

# GEGER CIAYUMAJAKUNING (CIREBON-INDRAMAYU-MAJALENGKA-KUNINGAN)

Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin  
di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda  
dan Inggris pada Abad ke-19 M.



**Dr. H. Ading Kusdiana, M. Ag., CIHCS**  
**Prof. Dr. H. Wawan Hernawan, M. Ag.**



Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LP2M)

penerbit  
**pusbangter**



**GEGER CIAYUMAJAKUNING  
(CIREBON-INDRAMAYU-MAJALENGKA-  
KUNINGAN)**

Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin  
di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda  
dan Inggris pada Abad ke-19 M.

Dr. H. Ading Kusdiana, M. Ag., CIHCS  
Prof. Dr. H. Wawan Hernawan, M. Ag.

GEGER CIAYUMAJAKUNING  
(CIREBON-INDRAMAYU-MAJALENGKA-KUNINGAN)  
Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin  
di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda  
dan Inggris pada Abad ke-19 M.

Penulis :  
Dr. H. Ading Kusdiana, M. Ag., CIHCS  
Prof. Dr. H. Wawan Hernawan, M. Ag.

Editor:  
Nunung Kaniawati

Layout:  
Aji Teja H

Gambar Cover:  
Rohulloh Muhammad Rizqie H., S. Hum

Penerbit: Penerbit Pusbangter  
Jl. Cikeruh No. 21 RT 02 RW 10 Cikeruh - Jatinangor

ISBN:  
978-623-6004-45-6



**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2:**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 27:**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Cetakan ke 01 02 03 04

22 23 24 25

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Copyright © 2022 by Pusbangter All Right Reserved

PENERBIT PUSBANGTER

Anggota IKAPI Jawa Barat

Nomor : 338/ Anggota Luar Biasa/JBA/2019

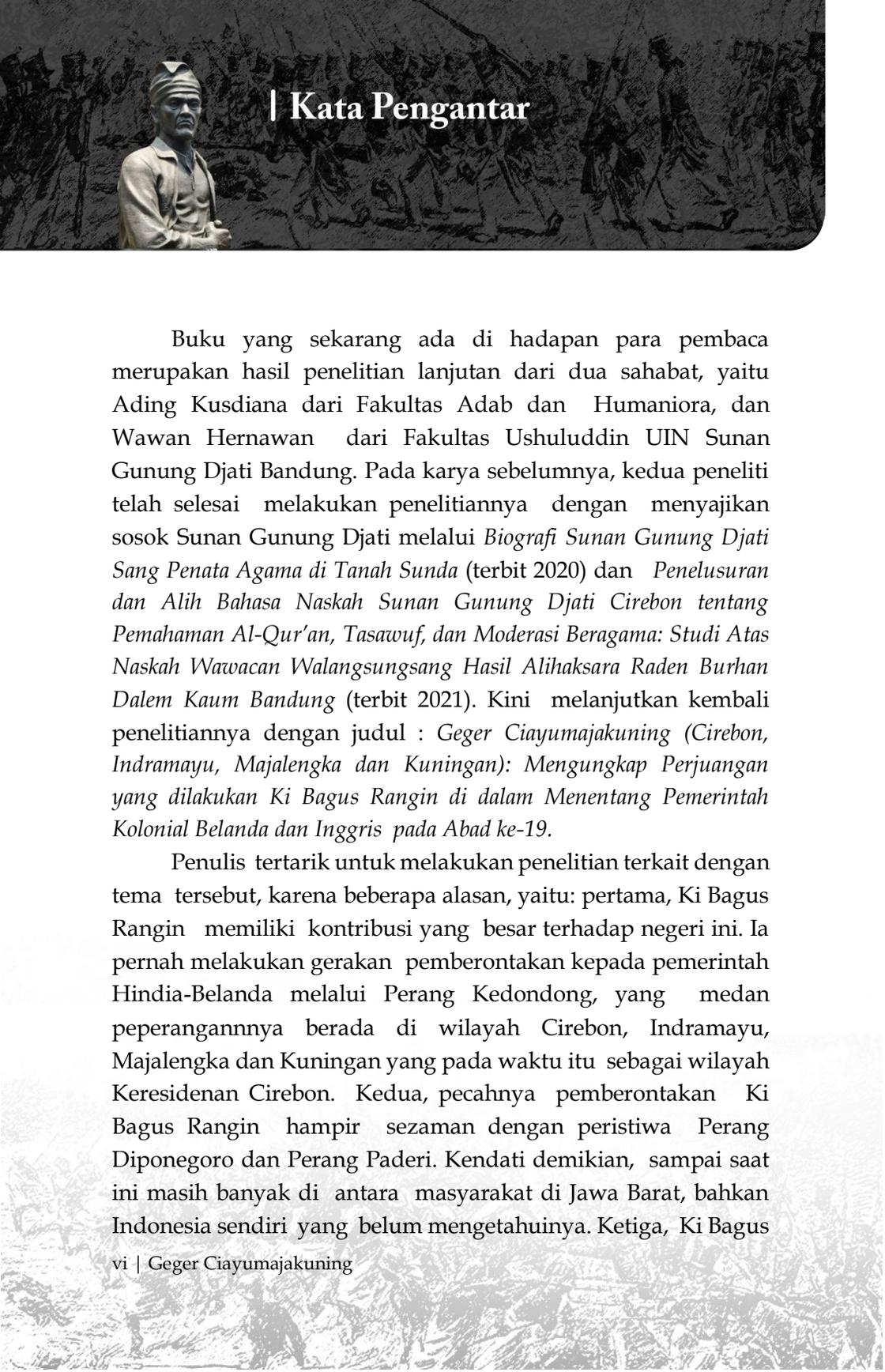
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl.Cikeruh No. 21 RT 02 RW 10

Jatinangor - Sumedang 45363

E-mail: [pusbangter49publishing@gmail.com](mailto:pusbangter49publishing@gmail.com)





## | Kata Pengantar

Buku yang sekarang ada di hadapan para pembaca merupakan hasil penelitian lanjutan dari dua sahabat, yaitu Ading Kusdiana dari Fakultas Adab dan Humaniora, dan Wawan Hernawan dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada karya sebelumnya, kedua peneliti telah selesai melakukan penelitiannya dengan menyajikan sosok Sunan Gunung Djati melalui *Biografi Sunan Gunung Djati Sang Penata Agama di Tanah Sunda* (terbit 2020) dan *Penelusuran dan Alih Bahasa Naskah Sunan Gunung Djati Cirebon tentang Pemahaman Al-Qur'an, Tasawuf, dan Moderasi Beragama: Studi Atas Naskah Wawacan Walangsungsang Hasil Alihaksara Raden Burhan Dalem Kaum Bandung* (terbit 2021). Kini melanjutkan kembali penelitiannya dengan judul : *Geger Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan): Mengungkap Perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris pada Abad ke-19*.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan tema tersebut, karena beberapa alasan, yaitu: pertama, Ki Bagus Rangin memiliki kontribusi yang besar terhadap negeri ini. Ia pernah melakukan gerakan pemberontakan kepada pemerintah Hindia-Belanda melalui Perang Kedondong, yang medan peperangannya berada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan yang pada waktu itu sebagai wilayah Keresidenan Cirebon. Kedua, pecahnya pemberontakan Ki Bagus Rangin hampir sezaman dengan peristiwa Perang Diponegoro dan Perang Paderi. Kendati demikian, sampai saat ini masih banyak di antara masyarakat di Jawa Barat, bahkan Indonesia sendiri yang belum mengetahuinya. Ketiga, Ki Bagus

vi | Geger Ciayumajakuning

Rangin telah berperan besar di dalam melawan praktik-praktik ketidakadilan dari Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris. Ia telah mengobarkan semangat perjuangan untuk bersama-sama menentang imperialisme. Ia juga telah merelakan harta, jiwa, dan raganya untuk membela bumi pertiwi ini.

Buku ini tentu tidak dimaksudkan untuk “mengagungkan” figur seorang Ki Bagus Rangin, namun yang sebenarnya didasari oleh kesadaran sejarah untuk mengungkap dan menginformasikan perjuangan yang telah dilakukan Ki Bagus Rangin, agar generasi di masa yang akan datang bisa mengetahui perjuangan yang pernah dilakukan pendahulunya bagi bangsa dan negara ini. Dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan pertama, dapat menjadi khazanah informasi bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar akan sejarah perjuangan bangsa yang pernah ditunjukkan oleh puteranya. Kedua, menjadi sumber referensi bagi para peneliti dan civitas akademika yang memerlukan informasi-informasi tentang Ki Bagus Rangin. Ketiga, dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan bagi Pemerintah Republik Indonesia di masa yang akan datang di dalam mengangkat putera daerah terbaik sebagai Pahlawan Nasional.

Selanjutnya, dalam penyusunan buku ini, sudah sepantasnya bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan mewujudkan keinginan penulis untuk melakukan penelitian ini, sekaligus membantu penulis di dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan yang berkaitan dengan perjuangan yang pernah dilakukan oleh Ki Bagus Rangin. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Dekan Fakultas Ushuluddin, Ketua LP2M, dan Kapuslit UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas kesempatan yang diberikan, sehingga penulis

mendapatkan Bantuan Penelitian Litapdimas 2022. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada unsur Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnasri), Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Keluarga Besar Keraton Kasepuhan Cirebon, Tokoh Masyarakat Cirebon, Museum Negeri Sri Baduga Jawa Barat, Pimpinan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi dan berkontribusi dalam penelitian ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah, pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih jauh dari kata sempurna. Pastinya hanya karya Tuhan, Allah yang Maha Sempurna, sementara isi dari buku ini masih banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena merasa jauh dari kesempurnaan inilah, dengan lapang dan hati yang terbuka peneliti menerima dengan senang segala kritik dan masukan yang konstruktif.

Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini.

Bandung, November 2022

Penulis,



# | Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vvi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>xi</b>
<b>Pedoman Transliterasi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu .....	10
F. Kerangka Berpikir.....	13
G. Metode Penelitian .....	211
<b>BAB II Gambaran Umum Keresidenan Cirebon sebagai Basis Perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M.....</b>	<b>288</b>
A. Kondisi Geografi dan Demografi Wilayah Keresidenan Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) .....	288
B. Kondisi Politik Wilayah Keresidenan Cirebon.....	51
C. Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat di Wilayah Keresidenan Cirebon .....	662
D. Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Keresidenan Cirebon .....	79
E. Kehidupan Keagamaan Masyarakat di Wilayah Keresidenan Cirebon .....	90

<b>BAB III Biografi Ki Bagus Rangin Dan Sebab-Sebab Munculnya Gerakan Penentangan Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris.....</b>	<b>112</b>
A. Riwayat Hidup Ki Bagus Rangin.....	112
B. Ki Bagus Rangin Menurut Informasi dari Naskah <i>Babad Dermayu</i> dan Tradisi Lisan/ <i>Oral Tradition</i> .....	115
C. Sebab-sebab Munculnya Gerakan Penentangan dan Perlawanan Ki Bagus Rangin.....	136
<b>BAB IV Berbagai Perjuangan yang Dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris .....</b>	<b>186</b>
A. Konsolidasi dan Penggalangan Massa.....	186
B. Memulai Gerakan Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda.....	199
C. Strategi Perjuangan Ki Bagus Rangin dan Para Pengikutnya di dalam Menentang dan Melawan Pemerintah Kolonial.....	274
D. Langkah-langkah Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di dalam Menyelesaikan Gerakan Perlawanan Ki Bagus Rangin.....	288
E. Dampak Kemunculan Gerakan Pemberontakan Ki Bagus Rangin terhadap Perkembangan Sosial-Politik dan Ekonomi di Wilayah Keresidenan Cirebon dan sekitarnya .....	293
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>304</b>
A. Kesimpulan .....	304
B. Saran-saran.....	306
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>308</b>
<b>Lampiran-lampiran .....</b>	<b>320</b>



# | Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Keresidenan Cirebon Pada Tahun 1857 .....	60
Gambar 2.2.	Klenteng Hok Keng Tong Plered .....	992
Gambar 2.3.	Klenteng Hok Tek Ceng Sin.....	93
Gambar 2.4.	Kelenteng Talang (Soeh Boen Pang Gie Soe).....	94
Gambar 2.5.	Kelenteng Talang Tiao Kak Sie (Vihara Dewi Welas Asih) .....	95
Gambar 2.6.	Masjid Merah Panjunan.....	100
Gambar 2.7.	Gereja St. Yusuf Cirebon .....	107
Gambar 2.8.	Gereja Kristen Pasundan Cirebon.....	108
Gambar 3.1.	Ki Bagus Rangin.....	124
Gambar 3.2.	Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles .....	147
Gambar 3.3.	Naskah Perjanjian 7 Januari 1681 .....	156
Gambar 3.4.	Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (A.H. Wiese) .....	178
Gambar 3.5.	Herman Willem Daendels.....	179
Gambar 3.6.	Pemandangan Perkebunan Tebu Dengan Latar Gunung Ciremai .....	185
Gambar 4.1.	Strategi Perang <i>Suluhan/Gasiran</i> yang Dipergunakan Ki Bagus Rangin dalam Menghadapi Pasukan Pemerintah Kolonial .....	278
Gambar 4.2.	Strategi Perang Tutup Kumbu dari perang Cakravayu yang Dipergunakan Ki Bagus Rangin dalam Menghadapi Pasukan Pemerintah Kolonial .....	287





# | Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI<sup>1</sup>, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

## 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

<sup>1</sup> SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing: No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	' <i>Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*, Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
آو	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
هُوْلَ : *haulā* bukan *hawla*





# | BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang Penelitian

Periode abad ke-19 M., bagi bangsa-bangsa yang hidup di Benua Asia dan Afrika dapat dikatakan sebagai periode dari puncak imperialisme Eropa atau penjajahan negara-negara Eropa terhadap bangsa-bangsa yang hidup di Benua Asia dan Afrika. Dikatakan demikian, karena pada periode ini sebagian besar negeri-negeri yang ada di Benua Asia dan Afrika banyak yang jatuh dan diduduki, bahkan dikuasai dan diperintah oleh negara-negara Eropa.

Menurut Vlekke, abad ke-19 M., sebagai puncak dari masa imperialisme. Periode abad ke-19 M. juga, dapat dipandang sebagai masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran/kemaharajaan. Pada masa tersebut negara Inggris, Perancis, dan diikuti negara-negara lainnya secara merajalela telah memerintah dan menguasai wilayah-wilayah yang berada di benua di Asia dan Afrika, sekaligus mengancam eksistensi negara-negara merdeka untuk dijadikan Provinsi Eropa.<sup>1</sup>

Sebagai fakta historis yang mendukung kepada pernyataan tersebut, bahwa pada abad ke-19 M., wilayah-wilayah yang berada di Benua Afrika sudah berada dalam penguasaan negara-negara Eropa dapat ditunjukkan, bahwa kawasan Afrika Selatan sudah menjadi wilayah jajahan Inggris. Kawasan Afrika Barat, Tengah (pedalaman), dan Timur sudah dibagi-bagi menjadi wilayah kekuasaan Inggris, Perancis,

---

<sup>1</sup>Bernhard H. M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia*. (The Hague: W. van Hoeve, 1959), hlm. 316; Pendapat yang sama, lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996), hlm. 1.

Jerman, bahkan Belanda. Begitu juga negeri-negeri Muslim yang terletak di kawasan Afrika Utara sudah banyak yang jatuh ke tangan Perancis dan Inggris.

Perlu diketahui, bahwa pasca pecah revolusi Perancis tahun 1789 M., di Benua Eropa, Perancis berkembang menjadi negara besar yang ekspansionis. Selanjutnya, negara Perancis dan Inggris saling bersaing di dalam memperebutkan wilayah tanah jajahan di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1798 M., negara Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, sebagai batu loncatan untuk menguasai Anak Benua India, telah berhasil menduduki Mesir. Kendati pun penguasaan Perancis di Mesir tidak berlangsung lama, yaitu hanya berlangsung kurang lebih sampai dengan tahun 1801 M., tetapi negara ini pada tahun 1830 M., dengan gemilang sukses mencaplok wilayah Aljazair. Tidak lama kemudian, pada tahun 1881 M., dan 1912 M., Perancis pun menguasai Tunisia dan Marok.<sup>2</sup> Selanjutnya, penguasaan bangsa Eropa di kawasan Afrika Utara tidak saja dilakukan negara Perancis. Pada tahun 1880 M., sampai dengan berakhirnya Perang Dunia I Mesir berada dalam penguasaan Inggris. Tampaknya Inggris tidak hanya puas dengan menguasai Mesir, selanjutnya Sudan pun diduduki. Begitu juga dengan bangsa Italia yang mulai menguasai wilayah Libia pada tahun 1911 M.<sup>3</sup>

Itulah imperialisme Barat yang terjadi di Benua Afrika. Nasib yang tidak jauh berbeda terjadi di Benua Asia. Imperialisme Barat yang terjadi di Benua Asia dapat diawali dengan kegiatan imperialisme yang dilakukan di Kawasan Asia Barat (Jazirah Arab). Sekalipun secara *de jure* kawasan ini sebenarnya masih merupakan bagian integral dari Kerajaan Turki Usmani, namun secara *de facto* pengaruh Perancis dan

---

<sup>2</sup>George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1992), hlm. 8.

<sup>3</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi. (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 202.

Inggris sangat besar. Perlu diketahui, bahwa sejak tahun 1848 M., Perancis sudah menanamkan pengaruhnya di Libanon dan Syiria. Hal ini menjadi terbukti bahwa di kedua negeri ini, Perancis senantiasa melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan intern yang dihadapi Libanon dan Syiria ketika kedua wilayah itu sedang berurusan dengan Kerajaan Turki Usmani. Begitu pula dengan apa yang telah dilakukan oleh Inggris di wilayah Pesisir Arab Selatan. Walaupun negeri Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan Kuwait merupakan negeri yang merdeka, tetapi negeri-negeri ini sudah berada dalam bayang-bayang pengaruh Inggris.

Hal yang sama terjadi di Asia Selatan. Pada abad ke-19 M., kawasan Anak Benua India ini tidak lepas dari sasaran kegiatan imperialisme Inggris. Sejak tahun 1610 M., bangsa Inggris sudah diizinkan berdagang di pesisir pantai Malabar dan Coromandel. Pada tahun 1757 M., wilayah Benggal sudah jatuh ke tangan bangsa Inggris. Pada 1857 M., sebagai akibat dari kegagalan dalam pemberontakan Sipahi, wilayah Anak Benua India yang semula masih diperintah oleh Kerajaan Mughal telah jatuh ke tangan Inggris. Dengan adanya peristiwa tersebut, mulai saat itu hukum yang berlaku di wilayah Anak Benua India adalah hukum Britania.

Di kawasan Asia Tengah pun masyarakat Muslim menghadapi ancaman imperialisme. Pada abad ke-19 M., ancaman imperialisme bagi negeri-negeri Muslim di kawasan Asia Tengah, seperti: Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kirghistan datang dari kekuatan imperialis Rusia. Di dalam usaha mencari jalan keluar untuk melancarkan kegiatan perdagangan ke wilayah Laut Hitam dan Mediterania, Kerajaan Rusia tidak segan-segan mencaplok negeri-negeri di kawasan Asia Tengah itu ke dalam kekuasaannya.

Begitu juga dengan kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-19 M., wilayah Asia Tenggara benar-benar telah dibagi dan

dipecah-pecah oleh kekuatan imperialis Eropa. Melalui berbagai perjanjian dan kesepakatan di antara negara Inggris, Perancis, Belanda dan bahkan Amerika Serikat, Asia Tenggara telah menjadi rebutan di antara negara-negara itu. Indonesia dan Malaysia yang merupakan basis terbesar dari komunitas masyarakat Muslim di kawasan ini telah dijajah oleh Belanda dan Inggris. Wilayah Indochina, yang mencakup: Laos, Vietnam, dan Kamboja harus jatuh ke tangan Perancis. Adapun Myanmar sudah dikuasai oleh Inggris. Sedangkan Filipina setelah lepas dari Spanyol, menjadi wilayah jajahan Amerika Serikat. Tampaknya pada saat itu untuk kawasan Asia Tenggara hanya negeri Thailand yang selamat dari imperialisme negara-negara Eropa, karena negeri ini telah dijadikan daerah *bufferstaats* di antara negara Inggris, Perancis, dan Belanda.<sup>4</sup>

Di wilayah Indonesia (baca: dulu Hindia Belanda) sendiri, pada abad ke-19 M., sedang mengalami proses imperialisme dari bangsa Belanda dan Inggris. Pemerintah Kolonial Belanda yang telah menanamkan kekuasaannya sejak awal abad ke-19 M., sudah melebarkan kegiatan imperialismenya tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga ke pulau-pulau besar dan penting, seperti: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Di wilayah-wilayah ini, mereka berupaya melakukan aktivitas imperialismenya dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti: politik pemerasan (*drainage politic*) melalui *cultuurstelsel*/tanam paksa, penerapan politik liberal, inkonsistensi untuk tidak mencampuri urusan agama dan pendidikan, dan lain sebagainya.

Praktik-praktik imperialisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda telah membawa kerugian dan akibat-akibat buruk bagi rakyat pribumi (Indonesia) pada waktu itu. Di Indonesia, kebijakan dan praktik-praktik imperialisme yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda telah banyak

---

<sup>4</sup>Ading Kusdiana, *Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Periode Pertengahan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 299.

membawa kehancuran keberadaan suprastruktur dan infrastruktur politik pemerintahan yang pernah ada sebelumnya. Kesultanan Aceh, Kesultanan Palembang, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, Kerajaan Islam, dan beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Selatan, seperti: Goa, Tallo, Sopeng, Wajo, dan lain-lain, serta di Maluku Utara, seperti: Ternate dan Tidore, berhasil dikuasai oleh Belanda. Begitu juga kehidupan perekonomian menjadi hancur. Kemiskinan terjadi dan diikuti oleh bahaya kelaparan. Tanah-tanah pertanian banyak yang mengalami kerusakan karena dipergunakan untuk menanam tanaman yang berbeda dengan kebiasaan, atau menjadi terlantar akibat waktu banyak yang dipergunakan untuk mengerjakan tanah. Sebagai informasi tambahan, dalam Koran *Bintang Priangan* dikemukakan:

Hal yang tak bisa disangkal lagi bahwasanja sifatnja kolonial politiek diseloeroeh doenia ini hanja disandarkan kepada politiek perbendaharaaan, (materialistische politiek). Politiek ini roepanja lama soedah berdjangkit di Indonesia, menjebakkan jang teroetama sekali persengketaan antara raiat oemoem dengan koloniale politiek, karena kehidoepan raiat makin soesah.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan kebodohan, buta huruf, dan kesenjangan sosial antara masyarakat pribumi dengan elit penguasa. Sebaliknya bagi Pemerintah Kolonial Belanda, mereka banyak mendapatkan pemasukan keuangan yang tidak kecil jumlahnya. Dari kegiatan tanam paksa, mereka banyak memperoleh keuntungan besar. Menurut sebuah sumber, disebutkan, dalam waktu 35 tahun diperoleh keuntungan sebesar f 627 juta. Dengan keuntungan sejumlah itu, biaya pemerintahan dapat dicukupi, kas pemerintahan tertutupi, dan

---

<sup>5</sup>Lihat Koran *Bintang Priangan*, Saptoe, 24 Januari 1931/5 Ramadan 1349. No. 1. Tahoen Ka I. Hlm. 1 Garoet.

hutang-hutang pun dapat dilunasi, serta kelebihanannya dapat ditanam sebagai modal di Indonesia.<sup>6</sup>

Kehadiran bangsa-bangsa Eropa yang melakukan praktik imperialisme di negeri-negeri yang berada di Benua Asia dan Afrika ini tentu saja telah mengundang respons dalam bentuk gerakan perlawanan dan pemberontakan dari masyarakat setempat, tidak terkecuali di Indonesia. Pada abad ke-19 M., di wilayah Indonesia banyak muncul pelbagai gerakan perlawanan dan pemberontakan di dalam upaya menentang keberadaan Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebagai catatan, di Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol maju memimpin gerakan perlawanan dan perjuangan menentang Pemerintah Kolonial Belanda melalui Perang Paderi (1821-1838 M.), yang kemudian pada periode berikutnya, diikuti dengan hadirnya sosok pejuang seperti Panglima Polim, Tengku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cut Mutia yang telah berjuang menentang Pemerintah Hindia-Belanda melalui Perang Aceh (1873-1904 M.) Di Tapanuli berkobar Perang Tapanuli (1878-1907 M.) yang dipimpin oleh Sisingamaraja XII. Di Palembang pecah pemberontakan yang dilakukan oleh Sultan Badarudin. Di wilayah Banten muncul gerakan Pemberontakan yang dipimpin oleh Syekh Abu Bakar dan H. Wasid di Banten. Di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Pangeran Diponegoro memimpin gerakan perlawanan dan pemberontakan melalui Perang Jawa (1825-1830 M.). Selanjutnya di Kalimantan Selatan pecah Perang Banjar (1859-1863 M.) yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah (Pangeran Antasari).<sup>7</sup> Itulah beberapa bentuk penentangan dan perlawanan yang dapat dikemukakan sebagai respons yang ditujukan kepada Pemerintah Kolonial Belanda yang muncul dari bangsa Indonesia pada periode tersebut.

---

<sup>6</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1988, Jilid 1), hal. 305-318. Perhatikan juga M.C. Rickhefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 165-200.

<sup>7</sup>Sartono Kartodirdjo, *ibid.*, hlm. 370-385.

Sebenarnya masih banyak gerakan penentangan dan perlawanan yang bersifat lokal sentris yang belum terungkap dan hanya menjadi khazanah tradisi lisan yang bersifat turun-temurun dan berkembang di masyarakat.

Saat ini nama-nama besar dari figur, seperti: Tengku Cik Di Tiro, Tuanku Imam Bonjol, Panglima Polim, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Sisingamangaraja XII, Sultan Badarudin, Pangeran Antasari, dan Pangeran Diponegoro dalam deretan pejuang-pejuang sudah begitu familiar dan populer sebagai tokoh atau figur pahlawan bangsa yang telah memiliki jasa besar di dalam menentang penjajah kolonial Belanda. Tampaknya di antara sekian banyak tokoh yang telah memberikan kontribusi yang besar tersebut, ada satu nama putera daerah dari Jawa Barat yang belum banyak dikenal, bahkan semakin tergilas dan terlupakan begitu saja oleh sejarah. Padahal sangat penting dan perlu untuk diangkat dan ditampilkan ke permukaan, yaitu Ki Bagus Rangin atau ada yang menyebut Tubagus Rangin.

Nama Ki Bagus Rangin pada abad ke-19 M., di Tatar Sunda memiliki kontribusi yang besar terhadap negeri ini. Ia pernah melakukan gerakan pemberontakan kepada pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris melalui Perang Kedondong, yang medan area peperangannya mencakup wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Pecahnya pemberontakan Ki Bagus Rangin melalui Perang Kedondong hampir sezaman dengan peristiwa Perang Diponegoro dan Perang Paderi. Kendati demikian, sampai saat ini masih banyak di antara masyarakat di Jawa Barat, bahkan Indonesia yang belum mengetahuinya. Seandainya pada waktu itu antara Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Ki Bagus Rangin menjalin komunikasi, dan pemerintah Kolonial Belanda tidak merahasikannya bisa jadi mereka akan kewalahan menghadapi tiga kekuatan tersebut.

Sosok dari Ki Bagus Rangin perlu mendapat perhatian. Karena bagaimana pun ia telah memiliki kontribusi yang besar terhadap bangsa ini. Ia telah berperan besar di dalam melawan praktik-praktik ketidakadilan dari Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris. Ia telah mengobarkan semangat perjuangan untuk bersama-sama menentang imperialisme. Ia juga telah merelakan harta, jiwa, dan raganya untuk membela bumi pertiwi ini. Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin dapat disejajarkan dengan perjuangan yang pernah dilakukan oleh Tengku Cik Di Tiro, Tuanku Imam Bonjol, Panglima Polim, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Sisingamangaraja XII, Sultan Badarudin, Pangeran Antasari, dan Pangeran Diponegoro. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang melatarbelakangi perlunya mengangkat nama Ki Bagus Rangin untuk dijadikan sebagai subyek penelitian dalam kegiatan penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di satu sisi memang ada dan benar-benar pernah terjadi sebagai sebuah gerakan pemberontakan yang eskalasinya mencakup wilayah keresidenan Cirebon, yaitu: Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Namun di sisi lain, ironisnya masih banyak di kalangan masyarakat di Jawa Barat sendiri, bahkan di Indonesia yang tidak mengetahui tentang jejak perjuangan dari figur Ki Bagus Rangin dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan rumusan tersebut dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan sebagai basis perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam menentang

Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris pada Abad ke-19?

2. Mengapa Ki Bagus Rangin melakukan gerakan penentangan dan pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris?
3. Bagaimana perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris, sehingga menggegerkan wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran Umum Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan sebagai basis perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris pada Abad ke-19.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab Ki Bagus Rangin melakukan gerakan penentangan dan Pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris.
3. Untuk mengetahui perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris, sehingga menggegerkan wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

### **D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Ki Bagus Rangin sangat signifikan dilakukan, karena bila ditelusuri sampai saat ini masih banyak berbagai peristiwa yang pernah terjadi dan perjuangan yang telah dilakukan para pejuang di daerah provinsi Jawa Barat yang belum banyak terungkap. Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin sebenarnya jauh lebih besar pengaruh dan medan peperangannya dibandingkan yang dilakukan oleh pangeran

Diponegoro. Namun, karena tidak banyak di kalangan sejarawan yang menelitinya informasi-informasi tentang Ki Bagus Rangin tidak banyak yang mengetahuinya. Bahkan belakangan semakin terlupakan seiring dengan dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, informasi-informasi tentang Ki Bagus Rangin semakin hilang dalam *memory collective* masyarakat. Bahkan sering dianggap sebagai sejarah *peteng*. Tampaknya generasi yang hidup di abad XXI harus mengetahui jejak perjuangan dan nilai kepahlawanan yang pernah ditunjukkan oleh Ki Bagus Rangin, sehingga dapat menimbulkan kesadaran sejarah.

Dengan dilakukannya penelitian tentang perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi khazanah informasi bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar akan sejarah perjuangan bangsa yang pernah ditunjukkan oleh putera daerah.
2. Menjadi sumber referensi bagi para peneliti dan civitas akademika yang memerlukan informasi-informasi tentang Ki Bagus Rangin.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan bagi Pemerintah Republik Indonesia di dalam mengangkat putera daerah terbaik sebagai Pahlawan Nasional.

## E. Kajian Terdahulu

Sampai saat ini, hasil penelitian sejarah yang secara khusus menginformasikan tentang perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris yang dilakukan di kalangan para peneliti sejarah masih kurang. Kendati demikian sebagai informasi awal, perlu diinformasikan bahwa K.H. Zamzani Amin pernah menulis sebuah buku yang berjudul: *Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919*. Buku yang diterbitkan oleh penerbit Humaniora ini dapat dipandang sebagai jembatan dan jendela pertama untuk membuka dan mengetahui tentang

informasi nilai-nilai kejuangan yang pernah ditorehkan oleh Ki Bagus Rangan. Meskipun buku ini lebih menitikberatkan informasinya tentang keberadaan Pesantren Babakan Ciwaringin yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa Perang Kedondong, tetapi paling tidak di dalamnya telah memberikan informasi awal tentang *trace* (jejak) keberadaan Ki Bagus Rangan.

Informasi tentang Ki Bagus Rangan saat ini masih tercecer dalam beberapa makalah yang pernah ditulis oleh beberapa peneliti sejarah, filolog, dan budayawan. Djoko Marihandono dalam *makalahnya* pernah menulis dengan judul: “Bagus Rangan berdasarkan Arsip-arsip Kolonial”. Tulisan ini mengungkapkan informasi bagaimana keberadaan dari Ki Bagus Rangan berdasarkan arsip-arsip Kolonial yang ditemukan di Lembaga Kearsipan yang ada di Negeri Belanda dan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Menurut Djoko Marihandono, sosok dari Ki Bagus Rangan berdasarkan arsip-arsip Kolonial memang benar adanya. Ia telah melakukan pemberontakan dan penentangan kepada Pemerintah Hindia-Belanda pada abad ke-19 M. Hanya saja keberadaannya tidak banyak yang diketahui dan tidak sepopuler Pangeran Diponegoro. Padahal pengaruh dan medan perjuangannya jauh lebih besar dari Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Rupanya Pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu berupaya untuk menutupi dan merahasiakan kemunculan gerakan pemberontakan agar tidak meluas dan melebar ke berbagai daerah di wilayah Hindia-Belanda.

Informasi tentang Ki Bagus Rangan, juga pernah disampaikan oleh Eva Nur Arovah dalam sebuah seminar. Ia menulis makalah, dengan judul: *Perjuangan Bagus Rangan dalam sumber-sumber tradisional Cirebon*. Tulisan ini berupaya mengungkap informasi-informasi perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangan berdasarkan sumber-sumber tradisional

yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Dalam hal ini dengan mendasarkan kepada sumber-sumber dari naskah-naskah yang berkembang di wilayah Cirebon.

Selanjutnya, Rachmat Iskandar menulis, *Bagus Rangin Dalam Mitologi Masyarakat*. Tulisan ini menginformasikan, bahwa sampai saat ini keberadaan dari Ki Bagus Rangin dalam mitologi masyarakat di sekitar Ciayumajakuning masing-masing lestari dalam berbagai bentuk tradisi lisan secara turun-temurun. Dengan demikian, sosok dari Ki Bagus Rangin memang ada. Hanya saja belum banyak di kalangan peneliti yang ingin mengkaji secara lebih mendalam, sehingga bisa menjadi informasi sejarah bagi masyarakat. Begitu juga, Achmad Rafan Sapari Hasyim menulis dengan judul: *Ki Bagus Rangin dalam Sumber Tertulis di Cirebon*. Ia menginformasikan, bahwa pada abad ke-19 M., kehadiran Ki Bagus Rangin di wilayah Ciayumajakuning oleh pemerintah Hindia-Belanda dipandang sebagai *karaman* yang harus dibasmi, karena dalam perspektif Pemerintah Hindia-Belanda dipandang sebagai pengganggu ketertiban umum.

Terakhir, Nina Herlina Lubis dalam makalahnya, berjudul: *Apakah Bagus Rangin Memenuhi Kriteria Pahlawan Nasional?* Apa yang dilakukan oleh Nina Herlina Lubis dalam tulisan yang disampaikan pada kegiatan di salah satu seminar di Majalengka-Jawa Barat, ingin menyampaikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin di dalam upaya menentang Pemerintah Hindia-Belanda sangat besar. Ki Bagus Rangin bagaimana pun telah memiliki kontribusi yang besar di dalam berjuang menentang Pemerintah Hindia-Belanda, sehingga berani mengorbankan dirinya untuk membela kepentingan bangsa dan negara (Indonesia). Atas dasar itulah, Nina Herlina Lubis berupaya menganalisisnya dengan mengemukakan, bahwa Ki Bagus Rangin layak dan memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai Pahlawan Nasional dari Jawa Barat.

Itulah beberapa informasi awal yang dapat dikemukakan berkaitan dengan sosok dari Ki Bagus Rangin. Sampai saat ini, informasi tentang Ki Bagus Rangin belum banyak yang terungkap untuk diinformasikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, sangat dibutuhkan keterlibatan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan para peneliti sejarah khususnya sejarawan akademis.

## F. Kerangka Berpikir

Sebagai pisau analisis, dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisis kejadian yang terjadi pada abad ke-19 M., ini dengan mempergunakan teori gerak sejarah yang dikemukakan oleh Arnold Toynbe tentang *challenge and respons*. Selanjutnya, untuk mempertajam analisis dipergunakan pendekatan-pendekatan dengan meminjam teori-teori ilmu sosial yang berkaitan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh para sosiolog, seperti: George Simmel, Lewis Alfred Coser, dan Tamrin Amal Tamagola.

Menurut Arnold Toynbe, jika muncul sebuah tantangan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat, maka akan muncul respons dari masyarakat tersebut sebagai jawaban untuk menjawab tantangan itu.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Simmel,<sup>9</sup> terdapat beberapa sebab atau faktor yang dapat mendorong terjadinya konflik dalam sebuah masyarakat. Di antara sebab-sebab atau faktor-faktor tersebut, konflik dapat muncul karena adanya: *pertama*, kesesuaian struktural, yaitu karena adanya struktur masyarakat yang menunjang. *Kedua*, ketegangan struktural, yaitu: karena adanya ketegangan struktur masyarakat yang menunjang. *Ketiga*, kemunculan dan

---

<sup>8</sup>Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah Sejarah Filsafat dan Iptek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 65-74.

<sup>9</sup>Paul B. Horton dan Chester, *Sosiologi*, Alih bahasa Aminudin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Erlangga, 1999), Jilid, hlm. 166-168.

penyebaran pandangan, dalam hal ini di antara para pelaku konflik sudah memiliki pandangan yang sama tentang kemunculan ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian menuju jalan keluar. *Keempat*, faktor mempercepat, yaitu: kemunculan suatu peristiwa dramatis atau desas-desus yang kemudian mempercepat munculnya perilaku kolektif. *Kelima*, mobilisasi tindakan, yaitu: para pemimpin mulai menyarankan dan mengarahkan suatu tindakan. *Keenam*, runtuhnya *social control*. Semua faktor tersebut, jika tidak dapat dikendalikan oleh para eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan, serta kontrol sosial lainnya, maka konflik akan mudah pecah.

Sementara menurut Tamrin Amal Tamagola,<sup>10</sup> sebuah konflik dapat terjadi karena bertemunya empat elemen utama konflik pada waktu yang bersamaan. Keempat elemen tersebut ialah: *pertama*, adanya konteks pendukung (*facilitating contexts*). *Kedua*, akar konflik [*core (roots) of conflict*]. *Ketiga*, adanya faktor sumbu [*fuse factor*], dan *keempat*, faktor pemicu (*triggering factor*)).

Dalam sebuah konflik, konteks pendukung bisa muncul karena adanya pola pekerjaan atau pemukiman yang terpisah berdasarkan garis keagamaan antara berbagai kelompok yang akan terlibat dalam konflik, atau kompetisi perkembangan demografi keagamaan. Sementara akar konflik, biasanya adalah suatu tingkat penderitaan sosial (*social deprivation*) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir lagi dalam perebutan sumber-sumber daya maupun kekuasaan. Sedangkan faktor sumbu (*fuse factor*) biasanya berupa sentimen suku, ras, dan agama. Kemudian faktor pemicu (*triggering factor*) adalah peristiwa atau momentum di mana semua elemen di atas diakumulasikan untuk melahirkan konflik. Momentum ini dapat terjadi bisa berawal dari adanya pertengkaran mulut atau

---

<sup>10</sup>M. Atho Mudzhar, "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" dalam Mohammad Soleh Isre (Ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Beragama, 2003), hal. 2.

pertikaian kecil tentang sesuatu hal yang pada awalnya dianggap remeh atau jauh dari akar konflik, tetapi kemudian berfungsi menjadi pembenar bagi dimulainya sebuah konflik yang berskala besar.<sup>11</sup>

Selanjutnya, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Simmel tentang konflik dan kekompakan, serta Lewis A. Coser tentang analisis fungsional mengenai konflik. Menurut Simmel konflik dapat dipandang sebagai sesuatu yang abnormal dan mengganggu persatuan kelompok. Jika dalam suatu hubungan sosial sudah dirusak oleh meledaknya perselisihan, maka hal itu merupakan suatu sinyal bahwa tingkat kesatuan telah benar-benar rendah. Ia juga mengemukakan, bahwa setiap individu pada dasarnya tidak hanya sekedar mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi kelihatannya bersemangat untuk konflik. Sementara itu Coser berpendapat, bahwa konflik dipandang sebagai sesuatu yang disfungsional atau mengacaukan terhadap keseimbangan sistem secara komprehensif. Kemunculan sebuah konflik semestinya bersifat fungsional atau tidak merusakkan terhadap sistem di mana konflik itu terjadi. Sebuah konflik seharusnya dapat mempunyai konsekuensi positif atau menguntungkan sistem itu. Dengan kata lain, menurut pandangan Coser, konflik mempunyai fungsi-fungsi positif untuk mencegah agar ketegangan tersebut tidak terus bertambah tinggi, atau mengurangi ketegangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ledakan kekerasan yang berpotensi memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan di dalam, serta mencegah pengerasan struktur sosial.<sup>12</sup>

Menurut Simmel, dalam kronologinya pada saat terjadinya konflik terdapat hubungan interdependensi antar-konflik dan kekompakan dalam dinamika hubungan kelompok luar (*out*

---

<sup>11</sup>M. Atho Mudzhar, *ibid.*, hlm. 6.

<sup>12</sup>Waren H. Handal, *Comparatory Sociological Theory*, (New Jersey: Printice Hall, Englewood Cliffs, 1993), hal. 74-75. Vic George dan Paul Wilding, *Ideologi dan Kesejahteraan rakyat*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1992), Cetakan Pertama, hlm. 14.

*group*) dan kelompok dalam (*in group*). Selama masa di mana ada ancaman atau konflik dengan orang luar atau masyarakat luar, percekocokan atau konflik cenderung rendah atau menurun. Kepentingan diri atau individualistik sebagian ditekan, dan para anggotanya bersatu memusatkan perhatiannya pada usaha bersama untuk menghadapi dan mengalahkan musuh Bersama.<sup>13</sup> Begitu juga, dalam keadaan yang tidak jauh berbeda, apabila seorang individu yang terlibat dalam konflik memiliki kekuatan yang dapat dikerahkan untuk berjuang memperoleh kemenangan. Begitu juga dalam suatu kelompok atau masyarakat cenderung memiliki sumber-sumber yang dapat dikerahkan dan solidaritasnya diperkuat apabila kelompok itu terlibat dalam konflik dengan kelompok atau masyarakat lain.<sup>14</sup>

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan Lewis A. Coser. Menurut Coser, di dalam sebuah kelompok itu ada potensi munculnya kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengkotakan, dan semakin tinggi tekanan pada konsensus dan konformitas. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen pada kelompok itu mungkin berkurang. Selanjutnya Lewis A. Cosser menyatakan bahwa kemunculan kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok akan bertambah tinggi, karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Kekompakan yang semakin tinggi dari suatu kelompok yang terlibat dalam konflik membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu. Khususnya kelompok yang bermusuhan, atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT Gramedia, 1988, Jilid 1), hlm. 272.

<sup>14</sup>Doyle Paul Johnson, *ibid*, Jilid 1, hal. 272.

<sup>15</sup>Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid I, hlm. 196.

Coser juga mengemukakan, bahwa semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme tertentu, yaitu: persoalan-persoalan negatif atau ketegangan. Munculnya tingkat antagonisme tersebut dapat terjadi untuk hubungan dalam, hubungan intim, hubungan segmental dan sekunder. Ditemukannya perasaan-perasaan negatif atau ketegangan merupakan hasil keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan, dan prestise, dukungan sosial atau penghargaan-penghargaan lainnya. Selain itu, ketegangan yang pasti dalam semua hubungan sosial dapat terjadi karena individu-individu memiliki perbedaan satu sama lain dalam kebutuhan, tujuan pribadi, keterampilan, dan kemampuannya.<sup>16</sup>

Jika ketegangan itu meledak, integrasi kelompok dapat menjadi rusak sama sekali. Persatuan yang utuh dalam sebuah kelompok, tampaknya akan terselimuti ketegangan dan permusuhan. Sebenarnya, sebuah kelompok yang acapkali terlibat dengan konflik terbuka sesungguhnya kelompok tersebut memiliki solidaritas yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki potensi terlibat untuk berkonflik sama sekali.<sup>17</sup>

Seperti halnya Simmel, Lewis Coser menekankan bahwa dalam hubungan emosional yang sangat dekat sekalipun, selalu akan muncul sikap ambivalen ataupun perasaan positif dan negatif yang terkait. Sesungguhnya, semakin erat hubungan semakin besar kemungkinan kesempatan-kesempatan munculnya perasaan antagonistik. Jika mereka yang berhubungan atau para anggota suatu kelompok sangat bergantung satu sama lain, maka kesempatan untuk gagal atau kecewa akan jelas lebih besar daripada kalau mereka saling mengharapkan. Sebaliknya kelompok-kelompok sekunder yang hubungan sosialnya lebih bersifat segmental, biasanya akan kurang pula kesempatan untuk munculnya ketegangan atau

---

<sup>16</sup>Doyle Paul Hohnson, *ibid.*, Jilid I, hlm. 199.

<sup>17</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid I, hlm. 199.

perasaan bermusuhan, karena kurangnya kepuasan sosial-emosional yang diharapkan dalam hubungan itu. Jelasnya, dengan semakin akrab atau intim hubungan, akan semakin besar pula ungkapan perasaan yang dicurahkan; begitu juga akan semakin besar tendensi untuk menekan perasaan bermusuhan daripada mengungkapkannya.<sup>18</sup>

Selanjutnya Coser menyatakan, jika sebuah konflik dipendam, maka konsekuensinya: *pertama*, konflik akan meledak secara tiba-tiba dan parah dalam bentuk amukan yang keras. *Kedua*, dengan dipendamnya konflik di satu sisi mungkin dapat meredam perasaan bermusuhan dari sumber yang sebenarnya dan di sisi lain dapat mengembangkan sebuah alternatif lain untuk mengungkapkannya.<sup>19</sup>

Simmel juga membedakan konflik antar-orang perorang secara langsung dan persaingan. Menurut Simmel, konflik yang terjadi karena persaingan tidak perlu mencakup konflik antarpribadi secara langsung. Akan tetapi, bagi mereka yang bersaing mungkin berjuang sendiri-sendiri untuk tujuan bersama dengan antagonisme yang muncul dari kenyataan, bahwa keuntungan bagi seseorang, berarti kerugian bagi pihak lain. Kemudian, dalam bentuk persaingan, mereka yang kalah sekalipun akhirnya akan memperoleh keuntungan secara tidak langsung. Simmel juga menyatakan, bahwa konflik mempunyai beberapa bentuk, di antaranya: konflik hukum, konflik yang berkaitan dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar, konflik yang terjadi antarpribadi, dan konflik yang mengancam untuk mengacaukan tatanan sebuah kelompok.<sup>20</sup>

Jika Simmel membedakan konflik atas orang perorang secara langsung, kelompok, hukum, mempertahankan prinsip-prinsip dasar dan persaingan, maka Coser membedakan konflik kepada konflik yang non-realistik dan konflik yang realistik.

---

<sup>18</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid II, hlm. 201.

<sup>19</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid II, hlm. 201.

<sup>20</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid I, hlm. 270.

Konflik yang non realistik mencakup ungkapan sebagai tujuannya sendiri. Sedangkan konflik yang realistik diarahkan ke objek dari konflik itu. Konflik yang non-realistik membelok dari objek yang sebenarnya. Sebaliknya Konflik realistik merupakan suatu alat tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu tercapai akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu. Di antara kedua konflik itu, konflik yang dapat membawa perubahan adalah konflik yang realistik.<sup>21</sup>

Lewis A. Coser juga menegaskan konflik seringkali memperkuat batas antara kelompok-luar (*out group*) dan kelompok-dalam (*in group*), serta meningkatkan usaha untuk menggalang solidaritas kelompok-dalam itu. Selanjutnya, Lewis A. Coser juga menyatakan jika sebuah konflik terus berkepanjangan, maka ikatan-ikatan sosial secara pelan-pelan dapat terbangun dan berkembang di antara pihak-pihak yang saling bertentangan tersebut. Dalam beberapa kasus, adanya antagonisme antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat diatasi jika kelompok ini bersatu dalam sebuah koalisi untuk melawan musuh bersama. Sampai di sini, biasanya sebuah koalisi akan berkembang menjadi sebuah kelompok yang benar-benar bersatu, sangat tergantung pada adanya persamaan kebudayaan yang dimiliki di antara para anggotanya, jumlah kepentingan bersama dan tingkat perlawanan yang menekan perubahan yang dihadapi dalam kelompok lawan.<sup>22</sup>

Selanjutnya, meskipun konflik merupakan gejala yang alamiah yang seringkali ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, Simmel pun menyatakan, bahwa kemunculan konflik dalam kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui tiga cara. *Pertama*, konflik dapat diselesaikan dengan menghilangkan persoalan yang mendasar dari konflik itu sendiri dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik.

---

<sup>21</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid II, hlm. 202.

<sup>22</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid II, hlm. 204.

Di sini artinya, dengan adanya kemenangan di satu pihak, ini bukan berarti bahwa pihak yang kalah kehilangan kekuasaan untuk terus berjuang. Pihak yang kalah bisa jadi bebas memilih untuk menyerah setelah tidak ada alternatif lagi. Dengan demikian, yang kalah akan terhindar dari kerugian, keharusan membuang tenaga, dan kerusakan berikutnya. *Kedua*, konflik dapat diakhiri melalui kompromi dengan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti dari benda yang disengketakan. *Ketiga*, konflik dapat diselesaikan dengan pola, “sepakat untuk tidak sepakat” mengenai suatu masalah tertentu dan kemudian mereka yakin bahwa hubungan itu tidak didominasi oleh perbedaan yang tidak dapat didamaikan.<sup>23</sup>

Menurut M. Atho Mudzhar, ada lima cara untuk mengakhiri suatu konflik, yaitu: (1) melalui perjuangan kalah menang; (2) *bargaining*; (3) mediasi; (4) arbitrase; dan (5) adjudikasi. Dalam perjuangan kalah menang, biasanya penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat dilakukan dengan melibatkan tekanan politik dan fisik oleh salah satu pihak yang menang dan kehancuran pada pihak lain. Cara ini biasanya disebut dengan *zero sum game*. Sementara dalam *bargaining*, masing-masing pihak yang terlibat berupaya mencapai pernyataan kesepakatan dengan pihak-pihak lawan yang biasanya terjadi dengan saling mengambil dan menerima tuntutan pihak lain. Sedangkan dalam cara mediasi, biasanya pihak ketiga telah dilibatkan tetapi tidak untuk mengambil keputusan melainkan sekedar membantu proses *bargaining*. Kemudian dengan cara arbitration, masing-masing pihak menyerahkan kepada pihak ketiga untuk mengambil keputusan yang mengikat. Selanjutnya cara adjudikasi, pada prinsipnya sama dengan arbitrase, hanya saja pihak ketiga itu ialah hakim atau pengadilan. Dari kelima cara tersebut, biasanya cara *bargaining* dan mediasi adalah cara yang

---

<sup>23</sup> Doyle Paul Johnson, *ibid.*, Jilid I, hlm. 273-274.

paling sering ditempuh mengingat paling sedikit menimbulkan korban, baik fisik maupun psikologis.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipergunakan dengan mempergunakan metode penelitian sejarah, yaitu sebuah metode penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian/peristiwa (*event*) di masa lalu dengan tujuan untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lalu secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang benar. Untuk pelaksanaannya metode ini dilakukan dengan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>25</sup>

Dalam tahapan heuristik, langkah pertama yang dilakukan adalah menelusuri, mencari, menemukan dan menghimpun di mana sumber-sumber itu dapat diperoleh.<sup>26</sup> Di dalam menelusuri, mencari, menemukan dan menghimpun sumber, maka prosedur pertama yang dilakukan adalah dengan mengunjungi lembaga kearsipan, perpustakaan, museum, dan keraton. Di antara lembaga kearsipan yang dikunjungi adalah lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Jawa Barat. Adapun perpustakaan yang dikunjungi adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI),

---

<sup>24</sup> M. Atho Muddzhar, *loc. cit.*, hlm. 9-10.

<sup>25</sup> Gilbert J. Garaghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1946), hlm. 103-426; Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32; G.J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Terj. A. Muin Umar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 118; Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika. Herlina, 2008), hlm. 17-60.

<sup>26</sup> Louis Gotschallk, *Ibid.*, hal. 35; Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 94; G. J. Renier, *Ibid.*, hlm. 113.

Perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Untuk museum itu sendiri, museum Negeri Sri Baduga Jawa Barat adalah museum yang sangat penting untuk dikunjungi. Selanjutnya penelusuran sumber ke lapangan, khususnya ke keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kecirebonan merupakan yang sangat perlu dilakukan, mengingat ketiganya dapat dipandang sebagai laboratorium sejarah yang banyak membantu menyediakan informasi-informasi Ki Bagus Rangin.

Setelah menelusuri, mencari, menemukan dan menghimpun sumber-selesai dilakukan, prosedur kedua yang dilakukan adalah mengklasifikasikan sumber yang diperoleh ke dalam sumber tertulis, lisan, dan benda.<sup>27</sup> Setelah selesai mengklasifikasikan, apakah sumber itu sebagai sumber tertulis, lisan, dan benda, langkah berikutnya adalah menentukan apakah sumber-sumber tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sumber primer dan sekunder. Bila sumber tersebut termasuk sumber primer, apakah juga sumber itu sebagai sumber yang kuat (*strictly primary sources*) atau sumber primer yang kurang kuat, atau sumber primer kontemporer atau sumber sezaman (*less-strictly primary sources*).<sup>28</sup>

Untuk sumber primer tertulis dalam penelitian ini banyak digunakan arsip kolonial, di antaranya dalam bentuk, *pertama*, surat keputusan pemerintah berupa OIB (*Oost-Indische Besluiten*) dan *circulaire* atau surat edaran. *Kedua*, *verbal*, yaitu proses keputusan mengenai masalah yang dilengkapi dengan surat-surat pertimbangan dari berbagai pejabat yaitu residen/gubernur adviseur dan raad van indie. *Ketiga*, sumber lainnya adalah *missive*, yaitu surat dinas dari Asisten Residen, Residen, atau pejabat lain kepada Gubernur. *Keempat*, *rapport* yaitu

---

<sup>27</sup>Louis Gottschalk, *Ibid.*, hlm. 35-36; Kuntowijoyo, *Ibid.*, hlm. 94-96; Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak. 2007), hlm. : 94-119.

<sup>28</sup>Gilbert J. Garraghan, *Loc. cit.*, hlm. 101-108.

laporan yang ditulis oleh pejabat Belanda kepada Gubernur Jenderal. Sumber-sumber tersebut terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selain arsip kolonial, dipergunakan juga buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis Belanda dan dalam jumlah yang sangat terbatas dipergunakan juga sumber-sumber yang berasal dari penulis-penulis dari Indonesia.

Untuk sumber lisan, karena penelitian ini dilakukan jauh ke belakang, usaha untuk memperoleh kesaksian lisan yang disampaikan oleh pelaku yang terlibat secara langsung tidak mungkin dilakukan karena pada umumnya sudah tidak ada. Namun demikian, usaha melakukan wawancara terhadap keturunan Ki Bagus Rangin, tokoh masyarakat, dan kiyai-kiyai pengasuh pesantren di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan tetap dilakukan walaupun sifatnya hanya sebagai sumber sekunder. Hal ini sangat penting, sekalipun diperlukan konfirmasi dengan sumber-sumber lain sebagai pembandingan (komparasi) dan pendukung (korporasi).

Untuk sumber primer benda adalah peninggalan-peninggalan Ki Bagus Rangin baik yang berupa bangunan yang masih ada, peta medan peperangan, foto-foto maupun benda-benda lain yang memiliki keterkaitan dengan Ki Bagus Rangin ataupun peristiwa Perang Kedondong. Sedangkan sumber sekunder yang cukup penting adalah buku-buku yang memberikan informasi tentang Ki Bagus Rangin ataupun peristiwa Perang Kedondong. Selain itu, dipergunakan surat kabar yang beredar pada waktu itu seperti *Bataviasche Caurant*, *Bintang Priangan*, dan *Preanger Bode Cultuur en Handelsbl.* Sumber-sumber tersebut, meliputi: sumber tertulis, baik sumber primer (arsip/dokumen) maupun sekunder (buku dan artikel/berita dalam majalah dan surat kabar).

Setelah tahapan heuristik dilakukan, prosedur berikutnya melangkah ke tahapan kritik. Perlu dikemukakan, bahwa sumber yang telah ditemukan dalam tahapan heuristik harus

diuji dahulu. Setelah sumber dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi atau menguji kebenaran sumber melalui kritik sejarah yang dilakukan melalui kritik ekstern dan kritik intern.<sup>29</sup> Menurut Garraghan,<sup>30</sup> tujuan dari kegiatan kritik sejarah ini adalah agar para peneliti sejarah setelah mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia bisa bersikap hati-hati dan tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Di sini ia akan menyaringnya secara kritis, sehingga terjaring fakta yang menjadi pilihannya.<sup>31</sup>

Dalam melakukan kritik ekstern usaha yang dilakukan adalah dengan menguji sampai sejauh manakah tingkat otentisitas sumber?<sup>32</sup> Terkait dengan langkah ini, maka prosedur yang diteliti adalah: *pertama*, dengan menentukan apakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki atau tidak? Atau dengan perkataan lain, apakah sumber itu palsu atau tidak? Oleh karena itu usaha yang dilakukannya adalah dengan meneliti tanggal dokumen itu ditulis ataupun dikeluarkan, bahan atau materi sumber dan identifikasi terhadap tulisan tangan, tanda tangan, materai, jenis huruf ataupun *watermerk*-nya. *Kedua*, apakah sumber itu asli atau turunan? Proses ini sangat penting terutama bagi dokumen-dokumen dari zaman dulu manakala diketahui bahwa satu-satunya cara untuk memperbanyak ialah dengan cara menyalinnya, yang kemungkinan potensi timbulnya perubahan sangat besar. Selanjutnya sebagai langkah yang *ketiga*, diteliti apakah sumber itu masih utuh atau telah berubah? Langkah ini dilakukan karena banyak timbulnya ketidakutuhan sesuatu sumber itu umumnya disebabkan oleh jenis kekeliruan yang berbentuk

---

<sup>29</sup>Gilbert J. Garraghan, *loc. cit.*, hlm. 168-169; Kuntowijoyo, *loc. cit.*, hlm. 98-99.

<sup>30</sup>Gilbert J. Garraghan, *loc. cit.*, hlm. 169-174.

<sup>31</sup> Helius Syamsudin, *loc. cit.*, hlm. 13.

<sup>32</sup>Sebuah sumber sejarah adalah otentik atau asli jika itu benar-benar adalah produk dari orang yang dianggap sebagai pemilikinya, atau dari periode yang dipercayai sebagai masanya jika tidak mungkin menandai pengarangnya, atau jika itu yang dimaksudkan oleh pengarangnya. Helius Syamsudin, *loc. cit.*, hlm. 134.

pengurangan, pengulangan, atau penambahan yang disebabkan kekurangtelitian atau karena ada maksud-maksud tertentu. Dengan demikian, kritik teks dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi atau bagaimana isi sumber asli bisa membantu apakah sumber itu utuh atau telah berubah.<sup>33</sup>

Selanjutnya, setelah melakukan kritik ekstern selesai dilakukan, penelitian terhadap sumber diteruskan dengan melakukan kritik intern. Kritik intern sangat penting dilakukan untuk mengetahui isi sumber atau kredibilitas sumber, apakah sumber itu sebagai sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan adalah: *pertama*, mengadakan penilaian intrinsik terhadap sumber dengan menentukan sifat sumber dan menyoroiti pengarang sumber, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian itu? Atau apakah ia mampu menyampaikan kebenaran? Ini semua sangat tergantung kepada kehadiran saksi di tempat dan pada waktu terjadinya peristiwa, keahlian saksi dan kedekatan saksi dengan peristiwa. Semakin dekat masa hidup saksi dengan masa peristiwa itu terjadi, semakin besar kemungkinan dapat dipercaya kesaksiannya. Sebaliknya semakin jauh jarak waktu masa hidup saksi dengan peristiwa yang diungkapkan saksi semakin kecil kemungkinan saksi dapat mengungkapkannya.<sup>34</sup> *Kedua*, apakah ia mau memberikan kesaksian yang benar? Dan apakah ia mau menyampaikan kebenaran?<sup>35</sup>

Kemudian, prosedur berikutnya yang tidak bisa ditinggalkan, setelah selesai melakukan kritik ekstern dan intern adalah melakukan usaha koraborasi atau saling pendukung antar sumber. Koraborasi perlu dilakukan pertimbangannya adalah sebuah sumber yang tergolong primer, setelah dikritik

---

<sup>33</sup>Gilbert J. Garaghan, *loc. cit.*, hlm. 174-177; Louis Gottschalk, *loc. cit.*, hlm. 82-86; Nina Herlina, *loc. cit.*, hlm. 28-29.

<sup>34</sup> Louis Gottschalk, *loc. cit.* hlm. 60; Nina Herlina, *loc. cit.*, hlm. 32.

<sup>35</sup> Helius Syamsudin, *loc. cit.*, hlm. 147-148.

ekstern, mungkin akan melahirkan sumber yang asli atau tidak palsu. Kendati demikian, sumber yang asli belum tentu mengandung informasi yang benar atau dapat dipercaya. Oleh karena itu, supaya mengandung informasi yang benar atau dapat dipercaya sumber yang telah dikritik diperlukan pendukung dari sumber lain.<sup>36</sup>

Tahapan *ketiga* setelah melakukan tahapan kritik, prosedur berikutnya adalah melakukan tahapan interpretasi. Interpretasi dapat dilakukan melalui sintesis (menyatukan) dan analisis (menguraikan). Ada lima jenis interpretasi yang biasa dilakukan seorang peneliti sejarah ketika melakukan penelitian, yaitu: (1) interpretasi verbal; (2) teknis; (3) logis; (4) psikologis; dan (5) faktual.<sup>37</sup> Interpretasi verbal biasanya dilakukan bila seorang peneliti sejarah banyak berhubungan dengan bahasa, perbendaharaan kata, tata bahasa, konteks dan terjemahan. Interpretasi teknis dilakukan didasarkan kepada pertimbangan tujuan penyusunan dokumen dan bentuk tulisan. Interpretasi logis, merupakan interpretasi yang didasarkan atas cara berpikir yang benar. Interpretasi psikologis adalah interpretasi tentang sebuah dokumen yang merupakan usaha untuk membacanya melalui si pembuat dokumen, untuk memperoleh titik pandangannya. Selanjutnya interpretasi faktual ialah sebuah jenis interpretasi yang tidak didasarkan atas kata-katanya tetapi terhadap faktanya. Jelasnya fakta dibiarkan berbicara sendiri, tanpa membuat interpretasi macam-macam.<sup>38</sup>

Tahapan *keempat* dalam metode penelitian sejarah adalah tahapan historiografi. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan penulisan sejarah. Tahapan historiografi merupakan tahapan di mana seorang peneliti sejarah berupaya menuangkan dan mengerahkan seluruh daya pikirnya, terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya untuk

---

<sup>36</sup> Gilbert J. Garaghan, *loc. cit.* hlm. 311-314; Nina Herlina, *loc. cit.*, hlm. 34.

<sup>37</sup> Gilbert J. Garaghan, *loc. cit.*, hlm. 321-332.

<sup>38</sup> Nina Herlina, *loc. cit.*, hlm 39-51.

menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya dalam sebuah penulisan yang utuh.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Helius Syamsudin, *loc. cit.*, hlm. 156.



## | BAB II

Gambaran Umum Keresidenan Cirebon Sebagai Basis Perjuangan Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris Pada Abad Ke-19 M

### A. Kondisi Geografi dan Demografi Wilayah Keresidenan Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan)

Secara geografis pada abad ke-19 wilayah keresidenan Cirebon adalah sebuah wilayah yang dalam konteks sekarang wilayahnya mencakup kabupaten dan kota Cirebon, kabupaten Indramayu, kabupaten Majalengka, dan kabupaten Kuningan. Pada abad ke-19 Keresidenan Cirebon di sebelah barat berbatasan dengan Keresidenan Karawang, di sebelah selatan berbatasan dengan keresidenan Priangan, di sebelah utara dengan Laut Jawa dan di sebelah timur berbatasan dengan keresidenan Banyumas. Wilayah Keresidenan Cirebon ini dalam konteks sekarang seringkali disebut dengan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan).

Wilayah keresidenan Cirebon merupakan wilayah yang subur. Salah satu faktor yang menyebabkan wilayah keresidenan ini berkembang menjadi wilayah yang subur karena wilayah ini merupakan daerah vulkanik yang dibentuk oleh gunung-gunung berapi dengan memiliki ketinggian di antara 1.800 m sampai 3000 m di atas permukaan laut. Hal ini dapat terlihat seperti pada Gunung Ciremai, yang berada di kabupaten Cirebon, kabupaten Kuningan dan kabupaten Majalengka. Oleh karena wilayah Keresidenan Cirebon merupakan daerah vulkanik yang dibentuk oleh gunung-gunung berapi, maka tidak mengherankan bahwa di wilayah ini, terutama di daerah kabupaten Majalengka dan kabupaten

Kuningan banyak ditemukan sungai, danau (situ), rawa, dan sumber air panas.

Keresidenan Cirebon yang terdiri dari kabupaten dan kota Cirebon, kabupaten Majalengka, kabupaten Indramayu dan kabupaten Kuningan memiliki total luas wilayah sekitar 5.068,40 km persegi. Secara keseluruhan, bila diperinci, untuk luas wilayahnya, kota Cirebon memiliki luas 36,09 km persegi, kabupaten Cirebon memiliki luas 981,03 km persegi, kabupaten Indramayu memiliki luas 2.000,04 km persegi, kabupaten Majalengka memiliki luas 954,14 km persegi, dan kabupaten Kuningan memiliki luas 1.091,10 km persegi.<sup>1</sup>

Berdasarkan informasi yang dikemukakan Kopen, wilayah keresidenan Cirebon memiliki tipe iklim Am. Wilayah dengan tipe iklim ini memiliki ciri-ciri tipe iklim mempunyai bulan-bulan kering dengan curah hujan di bawah 60 mm, curah hujan tahunan lebih dari 2000 mm, dan suhu pada bulan terdingin lebih dari 18 derajat celcius. Di bagian utara pesisir pantai seperti Cirebon dan Indramayu memiliki tipe iklim An. Di wilayah dengan tipe iklim An memiliki karakteristik suhu pada bulan terdingin lebih dari 18 derajat celcius dan hujan sepanjang tahun. Sedangkan di daerah pegunungan seperti Majalengka dan Kuningan pada umumnya mempunyai tipe iklim Cw dan Cf. Wilayah dengan tipe iklim Cw dan Cf memiliki karakteristik suhu normal dalam bulan terdingin berkisar antara 10 derajat celcius sampai 30 derajat celcius dengan masa kering pada musim dingin, di bulan Juni sampai dengan September. Tipe iklim seperti ini sangat terasa terutama di daerah sekitar Gunung Ciremai.<sup>2</sup>

Daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan termasuk daerah tropis. Dengan kedudukan matahari yang

---

<sup>1</sup>Saleh Danasasmitha dkk., *Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan Daerah Jawa Barat*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986), hlm. 104.

<sup>2</sup>Shaleh Danasasmitha dkk., *Ibid.*, hlm. 104.

selalu tinggi di sepanjang tahun, mengakibatkan suhu udaranya selalu panas, kendatipun tidak terlalu tinggi. Selain suhu yang selalu tinggi, biasanya ditemukan adanya perbedaan rata-rata suhu tahunan di berbagai tempat di atas permukaan laut.

Menurut Thomas Stamford Raffles, khusus bagi kawasan pesisir Cirebon yang terletak di Cirebon bagian utara dan timur dengan garis pantai yang panjang sekitar 170 km, ditambah dengan iklim yang cenderung panas sebagai akibat keadaan alam yang sebagian besar terdiri dari pantai, biasanya wilayah ini merupakan penghasil ikan yang berlimpah beserta produk olahannya. Sedangkan kawasan dataran rendah dan dataran tinggi Cirebon dengan luas sawah mencapai 9.180 ha dan luas tegal mencapai 2.550 ha merupakan bentangan areal pertanian dan perkebunan yang luas dan subur biasanya banyak menghasilkan padi, tebu, sayur mayor, kopi dan kayu dengan kualitas yang bagus dan berlimpah.<sup>3</sup>

Posisi Cirebon yang berada di pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan pesisir utara laut Jawa dengan garis pantai yang panjang, ditambah dengan teluk Muara Jati telah membentuk kawasan ini sebagai pelabuhan sekaligus jalur perdagangan dan pelayaran yang strategis. Posisi strategis ini kemudian diperkuat dengan keberadaan tiga pelabuhan di pulau Jawa yang mendukungnya, yaitu pelabuhan Jakarta, Surabaya, dan Semarang, sehingga keberadaan pelabuhan Cirebon termasuk menjadi salah satu dari empat pelabuhan termaju di pulau Jawa. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila J.J. Baggelar<sup>4</sup>, Singgih Tri Sulistiyono<sup>5</sup>, dan

---

<sup>3</sup> Thomas Stamford Raffles, *History of Java*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008), hlm. : 105; Lihat juga Eva Nurarovah, "Cirebon 1681-1945: Dinamika Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya", *Disertasi*, (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Jatinangor, 2018), hlm. 33.

<sup>4</sup>J.J. Baggelar, "De Haven van Cheribbon" dalam *Gedenboeke de Gemeente Cheirbon Door 1906-1931*, Door de Stadgemeente Cheribon Uitgegeven Tergeleneid van Het 25-jaring Bestaan Der Gemeente op 1 April 1931, hlm. 130-131.

<sup>5</sup>Singgih Tri Sulistiono, "Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1994), hlm. 39-40.

Veth<sup>6</sup> dalam analisis geografisnya menyatakan bahwa pelabuhan Cirebon memiliki letak yang sangat strategis karena berada pada sebuah teluk yang terlindungi oleh semenanjung Indramayu dan karang-karang di sebagian lepas pantai dari terjangan ombak yang berasal dari laut Jawa sebelah utara.<sup>7</sup>

Beberapa catatan sejarah memperlihatkan bahwa aktivitas perdagangan dan pelayaran semenjak abad ke-14 dan ke-15 di kerajaan-kerajaan pesisir seperti Majapahit, Malaka, Aceh, Demak, Tuban, Banten, Bali, Timor, Kutai, Kalimantan Selatan, Makasar, Maluku menunjukkan adanya hubungan pelayaran dan perdagangan dengan pelabuhan Cirebon. Dengan demikian, pelabuhan Cirebon telah menjadi pusat perdagangan di Nusantara maupun perdagangan internasional yang mencakup Vietnam, Kamboja, Burma, Cina, India, Arab, Siria, Afrika Timur, hingga Eropa<sup>8</sup>. Dengan kata lain, oleh karena posisinya geografis Cirebon yang strategis yang terletak di pesisir pantai utara pulau Jawa sekaligus menjadi jalur yang menghubungkan beberapa kota besar di pulau Jawa, hal ini tentu saja telah mendorong memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan nasional maupun internasional, baik antar pulau maupun antar negara.<sup>9</sup>

Sekali lagi, posisi geografis keresidenan Cirebon memegang peran yang sangat strategis. Kawasan pesisir bukan sekadar mempermudah dan menguntungkan secara ekonomis, tetapi juga membuka ruang persaingan yang lebih kompetitif. Di mulai dengan perdagangan melalui jalur laut dan bersamaan dengan aktivitas pertanian, utamanya padi dan perdagangan yang sudah diusahakan sebelumnya, di wilayah ini telah muncul

---

<sup>6</sup>P.J. Veth, "Java, Geographisch, Etnologisch, Historisch", Vol 3, Erven F Bohn, Tahun 1882, hlm. 195.

<sup>7</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 34.

<sup>8</sup>B.T. Wardaya, *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 23.

<sup>9</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 34.

jenis-jenis tanaman pertanian dan perkebunan komersial seperti tebu, kopi, indigo dan lainnya. Dalam konteks sejarah Cirebon, keberadaan ketiga faktor geografis tersebut, yakni pesisir, dataran tinggi, dan dataran rendah ini akan menjadi sangat penting bagi kelanggengan kekuasaan pemerintah kolonial.<sup>10</sup>

Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan terletak pada jalur angin yang selalu berganti arah tiap enam bulan. Tentu saja hal akan menimbulkan adanya musim penghujan dan kemarau. Musim barat banyak membawa hujan karena terlebih dahulu mengarungi lautan. Pada musim timur udara kering. Arah angin ini diberbagai tempat tidak selalu tepat dari jurusan barat atau timur karena pengaruh rotasi bumi dan perbedaan suhu pada berbagai permukaan bumi. Daerah pantai yang mempunyai angin jatuh kering dan panas adalah Cirebon dan Indramayu. Di daerah ini terdapat angin kumbang, sejenis dengan angin Bohorok di Sumatera Utara.<sup>11</sup>

Hujan yang banyak turun di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan adalah akibat dari letak geografis yang berada di bawah pengaruh angin pasat timur laut dan tenggara. Angin ini banyak mengandung uap air yang menimbulkan hujan frontal intertropik, sebagai pengaruh angin musim dan kondisi lokal (pegunungan, pantai dan suhu udara).

Di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan hujan turun terutama pada musim barat dan permulaan musim timur. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan pada musim ini di wilayah tersebut mendapat hujan lebih banyak. Boerema membagi wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan menjadi tiga tipe atau kelompok curah hujan. Tipe pertama terdapat di Sumedang yang membentang ke arah Cirebon. Hujan di daerah ini sangat dipengaruhi musim barat. Curah hujan maksimum pada bulan Januari (443 mm). Musim timur lebih kering daripada daerah di

---

<sup>10</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 35.

<sup>11</sup> Shaleh Danansasmita dkk., *loc. cit.* hlm. 6.

sebelah baratnya. Dari sebelah tenggara bertiup pula angin kumbang, angin jatuh yang kering. Tipe kedua terdapat di barat daya dan timur laut Majalengka. Hujan desakan musim barat sangat melimpah. Curah hujan maksimum pada bulan Januari (684 mm). Sebaran hujan secara keseluruhan sama seperti tipe pertama, tetapi dalam ukuran yang besar. Tipe ketiga terdapat di daerah Kuningan sampai Cibatu (Garut). Karena jauh dari pantai utara, hujan bulan Desember cukup besar dan menghilangkan pengaruh pancaroba akhir tahun.<sup>12</sup>

Berdasarkan peta tanah eksplorasi, jenis tanah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan adalah sebagai berikut : *pertama*, jenis tanah alluvial (Al). Jenis tanah ini meliputi daerah pantai utara Jenis tanah ini terdapat di dataran dan daerah aliran sungai, yang terbentuk dari bahan-bahan liat dan pasir. Bahan endapan di utara Keresidenan Cirebon bercampur dengan endapan gunung berapi. *Kedua*, jenis tanah regosol yang terdapat di daerah perbukitan yang tertoreh. Jenis tanah ini terbentuk dari bahan batu kapur dan napal. Di wilayah Keresidenan Cirebon , jenis tanah ini terdapat di daerah bentangan yang memanjang melalui daerah tenggara Subang sampai bagian selatan Cirebon. Kemampuan wilayah berjenis tanah ini sangat terbatas untuk usaha pertanian karena sebagian besar tandus akibat erosi dan pendangkalan lapisan tanah yang alkais. Wilayah kritis ini banyak diperuntukan untuk hutan lindung dan daerah hutan jati serta tempat penggembalaan ternak. *Ketiga*, jenis tanah regosol, yang terdapat di daerah pantai sebagai beting-beting dan bukit pasir pantai. Letaknya sejajar dengan garis pantai , terbentuk gelombang yang cembung memanjang. Bahan induknya adalah pasir pantai. Jenis tanah ini terdapat di daerah pantai Cirebon, Indramayu. Oleh karena jenis tanah ini terdiri dari lapisan butir tanah yang lepas dan

---

<sup>12</sup> Shaleh Danansasmita dkk., *loc. cit.* hlm. 20.

dengan lapisan tanah yang peka erosi, maka permeabilitasnya cukup tinggi dan kadar airnya sangat rendah. Dengan demikian jenis tanah ini hanya bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian terbatas menurut tingkat kesuburannya. Penggunaan tanah tersebut biasanya berwujud tegalan dan pekarangan dengan tanaman-tanaman makanan yang tahan kering dan manga. *Keempat*, jenis tanah regoso, yang terdapat di daerah berbukit dan bergunung di sekitar gunung berapi. Jenis tanah ini biasanya terdiri atas abu dan pasir gunung berapi intermedier sampai basis. Jenis tanah seperti ini dijumpai di Gunung Ciremai yang berada di kabupaten Majalengka dan Kuningan. Bagian bawah yang landai dan tidak berbatu sangat baik untuk segala macam usaha pertanian bila didukung oleh kelancaran pengairan. Sedang di bagian atas, baik daerah basah maupun daerah kering, usaha pertanian sangat terbatas karena batu-batu dan lereng-lereng yang curam. Tanah di daerah yang kering berbatu dan berlereng curam dimanfaatkan untuk tanaman jagung, ubi jalar, ibi kayu, dan kacang-kacangan. Sementara itu, daerah yang agak kering dan landau dan tidak berbatu dimanfaatkan untuk sawah. Jenis tanaman yang dibudidayakan adalah padi, palawija, dan tanaman niaga seperti tebu dan tembakau. Sedangkan daerah basah dimanfaatkan untuk sawah, kolam ikan, dan tegalan dengan tanaman pangan, terutama ubi jalar dan padi.<sup>13</sup>

Sungai-sungai yang berada di wilayah keresidenan Cirebon hampir semuanya termasuk tipe sungai hujan. Ciri-ciri tipe sungai hujan adalah debit air tidak tetap, banyak membawa tanah dan berarus deras terutama pada musim penghujan. Pemeliharaan debit air, pencegahan erosi dan banjir, sangat bergantung pada vegetasi berupa hutan lindung di daerah hulu dan aliran hilir sungai.

Sungai-sungai yang berada di wilayah keresidenan Cirebon berhulu di gunung-gunung yang merupakan kawasan

---

<sup>13</sup>Shaleh Danansasmita dkk., *loc. cit.* hlm. 25-26.

hutan lindung. Kawasan hutan lindung ini melindungi sungai-sungai yang bermuara ke laut Jawa. Di daerah aliran sungai, sudah merupakan gejala umum bahwa sejak jaman purbakala banyak dijadikan sebagai tempat permukiman. Penggalian penggalian arkeologi banyak menampilkan gejala yang sama. Pusat-pusat pemerintahan pada masa klasik seperti pada masa Kerajaan Tarumanegara, Pajajaran dan Galuh yang terkenal banyak terletak di daerah cabang sungai. Pada umumnya sungai-sungai yang berada di keresidenan Cirebon banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian.<sup>14</sup>

Selanjutnya, dengan adanya proses geologi telah menimbulkan berbagai bentuk permukaan bumi. Betapun besarnya tenaga pengangkatan, pelipatan kulit bumi yang ditambah dengan bahan-bahan vulkanik selalu diikuti oleh proses perataan, terutama oleh tenaga kikisan air. Hasil kerja proses yang bertentangan ini telah memberikan topografi daerah Ciayumajakuning ke dalam daerah datar sampai berombak dan daerah bergunung. Untuk daerah datar sampai berombak pada umumnya terletak di daerah pinggiran laut Jawa dalam hal ini terbentang mulai dari Cirebon sampai Indramayu. Sedangkan untuk daerah bergunung pada umumnya terdapat di daerah Majalengka bagian selatan dan Kuningan. Hal ini dapat disaksikan dengan adanya gunung Ciremai sampai gunung Cakrabuana yang berbatasan dengan daerah Garut.<sup>15</sup>

Menurut B.M. van Bemmelen, perkembangan geologis keresidenan Cirebon dapat dipaparkan sebagai berikut: *pertama*, Zone Jakarta yang meliputi dataran rendah dari Cirebon sampai Serang. Zone ini terjadi pada masa Holosen, babak terakhir sejarah pembentukan planet bumi ini, sebagai hasil endapan alluvial yang terbawa oleh sungai yang berasal

---

<sup>14</sup> Shaleh Danansasmita dkk., *loc. cit.*, hlm. 33.

<sup>15</sup> Shaleh Danansasmita dkk., *loc. cit.*, hlm. 23.

dari gunung berapi di pedalaman (Berbeek-Fenemena). Di beberapa tempat seperti Indramayu, endapan lumpur berlangsung dengan kecepatan rata-rata 100 meter tiap tahun. Daerah alluvial ini merupakan "Peneplain" yang tertoreh-toreh dan melandai ke laut Jawa. *Kedua*, zone Bogor. Zone ini merupakan daerah yang lebih tua, terjadi pada masa Pleistose (zaman es). Di sebelah timur zone ini berbatasan dengan Bandung. Daerah perbatasan ini merupakan lipatan yang telah terpatahkan pada beberapa tempat seperti patahan Lembang yang mungkin terbentuk pada waktu pengangkatan Zone Pegunungan Selatan pada masa peralihan dari zaman Pliosen ke Pleistosen. Dalam zone ini terdapat bahan gunung api muda seperti Gunung Ciremai. Sebagian bukit di Gunung Ciremai terdiri dari batuan keras (*volcanic neck*).<sup>16</sup>

Ketinggian letak wilayah-wilayah yang berada di Karesidenan Cirebon menunjukkan keberagaman. Wilayah kabupaten Cirebon sendiri berada di ketinggian 4 m dari permukaan air laut. Kabupaten Majalengka berada posisi 145 meter di atas permukaan air laut. Untuk kabupaten Kuningan posisinya terletak 480 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Cirebon dan Indramayu suhunya terasa panas karena secara geografis berada di wilayah pesisir pantai. Sementara wilayah kabupaten Kuningan dan Majalengka bagian Selatan terasa sejuk karena secara geografis berada di daerah pegunungan. Bila dihitung jarak kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah keresiden Cirebon dari kota Bandung, kabupaten Majalengka berjarak 45 km, kabupaten Indramayu 140 km lewat Jatibarang, dan kabupaten Cirebon 130 km. Sementara kabupaten Kuningan 170 km lewat Cirebon, dan 130 km lewat kabupaten Majalengka.<sup>17</sup>

Berbicara tentang gambaran demografi di wilayah Keresidenan Cirebon pada masa awal kekuasaan bangsa Eropa

---

<sup>16</sup> Shaleh Dananasasmita dkk., *loc. cit.*, hlm. 33.

<sup>17</sup> Shaleh Dananasasmita dkk., *loc. cit.*, hlm. 54-55.

sangat sulit untuk mendapatkan informasi tentang jumlah penduduk yang tepat dan dapat dipercaya. Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa para kepala daerah tidak terbiasa mencatat perkawinan, dan kematian di wilayahnya. Biasanya mereka hanya memberikan laporan kepada atasannya berupa perhitungan kasar tentang rakyatnya. Sumber-sumber tertulis yang menginformasikan tentang jumlah penduduk di wilayah kleresiden Cirebon berasal dari sumber luar dan sumber lokal.<sup>18</sup>

Tentang informasi jumlah penduduk di wilayah keresidenan Cirebon sendiri, Tome Pires merupakan orang asing pertama yang mencatat perkiraan jumlah penduduk di wilayah Keresidenan Cirebon. Menurut Tome Pires, bahwa pada tahun 1513 diperkirakan penduduk kota Cirebon berjumlah sekitar 1.000 kepala keluarga dan Japura yang terletak di sebelah timurnya berpenduduk sekitar 20.000 keluarga. Kalau setiap keluarga memiliki sekitar 4 dan 5 orang anggota, maka diperkirakan penduduk kota Cirebon berjumlah sekitar 4.000 atau 5.000 orang.<sup>19</sup>

Pada tahun 1678, Hurd memimpin sebuah ekspedisi dari Jepara ke Kediri. Salah satu laporan yang dibuatnya berkaitan dengan jumlah penduduk beberapa tempat yang terletak di pulau Jawa. Dalam laporannya disebutkan bahwa penduduk daerah Caruban berjumlah sekitar 6000 cacah. Sumber asing lain yang menginformasikan jumlah penduduk di wilayah Cirebon berasal dari catatan Francois Valentijn. Pada tahun 1722, ia mengunjungi Cirebon dan memberitakan bahwa penduduk daerah itu berjumlah sekitar 7000 keluarga. Jika setiap keluarga rata-rata berjumlah lima orang, maka penduduk kota Cirebon pada tahun itu berjumlah sekitar 35.000 Orang. Pada tahun 1781, Nederburg memperkirakan penduduk Cirebon berjumlah sekitar 90.000 orang. Dengan demikian dalam jangka waktu 59

---

<sup>18</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 316.

<sup>19</sup> Nina H. Lubis, "Cirebon" dalam Nina H. Lubis (Ed.), *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, (Bandung: Alqaprint, 2000), hlm. 44.

tahun penduduk Cirebon bertambah sekitar 55.000 orang atau sekitar 933 orang pertahun.<sup>20</sup>

Pada tahun 1700 Cirebon merupakan sebuah kota pribumi yang besar dengan rumah-rumah rakyat terbuat dari bambu. Bahan bangunan rumah untuk kraton dan rumah orang Belanda, selain menggunakan bambu, juga menggunakan sedikit batu dan kayu. Pada tahun 1793, di Cirebon ada tujuh rumah orang Eropa, dan tahun 1807, sudah bertambah menjadi sepuluh rumah. Jumlah pekerja dan pejabat Kompeni tidak pernah lebih dari 100 orang dalam satu waktu. Mereka bertugas mengumpulkan lada, kapas, tarum, dan kopi. Kopi memang sudah lama menjadi komoditas ekspor yang terutama sekali didatangkan dari Priangan.<sup>21</sup>

Kota Cirebon tumbuh perlahan-lahan. Keadaan lingkungan Cirebon pada akhir abad ke-18 dirasakan kurang sehat, sampah dibiarkan membusuk, kanal-kanal dibiarkan dan menjadi sarang nyamuk. Angka mortalitas di kalangan orang Eropa menjadi tinggi. Baru pada tahun 1800 Residen Waterloo mencoba membuat pipa saluran air dari Linggarjati. Tetapi akhirnya terbengkalai. Penyakit Pes pernah merajalela antara tahun 1853-1855. Pada tahun 1847 tercatat gempa bumi yang menyebabkan bencana. Banjir sering pula terjadi pada musim hujan.<sup>22</sup>

Memasuki abad ke-19, dengan tujuan utama pendataan penduduk Jawa untuk kepentingan sistem pajak tanah, Thomas Stamford Raffles mencatat jumlah penduduk di keresidenan Cirebon pada tahun 1812 berjumlah 16.000 jiwa, dan meningkat hingga tahun 1815 menjadi 216.001. Menurut Raffles pada tahun 1815 di Keresiden Cirebon secara keseluruhan terdapat 105.451 orang laki-laki dan 110.550 orang wanita. Penduduk pribumi sendiri jumlahnya 213.658 orang, yang terdiri dari 99.837 orang laki-laki dan 113.821 orang wanita. Peningkatan

---

<sup>20</sup> Nina H. Lubis, *ibid.*, hlm. 44.

<sup>21</sup> Nina H. Lubis, *ibid.*, hlm. 44.

<sup>22</sup> Nina H. Lubis, *ibid.*, hlm. 46.

jumlah penduduk juga terjadi pada golongan Cina dan lain-lain. Jika pada tahun 1815 jumlahnya mencapai 2.343 jiwa, dengan jumlah laki-laki 1193 orang dan wanita 1150 orang, maka pada tahun 1845 jumlahnya menjadi 8.814 jiwa.<sup>23</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan Thomas Stamford Raffles juga bahwa antara tahun 1811-1816 di wilayah keresidenan Cirebon jumlah elit pribumi yang terdiri dari bupati, tumenggung, patih Angehads, rangga, raden, demang, lurah, dan pemimpin desa lainnya berjumlah 2.368 orang. Begitu juga dengan para istrinya yang berjumlah 2.434 orang. Selanjutnya terdapat 698 pendeta (ulama, ustad/mubaligh), 35.020 orang Pria dan 41.944 orang wanita yang telah menikah dan sehat. Anak laki-laki berjumlah 8.402 orang, anak perempuan berjumlah 8.198. Jumlah total penduduk yang ada terdapat 144.405 orang. Sementara orang Cina 2.292 orang, peranakan Cina 304 orang, orang Arab dan Moor 19 orang. Adapun jumlah budak terdapat 193 orang yang terdiri dari budak pria 70 orang, budak wanita 104 orang, anak-anak 19 orang, semuanya penduduk pribumi 144.468.<sup>24</sup>

Orang-orang Eropa yang tinggal di Cirebon, tercatat sebagai berikut: pada tahun 1811 terdapat 14 orang, pada tahun 1848 ada 500 orang, pada tahun 1864 terdapat 700 orang, dan pada tahun 1876 terdapat 776 orang. Pusat kegiatan orang-orang Eropa adalah di Benteng Bestcherming. Pada tahun 1835 benteng tersebut terbakar dan kemudian dibangun benteng baru di Desa Tangkil, 3 km meter dari pusat kota Cirebon, dengan pemandangan yang indah menghadap ke Gunung Ciremai. Di benteng itu dibangun pula sebuah areal pergudangan dan penjara. Pada tahun 1841, dibangun pula gedung tempat tinggal residen di kota Cirebon.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 37-38.

<sup>24</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm 36

<sup>25</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 47

Penduduk pribumi di wilayah keresidenan Cirebon terpolarisasi ke dalam dua segmen, yaitu penduduk yang beretnis Jawa dan sunda. Tentang gambaran kedua etnis penduduk tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh Thomas Stamford Raffles yang pertama penduduk yang beretnis Jawa memiliki ciri-ciri bertubuh pendek meskipun tidak sependek orang Bugis dan orang - orang di pulau lain. Bentuknya sempurna dan tegap meski tidak sebagus orang Melayu. Kaki mereka panjang dengan telapak kaki dan pergelangan kecil. Biasanya mereka mempertahankan bentuk asli ini, kecuali pada perempuan kalangan atas, yang mencoba memperkecil pinggang mereka dengan dengan mengikat kuat wilayah perut hingga berubah bentuk keningnya tinggi, alisnya bagus, jauh di atas mata, dan lekuk mata dalam, menyerupai bangsa Cina atau Tartar. Warna matanya hitam, hidungnya kecil dan pesek meski tidak sepesek penduduk dari pulau lain. Mulutnya biasanya bagus, bibir lebar dan seringkali mereka menghitamkan gigi dengan kebiasaan menghisap tembakau, sirih dan lain-lain. Bagi para laki-laki biasanya tulang pipinya tinggi, jenggotnya jarang-jarang, rambutnya lurus dan hitam, kadang keriting dan kadang berwarna coklat kemerahan. Tindakan mereka sopan, lemah lembut, berhati-hati-hati dan seringkali menunjukkan kesopanan atau rasa malu.<sup>26</sup>

Kulit orang Jawa, seperti juga bangsa di wilayah timur pulau, lebih dikategorikan kuning dibanding berwarna tembaga atau hitam. Warna kulit mereka yang dianggap terbagus adalah warna kuning emas, kecuali di beberapa daerah pegunungan, di mana mereka lebih menyukai warna tembaga. Orang Jawa terlihat lebih gelap dibandingkan penduduk pulau sekitar, dan tampaknya penduduk sekitar itu mempunyai bentuk yang lebih baik dan jauh dari persamaan dengan orang India, yaitu di distrik barat atau distrik suku Sunda. Suku Sunda sendiri

---

<sup>26</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 34.

merupakan penduduk gunung dengan ciri fisik pendek, tegap, kuat dan lebih lincah dibanding penduduk Jawa Tengah dan Timur. Orang-orang dari suku Sunda lebih mirip orang Madura, yang menampakan ciri lebih perkasa dan bebas serta berjalan lebih tegap dibandingkan penduduk Jawa. Perbedaan juga ada di kalangan kelas bawah dan atas, khususnya karena perbedaan pada perlakuan dan pekerjaannya. Kalangan bangsawan Sunda mempunyai kaki dan bentuk tubuh lebih halus, hampir mirip penduduk India barat, sedangkan kalangan rakyat biasa menampakan ciri asli moyang mereka. Warna kulit mereka juga berbeda-beda di setiap keluarga di mana salah satunya berkulit lebih gelap dibanding yang lain. Banyak bangsawan yang mempunyai darah Cina, sedangkan pengaruh Arab tidak begitu terlihat, kecuali di kalangan ulama dan beberapa keluarga kelas atas.<sup>27</sup>

Secara umum, penampilan para wanita Jawa, tidak semenarik laki-laknya; dan menurut orang-orang Eropa yang telah lama tinggal di sana, kaum wanitanya jelek. Hal ini karena mereka banyak dipengaruhi oleh beban kerja di sawah, dan karena seringnya terbakar sinar matahari. Sedangkan perempuan Jawa kelas atas, yang selalu berada di rumah, tampaknya jauh dari kategori jelek. Orang-orang Jawa sangat sopan dan sederhana, bahkan cenderung tunduk. Mereka mempunyai rasa kesopanan dan tidak pernah bertindak atau berkata kasar. Sekalipun terasing, namun mereka penyabar, tenang dan cenderung tidak mengusik urusan orang lain. Mereka berjalan dengan lambat dan tidak tergesa-gesa, namun dapat menjadi tangkas apabila diperlukan.<sup>28</sup>

Orang Jawa mempunyai sifat lembut dan pendiam. Mereka tidak begitu suka berpetualang, tidak menyukai perdagangan internasional, tidak gampang marah atau berkelahi,

---

<sup>27</sup>Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 34.

<sup>28</sup>Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 34.

dan mereka juga jarang mendapatkan masalah, kecuali beberapa keluarga miskin yang tidak mempunyai pelindung. Kebiasaan saling membalas dendam yang ditanamkan pada seluruh penduduk kepulauan Hindia, tidak begitu tepat diterapkan pada bangsa Jawa. Meskipun pada beberapa kasus terjadi peristiwa menuntut balas dan tidak melalui jalur hukum yang dinilai buruk, namun bisa dikatakan tidak banyak nyawa yang hilang, karena perkelahian atau balas dendam pribadi.

Memasuki paruh kedua abad ke-19 bersamaan dengan adanya modernisasi ekonomi dan diterapkannya penataan administrasi pemerintahan kolonial, perbaikan sarana dan prasarana, migrasi dan urbanisasi, perbaikan standar hidup dan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah penduduk terutama di kota-kota di Jawa berangsur meningkat dengan tajam. Pada tahun 1856, secara keseluruhan jumlah penduduk keresidenan Cirebon mencapai angka 769.331 jiwa dengan perincian 606 orang Eropa, 1198 orang Cina, 905 orang Arab dan timur asing lainnya.<sup>29</sup>

Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di keresidenan Cirebon masih terjadi hingga memasuki tahun 1880. Secara keseluruhan jumlah penduduk pribumi di keresidenan Cirebon berjumlah 1.277.573 jiwa. Dari sejumlah itu, patut diketahui terdapat 948 orang Eropa, 15.630 orang Cina, dan 1.325 orang Arab dan Asia Timur lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah keresidenan Cirebon merupakan wilayah yang didiami oleh banyak etnis. Di luar etnis Jawa dan Sunda yang mendominasi wilayah Keresidenan Cirebon, keberadaan etnis China, Arab dan Eropa lainnya menjadi penting dalam pembentukan keresidenan Cirebon yang multikultur. Dapat pula dilihat, jumlah penduduk terbanyak selain penduduk pribumi dipegang oleh etnis Cina di peringkat kedua. Sementara di peringkat ketiga dipegang oleh

---

<sup>29</sup> *Aardrijkskundig en Stetisch Wordenboek van Nederlandsch Indie, 1861*, hlm. 239 & 243.

orang Eropa dan Asia lainnya. Bisa jadi kenaikan tersebut erat hubungannya dengan bertambahnya kekuasaan Belanda dan status *Gemeente Cirebon* yang membutuhkan banyak pegawai pemerintahan.<sup>30</sup>

Sebuah analisis lanjutan berdasar data demografis, telah dilakukan oleh Abdul Wahid<sup>31</sup> yang menyatakan bahwa dari rincian jumlah penduduk yang ada, dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk semenjak tahun 1840-1880 sebesar 2,14 %. Sementara , jumlah *sex ratio* atau jumlah penduduk laki-laki per 100 perempuan di Keresidenan Cirebon adalah 94,3%. Engan jumlah penduduk 1.295.476 pada tahun 1880 dan luas wilayah mencapai 6.787 km, dapat diketahui kepadatan penduduk Keresidenan Cirebon pada tahun itu adalah 216 jiwa per km.

Khusus untuk penduduk yang berada di wilayah kota Cirebon, secara struktur sosial dan dalam sistem hukum kolonial sebagian penduduk pribumi menempati strata sosial paling bawah dengan mata pencaharian sebagai pedagang kecil, buruh pabrik, kuli pelabuhan dan lainnya. Sementara orang Cina, Arab dan Timur asing lainnya berada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pribumi. Mereka pada umumnya bekerja sebagai pedagang dan penyedia jasa yang bertempat tinggal di sepanjang jalan besar kota. Adapun penduduk Eropa, mereka menempati tingkat tertinggi dalam struktur sosial dan sistem hukum kolonial yang berlaku di Cirebon. Mereka terdiri dari pegawai pemerintah, dokter, pengusaha penginapan, pegawai perkebunan, pegawai perusahaan swasta, notaris, dan pengusaha perbankan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Indische Verlag*, 1940, Jilid II, hlm. 32; Eva Nurarovah, *loc. cit.* hlm. 304.

<sup>31</sup> Abdul Wahid, "Bertahan di Tengah Gelombang Krisis: Komunitas China dan Ekonomi Kota Cirebon pada Masa Depresi Ekonomi 1930-1940", *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 47-49.

<sup>32</sup> Sulistyono, *loc. cit.*, hlm. 97; Eva, *loc. cit.*, hlm. 306.

Adapun struktur sosial masyarakat desa di keresidenan Cirebon pada dasarnya sama dengan kondisi di Jawa pada umumnya. Desa terbagi-bagi menurut stratifikasi atas dasar kepemilikan tanah. Orang desa pemilik tanah, terutama tanah sawah, dianggap sebagai inti dan menurut tradisi dianggap sebagai keturunan dari pendiri dan yang tertua di suatu desa. Tingkat di bawahnya dipegang oleh mereka yang tidak memiliki hak memegang tanah pertanian, tetapi hanya memiliki sebuah rumah dan kebun. Mereka ini bekerja di pabrik yang berdekatan dengan desa, bertukang, atau mengerjakan tanah orang lain atau mengerjakan semuanya. Sedangkan tingkat terbawah masyarakat desa adalah orang yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki rumah, dan tidak memiliki kebun. Mereka membangun gubuk di pekarangan salah satu penduduk desa dan biasanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau buruh tani bagi pemilik tanah pekarangan tempat mereka menumpang.<sup>33</sup>

Pembagian yang lebih sederhana dilakukan oleh Brandes (1894) dengan membagi status sosial masyarakat pribumi di Keresidenan Cirebon yang terbagi atas tiga golongan; pertama kelompok *priyayi* atau bangsawan yang terdiri atas para sultan dan bupati beserta keluarganya termasuk para pejabat bawahan sultan dan bupati. Kedua, golongan *sikep* yang terdiri dari petani pemilik lahan pertanian beserta keluarganya dan kebanyakan berasal dari desa. Kelompok ketiga yaitu golongan *manumpang* atau rakyat yang tidak memiliki lahan sendiri. Mereka biasanya menumpang pada *sikep* untuk mengolah lahan pertaniannya. Para *sikep* dan *manumpang* biasanya tinggal di desa, sementara penduduk yang menetap di perkotaan sebagian besar menjabat sebagai pegawai pemerintah atau kesultanan. Selain hubungan antar *sikep* dan *manumpang* di atas, sultan atau bupati serta bawahan masing-masing memiliki karakter sendiri dengan dua corak hubungan yaitu hubungan antara bawahan dengan

---

<sup>33</sup> Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 31-34.

atasan, dan juga hubungan tradisional yang bercorak feodalistik.<sup>34</sup>

Di desa-desa yang berada di wilayah keresidenan Cirebon, para sultan seringkali menempatkan anak buah atau utusan yang berasal dari golongan cacah dengan dipimpin seorang *sikep*. Anak buah kesultanan ini dilindungi oleh para bangsawan kesultanan dan sebagai pengganti dari perlindungan bangsawan tersebut, para cacah atau rumah tangga wajib memberikan sebagian dari hasil panen sawah dan hasil bumi lainnya, serta jasa tenaga kerja.<sup>35</sup> Tidak jarang dalam satu desa terdapat dua utusan atau anak buah sultan, yaitu utusan Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Fenomena ini biasanya banyak terjadi pada desa-desa potensial seperti Desa Gegesik atau Desa Ciledug. Desa Gegesik merupakan salah satu desa penghasil padi sekaligus bertugas mengadakan pagelaran wayang keraton,<sup>36</sup> sedangkan Desa Ciledug merupakan salah satu desa yang menjadi pusat perdagangan sayuran dan palawija sekaligus pusat penyebaran Islam di wilayah Losari.<sup>37</sup>

Bagi penduduk desa, berlaku kewajiban-kewajiban sebagai berikut: pertama kewajiban desa dalam arti yang sebenarnya atau *diensten* seperti : ronda, *kerig desa*, dan membantu polisi. Kedua, yaitu kewajiban seperti *soyo* atau gotong-royong, *sambutan*, *sinoman* dan *biodo*. Dalam perjalanannya sambutan banyak yang sudah tidak dijalankan, karena biayanya lebih mahal daripada menggunakan tenaga upahan. Sementara *Sinoman*<sup>38</sup> dan *biodo* banyak yang sudah lenyap karena pesta-

---

<sup>34</sup>J.L.A. Brandes, *Eenige Officiële Stukken met Betrekking tot Tjirebon TBG*, 1894, hlm. 449.

<sup>35</sup>Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa pada Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 15.

<sup>36</sup>Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 248.

<sup>37</sup>Memorie van Overgave van G.J. Oudemas aftredent Resident van Cheribon aan opvolger den heer F.Ch.N van deer Moore, Assisten Resident van Blora, 1911,38).

<sup>38</sup>*Sinoman* adalah perkumpulan dari para pemuda desa yang berkewajiban membantu kalau ada orang yang mempunyai hajat pesta menantu, khitan dan

pesta tidak lagi dilakukan secara besar-besaran seperti pada masa lalu.<sup>39</sup>

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan aspek demografis di wilayah keresidenan Cirebon pada abad ke-19 adalah keberadaan pemukiman penduduk berdasarkan etnis. Menurut pengamat sejarah penduduk Cina di keresidenan Cirebon dimulai sekitar abad ke-8 bersamaan dengan kedatangan orang Cina gelombang pertama. Mereka kemudian membentuk perkampungan dan membangun klenteng Tiao Kak Sie di dekat pelabuhan Cirebon. Rombongan orang Cina kedua diperkirakan tiba di pelabuhan Muara Jati pada tahun 1415 yang dipimpin seorang Cina Muslim yaitu Laksamana Cheng Ho. Di pelabuhan Muara Jati pula beberapa orang dari rombongan ini menetap dan membangun pemukiman sekitar daerah Lemah Wungkuk dan mengusahakan perdagangan sebagai sumber mata pencaharian.<sup>40</sup>

Masih di abad ke-15, sekitar tahun 1464, Cirebon kedatangan rombongan dari Baghdad yang dipimpin Syarif Abdurahman dengan membawa pula tiga orang adiknya yaitu Syarif Abdurrahim, Syarif Kapi dan Syarif Bagdad. Bersama dengan beberapa rombongan yang lainnya, mereka kemudian menetap dan membuat perkampungan Arab di daerah Panjunan. Di luar kepentingan dagang yang mereka usahakan, mereka juga merupakan para juru dakwah professional. Kawasan Panjunan yang menjadi perkampungan Arab Cirebon awalnya mengusahakan kerajinan gerabah dengan pemasaran hingga ke luar Cirebon. Penegasan nama Panjunan sebagai penghasil gerabah di masa lalu bisa dilihat dari Panjunan yang berasal dari kanta Anjun (Sunda) berarti pembuat kerajinan dari

---

sebagainya. Sedangkan Bido adalah semacam sinoman bagi pemuda. Lebih lengkap tentang desa Chirebon lihat J.W. Meyer Raneft, *Laporan-laporan Desa (desa Rapporten)* Jakarta ANRI, 1975, hlm. ix-xiv.

<sup>39</sup>J.W. Mayer Raneft, *Ibid.*, hlm. xiii-xiv; Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 309.

<sup>40</sup>H.J. de Graff dan T.H. Peagead, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, (Jakarta: PT Grafitti Pers dan KITLV, 2003), 1-23; Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 309.

tanah liat.<sup>41</sup> Begitu juga dengan nama Gang Pngobongan (obong+ bakar) dan Gang Warung Bata yang berada di daerah Panjunan sekaligus menjadi pembatas berlangsungnya pembuatan gerabah tersebut. Pada tahun 1845 komunitas Arab menjadi cukup besar hingga dibutuhkan sebuah koloni yang sekaligus bisa menampung semua orang Arab di Keresidenan Cirebon. Baru pada tahun 1872 komunitas Arab Indramayu membentuk komunitas tersendiri dan mengalami kemajuan yang pesat.<sup>42</sup>

Berbeda dengan orang-orang Cina yang mampu bertahan dan mengembangkan usaha dagang, kasus yang berbeda terjadi pada orang-orang Arab Cirebon yang menekuni kerajinan gerabah. Seiring dengan perkembangan wilayah Keresidenan Cirebon, menjadi pengrajin gerabah tidak lagi tampak sebagai aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar penghuninya. Kawasan Panjunan kemudian berubah menjadi kawasan perdagangan yang dinamis. Deretan toko memenuhi kawasan ini menjual berbagai produk khas Timur Tengah dan keperluan ibadah umat Islam yang mereka beli dari Batavia untuk kemudian dijual secara eceran atau dikirim kepada rekan-rekan berdagang mereka ke berbagai daerah. Dari sektor perdagangan ini, dalam satu tahun pada abad ke-19 orang-orang Arab yang berada di Keresidenan Cirebon yang memiliki penghasilan f 600-f 3600 sebanyak 64 orang, dan yang memiliki penghasilan f 3600-f12000 pertahun sebanyak 4 orang.<sup>43</sup>

Ini berarti, kedatangan orang-orang Arab pada hakikatnya tidak semata-mata dari kalangan ulama yang kemudian menjadi tokoh penyebar agama Islam di Cirebon. Sebagian dari mereka juga datang dari Kawasan Timur Tengah, seperti dari Hadramaut atau Yaman sebagai pedagang. Dengan

---

<sup>41</sup> Lihat *Sejarah Carub Kandha Naskah Pulosaren*, 2017

<sup>42</sup> L.W.C. van den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 103; Eva, *loc. cit.*, hlm. 310.

<sup>43</sup> L.W.C. van den Berg, *Ibid.*, hlm. 139; Eva, *loc. cit.*, hlm. 310.

latar belakang kondisi geografis Cirebon yang strategis, kemajuan perdagangan internasional pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-19, juga pelayaran yang lebih mudah dan cepat datang dengan tujuan utama ekspansi bisnis. Meskipun demikian, mereka juga ikut serta menebar budaya Islam dengan cara aktif bersosialisasi dengan lingkungan kerajaan lokal maupun masyarakat. Dua kelompok pedagang Arab ini memiliki peran signifikan dalam pembentukan identitas masyarakat Muslim Cirebon.

Dengan demikian, hadirnya kampung Pecinan di Lemahwungkuk dan kampung Arab di Panjunan, serta seluruh Kawasan Cirebon telah memberikan dampak kepada lahirnya bentuk-bentuk hubungan baru dengan karakteristik yang berbeda. Orang-orang Cina dengan kepentingan ekonomi dan ketajaman intuisi dagangnya, kehadiran mereka telah mewujudkan dalam bentuk munculnya kompleks pertokoan yang tersebar di sekitar pelabuhan dan beberapa jalan utama Cirebon. Selanjutnya berbeda dengan orang Cina, kedatangan orang Arab ke Cirebon selain dinilai telah mengembangkan usaha dagang, mereka juga dipandang memiliki andil yang besar Di dalam penyebaran agama Islam.

Uraian di atas juga sekaligus menandai hubungan yang terjalin antara etnis Cina, Arab dan masyarakat yang mendiami Cirebon sudah berlangsung lama, bahkan sebelum lahir kerajaan Cirebon. Jika ditarik lebih ke belakang bentuk lain yang terkait dengan interaksi etnis Cina, Arab dan penduduk Cirebon bisa ditemui dalam respon Sunan Gunung Jjati terhadap keragaman budaya Cirebon dan strategi dakwahnya dengan merekatkan hubungan antar kelompok-kelompok masyarakat melalui pernikahan. Seolah membenarkan pendapat sebagian besar para ahli barat yang menganut teori bahwa juru dakwah pertama Islam di Nusantara adalah para pedagang Muslim yang

membawa Islam bersama-sama dagangan mereka<sup>44</sup> dan salah satu pengembangannya melalui pernikahan. Dalam hal ini, sebuah elaborasi dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi adik Syarif Abdurrahman yang bernama Syarifah Baghdad sebagai istri ke-5 dan putri Cina yang bernama Ong Tien Nio sebagai istri ke-enam.<sup>45</sup>

Kedekatan etnis Cina dengan pemangku kekuasaan Cirebon dibuktikan juga dari sosok Tan San Kong atau Pangeran Aria Wira Cula. Konon, ia merupakan arsitek pada masa Sunan Gunung Jati yang meninggal pada tahun 1585.<sup>46</sup> Versi lain menyebut ia merupakan menteri keuangan Kesultanan Cirebon (1565-1585), mungkin masih masa pemerintahan Sunan Gunung Djati atau sesudahnya.<sup>47</sup>

Kedatangan orang-orang Eropa (Belanda) telah merubah pola hubungan antaretnis yang ada di Cirebon. Bersamaan dengan etnis Cina yang telah lebih dulu menetap di Cirebon dan memegang peran penting dalam ekonomi perdagangan, pertanian, dan perkebunan di Cirebon, kelompok orang-orang Eropa yang diwakili *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pun telah berhasil mengendalikan penguasa-penguasa tradisional Cina sekaligus simpul-simpul ekonomi strategis. Peran penting keduanya tampak dalam sektor ekonomi melalui pola kerjasama yang sebelumnya terjalin antara Cina dan Belanda. Sebagai contoh, selama fase-fase awal pengelakan kopi di Cirebon-Priangan pada tahun 1720-an, budi daya dan produksinya diserahkan kepada orang-orang Cina. Begitu pula dengan industri gula yang digeluti pengusaha Cina pada tahun 1705-1720 dan posisi syahbandar hingga kebijakan ekonomi

---

<sup>44</sup>Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas, dan Akar Sejarah*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. : 31.

<sup>45</sup>Eva Nurarovah, *loc. cit.* hlm. 312.

<sup>46</sup>H.J. de Graff dan T.H. Peagead, *loc. cit.*, hlm. 43-44.

<sup>47</sup>Undang Sunarjo, *Masa Kejayaan Cirebon dan Kerajaan Cirebon 1478-1809*, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1983), hlm. 3.

pemerintah Hindia-Belanda (tanam paksa) tidak serta-merta mengurangi posisi ekonomi komunitas Cina. Merekalah merupakan salah satu kelompok etnis yang berhasil mendominasi perekonomian Cirebon, bahkan hingga berakhirnya masa kekuasaan Pemerintah Hindia-Belanda. Karena hal itu pula, tampaknya bisa dipahami mengapa Pemerintah Hindia-Belanda memberi beberapa hak istimewa terhadap orang Cina seperti hak menjual candu, memungut pajak, dan merekrut tenaga kerja, hingga larangan mencampuri urusan Cina.

Memasuki abad ke-19 dikarenakan jumlah etnis Cina, Arab dan Melayu di Keresidenan Cirebon semakin banyak, Pemerintah Hindia-Belanda mulai menyertakan orang Cina dan Arab di Cirebon untuk memasuki struktur pemerintahan dengan menduduki jabatan sebagai *kapitein* dan letnan Cina, serta letnan Arab dan letnan Melayu. Kapten Cina berada di ibukota keresidenan, sementara letnan Cina, letnan Arab dan letnan Melayu berada di ibukota kabupaten.

Dalam pemerintahan Hindia-Belanda, keberadaan etnis Cina, Arab dan Melayu bertugas sebagai penanggung jawab sekaligus menjadi kordinator dan pengawas urusan pemerintahan di kelompok etnis masing-masing untuk kepentingan Pemerintah Hindia-Belanda. Tercatat di antaranya Letnan Cina Tan Tian Keng (diangkat 28 Agustus 1848) yang digantikan Hoe Oeng Pau (diangkat tanggal 12 Februari 1855). Untuk *kapitein* Cina diangkat Khoe Thee Jin (diangkat pada tanggal 12 Februari 1848). Sementara untuk letnan Arab diangkat Syekh Salim bin Awab Attamimi dan letnan Melayu, Encik Haji Husein bin Hasan (diangkat pada tanggal 3 Agustus 1867).<sup>48</sup>

Pada akhirnya, dengan adanya komunitas penduduk Cina, dan kawasan Pecinannya, Arab dan kawasan Panjunannya,

---

<sup>48</sup> Regeerings Almanak voor Nederlandsh-Indie 1871, hlm. 49.

orang Eropa, Jawa, Sunda, Priyayi, *Sikep*, *Manumpang*, kelenteng, masjid, dan gereja seolah-olah telah merefleksikan betapa keberagaman agama, basis ekonomi dan kebudayaan masyarakat telah terbentuk di wilayah Keresidenan Cirebon. Semua berbaur hingga membentuk struktur yang rumit dan khas sebagai hubungan antaretnis di wilayah Keresidenan Cirebon, sebuah masyarakat multikultur yang kompleks sebagai representasi dari keragaman berbagai etnis. Meski dalam konteks sosiologi, Islam menjadi agama mayoritas penduduk Cirebon, namun dalam kenyataannya, keyakinan dan pilihan pribadi juga mendapat tempat dan pengakuan layaknya sebuah wilayah yang terbingkai dalam ragam etnis dan budaya, multikulturalisme di wilayah Keresidenan Cirebon bukan sesuatu yang terciptakan oleh pihak-pihak tertentu, melainkan tercipta dengan sendirinya yang lahir bersama dengan sejarah Cirebon yang panjang.<sup>49</sup>

## **B. Kondisi Politik Wilayah Keresidenan Cirebon**

Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dibubarkan. Kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, kemudian dibentuk Pemerintahan Kolonial-Belanda. Sebagai gubernur jenderal peralihan yang pertama dari VOC ke Pemerintahan Kolonial-Belanda, maka diangkatlah Wise sebagai gubernur jenderal di tanah kolonial. Dalam perkembangannya, seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda, sebagai pengaruh dari adanya revolusi Perancis yang terjadi di Eropa, di mana Kerajaan Perancis berusaha untuk melebarkan kekuasaannya ke wilayah-wilayah lain di benua Eropa, kondisi ini telah mengakibatkan negeri Belanda untuk “sementara” menjadi bagian dari provinsi Kerajaan Perancis.

---

<sup>49</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 315.

Tentu saja, kondisi ini telah memberikan imbas terhadap keberadaan tanah-tanah jajahan milik pemerintah Kerajaan Belanda. Tanah-tanah jajahan Kerajaan Belanda pun dipandang menjadi bagian dari Perancis yang harus dipertahankan. Dengan keadaan seperti itu, maka Louis Napoleon sebagai penguasa yang ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte berusaha untuk mempertahankan wilayah tanah jajahan milik pemerintah Kerajaan Belanda. Dalam rangka mempertahankan tanah-tanah jajahan tersebut maka Louis Napoleon mengirimkan Herman Willem Daendels ke pulau Jawa untuk mempertahankan pulau Jawa dari serbuan tentara Inggris yang secara kebetulan di antara kedua negara tersebut sedang terjadi rivalitas dan konfrontasi. Pada tanggal 1 Januari 1808 Herman Willem Daendels mendarat di Anyer. Pada tanggal 5 Januari 1808 ia kemudian menuju ke Batavia, dan menjadikan Batavia sebagai ibu kota Hindia-Belanda. Tanggal 14 Januari 1808 terjadi serah terima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wiese kepada Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels memerintah dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Ia pada dasarnya merupakan gubernur jenderal pertama yang berkuasa di Hindia-Belanda sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan Kerajaan Perancis.<sup>50</sup>

Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels datang dan memerintah di Hindia-Belanda (1808-1811) dengan membawa semangat revolusi Perancis. Ia banyak melakukan perubahan dalam bidang pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi wilayah dan kekuasaan elite politik pribumi, sultan dan bupati. Herman Willem Daendels membagi pulau Jawa ke dalam sembilan *prefektur*. Setiap *prefektur* dipimpin oleh seorang *prefek*. Istilah ini kemudian dirubah menjadi *landroosttambt*. Sementara

---

<sup>50</sup>M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 107.

Nina H. Lubis dkk., *Sejarah Tatar Sunda*, (Bandung: Satya Historika, 2003, Jilid I, Cetakan I), hlm. 335.

itu, istilah kesultanan masih diberlakukan untuk Banten dan Cirebon sehingga wilayah Tatar Sunda pada waktu itu terbagi atas Jakarta dan daerah sekitarnya (Bogor, Tangerang, dan Krawang), Kesultanan Banten, Priangan (Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakan Muncang), dan Kesultanan Cirebon yang mencakup Limbangan, Sukapura, dan Galuh.<sup>51</sup>

Pola-pola Daendels dalam pembagian pulau Jawa, selain didasarkan pada sistem pemerintahan sentralistis juga dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan sebagai berikut: pertama, tugas utama Herman Willem Daendels adalah mempertahankan pulau Jawa. Kedua, pejabat tinggi sipil dan militer Pemerintah Hindia-Belanda saat itu jumlahnya sangat sedikit. Ketiga, keuangan pemerintah sangat minim.<sup>52</sup>

Dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda, Herman Willem Daendels sangat memperhatikan urusan pemerintahan dan administrasi negara. Ia menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistis. Semua urusan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah diatur dari pusat dengan intruksi dari gubernur jenderal. Hal itu dilakukan karena Herman Willem Daendels ingin menjalankan pemerintahan secara langsung (*direc rule*). Ia ingin memerintah rakyat pribumi secara langsung tanpa perantaraaan sultan atau bupati.<sup>53</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Herman Willem Daendels melaksanakan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional. Para sultan dan bupati dijadikan pegawai pemerintah yang menerima gaji, di bawah pengawasan *prefek*. Sistem pergantian sultan dan bupati secara turun temurun tidak

---

<sup>51</sup>R.A. Kern, *Geschiedenis de Preanger-Regenschappen Kort Over Zich*. (Bandoeng: Uingegeven Door de Vries en Fabricius, 1898), hlm. 33-34; Nina H. Lubis dkk., *ibid.*, hlm. 336.

<sup>52</sup> Nina H. Lubis dkk., *ibid.*, hlm. 336.

<sup>53</sup> Nina H. Lubis dkk., *ibid.*, hlm. 336.

diakui, kemudian diganti dengan sistem penunjukkan. Kekuasaan mereka pun berangsur-angsur dikurangi.

Untuk mempertahankan pulau Jawa, Herman Willem Daendels menghadapi kekurangan personil militer, bahkan pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu tidak memiliki angkatan laut. Oleh karena itu, para bupati pun dilibatkan dalam politik militer Herman Willem Daendels. Gelar bupati ditentukan korelasinya dengan kepangkatan militer. Bupati bergelar tumenggung mendapat pangkat mayor, bupati bergelar adipati /aria disamakan dengan letnan kolonel, dan bupati bergelar pangeran diberi pangkat kolonel. Penyetaraan kepangkatan seperti ini juga dimaksudkan untuk memudahkan skala panggilan.<sup>54</sup>

Dalam rangka mempertahankan pulau Jawa, Herman Willem Daendels dalam masa pemerintahannya berusaha untuk membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon. Untuk kelancaran pemerintahan dan menguasai pulau Jawa, Herman Willem Daendels juga membangun jalan raya sepanjang lebih kurang 1000 km mulai dari Anyer yang berada di ujung barat Jawa bagian barat sampai dengan Panarukan yang berada di ujung timur pulau Jawa. Tujuan utama pembangunan jalan raya ini adalah untuk kelancaran pengiriman surat antardaerah. Oleh karena itu berkembanglah istilah *Grote Posweg*, atau Jalan Raya Pos. Jalan itu dimaksudkan pula untuk kelancaran gerak militer. Pelaksanaan pembangunan jalan raya tersebut menjadi tanggungjawab bupati di daerah yang dilewati oleh jalan tersebut. Di daerah Tatar Sunda jalan itu melewati Serang, Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Cirebon.<sup>55</sup>

Ketika Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, wilayah Kesultanan Cirebon disatukan dengan sebagian wilayah Priangan menjadi

---

<sup>54</sup> Nina H. Lubis dkk., *ibid.*, hlm. 337.

<sup>55</sup> Nina H. Lubis dkk., *ibid.*, hlm. 337.

*Kesultanan Cheribon en Cheribonsche Prenger Regenschapen*, yang meliputi Kesultanan Cirebon, Limbangan, Sukapura, dan Galuh. Pada tanggal 2 Februari 1809 dikeluarkan *Reglemen op het beheer van de Cheribonsche Landen*, yang pada dasarnya menjadikan para sultan Cirebon sebagai birokrat yang bersubordinasi kepada birokrat Hindia Belanda. Para sultan benar-benar dianggap sebagai pegawai Kerajaan Belanda dengan pangkat bupati dan dengan demikian kehilangan kekuasaannya sama sekali. Rumah tangga para sultan benar-benar diatur oleh pemerintah kolonial, termasuk juga soal tanah milik keprabon, jumlah pegawai, dan pengiring keluarga sultan. Selain itu, Wilayah-wilayah kesultanan Cirebon meliputi daerah Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Gebang.<sup>56</sup>

Sebelum Daendels berhasil melaksanakan sistem pemerintahannya, pada bulan Mei 1811 kedudukannya sebagai gubernur jenderal di wilayah Hindia-Belanda digantikan oleh Jan Willem Jansen. Namun demikian, masa pemerintahan Jan Willem Jansen pun tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan saja, karena pada bulan Agustus 1811 ia tidak mampu mengatasi serbuan armada Inggris ke pulau Jawa. Akhirnya, ia menyerah kepada pihak Inggris di daerah Salatiga tanggal 17 September 1811 melalui Kapitulasi Tuntang.<sup>57</sup>

Sejak itu kekuasaan di Hindia-Belanda khususnya di pulau Jawa jatuh ke pihak Inggris yang diwakili oleh Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada masa pemerintahan *interregnum* (penyelang) Inggris ini, Thomas Stamford Raffles telah melakukan beberapa reorganisasi pemerintahan. Istilah *prefektur* diganti menjadi keresidenan dan istilah *prefek/landrostambt* pun diganti menjadi residen. Thomas Stamford Raffles juga mulai memperkenalkan jabatan baru

---

<sup>56</sup>Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 45.

<sup>57</sup>H.J. De Graaf, *Geschiedenis van Indonesie*. (Bandung: N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve-s'Gravenhage, 1949), hlm. 372; M. C. Ricklefs, *loc. cit.*, hlm. 108-109; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 337.

dalam pemerintahannya, yaitu asisten residen dan jabatan wedana yang mengepalai distrik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan.<sup>58</sup>

Pada dasarnya Raffles mengikuti pola Daendels dalam menjalankan pemerintahan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Daendels pada umumnya dinyatakan tetap berlaku. Walaupun demikian, terhadap bupati Raffles bertindak lebih jauh lagi. Hak bupati untuk mengadakan dicabut dan tugas itu diserahkan kepada residen. Untuk menjalankan pemerintahannya, Raffles membentuk badan penasihat yang terdiri dari satu orang Inggris dan dua orang Belanda (Cranssen dan Muntinghe) yang berpengalaman dalam urusan pemerintahan di Jawa. Raffles membentuk badan tersebut karena ia kekurangan tenaga dalam bidang pemerintahan.<sup>59</sup>

Pada masa pemerintahan *interregnum* Inggris (1811-1816) di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, mula-mula para sultan Cirebon dibiarkan saja statusnya sebagai pegawai, tetapi pada tahun 1815 mereka mulai dipensiunkan dengan menerima uang sejumlah 8000 rds setiap tahun. Pemakaian gelar juga mulai diatur oleh pemerintah kolonial. Hal ini juga berlaku bagi para bupati dan raja-raja di Jawa dan Madura. Sejak saat itu mereka hanya dianggap sebagai "pemangku adat" Cirebon.<sup>60</sup>

Sama halnya dengan Daendels, sampai akhir masa kekuasaannya, Raffles pun gagal melaksanakan sistem pemerintahan langsung. Selain karena pendeknya masa kekuasaan masing-masing, kegagalan itu pada dasarnya disebabkan oleh kuatnya ikatan feodal antara bupati dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintahan tradisional di daerah terus berlangsung. Kekuasaan Inggris di pulau Jawa berakhir pada tahun 1816, sesuai dengan perjanjian antara pihak Inggris

---

<sup>58</sup> Van Rees, *Overzicht van de Geschiedenis der Praeanger Regenschappen*. (Batavia: BGKW, 1869), hlm. 129; Nina H. Lubis dkk., *op.cit.*, hlm. 337.

<sup>59</sup> Nina H. Lubis dkk., *op.cit.*, hlm. 337.

<sup>60</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.* hlm. 46.

dan belanda yang dituangkan dalam Traktat London, 13 Agustus 1914, di mana pihak Inggris harus mengembalikan kekuasaan atas pulau Jawa kepada Pemerintah Hindia Belanda. Serah terima kekuasaan dilaksanakan di Batavia tanggal 19 Agustus 1816. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan tiga orang komisaris jenderal, yaitu Mr. C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen dan A.A. Busykes ke Hindia-Belanda untuk mengambil alih kekuasaan Inggris dan mengatur pemerintahan selanjutnya. Tindakan ketiga komisaris jenderal tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kebijakan Daendeles dan Raffles, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan penguasa pribumi.<sup>61</sup>

Setelah kekuasaan Raffles berakhir pada tahun 1816, dan Belanda berkuasa kembali di Hindia Belanda, status para sultan Cirebon tetap saja tidak berubah lagi. Pemerintahan di Cirebon dijalankan oleh para perantara, yaitu bupati. Yang pertama diangkat sebagai bupati Cirebon adalah Raden Tumenggung Natadiningrat (1814-1816), yang sebelumnya merupakan abdi dalem di Kesultanan Kasepuhan. Pada tahun 1819, pensiun para sultan mengalami perubahan. Sultan Kasepuhan mendapat uang f. 18.000 ditambah 210 bau sawah, sultan Kanoman mendapat uang f.18.000 ditambah 136 bau sawah, dan jandanya sultan Kacirebonan (yang meninggal tahun 1814), mendapat f.7200 ditambah 32 bau sawah, dan setelah kematian janda ini, pensiun diwariskan kepada puteranya. Pada tahun 1848, sultan menerima tambahan f. 3000 untuk biaya pemeliharaan Kompleks Makam Sunan Gunung Djati.<sup>62</sup>

Setelah komisaris jenderal bertugas kira-kira dua setengah tahun, yang dimulai dari tanggal 19 Agustus 1816 hingga pertengahan Januari 1819, jabatan komisaris jenderal dihapuskan. Selanjutnya pemerintahan Hindia Belanda

---

<sup>61</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 339.

<sup>62</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 46.

dipimpin oleh van der Capellen (1819-1830). Sejak pemerintahan komisararis jenderal itulah sesungguhnya masyarakat pribumi nusantara berada di bawah penjajahan Belanda dalam arti sesungguhnya.<sup>63</sup>

Gubernur Jenderal van der Capellen dan para gubernur jenderal para penggantinya mempertahankan sistem pemerintahan sentralistis yang dilakukan secara otokratis. Pada pemerintahan yang sentralistis itu, dijalankan pula asas dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan tugas-tugas pemerintahan kepada pejabat-pejabat Belanda yang lebih rendah tingkatannya secara hierarkis. Pejabat-pejabat itu ditempatkan di daerah-daerah dan menjalankan tugasnya terbatas pada lingkungan wilayah tertentu yang disebut daerah administrative atau pemerintahan lokal administratif. Oleh karena pemerintahan dijalankan oleh pangrehpraja, maka pemerintahan itu dikenal dengan sebutan pemerintahan Pangrehpraja.<sup>64</sup>

Meskipun pemerintah kolonial menerapkan sistem pemerintahan modern dan berusaha mengurangi kekuasaan bupati, pemerintahan tradisional tetap berlangsung tanpa mengalami perubahan sistem pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, bupati tetap dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional. Pejabat struktural terdiri atas *patih*, *wedana* (kepala distrik/*hoofddistrict*), asisten *wedana* (*hoofdonderdistrict*), dan *lurah* (kepala desa). Pejabat fungsional terdiri dari jaksa kepala (*hoofdjaksa*), penghulu kepala (*hoofpenghulu*), *kanduruan* (kepala/mantri besar paseban), *kunintir* kepala (*hoofdcommiteer*), *ondercollecteur* (pengumpul pajak), *demang*, *ngabehi*, *kaliwon*, *panglaku*, *lengser* (kabayan), sejumlah mantra dan lain-lain.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 339.

<sup>64</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 339-440.

<sup>65</sup> Frederick de Haan, *Priangan; De Preanger Regenschapens onder het Nederlandsch-Bestuur tot 1811*. I-IV. Batavia: BGKW, 1911, hlm. 702-703; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 440.

Pada tahun 1862 terjadi perubahan dalam pemerintahan tradisional akibat pemerintah kolonial memperkenalkan sistem *afdeeling* dalam pembagian wilayah kabupaten. Tiap kabupaten yang memiliki wilayah cukup luas rata-rata dibagi menjadi dua *afdeeling*. Secara politis perubahan itu dimaksudkan oleh pemerintah kolonial untuk mengurangi kekuasaan bupati, karena pemerintahan sehari-hari di wilayah *afdeeling* dilakukan oleh asisten residen (*hoofd van plaatselijke bestuur*) dengan didampingi oleh *patih afdeeling* yang disebut *zelfstandige patih*.

Pada akhir abad ke-19 wilayah Tatar Sunda dibagi dalam lima keresidenan. Tiap keresidenan terdiri atas sejumlah *afdeeling* dan kabupaten. Kelima keresidenan dimaksud sebagai berikut:

1. Keresidenan Batavia terdiri dari tiga *afdeeling*, yaitu Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, dan Buitenzorg (Bogor)
2. Keresidenan Kerawang terdiri atas tiga *afdeeling*, yaitu tanah-tanah negara, Pamanukan, Ciasem, dan Tegalwaru
3. Keresidenan Banten terdiri atas empat *afdeeling*, yaitu Anyer, Pandeglang, Caringin, dan Lebak
4. Keresidenan Priangan terdiri atas sembilan *afdeeling*, yaitu Bandung, Cicalengka, Cianjur, Sukabumi, Sumedang, Limbangan, Tasikmalaya, dan Sukapura Kolot
5. Keresidenan Cirebon terdiri atas empat *afdeeling*, yaitu Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Galuh.<sup>66</sup>

Selanjutnya perlu dikemukakan, secara khusus bahwa sesuai dengan pembagian pulau Jawa yang dilakukan oleh Daendels, pada awal abad ke-19 Cirebon merupakan salah satu

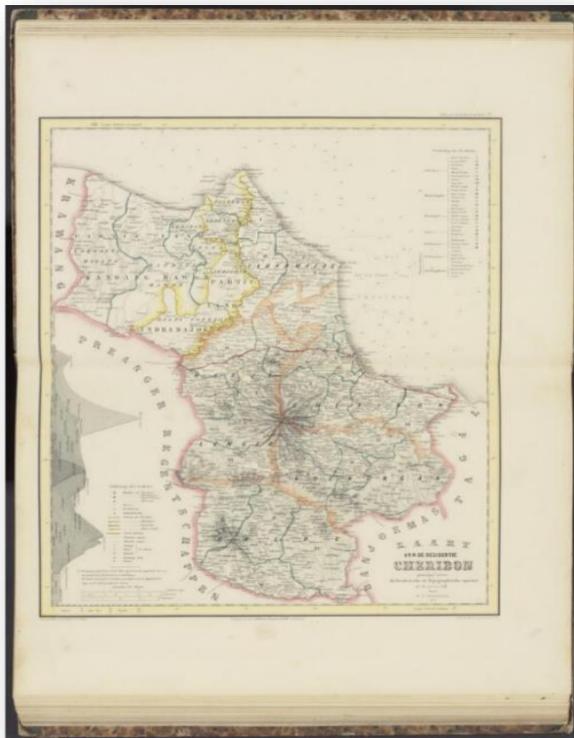
---

<sup>66</sup> *Regeeringsalmanak voor Nederlandsh-Indie*, 2: 1864; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 440.

*prefektur* di wilayah Tatar Sunda. Selanjutnya wilayah Cirebon beberapa kali mengalami reorganisasi pemerintahan.

Berdasarkan *Reglement of het beheer van Cheribonsche Landen* (peraturan tentang pemerintahan di wilayah Cirebon) tanggal 2 Februari 1809 ditetapkan bahwa secara politik para sultan di Cirebon (Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan) tidak memiliki kekuasaan lagi karena kedudukan mereka sudah berubah menjadi pegawai pemerintah kolonial.

*Gambar 2.1. Keresidenan Cirebon pada Tahun 1857*



*Sumber : Dokumentasi Kaart Van De Residentie Cheribon 1857*

Peraturan tersebut juga menetapkan pembagian wilayah Cirebon menjadi dua bagian. Bagian sebelah utara disebut wilayah Kesultanan Cirebon meliputi daerah Cirebon,

Kuningan, Indramayu, dan Gebang. Daerah itu diperintah tiga orang sultan, yaitu Sultan Kasepuhan, Sultan Kanoman, Sultan Krebonan, masing-masing menguasai empat distrik. Bagian selatan disebut Tanah Priangan-Cirebon (*Cheribonsche Preanger Landen*), meliputi daerah Limbangan, Sukapura, dan Galuh.

Pada tanggal 13 Maret 1809 Pemerintah Kolonial menerapkan bahwa wilayah kesultanan Cirebon dibagi atas tiga daerah, masing-masing dikepalai oleh seorang sultan. Ketiga daerah dimaksud adalah:

1. Daerah Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh Sultan Sepuh ke-7, Pangeran Tajul Arifin Jaenudin (selama 25 tahun)
2. Daerah Majalengka dikepalai oleh Sultan Anom ke-6, Pangeran Raja Mohammad Kamarudin I (selama 27 tahun)
3. Daerah Indramayu dikepalai oleh Sultan Kacirebonan (selama enam tahun).<sup>67</sup>

Kedudukan sultan sederajat dengan bupati, seperti halnya sultan Banten. Selanjutnya wilayah Kesultanan Cirebon terfragmentasi ke dalam 12 distrik. Ke-12 distrik yang dimaksud ialah Losari, Panjalu, Gebang, Talaga, Kuningan, Cikaso, Matang Aji, Rajagaluh, Sindang Kasih, Bengawan Wetan, dan Paparean, yang masing-masing dikepalai oleh pejabat-pejabat bergelar Tumenggung. Kemudian berdasarkan *Besluit* 2 Maret 1810, daerah Cirebon sebelah barat Cimanuk menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang.<sup>68</sup>

Seperti halnya wilayah Priangan, di bawah Pemerintahan Raffles, status administratif wilayah Cirebon menjadi keresidenan. Dalam hal ini, beberapa distrik yang semula berada di wilayah Kesultanan Cirebon berubah statusnya menjadi kabupaten. Pada tahun 1823, Keresidenan Cirebon terdiri atas

---

<sup>67</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 352-353.

<sup>68</sup> R.A. Kern, *loc. cit.*, hlm. 110-111; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 353.

lima kabupaten, yaitu Cirebon, Kuningan, Maja, Bengawan Wetan, dan Galuh. Kurang lebih tiga tahun kemudian Kabupaten Bengawan Wetan dihapuskan.

Begitu juga halnya dengan daerah- daerah lain, sejak diberlakukannya sistem *afdeeling*, Keresidenan Cirebon pun kemudian terbagi atas beberapa *afdeeling*. Tahun 1890-an Keresidenan Cirebon terdiri atas lima *afdeeling*, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Galuh.

Cirebon merupakan kota yang unik. Sejak awal berdirinya telah menduduki posisi yang sentral. Mula mula kota ini menjadi pusat kerajaan Cirebon. Pada Pemerintahanh Hindia-Belanda, Cirebon berkedudukan sebagai ibukota keresidenan yang meliputi kabupaten Indramayu, Kuningan Majalengka dan Cirebon. Selain itu Cirebon juga sebagai ibukota kabupaten sekaligus sebagai ibukota distrik. Bahkan pada tahun 1906 Cirebon dijadikan sebagai *gemeente*.

Demikian berbagai perubahan bentuk pemerintahan yang terjadi di wilayah Cirebon. Tentunya hal ini juga yang akhirnya mempengaruhi luas wilayah ataupun wilayah mana saja yang termasuk dalam Cirebon, baik itu sebagai kerajaan berdaulat, sebagai keresidenan, kabupaten ataupun kota. Penjelasan yang cukup terperinci yuang berhubungan dengan luas wilayahnya bisa diperoleh bersamaaan dengan digabungkannya beberapa wilayah administratif (kabupaten) ke dalam keresidenan Cirebon yang mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.<sup>69</sup>

### **C. Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat di Wilayah Keresidenan Cirebon**

Secara kultural penduduk yang mendiami keresidenan Cirebon banyak berasal dari berbagai etnis atau suku bangsa.

---

<sup>69</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 29.

Seperti diketahui bersama bahwa di wilayah keresiden Cirebon setidaknya terdapat dua etnis atau suku bangsa besar, yaitu etnis atau suku bangsa Jawa dan Sunda. Suku bangsa Jawa merupakan sebuah komunitas yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya. Umumnya mereka mendiami bagian pesisir utara, yaitu Cirebon dan Indramayu. Kehadiran mereka dan pengaruh kebudayaan Jawa di wilayah keresidenan memiliki keterkaitan dengan kegiatan politik ekspansi yang pernah dilakukan oleh Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung dari kerajaan Mataram beberapa abad sebelumnya. Sementara itu erat keterkaitannya dengan keberadaan penduduk yang beretnis Sunda sendiri di wilayah Keresidenan Cirebon, secara historis wilayah Cirebon jauh sebelumnya merupakan wilayah yang secara geografis merupakan bagian integral dari Kerajaan Sunda yang berpusat di Galuh ataupun di Pakuan Pajajaran. Dengan demikian secara etnosentris, wajar banyak orang-orang suku Sunda di di keresidenan Cirebon. Dalam perkembangan selanjutnya, penduduk yang beretnis Sunda banyak mendiami wilayah keresidenan Cirebon, terutama di bagian selatan, khususnya di kabupaten Majalengka dan Kuningan.

Selain kedua suku bangsa tersebut di atas, di keresidenan Cirebon berdiam pula berbagai etnis kelas migran yang notabene merupakan kelompok para pendatang seperti bangsa Eropa, Cina, dan Arab. Bangsa Eropa sendiri merupakan sebuah komunitas yang banyak mendiami daerah perkotaan. Hal yang tidak jauh berbeda tampaknya terjadi juga dengan keberadaan dari komunitas orang-orang Cina. Merekapun banyak yang mendiami daerah perkotaan. Pada akhirnya, oleh karena adanya pengaruh dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, lambat laun orang-orang Cina ini dapat menyebar ke seluruh kabupaten di wilayah di keresidenan Cirebon. Sementara itu, Keresidenan Cirebon sebagai dampak

dari perdagangan dan penyebaran Islam di daerah ini. Sekalipun mereka tidak terlalu dominan di bidang ekonomi, tetapi tetap memiliki peranan yang sangat penting di bidang perdagangan.<sup>70</sup>

Adapun secara sosiologis, menurut Ter Haart masyarakat tradisional di wilayah Keresidenan Cirebon secara umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan sebagai berikut: *Pertama*, adalah kelompok penduduk desa inti yang disebut *sikep, baku, gogol* atau pribumi. Kelompok penduduk desa inti ini umumnya banyak yang bermukim dengan menempati sebuah tempat sejak secara turun temurun, memiliki tanah, rumah, dan halaman, dan juga pekarangan sempit untuk tanaman kebutuhan dapur atau kebun buah-buahan. Mereka mempunyai kewajiban penuh sebagai warga desa terutama dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan komunal.<sup>71</sup>

*Kedua*, adalah kelompok penduduk yang disebut *indung*. Kelompok penduduk *indung* merupakan kelompok penduduk yang hanya memiliki sebidang tanah pertanian atau rumah halaman dan halaman, namun mereka tidak memiliki keduanya (hanya salah satu), serta mempunyai hak kewajiban komunal yang terbatas.<sup>72</sup>

*Ketiga*, adalah kelompok penduduk yang disebut dengan *wuwungan, nyusuf, tlosor* atau *bujang*. Mereka pada dasarnya merupakan kelompok penduduk yang tidak memiliki baik itu tanah pertanian maupun rumah dan halaman, namun bertempat tinggal di halaman orang lain, dan bekerja sebagai penyewa atau petani bagi hasil, atau bahkan mereka hidup menumpang dan bekerja untuk pemilik rumah di mana ia tinggal.<sup>73</sup>

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan di wilayah Keresidenan Cirebon kekuasaan tertinggi biasanya terletak pada

---

<sup>70</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hal. 320.

<sup>71</sup> Zamzami Amin, *Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919*, (Bandung: Humaniora, 2014, Edisi Revisi), hlm. 106-107.

<sup>72</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 106-107.

<sup>73</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 106-107.

peran *kuwu*. Tugas *kuwu* tersebut adalah mengatur kerja wajib secara bergiliran serta mengatur kehidupan sehari-hari di desa. Dalam melaksanakan roda pemerintahannya, seorang *kuwu* banyak dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan desa lainnya. Para pejabat desa tersebut di antaranya adalah *raksabumi* yang mempunyai tugas menjaga batas desa, *ngabehi* dan *ngtalambung* yang merupakan dua orang wakil *kuwu* dalam menjalankan roda pemerintahan desa sehari-hari. Selain itu terdapat pejabat desa yang bernama *cap gawe* yang tugasnya adalah mengatur hampir semua urusan desa yang paling pokok, seperti di antaranya mengurus urusan mengumpulkan masyarakat desa. Selanjutnya adalah *kabayan* ataupun *juru tulis* desa. Kemudian terdapat *lebe* yaitu semacam ulama desa. Secara sosiologis kedudukan seorang *kuwu* dan bawahannya dapat dipandang sebagai bagian dari *priyayi* yang merupakan penghubung antara pihak kerajaan dengan rakyat. Kaum elit kerajaan dan *priyayi* tersebut dibedakan statusnya dari rakyat biasa karena mereka dapat menikmati hasil tanah tanpa harus mengerjakan sendiri.<sup>74</sup>

Selain adanya penguasa lokal yaitu para elit *priyayi* desa, maka di Keresidenan Cirebon terdapat pula golongan yang “dikuasai” yaitu masyarakat desa tradisional yang terikat dalam suatu sistem yang dinamakan dengan “*cacah*”. *Cacah* merupakan sebuah penyebutan yang ditujukan terhadap sebuah golongan masyarakat yang memiliki ikatan hubungan ketergantungan antara keluarga petani pemilik dengan keluarga petani yang tidak memiliki tanah. Tanpa banyak mengadakan perubahan sistem dalam struktur tradisional, keberadaan sistem *cacah* banyak membantu dalam kegiatan pengerahan tenaga kerja yang tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 107.

<sup>75</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 107.

Di dalam sistem *cacah* terdapat perbedaaan kelas antar kaum petani yang didasarkan atas cara-cara petani tersebut menguasai tanah. Petani penguasa tanah disebut *sikep*, yang merupakan kelas petani penanggung beban atas tanah. Seorang *sikep* maksimal dapat menguasai sekitar 22 cacah yang tidak memiliki tanah.<sup>76</sup>

Selain *sikep* ada pula golongan *tangkong* yang merupakan penduduk desa pemilik rumah dan pekarangan namun tidak memiliki tanah *kasikepan*, dan mereka tidak memiliki kewajiban dalam melakukan kerja wajib yang menyangkut pertanian namun mereka mereka tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan kerja wajib yang berkaitan dengan kepentingan desa. *Tangkong* dapat disebut pula sebagai *sikep* nomor dua.<sup>77</sup>

Di Cirebon, *tangkong* merupakan calon utama pemegang hak atas tanah komunal apabila suatu ketika ada pembagian tanah tersebut. Linck menyebutkan bahwa setiap patok kecil yang mereka terima dalam tanah komunal merupakan panjar untuk patok komunal seutuhnya. *Sikep* memiliki lapisan sosial yang berada di bawahnya yaitu *wuwungan* atau yang disebut juga dengan *bujang*, apabila belum menikah. Biasanya mereka tinggal di dalam lingkungan keluarga *sikep*, dan segala kebutuhan hidupnya menjadi kewajiban *sikep*. Sebagai balasan atas perlindungan yang diperolehnya itu, biasanya kelompok *wuwungan* akan dimanfaatkan tenaganya oleh *sikep* untuk melakukan pengolahan tanah miliknya. Petani *wuwungan* tidak mempunyai kewajiban – kewajiban seperti pajak atau kerja wajib terhadap negara melainkan hanya bekerja untuk *sikepnya*. Terkadang *sikep* menggunakan mereka untuk melakukan kerja wajib bagi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terjadi karena semua kewajiban terhadap pemerintah kolonial Belanda seperti

---

<sup>76</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 107.

<sup>77</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 107.

pajak dan kerja wajib dibebankan kepada kaum tani penguasa tanah.<sup>78</sup>

Kelompok lapisan masyarakat *wuwungan* terbagi dua menjadi dua macam yaitu *pemaro* dan petani hamba. Perbedaan di antara keduanya terletak pada kemandirian. Petani *pemaro* mempunyai rumah sendiri walaupun biasanya berada di lingkungan petani pemilik tanah, sedangkan petani hamba tinggal di dalam rumah induk semangnya dan tetap bekerja sebagai orang suruhan.

Breman cenderung menyebut golongan pertama sebagai *wuwungan* dan yang kedua sebagai *bujang*. Namun seperti yang van den Bosch kemukakan, dapat ditarik sebuah kesan bahwa status petani bertanah dan tidak bertanah tersebut merupakan gambaran dari hubungan penghambaaan yang di masing-masing daerah mempunyai sebutan yang beragam. Selain itu ada juga kemungkinan sebutan-sebutan tersebut didasarkan atas status perkawinan mereka, di mana para anak-anak muda yang belum menikah (*bujang*) memulai pekerjaan mereka dengan menjadi hamba sebelum menjadi *wuwungan* (setelah menikah) pada keluarga (*sikep*) yang sama maupun yang lain.<sup>79</sup>

Pada awal pertumbuhan kekuasaan Eropa di Keresiden Cirebon, struktur sosial yang dikenal oleh masyarakat Cirebon tidak didasarkan pada etnis tertentu. Struktur sosial masyarakat Cirebon pada masa itu lebih di dasarkan kepada status sosialnya. Kendati demikian, seiring dengan semakin besarnya kekuasaan Eropa, struktur sosial pun bergeser sehingga menjadikan etnis sebagai salah satu kriteria untuk pelapisan sosial. Berdasarkan kriteria ini masyarakat di Keresiden Cirebon terbagi ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan bangsa Eropa, masyarakat Arab/Cina, dan golongan masyarakat pribumi.

---

<sup>78</sup>Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 107.

<sup>79</sup> Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 107.

Golongan pribumi yang menempati lapisan terbawah dalam masyarakat kolonial terbagi-bagi ke dalam beberapa golongan. Pada umumnya mereka terbagi ke dalam empat golongan, yaitu raja dan keluarganya, golongan elite, golongan non-elite, dan golongan budak. Raja dan keluarganya merupakan kelompok masyarakat yang menempati lapisan sosial tertinggi. Uniknyanya para raja yang memerintah di Cirebon memiliki keterkaitan leluhur kepada raja yang memerintah di Kerajaan Banten, sebagai keturunan Sunan Gunung Djati. Sedangkan di sisi lain Sunan Gunung Djati merupakan cucu Prabu Siliwangi dari garis keturunan ibu.

Sebagai kelompok masyarakat yang menempati lapisan sosial tertinggi, raja-raja yang memerintah di Keresidenan Cirebon tentunya memakai gelar yang sangat agung. Raja-raja yang memerintah di Cirebon pada awalnya memakai gelar susuhunan kemudiannya berubah menjadi panembahyan ratu dan akhirnya bergelar sultan. Gelar yang dipakai oleh kaum menak ini pun beragam karena gelar kebangsawanan yang dipakai biasanya disatukan dengan gelar kehormatan atau jabatan. Dengan perkataan, kaum menak pada dasarnya memakai gelar yang sama yaitu raden (untuk laki-laki) dan Nyiraden (untuk perempuan). Gelar ini kemudian diwariskan kepada anak cucunya, baik yang lahir dari istri *padmi* maupun dari selir.

Raja yang disebut susuhunan, sunan atau sultan adalah pemilik kekuasaan utama dan yang paling dihormati oleh semua kalangan. Anggota keluarganya disebut pangeran, isterinya disebut ratu, putera mahkotanya adalah pangeran adipati, dan perdana menteri bergelar raden adipati. Gubernur sebuah provinsi dipanggil oleh pemerintah Belanda dengan gelar *regent*, oleh penduduk dipanggil *bopatis*, *tumenggung*, atau *angabeis*, dan mereka merupakan penguasa suatu daerah. Para penguasa di daerahnya bergelar raden, mantris, demang, luras dan yang lainnya, kecuali untuk kepala desa yang bergelar *kuwu*, *bukus*,

pating'gis dan lain-lain yang dipilih sendiri oleh penduduk desa untuk mengerjakan kewajiban tertentuse macam *petite noblese*.<sup>80</sup>

Selain menyandang gelar kebangsawanan, kaum menak menyandang pula gelar kehormatan yang bergantung pada jabatan yang disandangnya. Gelar ini diberikan oleh penguasa di atasnya, dan dapat terus dipakai meskipun telah pensiun, dapat dicabut kembali dan tidak dapat diwariskan kepada anak cucunya. Gelar kehormatan itu adalah *tumenggung, aria, adipati, rangga, ngabehi* dan *demang*.

Masyarakat di Keresidenan Cirebon yang menempati lapisan menengah adalah mereka yang termasuk ke dalam golongan elite. Di Cirebon mereka lebih dikenal dengan sebutan priyayi yang ditujukan untuk menyebut kelompok pegawai pangreh praja yang harus memiliki kriteria tertentu, termasuk kebangsawanan. Termasuk ke dalam golongan elite ini adalah golongan bangsawan yang memegang jabatan di pemerintahan dan kaum agamawan. Kehidupan golongan elite yang jumlahnya terbatas serta menduduki status sosial yang tinggi itu berhubungan erat dengan status ekonomi yang tinggi pula, dibandingkan dengan golongan non-elite. Golongan elite membedakan dirinya dari lapisan atau golongan non-elite bukan karena kehidupan ekonominya saja, melainkan pula berkaitan dengan kehidupan sosial budayanya, Misalnya mereka mempunyai corak atau gaya berpakaian sendiri, cara berbahasa, gelar-gelar yang dimilikinya, rumah-rumahnya memiliki bentuk serta keadaan yang berbeda dengan golongan non-elite.<sup>81</sup>

Dalam pelapisan sosial, golongan non elite ini merupakan golongan masyarakat yang paling besar jumlahnya. Mereka terdiri dari golongan pedagang, golongan petani, golongan pekerja ahli atau tukang, golongan nelayan, pegawai pemerintahan eselon bawah, golongan agamawan yang melayani

---

<sup>80</sup>Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 48.

<sup>81</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 323.

orang-orang biasa, anggota tentara, dan golongan lainnya yang masuk dalam kriteria golongan ini. Golongan petani rupanya tidak banyak tinggal di dalam kota, melainkan di daerah pedalaman.

Golongan petani memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah keresidenan Cirebon. Seluruh kebutuhan bahan makanan, baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan perdagangan, dipasok oleh para petani. Golongan tukang memiliki peranan yang cukup penting juga. Mereka adalah masyarakat yang memiliki keahlian di bidang tertentu, baik untuk kepentingan militer maupun untuk kepentingan perlengkapan rumah tangga.<sup>82</sup>

Para petani biasanya tinggal pada sebuah pondok yang dinamakan *umah limasan*. *Umah limasan* biasanya dibangun di atas tanah. Dindingnya terbuat dari bambu yang dijalin menjadi satu, sekat juga dibuat dari bahan yang sama, atapnya terbuat dari rumput yang panjang, atau dari daun nipa atau sejenis bamboo sirap. Bentuk dan ukuran pondok ini berbeda menurut selera masing-masing orang. Ruangannya terbagi dua, yaitu satu untuk orang tua dan satu untuk anak-anak, tidak ada jendela di dalamnya. Cahaya hanya berasal dari pintu sehingga pekerjaan rumah tangga biasanya dikerjakan di luar rumah dimana terdapat sinar matahari. Para wanita biasa menjahit atau memintal di beranda rumah, di mana mereka terhalangi dari sinar matahari oleh bagian atap yang menjuntai ke depan. Di beberapa daerah pegunungan, di mana sering terjadi hujan lebat, penduduknya memperkokoh pondok mereka dengan memasang jalinan bambu di antara atap dan tiang-tiang rumah.<sup>83</sup>

Rumah yang ditempati penguasa kelas rendah dinamakan *umah che-bluk* atau *umah Joglo*. Rumah tersebut memiliki 8 atap,

---

<sup>82</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 324.

<sup>83</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 48

empat utama dan empat tambahan. Rumah yang paling besar, yang didiami residen atau penguasa, disebut *umah tumpang*, bentuknya hampir sama dengan rumah yang telah disebut sebelumnya, hanya berbeda dalam ukuran yang lebih besar, dan pembagian ruangan yang lebih beragam, ada 5-6 kamar. Tiang dan kerangka rumahnya dari kayu. Rumah semacam ini yang biasa didiami oleh seorang *patih* atau asisten gubernur propinsi. Terkadang ada rumah bertembok batu yang disebut *umah gedong*. Rumah semacam ini biasanya dimiliki orang Cina, yang lebih menyukai rumah dari batu bata apabila mampu. Dengan demikian, perkampungan Cina dapat dibedakan dari kampung pribumi.<sup>84</sup>

Proses awal pembentukan sebuah desa, biasanya diawali dari para penduduk yang berinisiasi dengan mempersiapkan daerah yang akan didiami, dan juga mempersiapkan kebutuhan keluarganya. Lahan yang diolahnya merupakan hak petani tersebut, dan luas lahan tergantung kontribusi atau beban yang harus ditanggung, seperti beberapa desa yang sangat luas. Para petani menanam sayur yang biasa dimakan dan juga beberapa pohon serta tanaman yang diharapkan buahnya. Jadi penduduk menanam tanaman yang benar-benar bermanfaat, tidak ada yang sia-sia ditanam. Pondok ini banyak mendapat sinar matahari dan biasanya ditutupi pepohonan dan rumput tinggi, sehingga dari kejauhan tidak tampak adanya hunian, namun tampak seperti hutan lebat. Tidak ada yang dapat menandingi keindahannya, kampung yang dihuni oleh petani-petani yang sejahtera, pemandangan alam yang indah, baik yang ada di sisi gunung maupun di dataran luas. Sebelum masa panen, di mana pengairan masih diperlukan, warna kehijauan di tengah ladang menyejukan setiap mata, dan apabila musim panen tiba, bumi akan dipenuhi kuning emas yang indah dari tanaman padi yang penuh berisi. Tidak ada satu taman pun

---

<sup>84</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 48.

yang berisi pepohonan yang teratur indah dapat menandingi keindahan alam pedesaan.<sup>85</sup>

Tiap desa mempunyai komunitasnya sendiri, yang terdiri dari para pamong desa, yang dianggap berkedudukan lebih tinggi dibanding penduduk biasa. Di beberapa desa besar, dibangun tempat ibadah sebagai pusat kegiatan beribadah. Di sini sangat terlihat bentuk sosial yang patriarkis, yang menandai masyarakat sipil yang beradab.

Sejak pertumbuhan penduduk meningkat, luas lahan yang dimiliki perseorangan berkurang. Tapi ketika ada lahan kosong di dekat desa itu, maka akan dibangun satu desa baru, yang pada awalnya masih bergantung dengan desa induknya. Kemudian desa baru ini akan berkembang menjadi desa induk bagi desa baru lain. Desa-desa baru ini disebut dengan *Dukuh*.<sup>86</sup>

Para pangeran bertempat tinggal di kadaton atau keraton. Untuk tempat tinggal *mangkubumi* atau bupati (gelar gubernur provinsi) dinamakan *dalam*, yang merupakan sebutan bagi satu ruangan aula besar yang ada di tempat itu, dan merupakan tempat, di mana penguasa sering berkumpul. Keraton atau tempat tinggal pangeran, bangunannya berbentuk kotak luas, dibatasi tembok tinggi dan biasanya terdapat saluran air atau selokan. Di tembok keraton biasanya tampak lubang pengintaian yang berisi sebuah meriam, di antara lubang-lubang tersebut dibatasi tembok kecil sehingga membentuk ruang-ruang kecil yang sengaja dibuat untuk tujuan khusus, yaitu untuk memenjarakan orang-orang yang tidak disukai pangeran atau raja. Tempat raja dinamakan *sitihinggil*. Pada acara tersebut para pangeran dan bangsawan duduk lebih rendah. Lebih masuk ke dalam keraton, setelah menaiki beberapa tangga, kita akan memasuki gerbang berikutnya yaitu *Brojonolo*. Setelah masuk ke ruangan itu kita memasuki pintu gerbang berikutnya yaitu *Kamandungan*. Kemudian kita akan sampai di gerbang

---

<sup>85</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 49.

<sup>86</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 49.

terakhir, yaitu gerbang *Srimanganti*. Di tengah alun-alun di depan *Sitihinggil* biasanya ada dua pohon *Waringin*. Tempat tinggal para petinggi dan bangsawan bentuknya hampir sama dengan istana dengan beberapa modifikasi. Alun-alun biasanya ditempatkan di depan bangunan. Bagian seperti keraton dinamakan *Lawang Seketing*, gerbang kedua disebut *Pasadong*, yang ketiga *Regol*, yang di dalamnya adalah *pendopo* atau *dalem*. Masjid terletak di seberang alun-alun.<sup>87</sup>

Selanjutnya dalam berpakaian penduduk di Keresidenan Cirebon, dibanyak wilayah terutama di bagiannya yang terletak di dataran Tinggi atau daerah pegunungan penduduknya banyak yang mempergunakan baju hangat. Bagi penduduk yang berada di dataran tinggi atau pegunungan kebanyakan bahan baku untuk keperluan pakaian berasal dari lahan dan kebun sendiri, tetapi ada beberapa daerah yang berasal dari kain impor. Kain biru dan *Chintz* diimpor dalam jumlah yang besar.<sup>88</sup>

Para penguasanya biasanya membutuhkan banyak kain kemeja, beludru dan kain jenis lain untuk membuat jaket, celana pantolan, dan pakain lain meniru gaya Eropa. Biasanya penduduk berpakaian rapi. Pakaian yang kotor merupakan sebuah aib, dan mereka berpakaian mewah ketika menghadapi upacara tertentu. Meskipun sebagian besar tergolong tradisional namun mereka sangat menyukai gaya orang Eropa. Hal ini dibuktikan ketika beberapa pegawai berkunjung ke provinsi pedalaman, mereka disambut para pejabat yang mengenakan topi berbulu dan *stoking* ala orang Eropa. Para wanita harus menyediakan pakain untuk suami mereka, dan peraturan ini berlaku, baik untuk perempuan yang menjadi istri penguasa, maupun isteri petani. Di setiap pondok ada alat pemintal dan alat jahit, dan tiap laki-laki akan membanggakan keindahan kain

---

<sup>87</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 50.

<sup>88</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 50.

yang dibuat oleh isteri, selir atau puteri mereka. Di kalangan masyarakat etnis orang Jawa, *sarong* kebanyakan menggunakan motif tartan, tetapi di kalangan bangsawan lebih menyukai batik Jawa atau kain yang dilukis. Pada acara resmi, mereka tidak menggunakan *sarong* atau *jarit* tetapi menggunakan pakaian yang disebut *dodot*, yang terbuat dari sutera atau katun, dan ukurannya lebih besar. Cara memakainya sama, tapi karena ukurannya lebih besar. Begitu juga dalam cara melilitkannya, lebih menyerupai balutan kain.<sup>89</sup>

Laki-laki dari kalangan bawah biasa menggunakan celana kain selutut, dengan *jarit* atau kain yang melilit pinggang dan menjuntai melewati lutut seperti gaun pendek. Kain ini selalu diikat pinggang dengan sabuk saat bekerja di sawah atau bepergian, tetapi biasanya dilepas saat bertemu orang-orang yang lebih kuasa. Para wanitanya juga menggunakan kain-kain yang sama dan dililit hingga mata kaki. Cara mengikatnya berbeda-beda dengan laki-laki dan tidak pernah diangkat ke atas seperti mereka. Pengikat kain dinamakan *udat*, sedangkan kain yang dililitkan mengelilingi tubuh menutupi dada sampai dekat lengan disebut *kemban*. Mereka juga seringkali memakai gaun longgar sepanjang lutut yang biasanya berwarna biru, dengan lengan panjang berkancing di pergelangan tangan. Jaket pendek seperti laki-laki yang dipakai juga disebut *kalambi*. Wanitanya tidak mengenakan kain di kepala, biasanya mereka menggulung rambut ke atas dan disebut *glung*. Mereka juga memakai sejenis logam atau tanduk kerbau atau kuningan sebagai anting-anting. Setiap laki-laki dan perempuan dari semua kalangan memakai cincin di jari mereka. Cincin pada laki-laki biasanya dari besi, tembaga, atau kuningan, sedangkan pada wanita hanya dari kuningan atau tembaga.<sup>90</sup>

Penguasa menggunakan kain jarit dengan Panjang 7-8 kubik dan lebarnya 3 kubik, di mana laki-laki mengenakannya

---

<sup>89</sup>Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 50.

<sup>90</sup>Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 54.

di sekeliling tubuh bawah mereka seperti mengenakan gaun, tetapi cukup longgar sehingga terkadang kakinya tampak saat berjalan. Bagian yang berada di depan lebih rendah dari bagian yang lain. Sabuk pengikat biasanya terbuat dari sutra dan berpola *chindi* atau *patole*. Ketika beristirahat di rumah, para pria biasanya mengenakan gaun katun longgar sepanjang lutut, tetapi saat bepergian atau menghadiri acara-acara umum, mereka biasanya mengenakan jaket pendek dari bahan tebal, sutra atau beludru yang dihiasi *payet* dan kancing-kancing logam. Cara berpakaian wanita kalangan atas tidak berbeda jauh dengan wanita petani, hanya berbeda dalam kualitas dan keindahan kain, serta hiasan dan cincin emas yang diasi batu permata berharga. Serta tidak menggunakan bahan tembaga atau kuningan. Semua orang mengenakan sandal di dalam rumah seperti yang dilakukan di distrik-distrik Eropa. Sementara para Mangkubumi dan penguasa lain ketika berkantor biasanya mengenakan pakaian tambahan berupa celana ketat atau pantolan ketat ditambah sepatu *boot* dan *tajoil* logam, seperti yang dikenakan orang-orang Eropa. Para ulama berpakaian putih dan memakai surban seperti orang Arab, sama seperti yang dikenakan kebanyakan penduduk di keresidenan Cirebon.<sup>91</sup>

Sejak Pemerintah Hindia-Belanda berkuasa menggantikan VOC, sekaligus sebagai pemegang kekuasaan di Nusantara, maka penjajahan yang sesungguhnya sudah mulai melakukan penetrasi bukan hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga secara perlahan-lahan mulai menanamkan pengaruhnya dalam bidang sosial budaya. Ikatan-ikatan tradisional yang telah terbina selama berabad-abad dicoba ditebas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan sosialpun tidak terelakan. Pengaruh budaya barat mulai terlihat dalam berbagai

---

<sup>91</sup> Thomas Stamford Raffles, *loc. cit.*, hlm. 54.

lini kehidupan masyarakat masyarakat, termasuk dalam gaya hidup, terutama di kalangan kaum *menak* (bangsawan).<sup>92</sup>

Sementara itu, kondisi kependudukan di beberapa kabupaten atau kesultanan yang semula homogen (hanya orang pribumi) berubah menjadi heterogen dengan keberadaan beberapa orang pejabat kolonial. Heterogenitas penduduk semakin bertambah dengan masuknya sejumlah kecil orang Cina ke pusat-pusat pemerintahan kabupaten. Hal ini terjadi karena pengaruh kolonial memberi kesempatan kepada orang-orang Cina menjadi agen dalam bidang perdagangan. Setelah jumlah orang Cina di kota kabupaten cukup banyak, mereka bermukim di daerah khusus yang disebut *Pecinan*. Sementara itu di ibukota Keresidenan, wilayah pemukiman orang Belanda benar-benar terpisah dari wilayah pemukiman pribumi.

Perlu diketahui bahwa sejak pemberlakuan Undang-undang Agrarian pada tahun 1870, di Keresidenan Cirebon tumbuh dan berkembang berbagai macam perkebunan milik swasta Eropa. Kondisi ini telah menyebabkan di kalangan masyarakat Eropa muncul kelompok baru, yaitu kelompok pengusaha perkebunan. Perkembangan perkebunan bukan hanya menyebabkan terjadinya perkembangan dalam bidang perekonomian, tetapi berpengaruh pula terhadap kehidupan sosial budaya di kalangan masyarakat bawah.

Kondisi ini jelas menjadi semakin nyata. Di antara para pengusaha perkebunan dengan orang-orang pribumi, khususnya mereka yang menjadi buruh/pegawai perkebunan, terjadi akulturasi kebudayaan. Para pengusaha perkebunan yang memerlukan tenaga kerja pribumi, beradaptasi dan menyerap sebagian unsur budaya masyarakat pribumi. Sebaliknya, orang pribumi pun menyerap sebagian unsur budaya barat. Dalam hal ini terjadi pula hubungan khusus antara kedua belah pihak. Di antara pengusaha perkebunan ada yang memiliki *gundik* wanita

---

<sup>92</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 437.

pribumi, yang dikenal dengan sebutan nyai-nyai. Dari hubungan itu lahirlah golongan Eropa baru yang disebut Indo-Eropa. Di kalangan masyarakat pribumi, keturunan campuran Belanda/Eropa dan pribumi itu biasa disebut *turunan Walanda kontrak*. Mereka berbicara dalam bahasa campuran, yaitu bahasa Belanda campur Melayu dan bahasa daerah (Sunda ataupun Jawa). Demikian pula, orang pribumi pegawai perkebunan pun sering meniru berbahasa Belanda dengan logat bahasa daerah.<sup>93</sup>

Pada abad ke-19 gaya hidup orang-orang Eropa pengusaha perkebunan di wilayah keresidenan Cirebon telah melahirkan budaya baru yang disebut “budaya Indis” atau “Mestiezcultuur”. Budaya itu terutama berkembang di kota-kota keresidenan. Di kota-kota pusat pemerintahan keresidenan, para pengusaha perkebunan banyak membangun sarana untuk kehidupan mereka, antara lain tempat hiburan dan pertemuan serta vila cukup mewah. Sementara itu, akulturasi budaya terjadi pula antara budaya pribumi dengan budaya Cina. Hal ini tampak sekali antara lain dalam hal jenis-jenis makanan. Orang pribumi mulai mengenal dan menyerap pengetahuan tentang membuat makanan Cina, seperti bacang, bapau, bakmi, sekoteng, tauco dan lain-lain. Tidak hanya itu, bahkan terjadi pula perkawinan campuran antara laki-laki Cina dan wanita pribumi

Hal lain yang turut mewarnai kehidupan sosial budaya masyarakat di keresidenan Cirebon pada abad ke-19 adalah dalam kehidupan kesenian yang telah menunjukkan adanya pengaruh luar. Kesenian istana yang sering disebut sebagai bagian dari tradisi besar dapat dilacak melalui sumber-sumber, baik berupa naskah yang tergolong historiografi tradisional maupun peninggalan berupa benda. Pada abad ke-19 jenis kesenian ini dianggap sebagai kesenian bermutu tinggi dan

---

<sup>93</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 441.

indah yang berorientasi kepada konsep nilai “halus” dan “kasar”.

Di antara seni istana ini yang patut dikemukakan di sini adalah seni sastra. Sampai dengan pertengahan abad ke-19, karya sastra dan karya sastra sejarah, di wilayah keresidenan Cirebon banyak ditulis karya sastra dan sastra sejarah dalam bahasa Jawa, dan hurup Sunda-Jawa. Beberapa judul karya sastra sejarah yang ditulis pada abad ke-19 adalah *Babad Cirebon*, *Babad Dermayu* dan lain-lain. Di samping seni sastra, jenis kesenian lain yang hidup pada abad ke-19 adalah seni musik. Mendengarkan gamelan adalah salah satu *kalanganan* (kesenangan) para kaum menak. Tentu saja, gamelan hanya bisa dimiliki kaum bangsawan, yang biasanya digelar di pendopo kabupaten atau miniatur pendopo milik wedana atau pejabat bawahan bupati lainnya. Bahkan ada bupati yang memiliki lagu khusus pula.

Di antara seni tari di wilayah keresidenan Cirebon yang juga menjadi milik kaum menak, adalah *tayuban*. Seni pertunjukkan tari yang berasal dari tradisi Jawa ini adalah semacam tari pergaulan yang disebut *ibing tayub*. Dalam seni tari ini, ronggeng menari sambal ngawih (menyanyi). Jenis tarian ini lama kelamaan menyebar ke kalangan rakyat biasa menjadi *ibing keurseus*.<sup>94</sup>

Seni suara yang berkembang di wilayah keresidenan Cirebon sebagai pengaruh budaya Jawa adalah seni tembang. Seni tembang merupakan nyanyian berbentuk pupuh yang sangat digemari oleh kaum bangsawan. Di wilayah Keresidenan Cirebon dikenal terdapat 17 jenis pupuh, seperti *asmarandana*, *kinanti*, *sinom*, *magatru*, *mijil*, *pangkur* dan *dangdanggula*. Selanjutnya wayang golek, kesenian wayang diperkirakan sudah masuk ke wilayah Keresidenan Cirebon pada abad ke-18 dan ke-19. Sultan-sultan Cirebon adalah orang-orang yang

---

<sup>94</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 447.

banyak berperan di dalam mengembangkan seni wayang golek. Selain wayang golek, di wilayah Keresidenan Cirebon dikenal juga kesenian *wayang wong*, wayang kulit, dan berbagai tarian lainnya. Dari uraian tersebut, patut dikemukakan bahwa kehidupan seni dan budaya di wilayah keresidenan Cirebon, bagaimanapun telah menunjukkan eksistensinya dan terus berkembang dengan pesat pada masanya, sekalipun tidak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya Jawa. Seperti itulah gambaran kehidupan sosial-budaya dari masyarakat yang berada di keresidenan Cirebon pada abad ke-19, baik itu yang berada di daerah Cirebonnya sendiri maupun yang berada dan berkembang di daerah-daerah yang berada di sekitarnya seperti Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, bahkan Subang dan Krawang.

#### **D. Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Keresidenan Cirebon**

##### **1. Masa Penguasaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)**

Pengakuan Cirebon sebagai kota pelabuhan berdampak pada citra Cirebon di dunia luar. Pada awal abad ke-16, perdagangan di Cirebon sudah marak dan memiliki hubungan erat dengan Mataram. Mengutip pernyataan Tome Pires, ia menyebutkan, bahwa nama syahbandar di daerah Upin Malaka bernama Pate Kadir berasal dari Cirebon. Ia sangat menonjol dan memiliki hubungan baik dengan raja<sup>95</sup> di wilayah itu. Pengakuan lainnya, setelah berhasil menaklukkan kesultanan Cirebon pada abad ke-17, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) terus berupaya mengembangkan administrasi politiknya di daerah Cirebon. Hal tersebut seiring dengan kegiatan ekonomi

---

<sup>95</sup>Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imporium Jilid I, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 38.

perkebunan dan barang-barang ekspor lainnya di pedalaman Cirebon. Birokrasi pemerintahan diperluas, sehingga jumlah pekerja dan pejabat Kompeni di kota Cirebon bertambah.<sup>96</sup> Pada perjalanannya, perkembangan perdagangan yang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian masyarakat Cirebon mengalami tekanan. Hal itu tidak terlepas dari tindakan Kompeni terhadap yang melakukan monopoli perdagangan. Pada saat itu, pihak Kompeni secara sepihak melakukan monopoli atas berbagai komoditas barang.

Kekuasaan VOC di Cirebon secara resmi mulai berlaku setelah dilakukan perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Sepuh I tertanggal 7 Januari 1681. Kekuasaan VOC sendiri pada saat itu berada di tangan *De Heeren Zeventien* (tujuh belas pemegang saham). Melalui perjanjian dengan Sultan Cirebon, pihak Kompeni memperoleh monopoli atas ekspor beras, lada, kayu, gula dan produk lain yang diinginkan. Mereka pun bebas dari pajak ekspor-impor di wilayah itu.

Dengan ditandatanganinya perjanjian antara pihak Kompeni dan penguasa Cirebon, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* kemudian menjadi pemegang dua jenis saham di wilayah Cirebon. Kedua jenis saham tersebut dibedakan berdasarkan fungsinya. *Pertama*, ada yang berperan sebagai *partner* yang tidak ikut serta dalam pengelolaan (peserta). *Kedua*, ada juga yang berperan sebagai *partner eksekutif* (investor). Ketentuan ini menunjukkan keunikannya, yaitu VOC memberikan tanggung jawab kepada seluruh pemegang saham. Tidak hanya untuk peserta, tetapi juga untuk *bewindhebbers* (direksi) yang dibatasi oleh modal yang disetor. Pada umumnya seorang direksi memiliki kewajiban yang tidak terbatas.

Golongan sosial penduduk asli di wilayah Cirebon pada masa VOC tetap sama seperti sebelum kekuasaan VOC. Mereka terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu: *pertama*, golongan

---

<sup>96</sup>Abdul Wahid, *Bertahan Di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon Pada Masa Depresi Ekonomi, 1930- 1940*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 35.

bangsawan tinggi. Orang-orang yang termasuk golongan ini adalah sultan dan keluarganya. *Kedua*, golongan bangsawan menengah. Orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini adalah para pejabat bawahan sultan, ulama, dan saudagar. *Ketiga*, golongan rakyat (masyarakat umum).<sup>97</sup>

Pengakuan selanjutnya, bahwa penduduk Cirebon tidak hanya dihuni oleh orang Cirebon. Dijumpai informasi, ada juga orang-orang asing yang telah mendiami Cirebon sebagai tempat tinggal mereka. Di antara mereka, sebut saja misalnya, orang-orang Arab dan Tionghoa. Sekitar tahun 1700, sudah ada rumah yang terbuat dari bambu milik orang-orang Arab dan Tionghoa. Sementara bangunan istana dan rumah Belanda sudah berbahan batu dan kayu. Dijumpai informasi pula, pada tahun 1793, di kota Cirebon sudah ada tujuh rumah Eropa.<sup>98</sup>

Kehadiran orang asing di Cirebon (Arab, Cina, dan Eropa) tidak mempengaruhi interaksi sosial di antara mereka. Hubungan sosial antara masyarakat Cirebon dengan Kompeni bahkan tetap terjalin. Kegiatan yang dilakukan, sebut saja misalnya, ketika masyarakat Cirebon diminta Kompeni untuk bekerja demi kepentingan Kompeni. Masyarakat pribumi, misalnya saat itu diwajibkan menanam tarum (nila)<sup>99</sup> dan kopi. Pihak Kompeni juga mewajibkan penguasa pribumi untuk mengerahkan tenaga kerja paksa (*rodi*) demi kepentingan mereka. Para tenaga kerja pribumi, misalnya, diminta untuk memperbaiki jalan, membangun *loji* (benteng), dan sebagainya.

Komunikasi dan hubungan rakyat dengan Sultan serta pejabat tinggi kesultanan juga tetap terjalin dengan baik. Dalam pemerintahan seperti kesultanan, komunikasi dan hubungan

---

<sup>97</sup>A Sobana Hardjasaputra, *Cirebon Dalam Lima Zaman: Abad Ke-15 hingga Pertengahan Abad Ke-20*, (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 109.

<sup>98</sup>A Sobana Hardjasaputra, *ibid.*, hlm. 122.

<sup>99</sup>Disebutkan, daerah Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-18 mampu menghasilkan 6.000-8.000 pon nila. Lihat, Nina H. Lubis dkk., *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid II. Bandung: Satya Historika, 2003, hlm. 303.

rakyat dengan penguasa diikat oleh ikatan *feodal-tradisional* yang telah mendarah daging. Dalam tata pamong pemerintahan kesultanan juga dijalin hubungan *kawula-gusti*. Kepemimpinan Sultan pun cenderung bercorak kepemimpinan tunggal, yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat terutama spiritual dan politik. Namun demikian, seiring masuknya birokrasi Kompeni, posisi para Sultan Cirebon mulai menurun dan lemah. Tidak jarang mereka (para Sultan) menjadi objek yang berada dalam tekanan pengaruh kekuasaan dan pengawasan Kompeni. Situasi dan kondisi demikian, terutama dirasakan mulai tahun 1752. Pada saat itu, VOC mengeluarkan peraturan untuk pergantian Sultan. Akibatnya, secara politis legitimasi kekuasaan Sultan menjadi terbatas dan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam mengatur masyarakat Cirebon.

Sebaliknya, pemerintahan VOC di Cirebon sangat berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan di masyarakat. Akibat *intervensi* VOC di Cirebon telah terjadi banyak perubahan. Kehidupan ekonomi perdagangan yang menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat Cirebon menjadi terpuruk. Kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah VOC pada berbagai barang komoditi menjadikan masyarakat kurang, bahkan tidak menikmati hasil usaha mereka.

Pada perkembangan selanjutnya, untuk memperkuat kuasa monopoli Kompeni, mereka membangun benteng perlindungan yang terletak di dekat pelabuhan Cirebon. Benteng itu kemudian dikenal *Fort van Beschermingh* atau benteng *Beschermingh*. Benteng ini untuk selanjutnya ditinggali oleh para residen Belanda. Selain sebagai pejabat, para residen juga merupakan pengusaha. Dalam waktu singkat, lokasi di sekitar benteng *Beschermingh* kemudian berkembang menjadi sentral bisnis baru. Dengan adanya sentral bisnis baru benteng *Beschermingh* menjadikan Cirebon lebih maju dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini memunculkan fenomena baru yang diterima Cirebon sebagai daerah bisnis di sekitar pelabuhan dengan pusatnya di benteng VOC.

Dengan berdirinya pusat bisnis baru di sekitar pelabuhan Cirebon, menjadikan kota Cirebon lama yang berpusat di keraton semakin jauh dari aktivitas ekonomi. Berkembangnya pusat bisnis di sekitar pelabuhan Cirebon mengakibatkan pendapatan ekonomi masyarakat meningkat. Di lokasi bisnis baru, masyarakat Cirebon dapat mengembangkan perekonomiannya dengan cara berinvestasi maupun berdagang.<sup>100</sup> Pada perkembangannya pula, kota Cirebon selain sebagai kota pelabuhan, juga dikenal sebagai kota penghasil gula dan beras. Dilihat dari letak geografisnya, tanah di Cirebon memiliki tingkat kesuburan yang tinggi untuk ditanami tebu dan padi.<sup>101</sup> Suatu yang tidak begitu mengejutkan, pada abad ke-17, Cirebon kemudian dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi di Pulau Jawa, selain Banten dan Rembang.

Namun demikian, meskipun Cirebon termasuk salah satu sentra penghasil beras di Jawa, komoditas ini (beras) termasuk salah satu komoditas yang dimonopoli Kompeni. Monopoli beras, jelas sangat merugikan rakyat Cirebon.<sup>102</sup> Tidak jarang perilaku kesewenang-wenangan Kompeni dalam mengeksploitasi beras dengan sangat kejam. Kaum tani dituntut untuk terus menghasilkan produk pertanian dengan baik. Sementara tanah-tanah mereka mulai dikuasai para pemilik modal. Tuntutan tersebut berkaitan dengan produksi kaum tani melalui penguasaan atas penggunaan tanah dari pemerintahan Kompeni. Kekejaman Kompeni begitu tampak pada lahan-lahan yang dijadikan tempat produksi padi yang dikenakan pajak. Desa-desa secara keseluruhan disewakan terhadap orang-orang Tionghoa yang memungut pajak, menjual candu, dan menguasai tenaga kerja. Pemerintahan VOC bertahan sampai akhir abad ke-18 dan

---

<sup>100</sup>Nina H. Lubis dkk., *ibid.*, hlm. 303.

<sup>101</sup>Taufik dan Huddy Husin, "Perubahan Sosial Cirebon 1918-1925", *Jurnal Studi Sosial*, (Th. 6. No. 1, Mei 2014, 31-36), hlm. 31.

<sup>102</sup>Eva Nur Arovah, "Cirebon 1681-1945: Dinamika Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya". *Disertasi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2018), hlm. 208.

secara resmi bubar pada tahun 1799. Masa pemerintahannya kemudian digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

*Tabel 2.1. Jumlah Produksi Komoditas Perdagangan Daerah Cirebon pada Akhir Abad ke-18<sup>103</sup>*

No.	Jenis Komoditas Perdagangan	Kapasitas Produksi	Satuan
1.	Kopi	14.000 – 18.000	Pikul
2.	Gula	500.000	Pon
3.	Benang (kapas)	20.000	Pon
4.	Nila	6.000 – 8.000	Pon
5.	Kayu Dolok	80.000	-
6.	Kayu Bahan Tong Mesiu	40.000	-
7.	Kayu Balok	2.000	-

## 2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintahan Hindia Belanda yang semula disebut *Bataafsche Republiek* (Republik Batavia), mulai tahun 1806 diubah menjadi *Koninkrij Holland* (Kerajaan Belanda). Untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda, mulai tanggal 18 Januari 1807, Lodewijk Napoleon sebagai Raja Kerajaan Belanda mengangkat Marsekal Herman Willem Daendels menjadi gubernur Jenderal untuk memerintah di Hindia Belanda. Pengangkatan itu terjadi setelah ± 12 tahun penghapusan direksi VOC, tahun 1796.<sup>104</sup>

Tidak lama setelah Daendels berkuasa, ia menolak keras rencana penjualan hasil bumi dari Hindia Belanda untuk dipasarkan di Nederland. Penolakan itu dituangkan dalam

---

<sup>103</sup>D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnjaparamita, 1962, hlm. 99. Lihat pula, Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 304.

<sup>104</sup>Sulaeman Anggapraja, *Sejarah Perkembangan Wilayah Pemerintahan di Jawa Barat (Sejak Abad ke XVII)*, Garut: TP., 1982, hlm. 69.

suratnya tertanggal 25 April 1808.<sup>105</sup> Daendels pun kemudian menerbitkan beberapa kebijakan mengenai perubahan-perubahan penting pada daerah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Priangan. Masih pada tahun 1808, ia membagi tanah Pulau Jawa, sebagai berikut: *Pertama*, Kota Batavia dan daerah sekitarnya, meliputi Kabupaten Jakarta dan Priangan: Tangerang, Karawang, Buitenzorg (Bogor), Cianjur, Sumedang, Bandung, dan Parakanmuncang dengan jumlah taksiran penduduk 200.000 jiwa. *Kedua*, Kerajaan Cirebon dan tiga Kabupaten Priangan (Limangan, Sukapura, dan Galuh) dengan jumlah taksiran penduduk 350.000 jiwa. *Ketiga*, Pesisir Timur dan Ujung Barat dihitung berdasar taksiran sejumlah 1.600.000 jiwa.<sup>106</sup>

Daendels, dalam menjalankan pemerintahannya bersifat sentralistis. Ia memerintah di Hindia Belanda secara langsung tanpa perantara bupati atau sultan. Berdasarkan *besluit* (keputusan) tanggal 18 Agustus 1808, para bupati atau sultan diangkat sebagai *ambtenaar* (pegawai tinggi) oleh Raja Belanda dan mendapat gaji. *Adipati* setingkat dengan pangkat militer *Letnan Kolonel*, *Tumenggung* setingkat *Mayor*, dan *Ingabehi* setingkat *Kapten*. Namun demikian, mereka tetap berkuasa di daerahnya masing-masing. Daendels mensejajarkan kedudukan bupati dan sultan yang dalam surat resmi harus menggunakan cap negara.<sup>107</sup>

Hal lain, dalam *reglemen* (aturan) sementara diatur pula tentang pemerintahan di Priangan Cirebon --termasuk Sukapura, Limangan, dan Galuh-- diputuskan berdasarkan *besluit* tertanggal 31 Maret 1809. Isinya, para bupati di wilayah-wilayah tersebut tidak serta merta menjadi *ambtenaar Gubernemen* (pegawai resmi Gubernemen). Disebutkan, "Para Bupati Daerah Priangan Cirebon mendapatkan penghasilan, termasuk

---

<sup>105</sup>Sulaeman Anggapraja, *ibid.*, hlm. 69

<sup>106</sup>Sulaeman Anggapraja, *ibid.*, hlm. 69

<sup>107</sup>Sulaeman Anggapraja, *ibid.*, hlm. 69

Limbangan dan Sukapura masing-masing 4.000 ringgit/tahun. Sedangkan Bupati Galuh memperoleh gaji sebesar 3.000 ringgit/tahun".<sup>108</sup> Namun demikian, *besluit* tertanggal 31 Maret 1809 tidak berjalan lama seiring terbitnya *besluit* tertanggal 20 Juni 1810. Dalam *besluit* yang disebut terakhir, disebutkan sebagai berikut:<sup>109</sup>

Yang Mulia memperhatikan, bahwa dari tiga kabupaten: Limbangan, Sukapura, dan Galuh dimasukkan ke dalam Landrost Ambt (Kantor Kewalian) Priangan Cirebon. Kedua kabupaten tersebut, pertama (Limbangan dan Sukapura) keadaannya bersatu dengan Kabupaten Jakarta dan Priangan Ulu, sehingga batas-batas sekarang tidak dapat dipertahankan. Penyatuan daerah ini tidak merugikan orang-orang pribumi dan *kultir*, mengingat mereka mempunyai peramaan hak mengenai wajib setor kopi, ini merupakan satu-satunya hasil negara yang dapat dipungut dari daerah tersebut. Sedangkan daerah Galuh, di samping letaknya yang jauh juga tidak menghasilkan kopi, maka daerah itu dianggap tidak begitu penting. Maka memutuskan, daerah Jakarta Priangan dan priangan Cirebon untuk disatukan dan diberi nama Priangan Jakarta dan Cirebon.

Mencermati *besluit* di atas, kuat dugaan, Daendels berusaha menghapuskan sebanyak-banyaknya kabupaten. Alasannya sudah dapat ditebak, karena sejumlah kabupaten kecil hanya akan menjadi beban orang Jawa pada umumnya. Untuk diketahui, pada saat itu untuk membiayai bupati dan keluarganya, pemerintah Hindia Belanda harus mengeluarkan uang sejumlah 30.000 ringgit/tahun. Itulah yang kemudian terjadi penghapusan atas beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Kendal, Lasem, dan Rembang.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup>Otto van Rees, *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen*, Batavia: BGKW, hlm. 94.

<sup>109</sup>Otto van Rees, *ibid.*, hlm. 89.

<sup>110</sup>Sulaeman Anggapraja, *ibid.*, hlm. 72-73.

Dalam aktivitas perekonomian, pada masa Daendels untuk wilayah Priangan Jakarta dan Cirebon membawa cerita tersendiri. Sistem ekonomi yang ditopang oleh sektor pertanian tradisional dan perkebunan modern yang berorientasi ekspor berjalan cukup baik di wilayah ini. Pertanian tradisional yang dikembangkan oleh penduduk bersifat sub-sistem untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Sementara pada perkebunan modern dikembangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari hasil pertanian tersebut. Sebagian masyarakat pribumi di wilayah Priangan Jakarta dan Cirebon hidup dari sektor pertanian. Mereka hidup di desa-desa dengan mengandalkan perkebunan untuk menghidupi ekonominya. Di wilayah ini, pertanian bukan hanya satu-satunya sumber ekonomi masyarakat. Mereka juga mengembangkan sector lainnya, seperti bidang pelayanan, jasa, dan pekerjaan non-pertanian, termasuk perdagangan.<sup>111</sup> Pada masa ini etnis Tiongkok menempati posisi yang paling banyak penduduknya di wilayah Priangan Cirebon.

Perubahan yang terjadi sebagai pengaruh dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Priangan Cirebon adalah mulai dikenalkan dan diwajibkan menanam tanaman komoditi perdagangan internasional, seperti: tebu, kopi, tembakau, dan sejenisnya untuk kepentingan ekonomi pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun jenis tanaman ini telah dikenal sebelumnya sejak masa kerajaan, masuknya pemerintahan Hindia Belanda ke dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Priangan Cirebon, terlihat dalam pengenalan tanaman baru kepada masyarakat. Pada prosesnya tidak hanya sekedar mengenalkan tanaman dengan jenis baru, akan tetapi sekaligus memberikan dampak pada pola pertanian penduduk. Tanaman baru tersebut dibudidayakan dalam jumlah

---

<sup>111</sup>Jayanto, "Industri Gula di Karesidenan Cirebon Tahun 1860-1930 dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Skripsi*, (Yogyakarta: FIS UNY, 2015), hlm. 9.

besar dan area tanah yang luas. Setelah memperoleh hasil melalui kegiatan panen, kemudian dijual dan diekspor ke pasar internasional.

Suatu yang perlu dicatat, dijumpai sejumlah usaha Daendels yang sampai saat ini terasa manfaatnya. Sebut saja misalnya, usaha-usahnya atas hukum pos, kayu hutan, dan pembuatan jalan besar melalui pulau Jawa.<sup>112</sup> Terkait hukum dan pengaruhnya atau persoalan susunan Bupati, Herman Warner Muntinghe menulis dalam advisnya tertanggal 5 Desember 1821, sebagai berikut:<sup>113</sup>

Marsekal dan Gubernur Jenderal Daendels mematahkan pemerintahan Komisariss atas orang-orang pribumi dan membagi-bagi daerahnya dengan cara mendirikan suatu Landrost-Ambt untuk daerah Batavia dan sekelilingnya, dan membuat daerah Kabupaten-kabupaten Priangan suatu Kresidenan yang terpisah dan juga memecah daerah merdeka dari para bupati.

### 3. Cirebon di bawah Kekuasaan Inggris (1811-1816)

Tahun 1811 secara resmi pemerintah Inggris menggantikan kekuasaan pemerintah Belanda atas wilayah Jawa. Masa pemerintahan *interregnum* (penyelang) Inggris hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun, yaitu 18011 – 1816.<sup>114</sup> Namun, dalam kurun waktu itu telah disusun fondasi kebijakan ekonomi yang sangat memengaruhi sifat dan arah kebijakan ekonomi pemerintahan sebelumnya, Hindia Belanda.<sup>115</sup> Dasar-dasar pemerintahan Inggris diletakkan oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal yang memimpin penguasaan atas Pulau Jawa setelah masa Daendels berakhir. Gaya kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh

---

<sup>112</sup>Sulaeman Anggapraja, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>113</sup>Sulaeman Anggapraja, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>114</sup>N Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 337-338.

<sup>115</sup>Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 89.

pengalamannya saat memimpin India.<sup>116</sup> Dalam usaha kepemimpinannya di Jawa, khususnya di wilayah Cirebon, Raffles berpedoman kepada tiga azas, sebagai berikut:<sup>117</sup> *Pertama*, segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apa pun. *Kedua*, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan Kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri-negeri Barat. *Ketiga*, Pemerintah Kolonial adalah pemilik tanah, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (*tenant*) tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Hingga di sini, dapat dipahami, bahwa di bawah kepemimpinannya, Raffles berhasil memberlakukan sistem sewa tanah.<sup>118</sup>

Pada awal pemerintahannya, Raffles tampak mengikuti kebijakan Daendels. Namun pada perkembangannya, ia mengubah sebutan *prefectur/landdrostambt* menjadi *residency*.<sup>119</sup> Ia juga memperkenalkan jabatan baru dalam pemerintahan kolonial, yaitu *asisten* residen dan jabatan *wedana* yang mengepalai distrik. Raffles memberikan tanah persawahan bebas pajak kepada Sultan, dan memberikan subsidi uang gaji. Penghasilan tunai ini diperlukan untuk mencegah para Sultan melakukan pungutan dari rakyat atau untuk hidup dari upeti rakyat yang diberikan kepada Sultan. Meskipun sistem sewa tanah selalu menjadi ciri khas dari pemerintahan Inggris, namun sistem ini gagal diterapkan di Cirebon. Raffles pun dipandang

---

<sup>116</sup>Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *ibid.*, hlm. 89.

<sup>117</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 338.

<sup>118</sup>Sulaeman Anggapraja, *loc. cit.*, hlm. 39.

<sup>119</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc.cit.*, 338

gagal melaksanakan sistem pemerintahan langsung. Kegagalan itu, kuat dugaan, disebabkan oleh kuatnya ikatan feodal antara para penguasa Cirebon dengan rakyat.<sup>120</sup> Pada masa pemerintahan Raffles, ketika keadaan Cirebon berada dalam kondisi penuh heroik, pemerintah Inggris ikut menghalau dan berhasil menundukkan pemberontakan.

## **E. Kehidupan Keagamaan Masyarakat di Wilayah Keresidenan Cirebon**

Jejak dan warisan agama-agama di wilayah Cirebon sebelum kedatangan Islam masih dapat dijumpai hingga hari ini. Arofah menyebutkan,<sup>121</sup> terdapat beberapa tinggalan arkeologis dan tulisan kuna yang menyebutkan, bahwa sebelum agama Islam dipeluk oleh mayoritas penduduk Cirebon, keyakinan Hindu-Budha (Çiva-Budha) menjadi agama penting di wilayah ini. Arovah menyebutkan lebih lanjut, wilayah Cirebon sebagai bagian dari Kerajaan Sunda Padjadjaran yang menganut agama resmi Hindu-Budha, menjadikan wilayah Cirebon tidak luput dari area penyebaran agama tersebut.<sup>122</sup> Negeri-negeri seperti Surantaka, Singapura (Singamerta), Japura, Wanagiri, Rajagaluh, dan Talaga selalu dikaitkan dengan daerah yang mayoritas penduduknya bergama Çiva-Budha.<sup>123</sup>

Hal yang sama ketika orang-orang Tiongkok datang ke wilayah Cirebon, mereka juga membawa tradisi leluhur mereka, yaitu agama Budha, Tao, dan Konghucu. Menurut beberapa catatan, kedatangan orang-orang Tiongkok ke wilayah Cirebon berlangsung dalam dua gelombang. *Pertama*, mereka terdiri dari para saudagar. Sambil menunggu untuk berlayar mereka singgah dan mendirikan pemukiman kecil di sekitar pelabuhan Cirebon. Dimulai dari pemukiman kecil itu mereka mempraktikkan tradisi

---

<sup>120</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc.cit.*, 338

<sup>121</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 332.

<sup>122</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 332.

<sup>123</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 332

dan keyakinan nenek moyang dari negeri asalnya. Falsafah hidup mereka, dimana pun orang-orang Tiongkok tinggal, mereka selalu menerapkan ajaran-ajaran yang dibawa dari negeri laluhurnya. Falsafah tersebut sangat berpengaruh kepada pola pikir, pandangan hidup, dan perilaku keseharian mereka. Mereka sangat setia kepada ajaran Budha, Tao, maupun Konghucu.<sup>124</sup> *Kedua*, selain para saudagar, kedatangan mereka pada fase berikutnya dipimpin langsung oleh Laksamana Cheng Ho (seorang Muslim) yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle (berkuasa tahun 1403–1424). Kaisar Yongle merupakan kaisar ketiga dari Dinasti Ming. Nama asli Laksamana Cheng Ho adalah Ma He dikenal dengan sebutan Ma Sanbao atau Sam Po Bo, berasal dari provinsi Yunnan.<sup>125</sup>

Bukti dan tinggalan dari keberadaan masyarakat Tiongkok di Cirebon yang hingga hari ini dapat dijumpai, sebut saja misalnya: *pertama*, Klenteng *Hok Keng Tong*. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang belum mengakui Konghucu sebagai agama resmi negara, klenteng ini bernama Vihara Dharma Sukha. Nama yang disebut terakhir terus digunakan hingga saat ini. Klenteng tersebut terletak di Jl. Pasar Kue Weru, Desa Weru Kidul, Kecamatan Plered (sekarang berada di Jl. Raya Plered Pesa, Weru Kidul, Kec. Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45154).<sup>126</sup> Menurut sumber tradisi, Klenteng itu pertama kali didirikan pada 12 Juni 1958 KT (Kalender Tionghoa) dengan luas bangunan ± 760 M<sup>2</sup>.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 332

<sup>125</sup>Widya Lestari Ningsih, "Cheng Ho, Laksamana Muslim yang Berpengaruh di Indonesia", retrieved Oktober 07, 2021 from *Kompas.com* website <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/10/-140000179/cheng-ho-laksamana-muslim-yang-berpengaruh-di-indonesia?page=all>.

<sup>126</sup>*Anonymous*, "Direktori Vihara Kabupaten Cirebon", retrieved Juni 03, 2022 from pikiran rakyat.com website <http://info.pikiran-rakyat.com/?q=direktori/vihara/kabupaten-cirebon/vihara-dharma-sukha>.

<sup>127</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 333.

*Gambar 2.2. Klenteng Hok Keng Tong Plered*



*Sumber: Dokumen Pribadi Eva Nur Arovah*

Kedua, Klenteng *Hok Tek Ceng Sin* atau dikenal Vihara Dharma Rakita. Klenteng ini sekarang terletak di Jl. Niaga I No.504, Jamblang, Kec. Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada perkembangannya klenteng ini lebih dikenal Klenteng Jamblang. Menurut Nurul Diva Kautsar saat mewawancarai penjaga Klenteng bernama Slamet (58), mengatakan, bahwa Klenteng Jamblang sudah berdiri sejak tahun 1500-an Masehi.<sup>128</sup> Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Tek Hian, seorang keturunan Tionghoa saat diwawancarai Eva Nur Arovah, menyebutkan, bahwa Vihara Dharma Rakita pernah dipugar pada tahun 1785 dengan dana berasal dari iuran/patungan masyarakat Jamblang.<sup>129</sup> Menurut pendapat lainnya, Klenteng

---

<sup>128</sup>Nurul Diva Kautsar, "Mengunjungi Vihara Dharma Rakhita Cirebon, Klenteng Yang Kayunya Dari Tiang Masjid", Retrived Januari 29, 2022 From *Merdeka.Com* Website <https://www.merdeka.com/jabar/mengunjungi-vihara-dharma-rakhita-cirebon-klenteng-yang-kayunya-dari-tiang-masjid.html>.

<sup>129</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 334.

Jamblang didirikan bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480.<sup>130</sup>

*Gambar 2.3. Klenteng Hok Tek Ceng Sin*



*Sumber: Nurul Diva Kautsar/Merdeka.com @2022*

*Ketiga*, Kelenteng Talang. Disebutkan, klenteng Talang atau disebut pula klenteng *Soeh Boen Pang Gie Soe* dahulu merupakan tempat penginapan para bikhu dan pemuka agama Konghucu.<sup>131</sup> Penamaan Klenteng Talang, terdapat dugaan, karena berlokasi di Jl. Talang No. 2 Kampung Keprabon RT. 03 RW. 02, Kelurahan dan Kecamatan Lemah Wungkuk Cirebon. Kelenteng Talang pertama kali dibangun oleh Tan Sam Chai Khong atau H. Moh. Syafei pada tahun 1450 di atas lahan seluas ± 400 M<sup>2</sup>. Menurut Sujito,<sup>132</sup> halaman klenteng dahulunya bertegel warna merah. Bagian depan merupakan bagian pendopo. Konstruksi atap

---

<sup>130</sup>Wawan Hernawan dkk., "Suluk Pesisiran Dalam Arsitektur Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, Indonesia, Purbawidya", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, Vol. 10 (1), Juni 2021, hlm. 33. Selanjutnya disebut, Wawan Hernawan dkk., Suluk Pesisiran ...

<sup>131</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 334-335.

<sup>132</sup>Disparbud.jabarprov.go.id, "Direktori Pariwisata: Kawasan Jawa Barat Kota Cirebon Jawa Barat". Retrieved Juni 18, 2022 from Disparbud.jabarprov.go.id website <https://direktoriwisata.id/unit/7893>.

pendopo disangga enam tiang. Lantai pendopo dari bahan tegel berwarna merah dengan ukuran 40 x 40 cm. Plafon ruang serambi dari kayu jati, di kiri kanan ruang serambi ini terdapat kamar masing-masing difungsikan untuk gudang. Di antara ruang serambi dan halaman terbuka, pada bagian atapnya terdapat ukiran *krawangan* motif flora dan fauna. Moh. Syafei awalnya adalah seorang saudagar dari daratan Tiongkok yang mengadakan pelayaran hingga mendarat di Pantai Utara Cirebon.

*Gambar 2.4. Kelenteng Talang (Soeh Boen Pang Gie Soe)*



*Sumber: [disparbud.jabarprov.go.id](http://disparbud.jabarprov.go.id)*

Karena kecerdasan dan kepiawaiannya dalam bergaul, ia kemudian diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Kesultanan Kanoman dan menikah dengan salah seorang putri Kanoman. Setelah menjabat Menteri ia diberi gelar Tumenggung Aria Dipacula. Makam H. Muhamad Syafei atau Tumenggung Aria Dipacula sekarang masih dipelihara dan merupakan benda cagar budaya. Karena muslim Tionghoa semakin berkembang, tempat ibadah mereka dipindahkan ke Desa Sembung. Sementara

bangunan yang ditinggalkan ini, secara berangsur-angsur beralih fungsi menjadi sarana ibadat pengikut ajaran Khonghucu.<sup>133</sup>

*Keempat*, Klenteng Tiao Kak Sie atau dikenal Vihara Dewi Welas Asih. Letaknya berada di Jl. Kantor No. 2, Kampung Kamiran-Cirebon atau berada di sebelah kiri Gedung Bank Mandiri, dan di seberang kanan Gedung *British American Tobacco* (BAT) Cirebon. Menurut sumber tradisi, nama Dewi Welas Asih diambil dari salah satu *rumpang* Dewi Kwan Im yang ada di dalam Vihara.<sup>134</sup> *Rumpang* tersebut merupakan benda yang masih terawat sejak kedatangan orang-orang Tiongkok ke tanah Jawa.

**Gambar 2.5. Kelenteng Talang Tiao Kak Sie (Vihara Dewi Welas Asih)**



Sumber: [aroengbinang.com](http://aroengbinang.com)

---

<sup>133</sup>*ibid.*

<sup>134</sup>Bambang Aroengbinang, "Kelenteng Dewi Welas Asih Cirebon". Retrieved Januari 13, 2019 from [aroengbinang.com](http://www.aroengbinang.com) website <https://www.aroengbinang.com/2017/12/kelenteng-dewi-welas-asih-cirebon-.html>.

Dibandingkan dengan klenteng lainnya, klenteng Dewi Welas Asih dapat dikatakan yang termegah dan terluas di Cirebon. Luas bangunan klenteng mencapai 1.857 M<sup>2</sup> pada luas lahan seluas 1.600 M<sup>2</sup>. Namun demikian, menurut Arovah, belum dijumpai informasi yang kuat yang menyebutkan pendiri dan tahun pendirian klenteng ini.<sup>135</sup> Dikatakannya, beberapa cacatan hanya menyebutkan tentang orang-orang yang turut memberikan sumbangan kepada klenteng ini. Di antaranya: Taan Kok Liong, Kang Li, dan Liem Tsiok Tiong. Mereka memberikan sumbangan pada tahun 1658 M. Sementara angkat tahun lainnya yang ditemukan, lebih menunjuk kepada renovasi dan pemugaran klenteng, yaitu tahun 1791, 1829, dan 1889. Meski demikian, dikatakan Arovah lebih lanjut, pemugaran hanya dilakukan pada bagian utama klenteng dan tidak mengubah bentuk aslinya.<sup>136</sup>

Apabila dicermati, tampak bahwa kehadiran orang-orang Tiongkok ke wilayah Cirebon pada rombongan pertama, meskipun tetap dengan keyakinan awal (Budha, Taoism, dan Konghucu), mereka tidak berhadapan dengan keyakinan masyarakat pribumi. Terdapat dugaan, karena penganut Budha, Tao, dan Konghucu yang datang ke wilayah itu bukan para *misionaris*. Dugaannya lainnya, agama-agama Budha, Tao, dan Konghucu bukan agama *misi*, tetapi lebih kepada pandangan dan falsafah hidup. Karena itu, tidak tampak jejak yang dilakukan penduduk Cirebon untuk menghambat orang-orang Tiongkok yang datang dan bermukim di wilayahnya. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit penduduk Cirebon yang mengadopsi kebudayaan Tiongkok, seperti bahasa, kesenian, dan makanannya.<sup>137</sup>

Situasi dan kondisi yang agak berbeda, dipertontonkan oleh penduduk Cirebon ketika kedatangan rombongan dari Tiongkok yang kedua kali. Laksamana Cheng Ho yang seorang

---

<sup>135</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 335.

<sup>136</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 335.

<sup>137</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 336.

Muslim, ia membawa norma, hukum, dan seterusnya yang sama dengan keyakinan penduduk Cirebon. Pengaruhnya, secara langsung atau tidak terjadi *unifikasi* (pembauran) antara orang-orang Tiongkok dengan penduduk Cirebon. Hal tersebut, diduga membawa angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan agama-agama Budha, Tao, dan Konghucu di Cirebon. Pengaruhnya lebih lanjut, ketika agama Islam menemukan *akselerasinya* secara *massif*, keberadaan orang-orang Tionghoa di Cirebon *relative* tidak terusik. Kaum Muslim dan penganut Budhisme, Taoisme, dan Konghucu di Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing tanpa ada *priksi* (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat).

Begitu pula, keberadaan pesantren-pesantren awal di Cirebon dapat mengembangkan pendidikannya dengan baik. Dicatat, pesantren pertama di Cirebon didirikan oleh Syekh Dzatul Kahfi alias Syekh Maulana Idholfi, alias Syekh Nurul Jati alias Syekh Nurjati pada tahun 1420. Pesantren itu bernama Amparan Jati.<sup>138</sup> Pendirian pesantren Amparan Jati didukung penuh oleh istri Syekh Datul Kahfi bernama Nyi Mas Khadijah. Ia adalah cucu Brata Legawa atau dikenal Haji Purwa dari Kerajaan Galuh. Pesantren Amparan Jati lambat laun mendapat sambutan baik dari penduduk Cirebon, sehingga menarik banyak santri untuk belajar ilmu agama (Islam) di sana. Di antara santrinya yang terkenal adalah dua orang putra *Sri Baduga Maharaja* Kerajaan Sunda Padjadjaran, yaitu Pangeran Walangsungsang, Nyi Indang Geulis, dan Nyi Mas Rarasantang.<sup>139</sup> Setelah Syekh Nurjadi wafat, kegiatan pendidikan di pesantren ini dilanjutkan oleh Syarif Hidayat

---

<sup>138</sup>Farihin dkk., "Jaringan Ulama Cirebon Abad ke-19 Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab dan Sanad". *Jurnal Tamaddun*, 7 (01), 2019, hlm. 4.

<sup>139</sup>Wawan Hernawan dkk., "Religious moderation in Naskah Wawacan Babad Walangsungsang: A Sundanese religious diversity wisdom" , *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 77 (4), 2021, hlm. 5-6.

(Sunan Gunung Djati) dan Syarifah Mudaim (gelar bagi Nyi Mas Rarasantang, ibunya Sunan Gunung Djati).<sup>140</sup>

Dijumpai informasi, pada masa yang hampir bersamaan Syarif Hidayat alias Sunan Gunung Djati juga membuka pesantren di pedukuhan Sembung wilayah Pasambangan.<sup>141</sup> Lokasi pesantrennya cukup dekat dengan pesantren Amparan Jati. Pesantren yang didirikan Sunan Gunung Djati karena letaknya di sebuah bukit (gunung kecil) kemudian dikenal pesantren *Giri Nur Cipta Rengga*<sup>142</sup> atau ada juga yang menyebut *Nur Giri Saptarengga*.<sup>143</sup> Pada masa-masa selanjutnya, para santri yang datang ke pesantren Giri Nur Cipta Rengga didominasi oleh santri perempuan, seiring tugas Sunan Gunung Djati yang menjadi kepala negara Kerajaan Islam Cirebon. Pengelolaannya pun diserahkan kepada Nyai Syarifah Mudaim bergelar *Sayyidatin Panatagama* yang tidak lain ibu dari Sunan Gunung Djati sendiri.<sup>144</sup> Kuat dugaan, pesantren *Giri Nur Cipta Rengga* merupakan pesantren perempuan pertama di wilayah Cirebon.

Selain mendirikan pesantren, Sunan Gunung Djati pun mendirikan masjid setelah memugar istana Pakungwati dan memperluasnya. Masjid itu bernama Masjid Agung Sang Ciptarasa (MASC). Sekarang terletak di Jl. Kasepuhan No.Komplek, Kesepuhan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Dengan selesainya pembangunan masjid, pusat penyebaran Islam di Cirebon menjadi bertambah, yaitu istana, Giri Nur Saptarengga, dan masjid Agung Sang Ciptarasa. Dengan adanya tiga pusat syi'ar kaum Muslim, orang-orang Tionghoa dengan berbagai latar dan keyakinannya di Cirebon tidak merasa terusik.

Begitu juga, ketika Sunan Gunung Djati menjadi penguasa Kerajaan Islam Cirebon bergelar *Sang Sinuhun Kanjeng Susuhunan*

---

<sup>140</sup>Farihin dkk., *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>141</sup>Wawan Hernawan dan Ading Kusdiana, *Biografi Sunan Gunung Djati, Sang Penata Agama*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 164.

<sup>142</sup>Wawan Hernawan dan Ading Kusdiana, *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>143</sup>Farihin dkk., *loc. cit.*, hlm. 7.

<sup>144</sup>Farihin dkk., *loc. cit.*, hlm. 7.

*Jati Purba Panetep Panata Agama Aulya Allah kutubiz-Zaman kalifatullah*, orang-orang Tionghoa tidak merasa terusik dan diusik keyakinannya. Mereka tetap dapat hidup berdampingan dalam memenuhi hajat hidup masing-masing. Dari sisi Sunan Gunung Djati sendiri, ia sangat memahami situasi dan kondisi tersebut. Oleh karena itu, sikap siger tengah, toleransi, dan hidup penuh ukhuwah di antara kedua belah pihak dapat dirasakan oleh keduanya. Kuat dugaan, Sunan Gunung Djati dipandang berhasil dalam syi'arnya dengan menempatkan sisi ketuhanan sekaligus sisi kemanusiaan pada posisi yang selayaknya.<sup>145</sup>

Selanjutnya, orang-orang Tionghoa juga tidak merasa terusik saat kedatangan rombongan Syarif Abdurrahman bersama saudaranya, yaitu Syarif Abdurrahim, Syarif Kaafi, dan Syarifah Baghdad ke Cirebon. Disebutkan, rombongan Syarif Abdurrahman kemudian berguru kepada Sunan Gunung Djati. Dalam pada itu, mereka diperkenalkan kepada Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana menerima semuanya dengan tangan terbuka. Ia kemudian mempersilakan Syarif Abdurrahman untuk membangun pemukiman di Cirebon. Wilayahnya sekarang dikenal dengan nama Kejaksan. Kegiatan Syarif Abdurrahman bersaudara, selain melakukan syi'ar Islam di daerah sekitar pemukimannya, juga mengembangkan usaha pembuatan peralatan rumah tangga dari tanah liat atau gerabah atau disebut *jun* atau *anjun*. Pada masa Kerajaan Islam Cirebon, daerah tempat tinggal Syarif Abdurrahman merupakan pusat pembuatan *anjun*. Karena itu, daerahnya kemudian disebut Panjunan.<sup>146</sup> Di Panjunan, Syarif Abdurrahman dikenal dengan nama Pangeran Panjunan, sementara Syarif Abdurrahim dikenal dengan nama Pangeran Kejaksan.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 338.

<sup>146</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 338.

<sup>147</sup>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, *Potensi Wisata Budaya Kota Cirebon*, Cirebon: Disbudpar Cirebon, 2006, hlm. 22.

Di Panjunan, Syarif Abdurrahman mendirikan *musala* atau *tajug* yang masih dapat dijumpai hingga hari ini. *Musala* tersebut bernama *Al-Athya*. Ukuran *musala* pada awal pembangunannya hanya  $\pm 40 \text{ M}^2$ . Karena jamaahnya semakin banyak kemudian diperluas menjadi  $150 \text{ M}^2$ . Arsitektur Masjid Panjunan merupakan perpaduan budaya Hindu, Tiongkok, dan Islam. Sekilas masjid ini tidak seperti masjid, karena bentuk bangunannya lebih menyerupai kuil. Perbedaannya terletak pada *mihrab* dan kaligrafi. Keunikan lainnya, terletak pada dinding pembatas atau pagar. Seluruh pagarnya terbuat dari susunan bata merah. Pada perkembangannya pula, masjid ini lebih dikenal sebagai masjid merah Panjunan. Kini masjid merah Panjunan terletak di Jl. Kolektoran No.43, Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat.

**Gambar 2.6.Masjid Merah Panjunan**



*Sumber: Koleksi bersama peneliti*

Selain dari Masjid Agung Sang Ciptarasa dan Masjid Merah Panjunan, masih di sekitar Cirebon selanjutnya berdiri masjid-masjid lainnya, sebagai berikut: Tajug Agung Kejaksan (1479/1480), Masjid Trusmi (1481), Masjid Dog Jumeneng (1542),

dan Masjid Kramat Depok (sekitar awal abad 15).<sup>148</sup> Dengan berdirinya masjid-masjid tersebut semakin memperkokoh Cirebon sebagai pusat kajian keilmuan dan penyebaran agama Islam.<sup>149</sup>

Situasi dan kondisi keagamaan yang harmonis baik intern, antar, dan antara umat beragama dengan Kerajaan di Cirebon mulai terusik seiring kedatangan Kompeni (orang-orang Eropa) ke wilayah ini. Pengaruh kehadiran Kompeni, tidak hanya berdampak kepada eksistensi politik para sultan Cirebon yang mulai turun dan lemah, tetapi juga kepada keberlangsungan keyakinan masyarakat Cirebon secara luas. Secara politik, para sultan berangsur tidak lagi mempunyai kekuasaan penuh, termasuk kewenangan dalam mengatur pemerintahannya.<sup>150</sup> Kekuasaan dan kewenangan para sultan kemudian bergeser hanya menjadi penguasa budaya. Pengaruhnya lebih lanjut, kegiatan keagamaan pun selalu diawasi oleh Kompeni. Posisi keraton tidak lagi sebagai pusat keagamaan. Situasi dan kondisi tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hindia

---

<sup>148</sup>Yulia Eka Putri dkk., *Masjid Kuno Cirebon*, Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2015, hlm: 52.

<sup>149</sup>Farihin dkk., *loc. cit.*, hlm. 8.

<sup>150</sup>Merujuk kepada arsip Perjanjian 7 Januari 1681, perjanjian yang telah dilakukan tiga Pangeran dari Cirebon dengan VOC berimplikasi pada ketaatan penuh Cirebon kepada VOC dalam berbagai kebijakan yang akan dilakukan dan hal itu berarti Cirebon sudah tidak lagi menjadi kerajaan yang berdaulat. Jika VOC menghendaki sesuatu, maka Cirebon harus mematuhi serta memenuhi permintaan VOC. Sebaliknya jika Cirebon menginginkan sesuatu maka hal tersebut harus berdasarkan pada persetujuan VOC. Cirebon tidak lagi dapat berkehendak serta bertindak sesuai dengan kebutuhan juga kepentingannya, semuanya harus atas izin dan persetujuan atau saran-saran yang diberikan oleh VOC. Sebagai contoh jika sewaktu-waktu Cirebon berada dalam keadaan yang mendesak serta memerlukan bantuan, maka Cirebon harus meminta bantuan VOC dan siap mengganti biaya yang dikeluarkan VOC untuk bantuan tersebut.

Dalam Perjanjian 7 Januari 1681 terdapat poin-poin kesepakatan serta ada juga poin ancaman. Jika terjadi, ada seseorang dari pihak raja atau tiga Pangeran dari Cirebon melanggar peraturan dan merugikan persekutuan atau menghina VOC, maka mereka yang melakukan perbuatan itu tanpa perbedaan harus dihukum karena perbuatannya. Pemberian hukuman harus segera dilakukan tanpa ditunda atau dilepaskan. Hal ini juga berlaku apabila VOC mengganggu masyarakat Cirebon.

Belanda. Bahkan, para bangsawan atau *sentana dalem*<sup>151</sup> warga keraton yang tidak sepaham dengan kebijakan politik keraton (raja) yang tunduk kepada pemerintahan Hindia Belanda memutuskan keluar dan mengasingkan diri ke daerah-daerah pinggiran dengan membangun pesantren.<sup>152</sup>

Kejadian keluarnya sejumlah kerabat keraton dan memilih mengasingkan diri ke daerah-daerah pinggiran Cirebon dijumpai hampir di sepanjang abad ke-18. Di antara mereka, sebut saja misalnya, Sultan Sepuh Shafiuddin atau lebih dikenal Sultan Matangaji (1773-1786), ia memilih keluar dari istana karena ketidaksetujuannya kepada Kompeni yang terlalu masuk dan mengatur istana.<sup>153</sup> Diinformasikan, Sultan Matangaji bersama beberapa abdi dalem menuju perkampungan di wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sekarang. Rombongan mereka singgah di Blok Capar. Menurut sumber tradisi, disebut Blok Capar terkait Sultan Matangaji beserta rombongan yang singgah karena kelelahan dan kelaparan. Capar diduga merupakan *kiratabasa* dari capai dan lapar.

Masih dalam sumber tradisi, setelah istirahat sultan dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Bukit Pasir Anjing untuk mencari tempat yang lebih aman. Di tempat ini, sultan mendirikan sebuah pesantren di tempat yang sekarang disebut Blok Pesantren (Dusun Pesantren). Dalam waktu cepat pesantrennya banyak didatangi para santri yang ingin belajar mengaji dan ilmu keagamaan. Blok Pesantren sekarang berada di Desa Sidawangi. *Sida* artinya: menjadi dan *wangi* artinya: harum

---

<sup>151</sup>*Sentana Dalem* adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja, seperti: para istri, anak-anak, keturunan raja, kerabat, saudara, pasangan-pasangannya, serta anak-anaknya.

<sup>152</sup>Beberapa pesantren yang bernilai sejarah, seperti: pesantren Benda Kerep, Dawuan, Mertapada, Munjul, Sidawangi, Sindanglaut, Buntet, Gedongan, Ciwaringin, Balerante, Mertasinga, dan Jagasatru hingga kini masih berdiri dan memberi pelayanan pendidikan keagamaan.

<sup>153</sup>Lihat, Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 339. Lihat pula, Mohammed Sugianto Prawirareja, *Cirebon: Falsafah, Tradisi, dan Alat Budaya*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2005), hlm. 76.

(menjadi harum).<sup>154</sup> Namun, karena letak pesantrennya masih dirasa kurang aman, Sultan kembali melanjutkan perjalanan menuju pedalaman Cirebon. Sultan dan rombongan tiba di daerah yang sekarang disebut Desa Matangaji. Di tempat baru kemudian dibangun sebuah tempat peristirahatan kecil yang oleh masyarakat hingga kini dikenal dengan nama blok Pedaleman (dusun Pedaleman) yaitu tempatnya para pembesar keratin. Di desa tersebut sultan kembali membangun sebuah pesantren dan mengajarkan ilmu keislaman. Sultan selalu berpesan, “jika ingin mengaji harus sampai matang”. Karena itu, wilayah tersebut dinamakan Matangaji.

Kerabat keraton lainnya adalah K.H. Muqayyim atau lebih dikenal Mbah Muqayyim, seorang Qadhi (hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam) di Keraton Kanoman menggantikan ayahnya, K.H. Abdul Hadi. K.H. Muqayyim meletakkan jabatannya, karena Kompeni (VOC) sudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan keagamaan dan tradisi Cirebon dengan menggunakan aturan-aturan mereka (Kompeni). K.H. Muqayyim kemudian mendirikan Pondok Buntet Pesantren pertama pada tahun 1750<sup>155</sup> di daerah Cimarati, Dawuan Sela, Desa Buntet, sekitar 500 Meter dari Buntet Pesantren saat ini. Setelah pesantrennya cukup ramai, kemudian diketahui Kompeni dan dibakar. K.H. Muqayyim bersama para santrinya telah meninggalkan tempat itu sebelum kedatangan Kompeni.<sup>156</sup>

Beberapa pesantren lain yang pendirinya merupakan kerabat keraton dan memilih tinggal di luar karena menolak dan

---

<sup>154</sup>Redaktur Desa Sidawangi, “Sejarah Desa Sidawangi”, Retrieved Agustus 20, 2022 from [wordpress.com website](https://desasidawangi.wordpress.com/sejarah/aroengbinang.com) <https://desasidawangi.wordpress.com/sejarah/aroengbinang.com> website.

<sup>155</sup>Lihat, Muhaimin A.G., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Ford Foundation, 2001, hlm. 23-25. Lihat pula, Eva Nur Arovah, *loc. cit.* 339

<sup>156</sup>Syakir Niamillah & Abdullah Alawi, “Mbah Muqoyyim, Kiai Rakyat Pendiri Buntet Pesantren”, Retrieved November 15, 2016 from *NU online* website <https://www.nu.or.id/pesantren/mbah-muqoyyim-kiai-rakyat-pendiri-buntet-pesantren-jPwYn>.

bersebrangan dengan kebijakan keraton, apabila disebut satu-persatu meliputi sebelah Barat dan timur Cirebon. Di sebelah Barat Cirebon Barat, sebut saja: pesantren Babakan Ciwaringin, Arjawinangun, Kempek, dan pesantren Balerante. Sementara di Cirebon Timur, seperti: Pesantren Buntet, Gedongan, dan pesantren Benda Kerep.<sup>157</sup> Disebutkan, pesantren Babakan Ciwaringin didirikan oleh Ki Jatira bin KH. Abdul Latief dari Pamijahan Plumbon Cirebon, pada tahun 1705. Pesantren Balerante didirikan sekitar 1774-1784 oleh Syekh Khalifah Raja dan Syekh Romli. Pesantren Benda Kerep didirikan pada tahun 1873 oleh K.H. Soleh Zamzami dan K.H. Anwarudin Kriyani, serta pesantren Gedongan didirikan oleh K.H. Muhamad Said pada tahun 1880.<sup>158</sup>

Hingga di sini, kuat dugaan, semakin kuat arus tersesatnya para penguasa pribumi (Sultan) ke dalam pusaran kuasa pemerintah Kolonial (baik Kompeni maupun Hindia Belanda), ia semakin ditinggalkan oleh kaum Muslim. Dhofier menyebutkan, “para priyayi yang bersikap lebih menyenangkan para penguasa asing, begitu berhati-hati untuk menghindari kecurigaan Belanda untuk berhubungan dengan orang-orang yang dicap oleh pihak Belanda sebagai “orang-orang fanatik”. Akibatnya, mereka menjadi sasaran penghinaan para ulama untuk selanjutnya kehilangan hubungan baik dengan Islam.<sup>159</sup>

Arovah menyebutkan, sikap tegas para kyai Cirebon terhadap pemerintahan Kompeni ditunjukkan ketika mereka mengangkat pengganti Sultan Kanoman IV dengan Pangeran Surantaka, putra yang berusia lebih muda dan dari selir yang kurang diterima masyarakat Cirebon. Sebaliknya putra tertua Sultan Kanoman IV yang merupakan putra mahkota dan berhak

---

<sup>157</sup>Afwah Mumtazah, “KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon”, dalam *Jurnal Islam Indonesia*, 02 (01), 2015, hlm. 115-116.

<sup>158</sup>Lihat, Zamzami Amin, *Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919*, Bandung: Humaniora, 2015, hlm. 79-85. Lihat pula, T.D. Sujana, *Kidung Rara Roga*. Cirebon: Pustaka Keraton Kanoman. 24 Oktober 1987, hlm. 22.

<sup>159</sup>Zamakhshari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 36.

atas penobatan itu serta disenangi masyarakat Cirebon, yaitu Pangeran Suryanegara beserta kedua saudaranya diusir dari keratin dan diasingkan ke Ambon.<sup>160</sup> Kekecewaan itu uterut bertambah seiring kebijakan bupati Cirebon dan Kompeni menyewakan sejumlah lahan desa kepada orang-orang Tionghoa. Dengan posisinya sebagai penyewa lahan, orang-orang Tionghoa menjadi punya kekuatan untuk memeras rakyat dengan pajak yang sangat tinggi. Upaya permohonan keringanan yang ditujukan kepada Bupati sudah dilakukan. Namun hal tersebut ditolak, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat. Dalam perlawanan itu, banyak orang Tionghoa yang dibunuh dan atau diusir dari bumi Cirebon.<sup>161</sup>

Peristiwa lain yang merupakan gerakan protes masyarakat Cirebon terhadap pemerintah, dilakukan oleh kalangan santri, kerabat di lingkungan keraton, para kyai, serta masyarakat umum. Gerakan protes itu kemudian dikenal dengan perang santri atau Perang Kedondong. Di antara tokoh penggeraknya yang paling menonjol adalah Ki Bagus Rangin.<sup>162</sup> Dari studi literer yang dilakukan, peristiwa tersebut dipicu oleh hubungan ekonomi yang mesra antara pemerintah Hindia Belanda dengan para pedagang keturunan Tionghoa di Cirebon. Kedekatan di antara kedua pihak, disinyalir telah berlangsung lama. Pemerintahan Kompeni yang dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang 'memanfaatkan jasa' orang-orang keturunan Tionghoa sebagai perantara yang sekaligus 'mesin pencetak uang' bagi para pangeran Cirebon dan pihak Kolonial. Dengan mengutip Carey (2006, x-xiii), Arovah menyebutkan, beragam hal mengenai hak pengelolaan termasuk jalan dan rumah pegadaian oleh pemerintah Hindia Belanda dijual ke

---

<sup>160</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 341.

<sup>161</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 341.

<sup>162</sup>Lihat, P.H. van der Kemp, *De Cheribonsche Onlusten Van 1818, Naar Oorspronkelijke Stukken*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979. Lihat pula, Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 342.

orang-orang Tionghoa. Lebih dari itu, yang menambah sakit kaum santri adalah perdagangan candu di wilayah Priangan mulai abad ke-19-- disinyalir merupakan dampak kehadiran orang-orang Tionghoa yang dipasok dari Cirebon. Perlakuan istimewa dari pemerintah Kolonial terhadap orang-orang Tionghoa inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik, bahkan berujung kerusuhan anti etnis Tionghoa.<sup>163</sup>

Hal lain, di tengah kepentingan dagang, profit ekonomi, serta perluasan kekuasaan politik, sejak kehadiran VOC di Nusantara pada 1602, mereka memaksa menebarkan agama Kristen di tanah jajahan. Namun, khusus untuk wilayah Cirebon hingga menemui kemundurannya dan berakhir beroperasi pada 31 Desember 1799, *misionaris* mereka dapat dikatakan menemui kesulitan di wilayah itu. Para *misionaris* yang ditugaskan untuk Cirebon hanya bisa mendirikan dua gereja di sana, yaitu Gereja St. Yusuf dan Gereja Kristen Pasundan (GKP).<sup>164</sup>

Cikal bakal pendirian Gereja St. Yusuf Cirebon dimulai pada 1878.<sup>165</sup> Pada saat itu, Cirebon belum memiliki *stasi* maupun *paroki*. Mulai tahun 1878, Cirebon menjadi *stasi* pertama di Jawa Barat. Pada masa itu, Cirebon masih menjadi bagian dari Vicariatus Apostolicus Bataviensis. Vicariatus Apostolicus Bataviensis merupakan bentuk pengembangan dari *Prefektur Apostolik* Batavia. *Vicariatus Apostolicus* merupakan sebutan untuk sebuah bentuk otoritas kawasan dalam Gereja Katolik Roma. Istilah tersebut digunakan dalam pelayanan di daerah *misi* yang belum memiliki keuskupan. Dijumpai informasi pula, bahwa perintisan agama Katholik Cirebon dimulai pada tahun 1877.<sup>166</sup> Sosok perintis *misi* adalah seorang pengusaha gula tebu

---

<sup>163</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm 342.

<sup>164</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm 343.

<sup>165</sup>Redaksi Katolikana, "Gereja Santo Yusuf Cirebon: Gereja Katolik Pertama di Jawa Barat", retrieved Maret 22, 2021 from *katolikana.com* website <https://www.katolikana.com/2021/03/22/gereja-santo-yusuf-cirebon-gereja-katolik-pertama-di-jawa-barat/#:~:text=Pembangunan%20Gereja%20Santo%20Yusuf%20Cirebon,Barat%20dan%20di%20Keuskupan%20Bandung>

<sup>166</sup>*ibid.*

bernama Louis Theodorus Gonsalves. Saat itu, industri gula di Cirebon sedang berkembang baik. Bahkan, gula hasil produksi Cirebon telah berhasil menembus pasar Amerika. Dijumpai informasi lebih lanjut, bahwa pembangunan gereja membutuhkan waktu selama dua tahun dan selesai pada tahun 1880. Gedung gereja St. Yusuf Cirebon diresmikan 10 November 1880 oleh Mgr. Adam Carel Claessens. Sejak saat itu, Gereja Santo Yusuf Cirebon menjadi gedung gereja Katolik pertama di Jawa Barat dan di Keuskupan Bandung.<sup>167</sup>

*Gambar 2.7. Gereja St. Yusuf Cirebon*



*Sumber: katolikana.com*

Masih pada tahun 1788, seiring pendirian Gereja St. Yusuf, di Cirebon juga berdiri Gereja Kristen Pasundan. Menurut Kruger,<sup>168</sup> bangunan Gereja Pasundan Cirebon awalnya merupakan rumah milik orang Belanda yang tinggal di Cirebon. Rumah tersebut kemudian dialihfungsi menjadi gereja.

---

<sup>167</sup>*Ibid.*

<sup>168</sup>Th. Muller Kruger, *Sedjarah Geredja di Indonesia*, Djakarta: BPK Kristen, 1959, hlm. 191-195.

Tempatnya masih berada satu area dengan Gereja Katolik St. Yusuf, yaitu di Jl. Yos Sudarso. Lokasinya sekarang berada di pojok Jl. Yos Sudarso No. 10, di antara Gedung Bank Indonesia dan Gereja Santo Yusuf, bersebelahan dengan Gedung Cipta Niaga Cirebon. Sejak didirikan, jemaat Gereja Kristen Pasundan Cirebon terdiri dari multi etnis. Berdasarkan catatan 1885 jemaat gereja itu sejumlah 39 orang, terdiri dari etnis Sunda, Tionghoa, keturunan Indo-Eropa, dan Amboina.<sup>169</sup> Gereja ini resmi berdiri pada 14 November 1934 dengan *Raad Ageng* (Majelis Besar) pertama seorang Penginjil bernama J. Iken dari *Nederlandse Zendelings Vereeniging* (NZV) Belanda, sekretaris D. Abednego, dan bendahara Tan Goan Tjong.<sup>170</sup>

***Gambar 2.8. Gereja Kristen Pasundan Cirebon***



*Sumber: cirebon.inews.id/*

Perkembangan *pekabaran Injil* memasuki dekade terakhir abad ke-19 dan paroon pertama abad ke-20 seiring masa puncak

---

<sup>169</sup>Th. Muller Kruge, *ibid.*, hlm. 195.

<sup>170</sup>Riant Subekti, *Gereja Kristen Pasundan, Dibangun Tahun 1788 Hingga saat Ini Kokoh Berdiri*, retrieved Maret 19, 2022 from [cirebon.inews.id/](https://cirebon.inews.id/read/56595/gereja-kristen-pasundan-dibangun-tahun-1788-hingga-saat-ini-kokoh-berdiri/2) website <https://cirebon.inews.id/read/56595/gereja-kristen-pasundan-dibangun-tahun-1788-hingga-saat-ini-kokoh-berdiri/2>.

imprealisme, pemerintah Hindia Belanda secara intensif melakukan misinya di Jawa Barat. Para misionaris baik secara perseorangan maupun melalui lembaga resmi pemerintah, seperti *Nederlandsche Zendingsvereniging* kemudian merekrut jemaat pribumi untuk melakukan pekabaran Injil kepada pribumi.

Misi tersebut dikenal dengan, “mengabarkan Injil oleh Penginjil Bumiputera”. Di antara misionaris yang cukup terkenal saat itu adalah Frederik Lodewijk Anthing (1820-1883). Ia merupakan penginjil Belanda yang melakukan kegiatan pekabaran Injil di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat. Ia memberikan perhatiannya terhadap penginjilan kepada masyarakat pribumi. Dalam menjalankan misinya, ia dibantu oleh Gan Kwee seorang keturunan Tionghoa yang beralih menjadi penganut Kristiani yang taat. Pada tahun 1851, Anthing yang seorang ahli hukum berhasil mendirikan “Perkumpulan untuk Misi di dalam dan di luar”, sehingga menjadikan Cirebon sebagai pos penting kegiatan misionaris Kristen di Jawa. Daerah lainnya yang dijadikan pusat misionaris, seperti Sukabumi, Bandung, Purworejo, Malang, Mojokerto, dan Bangil.<sup>171</sup>

Kegiatan *misionaris* tersebut bukan berjalan tanpa kendala. Di saat tekanan dari kalangan non Kristen semakin kuat, mereka kemudian menyusun strategi baru dengan mendirikan desa-desa Kristen. Di Wilayah Cirebon sendiri kemudian tercatat desa Kristen seperti di Cideres Majalengka yang didirikan oleh J. Verhoeven (1882-1883), dan Desa Tamiang di Cirebon yang didirikan oleh A. Vermeer pada tahun 1900. Sementara pembaptisan Kudus sudah dilakukan oleh A. Djikstra yang mulai bekerja sebagai penginjil pada 1864. Dicatat, pada tahun tersebut A. Djikstra telah melakukan pembaptisan terhadap dua orang penduduk pribumi dan satu keluarga keturunan Tionghoa.

---

<sup>171</sup>Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I: Batas-Batas Pembaratan*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 102.

Pembaptisan selanjutnya dilakukan terhadap Sembilan orang termasuk dua di antaranya perempuan pribumi di Cideres Majalengka.<sup>172</sup>

Dari rangkaian peristiwa historis sebagaimana disebutkan di atas, tampak bahwa pergumulan agama-agama di wilayah Cirebon bermula dari Çiva-Budha, Budha, Tao, Konghucu, Islam, dan Kristen (Katolik dan Protestan). Pekabaran yang dilakukan oleh para misionaris dilakukan di saat penduduk Cirebon sudah menganut secara ketat agama sebelumnya, terutama Islam. Itulah yang diduga kuat, kemudian memunculkan konflik. Pengaruhnya lebih lanjut, persaingan antara pemerintah Hindia Belanda, Kristen, dan Islam. Sementara Tionghoa lebih memilih pihak yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Dicatat, Tionghoa bisa beradaptasi dengan penguasa Islam, pada saat yang sama dapat bekerjasama dengan pemerintah Kompeni dan Hindia Belanda. Selanjutnya, disadari atau tidak, semua yang menguntungkan Islam, sama artinya akan merugikan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, dan sebaliknya.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 346.

<sup>173</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm 27. Lihat pula, Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 348.





## | BAB III

Biografi Ki Bagus Rangin Dan Sebab-Sebab Munculnya Gerakan Penentangan Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris

### A. Riwayat Hidup Ki Bagus Rangin

Ki Bagus Rangin adalah salah satu figur pejuang penting dari Ciayumajakuning yang dalam hidupnya begitu gigih menentang praktik-praktik imperialisme dan kolonialisme. Perlu diketahui bahwa sinkron dengan kondisi wilayah kesultanan Cirebon yang pada paruh kedua dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19 yang kondisinya banyak dipenuhi intrik-intrik dan carut-marut konflik di antara para penguasa tradisional, kekacauan ekonomi, serta proses perubahan social-budaya yang tidak bergerak ke arah kondusif dan stabil, kehadiran Ki Bagus Rangin telah memberi warna sekaligus kontribusi tersendiri terhadap dinamika perjuangan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, bahkan Subang dan Karawang.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua windu, semenjak tahun 1802 hingga 1818, Ki Bagus Rangin bersama dengan tokoh-tokoh pejuang lainnya yang berasal dari berbagai golongan secara aktif telah banyak terlibat di dalam menentang ketidakbenaran pemerintah kolonial pada saat memperlakukan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Begitu juga ia selama hidupnya bersama dengan tokoh-tokoh pejuang yang lainnya berusaha melawan kekuasaan pemerintahan kolonial dan dominasi golongan Cina atas sumber-sumber ekonomi yang dalam praktiknya bertendensi lebih banyak melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam demi meraih keuntungan bagi kelompoknya

ketimbang meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.<sup>1</sup>

Secara khusus, sampai saat ini diskursus dan informasi tentang perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin masih sangat terbatas untuk tidak menyebut tidak ada sama sekali. Beberapa penelitian yang dilakukan secara khusus terkait Ki Bagus Rangin tampaknya masih bisa dihitung dengan jari. Dengan gambaran kondisi seperti ini tentunya masih banyak elemen-elemen masyarakat di Indonesia, bahkan di Jawa Barat sendiri yang tidak mengetahui perjuangan yang pernah dilakukan oleh Ki Bagus Rangin.

Perlu diketahui, betapa masih belum banyak sumber-sumber sejarah yang mencatat perjuangan dari Ki Bagus Rangin. Kondisi ini tentunya semakin diperparah dengan adanya realita bahwa masih banyak dijumpai informasi tentang perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin yang sebenarnya acapkali tertutup, atau mungkin sengaja tidak dibuka, bahkan didistorsikan oleh informasi sejarah versi penguasa yang dengan sengaja tidak mau memasukan perjuangannya di dalam menentang pemerintah kolonial. Sebagai implikasinya pada kasus-kasus tertentu kemunculan berbagai perjuangan yang pernah ada seperti yang pernah dilakukan Ki Bagus Rangin, dan tokoh-tokoh lokal lainnya dalam bingkai perjuangan bangsa ini seringkali terabaikan dan tidak diketahui oleh masyarakat luas. Padahal jika diamati lebih seksama, selain beberapa arsip kolonial yang dapat dijadikan sumber penulisan sejarah perjuangan dari Ki Bagus Rangin, dalam berbagai karya historiografi tradisional seperti dalam *babad* ataupun yang tertulis dalam naskah telah banyak mencatatnya. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Eva Nurarovah, "Cirebon 1681-1945: Dinamika Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya," *Disertasi*, (Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, 2018), hlm. 1.

kepada realita ini, bagaimanapun ini menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin memang benar-benar ada dan peristiwanya benar-benar terjadi.<sup>2</sup>

Memang, seperti yang dikemukakan Eva Nurarovah sekalipun kajian tentang Ki Bagus Rangin yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari karya-karya historiografi tradisional acapkali dibumbui unsur mitos, legenda, dongeng, bahkan keterangan-keterangan yang diberikannya mungkin diragukan untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. Begitu juga informasi tentang Ki Bagus Rangin yang diperoleh dari tradisi lisan acapkali mengalir hadir begitu saja dan berpindah dari satu penutur yang satu ke penutur yang lainnya. Namun, bagaimanapun seorang sejarawan akan terus berusaha untuk mengungkap dan memberi tempat terhadap peristiwa sejarah lokal ini, sekaligus mengenalkan tokoh pejuang dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan ini yang secara kebetulan secara administratif pada abad ke-19 sebagai bagian dari Keresidenan Cirebon.

Dalam konteks ini, pada dasarnya keterangan yang diperoleh dengan bersumber dari karya-karya historiografi tradisional dan tradisi lisan ini bagaimanapun seperti yang dikemukakan Eva Nurarovah tetap merupakan informasi sejarah yang penting untuk mengetahui sejauh mana dan untuk kepentingan apa suatu “fakta wacana” dihadirkan. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan tetap melihat konteks sejarah dan situasi kondisi yang melatarbelakangi kelahirannya, kecamuk perang, situasi psikologis, dan juga situasi-kondisi sosial-budaya masyarakat yang melahirkannya.<sup>3</sup> Apa yang dikemukakan Eva Nurarovah tersebut menegaskan kembali dari apa yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah yang mengatakan bahwa kendatipun dalam karya historiografi tradisional biasanya bukan kebenaran historis yang menjadi tujuan, tetapi lebih berorientasi

---

<sup>2</sup> Eva Nurarovah, *ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Eva Nurarovah, *ibid.*, hlm. 1.

kepada upaya meneguhkan nilai kultural masyarakat yang menghasilkan karya tersebut.<sup>4</sup> Sampai di sini, penulis berpendapat dari nilai-nilai kultural yang telah “terpatri” dan “terjaga” secara turun-temurun tersebut supaya bisa menjadi informasi sejarah perlu dilakukan komparasi dan korborasi dengan mempergunakan metode sejarah.

Berangkat dari pemikiran itu, maka dalam mengungkap tentang perjuangan Ki Bagus Rangin di dalam menentang pemerintah kolonial Belanda dan Inggris pada masa *interregnum* (penyelang) yang terjadi pada abad ke-19 ini, bila dilihat dari jangkauan waktu penelitiannya yang jauh ke belakang yaitu pada dekade pertama dan kedua dari abad ke-19, maka upaya penelusuran terhadap sumber-sumber kolonial dalam bentuk sumber tertulis dan material/benda sebagai sumber dari luar, tentu banyak dipergunakan. Begitu juga penggunaan sumber dari dalam (pribumi), termasuk informasi-informasi pembandingan yang berasal dari naskah atau babad sebagai karya historiografi tradisional perlu dilakukan.

## **B. Ki Bagus Rangin Menurut Informasi dari Naskah *Babad Dermayu* dan Tradisi Lisan/*Oral Tradition***

Upaya menelusuri dan membicarakan tentang figur Ki Bagus Rangin, sampai saat ini nama Ki Bagus Rangin, khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, terlebih di Indramayu sendiri seperti berada pada dikotomi yang saling kontradiktif. Di satu sisi stigma sebagai sosok perampok, perusuh, pengacau, dan *berandalan* masih tertulis dalam karya historiografi tradisional, khususnya dalam

---

<sup>4</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990), hlm. xxi.

naskah *Babad Dermayu (Babad Carbon II)*.<sup>5</sup> Dengan mengambil dasar dari naskah tersebut, yang kemudian seringkali menjadi sumber penulisan sejarah di Indramayu menuntut perlu adanya “pelurusan sejarah” yang tentunya dengan mengikuti tahapan-tahapan penelitian sejarah (metode sejarah).

Di sisi lain, dalam terminologi tradisi lisan dan heroisme masyarakat, justru figur Ki Bagus Rangin telah menempati ruang terhormat yang dalam bagian-bagian tertentu menjadi kebutuhan masyarakat. Bagaimanapun masyarakat memandang secara hitam-putih, yaitu antara Penindas dengan Kaum Marginal; antara Kolonialis dengan Sang Pembebas; antara Kebatilan dengan Kebenaran. Ketokohan Bagus Rangin telah mengisi relung-relung tersebut sebagai sosok yang berada di tengah-tengah kaum marginal untuk melakukan pembebasan dengan spirit kebenaran. Dikotomi itu tampak sekali, yakni pada pada dua kelompok masyarakat, yaitu : (1) pengikut naskah *Babad Dermayu*, dan (2) pengikut tradisi lisan dan merasa berada pada silsilah keturunan Bagus Rangin.<sup>6</sup>

## 1. Ki Bagus Rangin Versi Naskah *Babad Dermayu*

Dengan mengambil informasi sepenuhnya dari naskah *Babad Dermayu*<sup>7</sup>, pada tahun 1977 telah terbit buku *Sejarah Indramayu* yang ditulis H.A. Dasuki, dkk.<sup>8</sup> Menurut Supali Kasim,

---

<sup>5</sup> Supali Kasim, “Perjuangan Bagus Rangin di Indramayu Sayatan Sejarah yang Terluka,” *Makalah*, disampaikan pada Seminar Pengusulan Ki Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional di Majalengka. Tanggal 5 September 2015, hlm. 1

<sup>6</sup> Supali Kasim, *ibid.*, hlm. 1.

<sup>7</sup>*Babad Dermayu (Babad Carbon II)*, Ditulis antara 1818-1913, Disalin 1913 oleh penulis pertama tahun 1913, kemudian disalin kembali oleh Rochani Kusumawijaya tahun 1957, kemudian disalin kembali oleh R. Syarif Zaenal Asikin Tirtawijaya pada tahun 1977.

<sup>8</sup> Menurut Supali Kasim terdapat keseragaman antara naskah *Babad Dermayu* yang diketemukan di berbagai daerah satu daerah di kabupaten Indramayu, seperti naskah dari Desa Pamayahan (Kec. Lohbener), Tambi (Kec. Sliyeg), Kertasemaya (Kec. Kertasemaya), bahkan juga naskah yang sudah dilakukan transliterasi dan terjemahan oleh Museum Negeri Sri Baduga bekerjasama dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara Cabang Bandung Jawa Barat. Naskah tersebut kini menjadi koleksi Museum Negeri Sri Baduga dengan nomor registrasi 1.368, dan nomor inventarisasi 183.1498/07.35. Tebalnya 124

berdasarkan informasi yang diberikan dari naskah ini, secara eksplisit dan tanpa *tedeng aling-aling* menyebut figur Ki Bagus Rangin sebagai sosok pengacau, perusuh, perampok, dan *berandalan*. Meskipun bernama buku sejarah, namun kajian di dalamnya sangat miskin. Tidak ada tahapan heuristik, kritik, interpretasi ataupun penulisan historiografi. Perlu diketahui, buku tersebut hanya melakukan transliterasi dan terjemahan dari sebuah naskah *Babad Dermayu*.<sup>9</sup> Kelemahannya, hasil dari transliterasi dan terjemahan itulah yang kemudian secara tidak hati-hati dianggap sebagai informasi sejarah.<sup>10</sup>

Buku yang berasal dari *Babad Dermayu* ini juga berusaha untuk mencoba menampilkan kembali awal perlawanan Ki Bagus Rangin sampai selesai dengan naskah *Babad Dermayu* sebagai referensi utama. Sampai di sini, tampaknya perlu dipahami bahwa Naskah *Babad Dermayu* dipilih sebagai bahan referensi utama dalam buku tersebut karena memang negeri Dermayu pada saat itu merupakan wilayah yang paling banyak mengalami tekanan dari pasukan Ki Bagus Rangin. Dengan demikian, boleh jadi penulis *Babad Dermayu* mencatat peristiwa ini dengan penuh kemarahan, sehingga muncul sebutan Pasukan *Brandal* atau *Brandal* Rangin yang juga sekaligus sebagai representasi dalam sudut pandang penguasa saat itu.<sup>11</sup> Hal ini tentunya bisa dipahami, karena dari sinilah kita bisa melihat bahwa naskah *Babad Dermayu* (*Babad Carbon II*) memang ditulis oleh penulis versi pemerintah, yang pada waktu itu pemerintahannya berafiliasi dengan pemerintah kolonial Belanda.

---

halaman, beraksara Cacarakan Jawa, dan berbahasa Jawa Cirebon Lihat Supali Kasim, *op.cit.*, hlm. 1

<sup>9</sup> Lihat naskah *Babad Dermayu* (*Babad Carbon II*)

<sup>10</sup> Supali Kasim, *ibid.*, hlm. 1.

<sup>11</sup> Muhammad Muhktar Zaedin, "Perjuangan Rakyat Cirebon Melawan Penjajah", *Makalah*, disampaikan dalam salah satu seminar yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2022, hlm.1

Menurut Muhamad Mukhtar Zaedin, bila demikian adanya, tentu dapat diajukan pertanyaan: Mengapa Ki Bagus Rangin sebagai putra yang secara geneologis masih memiliki hubungan keturunan Keraton Kasepuhan tersebut membuat *rusuh* di Keraton Kanoman dan *wewengkon* Keraton Kanoman? Mengapa pula yang paling sering dituju, diganggu, dan ditarget oleh pasukan rakyat, yang kemudian nama pemimpinnya ini disebut dengan nama Bagus Rangin,<sup>12</sup> adalah negeri Dermayu, yang pada saat itu sebagai *wewengkon* Keraton Kanoman?<sup>13</sup>

Negeri Dermayu sebagai negeri yang paling banyak bersentuhan dengan pergerakan pasukan kebagusan ini, mulai dari Bantarjati, Lohbener, Pemayahan, Kedongdong, Jatitujuh, Pegaden, Cigadung Subang, hingga Karawang, pada akhirnya tidak mampu membayar seluruh biaya kegiatan pertahanan dan peperangan yang terjadi sepanjang Bantarjati, Kedongdong, Cigadung, hingga Karawang yang diakibatkan oleh peperangan tersebut<sup>14</sup>.

## 2. Ki Bagus Rangin Berdasarkan Tradisi Lisan/*Oral Tradition*

Hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian terkait informasi dari figur Ki Bagus Rangin adalah berdasarkan tradisi lisan (*oral tradition*) yang berkembang di masyarakat. Sisi kontradiktif yang berhasil ditemukan dari figur Ki Bagus Rangin justru ditunjukkan berdasarkan tradisi lisan pada masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi sejak abad ke-19 hingga abad ke-21 yang kini telah mewujudkan sebagai sebuah ingatan kolektif. Berdasarkan tradisi lisan yang

---

<sup>12</sup>Sebenarnya, kata 'bagus' yang disandingkan pada nama Rangin bisa jadi bukan gelar *kebangsawanan*, tapi merupakan gelar *pergerakan*. Bagus berarti baik. Dalam konteks kekinian, kelompok kebagusan (para bagus) adalah kelompok oposisi yang menginginkan perubahan sistem, yang dalam konteks kekinian bisa disebut kelompok reformasi, yang menghendaki keberpihakan pada rakyat dan dapat mensejahterakan rakyat. Kehendak rakyat keseluruhan adalah kehendak kebaikan; baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, perdagangan, perburuhan, perindustrian, dan juga bidang-bidang yang lainnya lagi. Muhammad Mukhtar Zaedin, *ibid.*, hlm. 3.

<sup>13</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>14</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *ibid.*, hlm. 4-5.

berkembang secara turun temurun dalam memori masyarakat, figur Ki Bagus Rangin dipandang sebagai figur orang yang baik. Masyarakat di beberapa kecamatan, yang menjadi wilayah jelajah perjuangan Ki Bagus Rangin, seperti di Kecamatan Bangudua, Lelea, Cikedung, Terisi, Gabuswetan, hingga Lohbener menampilkan ingatan pada figur Bagus Rangin dan para pengikutnya sebagai pahlawan.<sup>15</sup>

Lebih dari itu, sebagai suatu hal yang unik, beberapa di antaranya elemen masyarakatnya memaparkan dengan bangga sebagai bagian dari silsilah keluarga Ki Bagus Rangin maupun anggota pasukannya, seperti Suryapringga, Leja, Kayim, Patah, Jatem, Sapidin, Ki Bagus Marsidem, dan lain-lain. Ada pula masyarakat yang secara turun-temurun menyimpan pusaka Ki Bagus Rangin atau anggota pasukannya berupa keris, golok, *badung batok*, maupun kopyah *waring*.<sup>16</sup>

Secara ekspresif, masyarakat akan spontan melakukan sanggahan, jika ada cerita yang menyebut Ki Bagus Rangin adalah perusuh atau berandal atau *begal*. Dalam pergaulan sehari-hari, jika ada yang menyebut demikian, akan langsung dibantah. Mereka pun menyayangkan kenapa naskah *Babad Dermayu* tertulis demikian. Bahkan, jika ada grup seni sandiwara yang menampilkan lakon Ki Bagus Rangin dengan sosok sebagai perusuh dan berandal serta mudah tertipu Belanda dengan iming-iming jabatan lalu pesta pora semalaman, bisa-bisa dilempari dengan batu-bata oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Seperti itulah keberadaan dari figur Ki Bagus Rangin yang terpelihara dalam memori kolektif masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan yang telah terpelihara secara turun temurun. Memang yang ikut berjuang dalam gerakan penentangan itu tidak hanya Ki Bagus Rangin,

---

<sup>15</sup> Supali Kasim, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>16</sup> Supali Kasim, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>17</sup> Supali Kasim, *op. cit.*, hlm. 3.

namun nama Ki Bagus Rangin telah memiliki ruang dan tempat tersendiri di hati masyarakat. Seperti yang dikemukakan P.H. Van der Kemp, salah seorang pegawai pemerintah kolonial Belanda yang ikut menumpas gerakan Ki Bagus Rangin yang menuliskan kesaksiannya dalam buku *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818*. Selain nama Ki Bagus Rangin ada beberapa nama yang ia sebut seperti: (1) nama Bagus Nairem, seorang demang Pedagangan (di halaman lain ia menyebut Pegadhangan). Ada kemungkinan adalah Desa Pekandangan di Kecamatan Indramayu; (2) nama Ki Bagus Jabin, yang menginisiasi dan mengepalai kerusuhan di Kandanghaur; (3) nama Ki Bagus Serit (Rono Diwongso) dari Distrik Semarang; (4) nama Ki Bagus Kundor, yang diduga sebagai anak Ki Bagus Rangin; (5) Tiga orang pengacau: Sapie, Lejo, dan Ribut. Nama Sapie, kemungkinan adalah Sapidin; dalam tradisi lisan masyarakat Cikedung ada kisah persembunyian di pinggir kali seperti sapi. Sedangkan nama Lejo, sangat dimungkinkan adalah nama dari Ki Bagus Leja.<sup>18</sup>

### 3. Geneologi dan Jejak Perjalanan Ki Bagus Rangin

Berdasarkan naskah *Babad Dermayu*, Ki Bagus Rangin disebut berasal dari Demak, Blandong, Rajagaluh, Majalengka. Ki Bagus Rangin merupakan anak dari Sentayem yang dilahirkan pada tahun 1761. Ia adalah cucu dari Buyut Waridah; keturunan Embah Buyut Sambeng. Kakaknya bernama Buyut Rangin; adiknya bernama Buyut Salimar dan Ki Bagus Serit. Ayah Ki Bagus Rangin adalah seorang kiyai besar yang memiliki banyak santri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>P.H. Van der Kemp. “ De Cherribonshe Onlusten van 1811 Naar Oorspronkelijke Stukken” dalam *Bijragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde*, 1920), hlm. 45; Supali Kasim, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>19</sup>Lihat *Babad Dermayu (Babad Carbon II)*, yang ditulis antara 1818-1913, disalin 1913 oleh penulis pertama tahun 1913; Zamzami Amin, *Sejarah Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedongsong 1801-1919*, Edisi Revisi, (Bandung : Humaniora, 2019, Cetakan Keenam), hlm. 166-206; Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hal. 2.

Dalam berbagai literatur tidak diperoleh keterangan yang lengkap mengenai biografi Ki Bagus Rangin, baik riwayat hidupnya maupun asal usulnya. Edi S. Ekadjati mengatakan bahwa Bagus Rangin adalah tokoh yang berasal dari Demak Blandong, Rajagaluh sebagai bagian dari wilayah Majalengka yang berada di kaki Gunung Ciremai. Ayahnya bernama Sentayem, yang oleh orang-orang biasa memanggilnya Buyut Tayom. Kakeknya adalah Ki Waridah keturunan Ki Sambeng yang merupakan orang yang disepuhkan di daerah Rajagaluh karena secara keturunan keluarga Ki Bagus Rangin merupakan orang yang taat beribadah dan penyebar agama Islam di daerah Majalengka, bahkan banyak murid-murid yang datang untuk berguru pada kakek buyut Ki Bagus Rangin. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Bagus Rangin melakukan perlawanan kepada Belanda para murid dan simpatisan keluarga Bagus Rangin banyak yang membantu dengan sukarela tanpa diminta. Dengan munculnya rasa kekeluargaan ini mencerminkan adanya solidaritas yang dibangun atas ikatan aqidah yang mendalam di kalangan penganut agama Islam.<sup>20</sup>

Ki Bagus Rangin mempunyai tiga orang saudara. Kakaknya bernama Buyut Jabin dan kedua adiknya masing-masing Buyut Salimar, dan Ki Bagus Serit. Ki Bagus Rangin juga dikenal sebagai Ki Buyut Sapu Angin. Masyarakat di daerah Majalengka mengatakan hal ini didasarkan kepada cerita pembabakan awal pendirian wilayah Jatitujuh dan pada perlawanan melawan penjajah Belanda, di mana Ki Bagus Rangin mampu menceraiberaikan Belanda bagaikan sapu yang tertiuap angin (sapu angin).<sup>21</sup>

Ki Bagus Rangin dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim dan sudah mempunyai dasar agama Islam sejak kecil.

---

<sup>20</sup> Edi. S. Ekadjati, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Jawa Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1990), hlm. 103; Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 168.

<sup>21</sup>Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 169.

Ayahnya yang bernama Ki Buyut Tayom, sebagai seorang ulama mempunyai tugas untuk mendakwahkan syiar agama Islam ke berbagai tempat. Santri-santri Ku Buyut Tayom sangat banyak, bahkan banyak yang datang dari berbagai daerah. Dari ayahnya lah Ki Bagus Rangin banyak mendapat didikan ilmu agama dan akhlak/sopan santun. Masyarakat di daerah Jatitujuh- Majalengka sendiri membenarkan bahwa figur Ki Bagus Rangin adalah seorang tokoh yang kharismatik, gagah-berani, tegas, bertanggung jawab dan sanggup menyatukan setiap kegelisahan individu-individu rakyat pribumi yang terusik oleh tindakan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, bisa dipahami bila gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin banyak mendapat dukungan yang penuh dari seluruh pengikutnya.<sup>22</sup>

Keterangan lain menyebutkan bahwa Ki Bagus Rangin merupakan buyut dari Pangeran Suryakusuma, cucu dari Pangeran Jayanegara, dan anak dari Pangeran Suryadiningrat atau Ki Bagus Arsitem yang tinggal di Kertajati. Ada pula yang menyebutkan bahwa Ki Bagus Rangin yang ketika muda bernama Pangeran Atas Angin atau Pangeran Bagus Rarangin lahir di Kertajati merupakan anak dari Bagus Sentayem atau Ki Bagus Tenom sebenarnya bernama Pangeran Suryadiningrat, keturunan dari Syekh Idrus atau Pangeran Jayanegara, putra Sultan Sena Zainudin (1753-1786) dari Keraton Kasepuhan.<sup>23</sup> Mendekati kemiripan dengan pendapat ini terdapat dalam naskah *sejarah Wiralodra*<sup>24</sup> yang ditulis sekitar tahun 1818-1913 dan disalin oleh Raden Syarif Rochani Kusuma Wijaya pada tahun 1957 yang menyebut silsilah Ki Bagus Rangin hingga ke Keraton Kasepuhan.

---

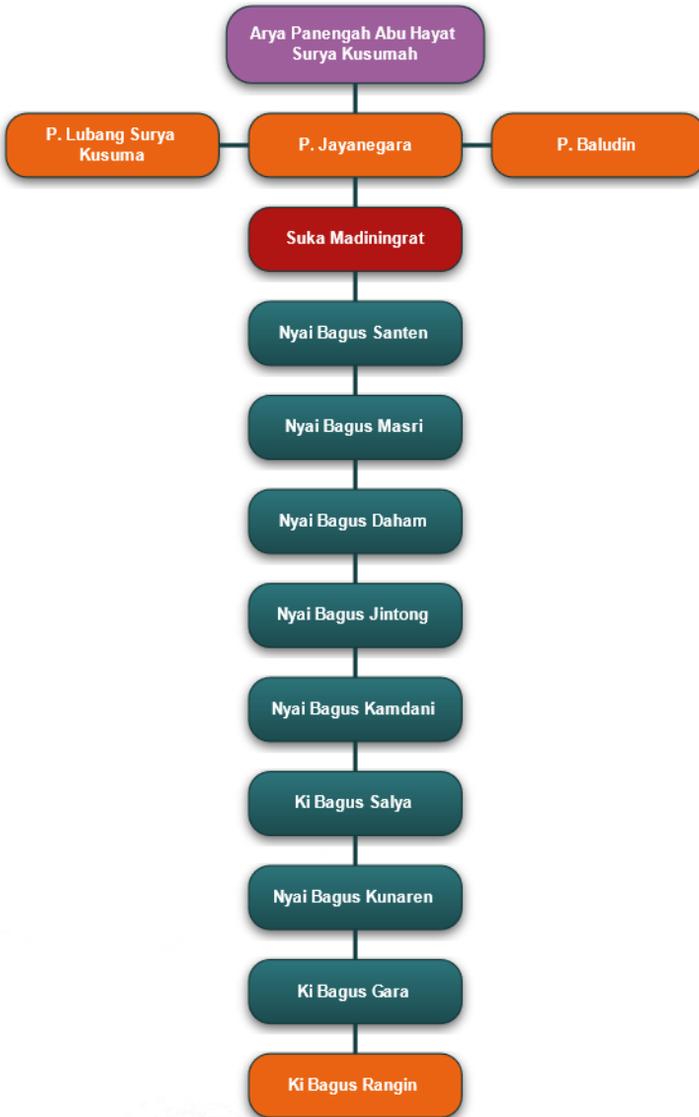
<sup>22</sup>Zamzami Amin, *ibid.*, hlm. 169.

<sup>23</sup> Mashum Hidayatullah, *Sejarah Singat Ki Bagus Rangin*. (Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 3.

<sup>24</sup> R. Achmad Opan Safari Hasyim, "Ki Bagus Rangin dalam Sumber-sumber Tertulis di Cirebon". *Makalah*, disampaikan pada seminar nasional Pengusulan Ki Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional di Majalengka, tanggal 5 September 2015, hlm. 1-2.

Dalam naskah *Sejarah Wiralodra*<sup>25</sup> disebutkan silsilah Ki Bagus Rangin sebagaimana dalam bagan berikut ini:

**Bagan 3.1. Silsilah Ki Bagus Rangin**



<sup>25</sup>R. Achmad Opan Safari Hasyim, *Ibid.*, hlm. 2-3.

Berdasarkan bagan silsilah tersebut di atas, leluhur Ki Bagus Rangin bila ditelusuri, maka akan sampai kepada nama salah satu sultan Kasepuhan yaitu Sultan Sena Zainuddin (1753-1773). Sementara ayahnya yang bernama Ki Bagus Arsitem atau Buyut Arsitem dikenal sebagai ulama besar. Buyut Arsitem mengembara dan berguru kepada beberapa ulama hingga menikah dengan putri Rajagaluh. Dari pernikahan tersebut lahir anak laki-laki yang bernama Pangeran Atas Angin atau Ki Bagus Rangin.<sup>26</sup>

*Gambar 3.1. Ki Bagus Rangin*



*Sumber: detik.news*

---

<sup>26</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 3.  
124 | Geger Ciayumajakuning

Menurut Kartani, Ki Bagus Rangin terlahir dengan nama Pangeran Bagus Kerarangin. Dia lahir di Bantarjati, ayahnya bernama Pangeran Bagus Gara. Namun ibunya tidak diketahui namanya. Menurut sumber-sumber di Mertasinga nama Bagus Rangin adalah nama samaran. Menurut sumber lokal di desa Jatitujuh, Ki Bagus Rangin lahir pada tahun 1761 di Desa Bantarjati, ayahnya bernama Ki Buyut Sentayem atau Buyut Taye (Teyom). Menurut Kartani juga, ia menyebutkan bahwa ibunya Ki Bagus Rangin bernama Ratu Sunue/Winaon. Dari pernikahannya dengan Ki Buyut Sentayem atau Ki Buyut Teyom lahirlah Bagus Bangin, Bagus Serangin, Bagus Selimar dan Bagus Serit.<sup>27</sup>

Ki Bagus Rangin banyak belajar ilmu agama pada ayahnya. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke beberapa pesantren, yang salah satunya dengan menjadi santri di Pesantren milik Buyut Asyrofudin (Pangeran Muhamad Asrofudin) di Congeang Sumedang. Pangeran Muhamad Asyrofudin adalah putra dari Sunan Sepuh IV, Sultan Amir Sena Zaenudin. Ia keluar dari Keraton Kasepuhan setelah tewasnya Sultan Muhamad Shofiudin Matangaji pada tahun 1786. Dalam naskah silsilah yang ditulis R. Khalil Abdulah, R. Achmad Dahlan dan R. Chafid, Ki Bagus Rangin masih merupakan keturunan dari Pangeran Arya Panengah Abu Hayat Suryakusuma atau lebih dikenal dengan Pangeran Suryanegara. Pangeran Suryanegara yang bersama kakaknya, Sultan Muhamad Shofiudin Matangaji,

---

<sup>27</sup> Kartani, *Perang Kedondong*. (Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 1-5; R.A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 1.

memberontak kepada pemerintah kolonial Belanda. Pangeran Suryanegara menikah dengan Ratu Ayu Jamaliyah, putri dari Syeikh Muhyidin/Buyut Muji. Pernikahan keduanya melahirkan seorang putra yang bernama Pangeran Jayanegara Awal (Pangeran Wijayanegara). Pangeran Wijayanegara kemudian dikenal dengan nama Syeikh Idrus. Pangeran Jayanegara Awal kemudian berputra Pangeran Sukmadiningrat atau lebih dikenal dengan nama samarannya Ki Bagus Arsitem atau Buyut Arsitem.<sup>28</sup>

Selain memiliki keterkaitan dengan nama tokoh-tokoh yang terlibat dengan gerakan perlawanan-perlawanan sebelumnya, Ki Bagus Rangin juga secara geneologis merupakan kakak dari Ki Bagus Serit<sup>29</sup>. Saudara-saudara Ki Bagus Rangin yang membantu perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda adalah adalah:

1. Ki Bagus Seja
2. Ki Bagus Sena
3. Ki Sura Persanda
4. Ki Bagus Kandar.<sup>30</sup>

Berikutnya adalah petikan silsilah dari Ki Bagus Rangin berdasarkan catatan dari R. Kholil Abdulah, R. Achmad Dahlan dan R. Chafid:

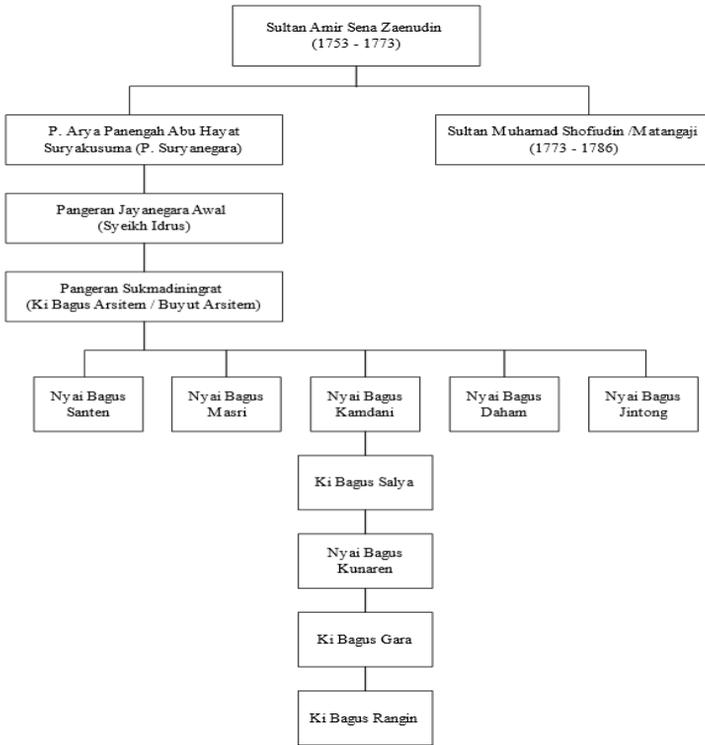
---

<sup>28</sup> R.A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 2.

<sup>29</sup>Naskah *Babad Dermayu (Wiralodra)* yang ditulis pada tahun 1913. Naskah tersebut ditransliterasi oleh R. Syarief Rohani Kusumawija tahun 1957 dan R. Syarief Zaenal Asyikin Tirtawijaya 1977.

<sup>30</sup> R.A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 2-3

### Bagan 3.2. Silsilah Ki Bagus Rangin<sup>31</sup>



Tidak banyak sumber yang mengungkap figur Ki Bagus Rangin dari sisi hubungan geneologis. Kendati demikian, sampai saat ini masih ditemukan banyak versi akan leluhur Ki Bagus Rangin. Menurut Busytomi, Ki Bagus Rangin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ki Bagus Sidong, seorang pemimpin pemberontakan. Bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Bagus Arisim dan Bagus Suwarsa, mereka dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah kolonial Belanda karena ikut serta memperotes kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu terhadap Pangeran Kanoman.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> R.A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 2.

<sup>32</sup> Omi Busytoni, *Dakwah dan Perjuangan Ulama Cirebon. (Tanpa Kota Penerbit: TP, Tanpa Tahun)*, hlm. 124-126); Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 2.

Informasi lain menyebutkan Ki Bagus Rangin merupakan buyut dari Pangeran Suryakusuma, cucu dari Pangeran Jayanegara, dan anak dari Pangeran Suryadiningrat atau Ki Bagus Arsitem yang tinggal di Kertajati. Ada pula yang menyatakan bahwa Ki Bagus Rangin yang ketika muda bernama Pangeran Atas Angin atau pangeran Bagus Rarangin lahir di Kertajati merupakan anak dari Ki Bagus Sentayem atau Ki Bagus Tenom yang sebenarnya bernama Pangeran Suryadiningrat, keturunan dari Syekh Idrus atau Pangeran Jayanegara, putra Sultan Sena Zainuddin (1753-1786) dari Keraton Kasepuhan.<sup>33</sup>

Figur Ki Bagus Rangin di masa kanak-kanak digambarkan sebagai anak yang semenjak kecil telah diwajibkan menuntut ilmu di berbagai pesantren. Selain berguru kepada ayahnya, Ki Bagus Rangin juga berguru kepada beberapa ulama lain seperti ulama Banten yang menetap di Kertajati, yang kemudian dikenal dengan panggilan Rama Banten. Guru lainnya adalah Raden Hasanudin atau yang lebih dikenal dengan Syekh Jatira, salah seorang ulama yang melakukan perlawanan terhadap Belanda pada saat pembangunan jalan besar pos yang melewati daerah Babakan Ciwaringin.<sup>34</sup>

Dari ayahnya, Ki Bagus Rangin banyak menimba ilmu agama, di samping mendapatkan pengetahuan “ilmu duniawi” seperti ilmu bercocok tanam, berdagang, dan ilmu pemerintahan. Pengetahuan Ki Bagus Rangin dalam ilmu agama diperdalam lagi dengan mempelajari tarikat dan ilmu kesaktian untuk membela diri pada Rama Banten. Salah satu ilmu kesaktian yang diperolehnya adalah penguasaan senjata cambuk atau cemeti yang sudah diisi dengan kekuatan tenaga dalam hingga mampu melumpuhkan lawan dari jarak jauh.<sup>35</sup> Sementara itu dari Syekh Jatira, Ki Bagus Rangin selain mendapatkan ilmu

---

<sup>33</sup> Mashum Hidayatullah, *Sejarah Singat Ki Bagus Rangin*. (Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 3; Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 2.

<sup>34</sup> Mashum Hidayatullah, *ibid.* hlm. 4; Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 170.

<sup>35</sup> *Bagoes Rangin 1812*, *Bundel Cheribon Nomor 39/8*, (Jakarta: Koleksi Arsip Nasional RI, 1812), hlm. 1-7.

agama juga, ia banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan strategi berperang dan banyak mendapatkan penanaman jiwa patriot.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan K.H. Jamjami, Ki Bagus Rangin banyak ke beberapa guru dan belajar ilmu *Thoriqoh*. Salah satu gurunya yang mempengaruhi sikap dan tindak tanduknya adalah Rama Banten. Selain belajar ilmu nahwu dan Sharaf, ia juga mempelajari ilmu *Thoriqoh*.<sup>36</sup> Pernyataan ini diambil dari *crosscheck* proses verbal terhadap keponakan Ki Bagus Rangin yang tertangkap Belanda yaitu Ki Bagus Manoch ia diinterogasi mengenai sejarah bagaimana Ki Bagus Rangin mendapatkan kesaktiannya. Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, Ki Bagus Rangin adalah orang yang tercerahkan pada zamannya, ia dianggap yang *Messian* atau pembebas rakyat yang sedang mengalami kesengsaraan akibat penjajahan. Rakyat Cirebon meyakini bahwa Ki Bagus Rangin adalah seorang yang sangat terhormat dan disegani serta diharapkan menjadi pemimpin yang bisa membebaskan dan menolong mereka dari kesengsaraan, penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah menuju keemasan dan kesejahteraan.<sup>37</sup>

Berkat *gemblengan* dari orang tua dan beberapa guru tersebut, hal ini telah membentuk figur Ki Bagus Rangin bukan sekedar matang secara spiritual tetapi juga menjadi sosok pemberani dan siap berperang. Kecakapannya dalam ilmu pemerintahan telah menjadikan Ki Bagus Rangin diangkat sebagai pemimpin daerah kebagusan Jatitujuh. Dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut, figur Ki Bagus Rangin di tengah -

---

<sup>36</sup>Makna *thoriqoh* sendiri memiliki arti berusaha menahan dari segala hawa nafsu seperti melakukan puasa berpantang; meninggalkan tempat ramai untuk berkhawat di tempat yang sunyi, seperti di gunung-gunung, goa, hutan belantara; di mana orang Cirebon mengenalnya dengan *Mati Geni*. Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 170.

<sup>37</sup>*Bagoes Rangin 1812, Bundel Cheribon Nomor 39/8*, (Jakarta: Koleksi Arsip Nasional RI, 1812), hlm. 1-7; Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 170-171.

tengah masyarakat menjadi lebih populer sebagai pemimpin yang mudah sekali mendapatkan pengikut. Jumlah pengikut Ki Bagus Rangin banyak tersebar, membentang dari ujung timur Semarang, hingga Sumedang, Majalengka, Kuningan dan di berbagai wilayah lainnya, termasuk Indramayu.<sup>38</sup>

Di Indramayu, perlawanan Ki Bagus Rangin terhadap Belanda tercatat dengan jelas dalam *Babad Dermayu*.<sup>39</sup> Di dalamnya disebutkan bahwa keinginan Ki Bagus Rangin untuk mengajak rakyat berjuang melawan pemerintah Kolonial Belanda mendapat respon yang baik dari masyarakat sekitarnya. Orang-orang yang memegang peranan penting dalam gerakan pemberontakan tersebut, selain Ki Bagus Rangin sendiri adalah Bagus Surapersanda, Bagus Seling, Bagus Sena, Bagus Jabin, Bagus Prasana, Bagus Layung, Bagus Serit, Bagus Leja, Bagus Kandar, Bagus Jari, dan Ciliwidara. Mereka banyak berasal dari wilayah yang beragam, ada yang berasal dari Bantarjati, Biyawak, Jatitujuh, Kulinyar, Pamayahan, dan ada pula yang dari Banten.

Keresahan yang diakibatkan kesengsaraan akibat penjajahan Belanda, memaksa rakyat Cirebon dan sekitarnya menunggu akan kedatangan sosok manusia *insanul Kamil* untuk memberikan kesejukan dan kedamaian bagi mereka. Akumulasi dari keseluruhan itu mendorong rakyat untuk berharap hadirnya seorang pemimpin yang mampu memimpin dan memerintah dengan kebijakan yang mendukung rakyat. Pemimpin yang mengayomi, ia memiliki jiwa kewiraan dan tanggung jawab lebih untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpinya. Pemimpin yang dinanti-nantikan itu ternyata ada pada figur Ki Bagus Rangin, yang dekat dengan rakyat dan mempunyai ilmu agama yang tinggi. Ia sering melakukan pengajian dan doa bersama dengan rakyat Cirebon.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>*Bagoes Rangin 1812, Bundel Cheribon Nomor 39/8, ibid., hlm. 1-7; Zamzami Amin, loc. cit., hlm. 170-171.*

<sup>39</sup>Lihat *Babad Dermayu (Babad Carbon II)*, yang ditulis antara 1818-1913, disalin 1913 oleh penulis pertama tahun 1913.

<sup>40</sup>Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 171.

Dalam gerakan protes yang dipimpin Ki Bagus Rangin banyak mengandung unsur *mesianisme* dan militanisme. Hal ini terjadi karena Ki Bagus Rangin dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh yang ditunggu-tunggu untuk dapat membebaskan dari kesengsaraan. Sebagai seorang yang ditokohkan dan dipercaya oleh para pengikutnya, yang menjadi bukti nyata bahwa unsur *mesianisme* melekat pada diri Ki Bagus Rangin ialah segala tindak tanduknya dapat terlihat mempunyai pengaruh yang besar dan diikuti oleh rakyat yang berada di Keresiden Cirebon pada waktu itu. Ki Bagus Rangin dianggap sebagai titisan ratu adil yang akan melenyapkan kedhaliman dan ketidakadilan serta membawa kepada suasana adil dan makmur dalam sebuah negara yang akan dibangunnya, yakni negara Panca Tengah.<sup>41</sup>

Berbagai bentuk simbol ghaib yang bersifat magis dan religious dalam gerakan perlawanan yang dipimpin Ki Bagus Rangin dapat dilihat dari kenyataan bahwa pemimpin gerakan ini memulai usahanya dengan menghindarkan diri dari ibukota untuk hidup dalam pengasingan dan melakukan semedi dan ritual kedigjayaan. Ki Bagus Rangin sebagai seorang pemimpin gerakan perlawanan berusaha mencoba memusatkan pikiran dan perasaan, melakukan meditasi, mengheningkan cipta dan memusatkan segenap pikirannya, dengan mensucikan dan membersihkan dirinya dengan meniadakan segala hasrat jasmaniah sebagai seorang manusia. Tampaknya hal ini memiliki kemiripan yang sama seperti yang dilakukan oleh hampir setiap pemimpin gerakan perlawanan di berbagai tempat di Indonesia, sebut saja seperti yang dilakukan para pemimpin dalam gerakan pemberontakan petani Banten, perlawanan petani Indramayu, gerakan perlawanan masyarakat rakyat Aceh dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja dilakukan dengan

---

<sup>41</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 171.

harapan dapat memperkuat batinnya untuk menghindari konfrontasi kekuatan yang akan datang.<sup>42</sup>

Harapan datangnya Sang Ratu Adil sebagai pembebas dari zaman kegelapan dan datangnya zaman keemasan yang mampu memutarbalikan kedudukan penguasa saat itu terdapat dalam cita-cita Ki Bagus Rangis dan para pengikutnya untuk mendirikan sebuah kerajaan tersendiri yang bernama Panca Tengah dan berpusat di Bantarjati. Tujuan mendirikan suatu pemerintahan yang berpusat di Bantarjati ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dari penindasan dan pajak-pajak yang dibebankan pemerintah Belanda, dan kesewenang-wenangan orang-orang Cina yang banyak menguasai sektor ekonomi dan sawah-sawah warga. Harapan akan datangnya Sang Pencerah, yang bisa membawa keadilan dan kemakmuran ada pada kerajaan yang dibangun dan dirintis bersama rakyat Cirebon dan Ki Bagus Rangin. Sikap dan sugesti ini muncul karena digerakkan oleh kesadaran akan kenyataan ekonomi dan realitas sosial yang sudah sedemikian melenceng dari harapan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat yang berada di keresidenan Cirebon pada umumnya. Kesengsaraan atas tindakan kesewenang-wenangan penjajah Belanda melakukan yang melakukan eksploitasi ekonomi telah memaksa warga menjadi miskin, tertinggal, bodoh dan memburuknya kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan fakta sejarah ini telah menggambarkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin merupakan reaksi dari adanya ketidakadilan dan kesengsaraan rakyat Cirebon yang diakibatkan penjajahan Belanda di tanah Air dan para elit pribumi yang menjadi cukong-cukong Belanda yang korup.<sup>43</sup>

Gerakan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin juga tidak dapat dipisahkan dari aspek agama. Dalam penyerangannya terhadap orang-orang Belanda terpotret

---

<sup>42</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 172.

<sup>43</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 172.

bahwa ketaatan dan fanatisme yang tinggi yang ditunjukkan oleh para pengikut Ki Bagus Rangin terlihat dari ketaatan yang ditunjukkan para pengikut Ki Bagus Rangin terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Di dalam menanamkan perjuangannya kepada masyarakat, Ki Bagus Rangin dalam setiap shalat Jumat, kepada para santrinya yang notabene merupakan para pengikutnya senantiasa menganjurkan untuk menggunakan pakaian putih-putih sebagai simbol keikhlasan, rela berkorban jiwa raga, demi agama dan tanah air tempat kelahiran. Pada masa-masa ini perekat perjuangan untuk membangkitkan semangat tidak ada cara lain selain membangun dan menanamkan kesamaan aqidah dan agama sebagai simbol perlawanan  *Jihad fisabilillah*  melawan pemerintah kolonial Belanda.<sup>44</sup>

Pola perjuangan dengan menerapkan konsep guru (*mursyid*) dan murid yang dilakukan Ki Bagus Rangin dalam gerakan perjuangannya bisa ditelaah melalui ajaran *thoriqoh* yang dianut Ki Bagus Rangin yang dipelajari dari Rama Banten dan ayahnya sebagai seorang kiyai kharismatik. Walaupun berdasarkan sumber yang diperoleh ia tidak pernah memunculkan sebagai penganut dari ajaran *thoriqoh* Syatariyah, Qodiriyah, Naqsabandiayah, ataupun Sanusiyah, namun bila memperhatikan pola perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam menentang pemerintah kolonial banyak menerapkan pola-pola perjuangan yang dilakukan oleh sebuah *thoriqoh*, terutama dalam upaya-upaya membangun penggalangan dan mobilisasi masyarakat. Tampaknya sampai di sini pola gerakan yang biasa dilakukan dalam sebuah "organisasi" *thoriqoh* dipandang lebih ideal sebagai sarana untuk melakukan gerakan massif di dalam melakukan

---

<sup>44</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 173.

perlawanan terhadap kedzaliman yang dilakukan penjajah Belanda.<sup>45</sup>

Gerakan perlawanan Ki Bagus Rangin di dalam menentang pemerintah Kolonial-Belanda dengan menerapkan pola *thoriqoh* hasilnya cukup signifikan terutama sekali di dalam menggalang persatuan dan kesatuan. Ki Bagus Rangin dalam perjalanan hidupnya pernah menobatkan diri menjadi raja Panca Tengah. Apa yang dilakukakannya bisa dipandang wajar dan bisa dipahami, tiada lain karena pada dasarnya ditujukan sebagai *balance of power* mengingat kekuatan yang dihadapinya adalah kekuatan pemerintah kolonial Belanda yang dibantu Sultan Cirebon dan para sekutunya, yang meliputi Sumedang dan Karawang. Hal ini juga, yang menjadi alasan pemerintah kolonial-Belanda berusaha untuk menangkap Ki Bagus Rangin yang dianggap *mbalelo* melakukan makar dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Cirebon.<sup>46</sup>

Dari berbagai perjalanan perjuangan yang telah dilakukan dan ditunjukkan oleh Ki Bagus Rangin di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tersebut, dapat dipastikan bahwa perlawanan Ki Bagus Rangin dan kelompoknya terhadap Belanda telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Tercatat dalam kurun waktu 1800-1818 Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya yang melanjutkan estapeta perjuangannya telah berjuang mati-matian dengan mengorbankan pikiran, tenaga, harta dan nyawa untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, tidak hanya dilakukan dan terjadi di wilayah yang pada abad ke-19 tercatat secara wilayah administratif berada di wilayah keresidenan

---

<sup>45</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 173.

<sup>46</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 173.

Cirebon, tetapi kemudian meluas hingga ke Subang, Karawang, dan Sumedang.<sup>47</sup>

Dengan jangkauan periodisasi waktu yang panjang, yaitu mendekati dua dasawarsa, kemunculan gerakan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin terhadap pemerintah kolonial Belanda bagaimanapun telah menimbulkan korban pasukan dari kedua belah pihak, baik dari pihak Ki Bagus Rangin maupun dari pihak pemerintah kolonial Belanda dan sekutunya. Selama dalam kurun waktu tersebut, bisa dibayangkan betapa besarnya gelombang-gelombang pertempuran yang terjadi antara pasukan Ki Bagus Rangin dan pemerintah kolonial Belanda. Begitu juga dengan kerugian yang ditimbulkan dari Pemberontakan tersebut. Dalam *Babad Dermayu* disebutkan bahwa penumpasan gerakan Ki Bagus Rangin di keresidenan Cirebon telah membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami kerugian sebanyak f. 1.830, sebuah jumlah biaya kerugian yang besar pada masa itu. Namun demikian, kerugian tersebut harus ditanggung pemerintah Indramayu. Oleh karena Bupati Indramayu tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, sebagai konsekuensinya Bupati Indramayu harus menyerahkan beberapa wilayah kekuasaannya kepada pihak yang telah membantu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Secara singkat, gerakan penentangan terhadap pemerintah kolonial tersebut dapat dipolarisasikan dibagi ke dalam dua tahap, yaitu pada tahap yang pertama pada tahun 1802 dipimpin Ki Bagus Rangin. Pada periode ini Ki Bagus Rangin bersama dengan pengikutnya melakukan perlawanan di wilayah Keresiden Cirebon hingga keluar Keresiden Cirebon. Pada periode ini Ki Bagus Rangin bercita-cita membangun negara Panca Tengah. Gerakan ini mengalami kegagalan setelah Ki Bagus Rangin dan beberapa pengikutnya ditangkap oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1812. Sementara pada periode kedua berlangsung dari tahun 1816 sampai tahun 1818. Gerakan penentangan pada periode ini dilakukan oleh para pengikut Ki Bagus Rangin, karena diduga Ki Bagus Rangin sudah meninggal dunia. Lihat R.A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 4-7.

<sup>48</sup>Pada masa periode awal perang Kedondong, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1802 setelah pemberontakan yang dipimpin Bagus Sidong berakhir, Bagus Sidong dan dua orang anaknya membuat beberapa kesepakatan. Salah satu bunyi kesepakatan tersebut adalah pihak pihak Kasepuhan dan Kanoman harus membayar kerugian akibat ulah para pemberontak dan harus lunas dalam waktu 10 tahun. Lihat Djoko Marihandono, "Daendels dalam Naskah Cerita Rakyat: Cerita yang Berkaitan dengan Daendels di Pantai

## C. Sebab-sebab Munculnya Gerakan Penentangan dan Perlawanan Ki Bagus Rangin

### 1. Imperialisme bangsa Belanda dan Inggris di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon

Membincang tentang imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa yang terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia yang terjadi selama dalam kurun waktu dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-19, secara umum kegiatan imperialisme itu sendiri terbagi kepada dua bentuk, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah bentuk imperialisme yang dilakukan negara-negara Eropa dengan motivasi untuk mencari kekayaan (*gold*), mencari kejayaan (*glory*) dan menyebarkan agama Nasrani (*gosvel*)<sup>49</sup> yang kemudian diikuti dengan semangat *reqonguesta* (memerangi orang-orang Islam di setiap daerah yang ditemuinya). Kegiatan imperialisme dalam bentuk Imperialisme kuno yang terjadi di Indonesia umumnya berlangsung pada abad ke-16 - ke-18 M. Pada masa ini kegiatan imperialisme banyak dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol, dengan perjanjian Tordesillas sebagai “payung hukumnya”.

Kemudian seiring dengan runtuhnya pamor kekuasaan Portugis dan Spanyol yang terjadi sampai dengan akhir abad ke-18 M, maka sejak abad ke-19 M kegiatan imperialisme yang dilakukan negara-negara Eropa dapat diidentifikasi dalam bentuk imperialisme modern. Disebut imperialisme modern, karena kegiatan imperialisme yang dilakukan negara-negara Eropa pada abad masa itu dimotivasi oleh adanya persaingan di antara negara-negara Eropa untuk mendapatkan bahan-bahan mentah untuk keperluan industri sekaligus kepentingan memasarkan hasil-hasil industrinya di negara-negara jajahannya.

---

Utara Jawa”. *Makalah*, dalam seminar Internasional Tradisi Lisan IV. Jakarta: 2 – 5 Oktober 2003, hlm. 15.

<sup>49</sup>A. Mansur Suryanegara, *Amerika Menolak Presiden Amerika*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 18.

sinkron dengan berkembangnya sektor industri setelah terjadinya Revolusi Industri di Inggris.

Pada masa ini, bersamaan dengan kemunduran yang dialami oleh Dunia Islam, terutama di Kerajaan Turki Usmani dan Kerajaan Mughal serta kehancuran yang diderita Kerajaan Safawiyah, di antara negara-negara Eropa terjadilah persaingan dan perlombaan untuk mendapatkan tanah jajahan baru di benua Asia dan di Afrika, termasuk dalam hal ini terhadap wilayah-wilayah di kawasan Asia Tenggara. Begitu juga, jika tidak berhasil mendapatkan tanah jajahan di wilayah-wilayah itu, di antara negara-negara Eropa berusaha semaksimal mungkin dengan menjadikan wilayah yang masih merdeka sebagai bagian dari pengaruhnya. Adapun di antara negara-negara Eropa yang berperan di dalam kegiatan praktek-praktek imperialisme modern ini adalah Inggris, Perancis dan Belanda.

Pada periode abad ke-17 s.d. abad ke-19 M, banyak negeri-negeri Muslim yang berada di berbagai belahan dunia, baik itu yang berada di benua Asia dan Afrika kondisinya sedang mengalami kemunduran, baik secara politis, agama, ekonomi, maupun sosial-budayanya. Kondisi seperti ini di alami juga oleh masyarakat Muslim di Indonesia yang pada waktu itu namanya Hindia Belakang atau Hindia-Belanda. Di tengah kemunduran yang dialami negeri-negeri Muslim tersebut, justru di dunia Barat (baca: Eropa), kondisinya sedang bangkit. Dapat dikatakan, bahwa peradaban mereka sedang bergerak ke arah kemajuannya, baik dalam bidang politik, ekonomi, agama maupun sosial-budaya. Kemajuan peradaban Barat dalam berbagai bidang ternyata telah membawa dampak negatif terhadap negeri-negeri Muslim, di mana seiring dengan majunya peradaban barat, pada saat yang bersamaan di dunia barat sendiri berkembang semangat imperialisme/kolonialisme yang kemudian dalam perjalanannya telah membawa negeri-negeri Muslim menjadi korban dari praktik-praktik

imperialisme/kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh bangsa Inggris, Perancis dan Belanda. Periode abad ke-19 dapat dikatakan sebagai puncak keberhasilan dari kegiatan imperialisme negara-negara Barat di wilayah-wilayah Islam. Pada periode imperialisme modern inilah banyak negeri-negeri Muslim yang jatuh ke tangan bangsa Inggris, Perancis, Belanda dan Italia. Pada masa ini telah banyak di antara negeri-negeri Muslim yang dikuasai, di-*kawling-kawling* dan diperintah oleh kekuatan asing, termasuk dalam hal ini bumi Indonesia.

Timbulnya kegiatan imperialisme yang dilakukan negara-negara Barat memiliki keterkaitan dengan kondisi dan faktor yang terjadi di Eropa sendiri. Di antara kondisi dan faktor yang mendorong timbulnya kegiatan imperialisme Barat ialah bahwa sejak kira-kira tahun 1880 M di wilayah Eropa berkembang suatu kegiatan yang berhubungan dengan berkembangnya semangat akan perlunya identitas kebangsaan atau nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa Eropa yang berkobar sesudah pecahnya revolusi Perancis. Kemudian yang kedua timbulnya imperialisme Barat di Dunia Islam memiliki keterkaitan juga dengan muncul dan semakin menjalarnya kegiatan industrialisasi terlebih setelah di Eropa terjadi revolusi industri. Selanjutnya imperialisme Barat di Dunia Islam memiliki keterkaitan dengan berkembangnya sistem perekonomian yang bersifat kapitalistik yang menjamur di negara-negara Eropa.<sup>50</sup>

Yang pertama adalah yang berhubungan dengan berkembangnya semangat akan perlunya identitas kebangsaan atau nasionalisme yang berkembang di Eropa. Nasionalisme di kalangan negara-negara Eropa pada abad ke-19 M semakin bertambah kuat karena didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Paura/Bourjouis. Perlu dikemukakan bahwa Industrialisme dan kapitalisme mendorong nasionalisme, karena

---

<sup>50</sup>Jan Romein, *Aera Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*, Terj. Noer Toegiman, Bandung-Djakarta-Amsterdam: Ganaco, 1956), hlm. 139.  
138 | Geger Ciayumajakuning

kedua-duanya menimbulkan kemungkinan orang mengadakan ekspansi ekonomi, yang menimbulkan iri hati dan persaingan di antara bangsa-bangsa yang menghendaki kekuasaan dunia. Periode dari abad ke-19 di Eropa merupakan abad yang penuh nyanyian sejarah, roman sejarah, dan rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan (*chauvinisme*), sehingga dalam hal-hal tertentu bertendensi sangat membahayakan karena terlalu mengagungkan akan kelebihan bangsanya sendiri. Periode abad ke-19 bagi Eropa disebut juga abad *jingoisme*, yakni suatu paham kebangsaan atau nasionalisme yang lebih bersifat berani menentang. Perlu juga diketahui bersama bahwa di atas nasionalisme negara, pada abad ke-19 M di benua Eropa muncul pula nasionalisme Eropa yang ditujukan terhadap bangsa-bangsa lain yang berada di luar benua Eropa dengan mengambil bentuk dalam perasaan lebih (superior) yang dimiliki bangsa kulit terhadap bangsa kulit berwarna. Perasaan lebih itu sering diungkapkan dalam ungkapan *the white man's burden*. Dalam paham itu terlihat adanya unsur angkara murka yang hanya dapat dipuaskan dengan melakukan pemerasan terhadap tanah jajahan.<sup>51</sup>

Kedua, timbulnya imperialisme Barat di dunia Islam didorong oleh berkembangnya kegiatan industrialisasi. Yang dimaksud dengan berkembangnya kegiatan industrialisasi itu berarti bahwa industri tidak hanya terfokus dengan mempergunakan alat-alat mesin, tetapi juga berkembangnya tenaga produksi dalam segala lapangan dalam abad XIX. Perubahan ini semakin cepat setelah di Inggris terjadi revolusi yang banyak mengubah kehidupan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi, kenegaraan dan politik.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Jan Romein, *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>52</sup>J.A. Willem son, "The Expansion of Euope" dalam John Bowle *The Concise Encyclopedia of World History*, (London: Hutchinson, 1971), hlm. 233.

Sebagai negara tempat terjadinya revolusi industri, Inggris telah memelopori Eropa dalam pembangunan industri. Melalui serangkaian peristiwa kurang lebih setengah abad sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 M, kemunculan revolusi industri telah berhasil mengkonversi tenaga-tenaga manusia sebagai sumber penggerak dengan tenaga-tenaga mesin yang dapat melipatgandakan produksi. Dengan demikian kemunculan revolusi industri di samping membantu meringankan pekerjaan manusia, secara ekonomis juga sangat menguntungkan bagi usaha memenuhi dan memperbaiki kehidupan manusia. Begitulah revolusi industri di Inggris yang kemudian menjalar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Perancis, Jerman, Italia, Belgia dan lain sebagainya.

Kendati demikian, dengan berubahnya negara-negara Eropa menjadi negara industri pada abad ke-18 dan ke-19, maka yang menjadi persoalan berikutnya adalah pertama, bahwa setelah menjadi negara industri, bagaimana negara-negara Eropa bisa memenuhi akan kebutuhan bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk keperluan industri, sementara di negara-negara Eropanya sendiri persediaan bahan-bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan industri sangat terbatas. Kedua, berkaitan dengan berkembangnya sektor industri itu sendiri, persoalan berikutnya adalah bagaimana bisa memasarkan kembali hasil-hasil industrinya itu, karena dengan tingkat produksi yang berlebih tidak mungkin bisa dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat Eropa saja.

Berangkat dari kenyataan tersebut, bagi negara-negara Eropa upaya mencari pemecahan dari persoalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan melirik wilayah-wilayah di luar Eropa dalam hal ini wilayah-wilayah koloni mereka di Asia dan Afrika. Bagi negara-negara Eropa, wilayah-wilayah di Asia dan Afrika adalah wilayah yang kaya dengan sumber-sumber bahan

mentah, seperti halnya kapas yang sangat dibutuhkan Inggris untuk keperluan industri tekstilnya.

Senada dengan pernyataan di atas, Jan Romein lebih lanjut mengemukakan bahwa di samping hasil-hasil industri yang diproduksi di Eropa dapat dipergunakan untuk konsumsi mereka di tanah air sendiri, maka masih ada lagi pasar yang lebih besar potensinya, yakni daerah yang masih merdeka tetapi masih terbelakang, yang dapat dijadikan tanah jajahan.<sup>53</sup> Oleh karena itu dengan tanpa mendapat banyak hambatan, maka daerah-daerah yang terdapat di luar benua Eropa semakin cepat terseret dalam banjir-banjir barang imperialisme. Dalam sistem kapitalis itu, maka fungsi tanah jajahan yang kedua, di samping menjadi pasar barang industri ialah menjadi gudang bahan mentah yang dapat dihasilkan oleh tenaga yang sangat murah. Selanjutnya, Fungsi ketiga dari tanah jajahan juga berperan sebagai tempat untuk penanaman modal bagi produksi bahan mentah. Begitu juga dengan pengangkutannya yang memberikan kemungkinan untuk menanamkan modal dalam perkebunan kopi, teh, gula, karet dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Oleh karena itu jika sebelum terjadinya revolusi industri, di antara negara-negara Eropa seperti Inggris dan Perancis banyak yang memiliki daerah jajahan yang luas, maka setelah menjadi negara industri, negar-negara ini makin memperluas usahanya untuk mendapatkan daerah jajahan baru. Rupanya tingkat perindustrian yang maju telah mengakibatkan produksi menjadi berlebih, jauh melebihi kebutuhan dalam negeri, sehingga terjadi ekspor tekstil Inggris ke Eropa. Namun ketika negara-negara Eropa lainnya membangun industrinya, Inggris terpaksa mencari daerah-daerah pelemparan untuk hasil industrinya di luar Eropa.

---

<sup>53</sup>Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 140.

<sup>54</sup>Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 140-141.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami dengan jelas mengapa wilayah-wilayah yang berada di benua Asia dan Afrika banyak yang jatuh menjadi wilayah jajahan negara-negara Eropa. Karena dengan kondisi dan berangkat dari motif inilah yang mendorong negara-negara Eropa tetap berusaha untuk mempertahankan tanah jajahannya di Asia dan Afrika. Terlebih bahwa wilayah-wilayah yang berada di benua Asia dan Afrika pada umumnya merupakan negeri-negeri penghasil bahan-bahan mentah yang sangat diperlukan untuk keperluan industri negara-negara Eropa. Begitu pula bila ditambah dengan kondisi bahwa wilayah-wilayah yang berada di benua Asia dan Afrika merupakan wilayah yang luas dengan penduduk yang banyak dan besar sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai tempat untuk memasarkan hasil-hasil industrinya. Dengan demikian dalam konteks ini dapatlah dipahami mengapa negara-negara Eropa senantiasa menjadikan wilayah-wilayah yang berada di benua Asia dan Afrika sebagai tanah jajahannya.

Karena begitu besar nilai dari tanah jajahan, maka terjadilah persaingan yang hebat di antara negara-negara Eropa untuk memperolehnya. Mula-mula negara Inggris menjadi pemukanya, kemudian diikuti Perancis, Jerman dan Italia. Selanjutnya pada tahun 1900-an menyusul Amerika. Persaingan itu akhirnya menjadi kegiatan perlombaan membagi-bagi dunia. Jika suatu daerah ternyata tidak dapat dijadikan tanah jajahan, pecalah perlombaan untuk membuat daerah itu menjadi daerah pengaruh, yang dicadangkan untuk penanaman modal sendiri.<sup>55</sup>

Kemudian kondisi dan faktor ketiga yang mendorong timbulnya imperialisme Barat di Dunia Islam ialah karena didorong oleh adanya perkembangnya sistem perekonomian

---

<sup>55</sup>Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 141.

yang bersifat kapitalis<sup>56</sup> di Eropa pada abad ke-19. Kapitalis<sup>57</sup> adalah suatu bentuk kepemilikan yang dipergunakan untuk memperbanyak kepemilikan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, orang mengadakan produksi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bagaimana orang mengadakan produksi dengan orientasi bisa memperoleh *profit* atau laba yang sebesar-besarnya. Biasanya *profit* yang diperoleh, sesudah dikurangi untuk menutupi ongkos yang dikeluarkan, dipergunakan untuk mengadakan perusahaan baru.

Paham kapitalisme berkembang di Eropa dalam tiga tahap, yakni kapitalisme dagang, dimana para pengusaha memperbesar kapitalnya dengan transaksi dagang dan laba yang diperolehnya dipergunakan untuk mengadakan transaksi lain. Kemudian kapitalisme industri, yang timbul ketika industri

---

<sup>56</sup>Jan Romein menginformasikan bahwa kegiatan ekonomi yang bercorak kapitalis mula-mula timbul dalam bentuk sederhana di Eropa pada tahun 1250 M dalam lapangan industri tekstil. Pada mulanya adalah bangsa Belanda yang mengadakan perusahaan tenun domba dengan memperoleh dari daerah sendiri. Tetapi kemudian karena ekspor barang tenunan meningkat, kebutuhan akan bulu domba harus didatangkan dari daerah lain, terutama dari pasar Calais, yang mendatangkannya lagi bulu domba dari Inggris. Pengusaha yang memiliki modal yang besar menempatkan dirinya antara penenun dan bahan tenun; diborongnya bulu domba di Calais itu, lalu dijualnya kepada penenun. Dalam taraf berikutnya bulu domba benar-benar telah menjadi milik saudagar, yang telah dapat disebut menjadi seorang pengusaha. Penenun hanya disuruhnya mengerjakan bulu dombanya dan penenun itu hanya mendapat sebagian dari hasil pekerjaannya, hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, sisanya menjadi laba perusahaan. Dengan demikian orang-orang yang bekerja pada perusahaan tenun itu menjadi pekerja dari pengusaha itu, sebab pengusaha itu yang memiliki kapital perusahaan. Hidup mereka bergantung pada pengusaha itu. Jika penenun tidak mempunyai uang pembeli alat-alat, pengusaha memberikan alat yang dibutuhkan itu, tetapi sebagian dari laba harus diberikan kepada pengusaha. Dengan demikian timbullah kaum pengusaha yang cerdik, kaya dan berkuasa, yang berhadapan dengan kaum buruh yang miskin dan tidak berdaya. Lihat Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 97.

<sup>57</sup>Salah satu karakteristik yang menonjol dari sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan. Seorang pengusaha mengadakan persaingan hebat. Siapa yang dapat membuat barang sebanyak-banyaknya, maka di samping bisa menjualnya dengan harga serendah-rendahnya, ia akan dapat menguasai pasar dan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengusaha yang memiliki modal yang besar dan cerdik dapat mendesak produksi saingannya, sebab bagi saingan itu produksi hanya berarti rugi saja. Dengan demikian saingan itu mati terdesak. Salah satu cara untuk mendesak saingan ialah *dumping*. Seorang pengusaha yang besar modalnya atau gabungan pengusaha dapat menguasai pasar suatu daerah dengan jalan menjual barang di bawah harga pokok selama waktu yang tertentu.

yang telah dimekanisasi lebih menguntungkan bagi penanaman modal. Dalam kapitalisme industri biasanya Industri telah menjadi perusahaan besar, lengkap dengan gedung, mesin dan alat-alat pengangkut bahan dan barang-barang pabrik yang makin lama makin sempurna. Selanjutnya, setelah kapitalisme industri berkembang kapitalisme keuangan. Dalam kapitalisme keuangan biasanya terjadi pemusatan bank dan perkreditan.<sup>58</sup>

Pada awalnya sistem ekonomi kapitalis tumbuh dan berkembang di Eropa Barat, tepatnya di kota-kota Italia Utara, Jerman Selatan, Belanda, Perancis Utara dan Inggris. Kemudian kapitalisme meluaskan sayapnya ke Amerika Utara. Daerah itu pada mulanya merupakan koloni Inggris. Barang-barang impor didatangkan dari tanah induk di Inggris. Tetapi sesudah proklamasi kemerdekaan tahun 1776 di daerah itu timbul pula suatu industri yang bersifat kapitalis. Seperti laksana tetesan minyak di atas kertas, maka kapitalisme itu semakin meluaskan ke mana-mana. Mula-mula ke seluruh Eropa, kemudian juga ke tanah jajahan Perancis, Inggris dan tanah jajahan Belanda di Afrika dan Asia.<sup>59</sup>

Kapitalisme telah menelurkan manusia baru, yang di tanah Inggris disebut *Captain of industry*. Manusia atau bangsa kapitalis adalah Jenis manusia atau bangsa yang selalu mawas dan penuh dengan semangat usaha. Manusia yang berani mengadu untung, yang dapat mengambil keputusan tepat dalam keadaan darurat, manusia yang mempunyai naluri tentang apa yang akan terjadi, dapat mengambil keputusan dengan cepat. Pendek kata manusia kapitalis adalah jenis manusia yang dapat menimbulkan rasa hormat pada orang lain. Namun sayang, sifat istimewa itu mereka kembangkan dengan tujuan agar laba atau keuntungan yang mereka peroleh dapat selalu bertambah besar. Bangsa-bangsa Eropa membanjiri negeri-negeri yang ada di Benua Asia dan Afrika, termasuk Indonesia dengan barang-

---

<sup>58</sup>Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 140.

<sup>59</sup>Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 99.

barang, bukan dengan tujuan menghilangkan kemiskinan, melainkan menambah jurang kemiskinan dengan kekayaan mereka sendiri.<sup>60</sup>

Setelah bangsa-bangsa Eropa berhasil mengambil alih dan menguasai wilayah-wilayah yang ada di benua Asia dan Eropa, beberapa hal penting yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa yang dilakukan di wilayah-wilayah yang berada di benua Asia dan Afrika termasuk salah satunya di Indonesia ialah mereka mulai melakukan reorganisasi dan menerapkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan yang bisa memberikan keuntungan sesuai dengan tujuan dari kegiatan imperialisme.

Di antara langkah-langkah yang dilakukan negara-negara Eropa selama melakukan penjajahan terhadap wilayah-wilayah tersebut, di antaranya dapat dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, melakukan pendudukan, aneksasi, penjualan hak kepemilikan tanah dan tanam paksa. Di Indonesia, Belanda pun setelah menerima penyerahan tanah jajahan dari Inggris melalui Konvensi London pada tahun 1816, tidak ketinggalan bahwa di dalam menerapkan praktek-praktek imperialismenya mulai memberlakukan politik pemerasan melalui kegiatan tanam paksa di mana penduduk dipaksa menanam sebagian tanahnya dengan tanaman yang laku di pasar-pasar Eropa. Di dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkannya, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan pemaksaan terhadap para penduduk untuk menyediakan tanah 1/5 tanah pertanian desa. Pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan bentuk kontrak dengan rakyat mengenai mekanisme penyerahan sebagian tanah pertanian desa yang akan ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia dan menyampaikan bahwa tanah yang akan dipergunakan akan dibebaskan dari pajak.

Namun demikian, dalam realitanya tanah desa yang dipergunakan untuk tanam paksa dalam prakteknya banyak

---

<sup>60</sup>Jan Romein, *loc. cit.*, hlm. 99.

yang melebihi dari 1/5 tanah pertanian desa, malahan ada yang setengahnya. Begitu pula dengan tanah yang dipergunakan pada umumnya adalah tanah-tanah yang subur. Selain itu waktu yang dipergunakan untuk pemeliharaan tanaman umumnya melebihi waktu menanam padi, sehingga waktu kerja yang diperlukan rakyat untuk mencukupi keperluan keluarganya makin berkurang. M.C. Rickhiefs menyatakan dengan adanya kebijakan tanam paksa telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap rakyat. Besarnya angka kemiskinan yang diikuti dengan munculnya ancaman bahaya kelaparan banyak terjadi di mana-mana. Tanah-tanah pertanian menjadi rusak karena banyak yang dipergunakan untuk menanam tanaman yang berbeda dengan kebiasaan.<sup>61</sup>

*Kedua*, melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia. Adapun tindakan Belanda di Indonesia dalam usaha mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan dan sumber daya manusia, tampak dengan dimulai ketika VOC masih ada, bangsa Belanda di Indonesia telah memberlakukan praktek-praktek monopoli, hongli dan ekstirpasi. Ira M. Lapidus<sup>62</sup> menyatakan sebelum tahun 1795 M Belanda telah berusaha memeras produk pertanian seperti kopi dan lada, melalui penyerahan paksa dan menjualnya ke pasaran Eropa. Kemudian ketika Inggris menguasai Jawa pada tahun 1811 M, Thomas Stamford Raffles pernah memberlakukan sebuah pola pembangunan ekonomi kapitalis, dengan memberlakukan sistem perpajakan baru dengan menggantikan sistem pajak kontan untuk memaksa penyerahan produk pertanian rakyat. Raffles juga mencoba memberlakukan sistem upah, meskipun dengan kerja paksa.

---

<sup>61</sup>M.C. Rickhiefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 182-190.

<sup>62</sup>Ira M. Lapidus, *loc. cit.*, lm. 310.

**Gambar 3.2. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles**



Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Besar\\_Cirebon](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Besar_Cirebon) diakses tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.45 WIB.

Kemudian pada tahun 1830 M Gubernur Van den Bosch memberlakukan kebijakan perekonomian berdasarkan sistem kultur. Meskipun sistem ini dimaksudkan untuk melindungi para petani dari kewajiban tertentu, namun kenyataannya para petani justru menjadi sasaran penghisapan lainnya. Barang-barang yang dihasilkan oleh sistem kultur ini dijual oleh *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) dengan harga kontrak dan dikapalkan ke Eropa dengan menggunakan armada Belanda.<sup>63</sup>

*Ketiga*, melakukan praktik-praktik asimilasi penduduk yang dipaksakan. Kebijakan serupa juga dilakukan pemerintah

---

<sup>63</sup>Ira M. Lapidus, *loc. cit.*, hlm. 310-311.

Hindia-Belanda di Indonesia. Kebijakan yang pernah dijalankan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia di dalam usaha mengasimilasikan penduduk pribumi dilakukan dengan memberlakukan kebijakan politik Etik (*Ethical Policy*). Munculnya kebijakan politik Etis sebetulnya merupakan gagasan yang muncul dari kaum liberal Belanda yang duduk di pemerintahan. Dalam pandangan kaum liberal bahwa pemerintahan Belanda harus dijalankan atas dasar kerja sama antara Belanda dan masyarakat setempat. Kaum liberal juga mengusulkan asimilasi bangsa Indonesia ke dalam kultur Eropa dan membentuk sebuah kesatuan elit Belanda di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan. Tampaknya kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat *Euro-centered*, di mana di dalamnya banyak kebijakan bersyarat yang didominasi Belanda. Kebijakan Etik tersebut tampaknya dirancang sebagai sebuah “akal-akalan” versi Belanda untuk menunjukkan bahwa bangsa kulit putih memiliki tanggung jawab terhadap tanah jajahan.<sup>64</sup>

*Keempat*, melakukan perubahan orientasi dan sistem pendidikan di kalangan masyarakat pribumi. Bangsa Belanda juga di Indonesia sangat aktif dalam pendirian sekolah-sekolah baru. Pembentukan lembaga Pendidikan Belanda atas bangsa Indonesia bermula sejak awal abad ke-19 M ketika kalangan aristokrat Indonesia melakukan kegiatan belajar di rumah-rumah pemukiman Belanda. Pada tahun 1848 M untuk keperluan beberapa pekerjaan pamongpraja telah didirikan sekolah pertama untuk melatih warga Indonesia. Kemudian, pada tahun 1851 M didirikan sejumlah sekolah untuk pegawai juru tulis dan kesehatan yang melatih kalangan priyayi rendahan untuk menjadi pegawai pemerintah. Selanjutnya, dalam perkembangan berikutnya sejumlah sekolah teknik, pertanian, kedokteran dan kehewanian banyak didirikan.

---

<sup>64</sup>Ira M. Lapidus, *loc. cit.*, hlm. 316-317.

Beberapa kebijakan baru itu pada dasarnya ditempuh pemerintah Hindia-Belanda merupakan sebuah upaya untuk memusatkan kekuasaan politik Belanda atas seluruh wilayah kepulauan Indonesia, sekaligus sebagai upaya pembentukan sebuah pemerintahan tunggal atas Hindia. Dengan demikian, pemerintah Hindia-Belanda telah merancang agar para penguasa pribumi tunduk kepada pemerintahan Belanda.<sup>65</sup>

## **2. Intervensi *Vereenigde Oost-indische Compagnie* (VOC) dan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Persoalan Intern Kesultanan Cirebon**

Adanya Intervensi bangsa Belanda terhadap Kesultanan Cirebon sehingga mendorong munculnya gerakan penentangan dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan Inggris pada masa penyelang, sebenarnya telah berlangsung dalam waktu yang lama, jauh sebelum pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin. Seperti diketahui bahwa di wilayah pulau Jawa sejak abad ke-17 setidaknya terdapat tiga kerajaan Islam yang eksis, yaitu Kerajaan Banten, Kerajaan Islam Mataram dan Kerajaan Cirebon. Yang menarik, sekalipun di antara ketiga kerajaan tersebut merupakan kerajaan Islam, tetapi tampaknya hubungan di antara ketiganya acapkali diwarnai dengan saling mencurigai dan bahkan cenderung mengarah kepada terjadinya rivalitas. Idealnya, secara teoritis ketika ketika kerajaan ini sedang menghadapi musuh bersama, dalam hal ini bangsa Belanda yang sedang meluaskan kekuasaannya, seharusnya di antara Kerajaan Banten, Kerajaan Islam Mataram dan Kerajaan Cirebon bisa bersatu, tetapi dalam realitanya tidak terjadi. Yang ada adalah rivalitas. Justru dalam posisi ini Kerajaan Cirebon dalam posisi terhimpit di antara dua kekuatan

---

<sup>65</sup>Ira M. Lapidus, *loc. cit.*, hlm. 317-318.

besar. Ketika dekat dengan Kerajaan Banten dicurigai oleh Kerajaan Islam Mataram. Begitu juga sebaliknya, ketika dekat dengan Kerajaan Islam Mataram tidak disenangi oleh Kerajaan Islam Banten. Dalam posisi seperti ini, tiba-tiba Kerajaan Cirebon yang posisinya sudah mulai lemah meminta bantuan kepada bangsa Belanda. Tentu saja kondisi ini dimanfaatkan betul oleh Belanda dengan memulai mengatur dan mengendalikan Kerajaan Cirebon.

Perlu dikemukakan, bahwa seiring dengan kegiatan imperialismenya, bangsa Belanda terus berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah berhasil melemahkan Kerajaan Banten pada tahun 1682, bangsa Belanda melalui VOC berupaya melebarkan wilayah kekuasaannya ke arah timur dengan melirik kepada wilayah Kerajaan Cirebon. Kedatangan bangsa Belanda di Cirebon pada awalnya disambut baik dengan tangan terbuka oleh Panembahan Ratu I. Bahkan Cirebon pernah membantu VOC membebaskan beberapa orang VOC yang ditangkap di Mataram pada tanggal 18 Mei 1619. Hal ini merefleksikan bahwa pada saat itu Kerajaan Cirebon mempunyai pengaruh dan kedudukan yang sejajar dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Kedudukan Kerajaan Cirebon yang sejajar dengan kerajaan lain dan tidak berada di bawah pengaruh kerajaan lain itu sejalan dengan kesaksian Rijkolf van Goens yang menyatakan bahwa Cirebon termasuk kerajaan yang belum berada di bawah kekuasaan Mataram, bersama dengan Jayakarta, Banten, dan Blambangan.

Dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1619 tersebut, secara perlahan-lahan tetapi pasti, kehadiran dan keterlibatan VOC dengan Kerajaan Cirebon mulai terlihat dan semakin kuat. Keadaan ini tentu saja, di satu sisi bukan hanya menandai awal permulaan adanya hubungan baru dalam peningkatan kegiatan ekonomi antara VOC dengan Kerajaan Cirebon, namun di sisi lain juga mulai menandai adanya perluasan wilayah kedaulatan VOC. Kendatipun pada awalnya

mereka mula-mula tampak lebih mengutamakan perdagangan daripada kekuasaan, namun mulai terlihat dengan jelas, bahwa peningkatan aktivitas ekonomi VOC di Cirebon hanyalah sebuah episode drama semata dari gambaran yang lebih luas, yakni dimulainya eksploitasi ekonomi Cirebon sekaligus menjadi masa dimulainya campur tangan VOC pada hampir seluruh proses perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kerajaan Cirebon.<sup>66</sup>

Pada akhir tahun 1619, sikap Cirebon sebagai negara yang tidak berada di bawah pengaruh kerajaan lain, dan terbuka terhadap kedatangan bangsa Belanda dan bangsa Eropa lainnya mulai berubah. Hal tersebut mulai tampak pada tahun itu juga pada saat kedudukan Cirebon sudah mulai berada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram. Hal ini terjadi dengan ditandai adanya pengakuan Panembahan Ratu yang mengatakan bahwa Kerajaan Cirebon adalah *vassal* atau bawahan dari Kerajaan Mataram, dalam hal ini bawahan dari Sultan Agung Hanyorokusumo sebagai rajanya. Pengakuan bahwa Cirebon menjadi *vassal* Mataram ini kemungkinan dilatarbelakangi oleh kesadaran dari Panembahan Ratu yang memandang bahwa kekuatan militer Kesultanan Cirebon tidak mungkin menandingi kekuatan militer Kerajaan Mataram. Selanjutnya, perubahan ini semakin kentara karena pada tahun – tahun berikutnya selalu diberitakan bahwa Raja Cirebon banyak melakukan berbagai hal atas perintah raja Mataram. Sebagai dampaknya adalah bisa terlihat dari sikap Kerajaan Cirebon terhadap VOC.

Sikap Kerajaan Cirebon berada di bawah Kerajaan Mataram setidaknya terus berlangsung sampai dengan tahun 1677. Ketika di Kerajaan Mataram terjadi pemberontakan

---

<sup>66</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 71.

Trunojoyo yang dibantu oleh Kerajaan Banten. Sikap Kerajaan Cirebon mulai berubah dan dekat dengan Kerajaan Banten, sangat tampak pasca Sultan Ageng Tirtayasa dengan bertempat di Banten segera menobatkan Pangeran Martawijaya, Kartawijaya dan Pangeran Wangsakerta menjadi penguasa Cirebon. Dalam penobatan tersebut, dua orang menjadi sultan, dengan memiliki wilayahnya masing-masing, sementara Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan tanpa wilayah kekuasaan namun memegang kekuasaan atas kepustakaan keraton.<sup>67</sup> Sebagai sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi sultan melainkan hanya Panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai Kaprabon (Paguron) yaitu tempat belajar para intelektual keraton.<sup>68</sup>

Sejak terjadinya peristiwa itu, Kerajaan Mataram pun sudah tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap Kerajaan Cirebon, sehingga pengaruh Banten mulai masuk dan diterima oleh Cirebon. Perubahan ini sudah barang tentu telah berdampak pula terhadap pola hubungan Kerajaan Cirebon dengan VOC karena sikap Cirebon kemudian mengikuti sikap Kerajaan Banten, dalam hal ini dengan mengikuti sikap Sultan Ageng Tirtayasa yang menganggap VOC sebagai musuh.<sup>69</sup>

Bagi Kerajaan Banten, adanya tindakan politis simbolis yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dengan menempatkan

---

<sup>67</sup>Dengan keadaan ini dapat disebut babak baru bagi kesultanan Cirebon, di mana kesultanan terpecah menjadi tiga dan masing-masing berkuasa dan menurunkan para penguasa berikutnya, berikut gelar ketiganya setelah resmi dinobatkan: 1. Sultan Kasepuhan, Pangeran Martawijaya, dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin (1679-1697). 2. Sultan Kanoman, Pangeran Kartawijaya, dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin (1679-1723). 3. Panembahan Cirebon, Pangeran Wangsakerta dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasarudin atau Panembahan Tohpati (1679-1713).

<sup>68</sup>Ekajati, Edi Suherdi. 2005. *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta*. (Bandung: Pustaka Jaya, 2005), hlm. 45.

<sup>69</sup>M.C. Ricklefs, *loc. cit.*, hlm. 120; Nina H. Lubis dkk., *Sejarah Tatar Sunda*, Jilid I, (Bandung: Satya Historika, 2003), hlm. 268.

para Pangeran Cirebon pada kedudukan tertentu secara langsung mengandung arti bahwa posisi Kerajaan Banten telah menunjukkan kekuatannya terhadap Cirebon sekaligus menjelaskan berkurangnya kekuasaan para pangeran Cirebon dalam bidang politik. Adapun pemberian gelar yang diberikan kepada pangeran Cirebon dapat diartikan sebagai pengakuan atas keberadaan mereka sebagai golongan elit Cirebon meski terdapat kontrol Banten atas pangeran-pangeran tersebut. Maksud lainnya adalah dengan berhasilnya Kerajaan Banten mengendalikan Cirebon, Kerajaan Banten berharap agar Cirebon mau membantu Kerajaan Banten dalam menguasai wilayah Priangan yang meliputi Sumedang, Bandung, Parakan Muncang Sukapura, Galuh dan Cianjur.<sup>70</sup>

Rupanya sikap Cirebon terhadap VOC yang sejalan dengan Banten itu tidak berlangsung lama. Perubahan itu terjadi berawal dari rencana Banten dan Cirebon yang akan menyerang Sumedang. Ranga Gempol III sebagai penguasa Sumedang, meminta perlindungan kepada VOC. Selanjutnya VOC kemudian mengirim Jacob van Dick ke Cirebon agar tidak membantu Banten untuk menyerang Sumedang. Jacob van Dick mengingatkan para penguasa Cirebon bahwa sejak tahun 1677 daerah Priangan telah diberikan oleh Mataram kepada VOC. Peringatan Jacob van Dick tersebut disertai dengan suatu ancaman bahwa VOC tidak akan mengakui gelar sultan pemberian Sultan Banten bila Cirebon membantu Banten menyerang Sumedang. Tampaknya Cirebon melihat bahwa VOC lebih kuat daripada Banten. Oleh karena itu, Cirebon mematuhi peringatan VOC tersebut. Oleh karena itu ia menjawab ancaman VOC dengan mengatakan bahwa Cirebon tidak bermaksud menyerang Sumedang dan sikap tersebut

---

<sup>70</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 71.

diambil hanya sebagai alasan untuk melepaskan diri dari Kesultanan Banten. Perubahan sikap Cirebon tersebut mengakibatkan Sultan Banten marah dan mengirim pasukan di bawah pimpinan Pangeran Kidul, saudara Sultan Ageng Tirtayasa, untuk menyerang Cirebon. Dalam serangan itu ketiga penguasa Cirebon berhasil ditawan oleh pangeran Kidul.<sup>71</sup>

Untuk melepaskan dari tawanan pasukan Banten sekaligus untuk mengusir mereka dari Cirebon ketiga penguasa Cirebon meminta bantuan VOC. Kesempatan ini dimanfaatkan VOC dengan mengirimkan serdadunya untuk mengusir pasukan Kerajaan Banten dari Cirebon. Selain berhasil membebaskan ketiga penguasa Cirebon tersebut, VOC pun berhasil mengusir pasukan Kerajaan Banten dari Cirebon. Keberhasilan ini merupakan pintu pembuka jalan bagi tertanamnya pengaruh dan kekuasaan VOC di Cirebon.

Pengaruh kekuasaan VOC semakin tertanam kuat di Kesultanan Cirebon. Hal ini dapat diamati dari berbagai rangkaiian kronologi, *pertama*, pada bulan September 1680 Jacob van Dick melakukan pendekatan dengan ketiga penguasa Cirebon agar mereka mau mengakui VOC sebagai sekutu Cirebon. Karena merasa berhutang budi kepada VOC, ketiga penguasa Cirebon mau menerima keinginan VOC tersebut. *Kedua*, pada akhir tahun 1680 pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon. Kemudian *ketiga*, pada saat tahun baru 1681 tujuh orang utusan dari tiga penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan di rumah Rijckloff van Goens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada 29 Oktober 1680. Dengan dipimpin oleh Jacob van Dyck, setelah bersulang untuk keselamatan Raja

---

<sup>71</sup> E. B. Kielstra, *De Sulthan van Chirebon De Indische Archief*, (Harleem: De Erven F. Bohr, 1917), hlm. 60; Nina H. Lubis dkk., *op. cit.*, hlm. 269; Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 72.

Belanda dengan anggur Spanyol maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan para penguasa Cirebon. Selanjutnya menjelang malam harinya Jacob van Dyck berlayar dengan dua buah kapal diikuti oleh perahu-perahu yang membawa para utusan Cirebon menuju ke Cirebon. Kehadiran Jacob van Dyck sampai di pelabuhan Cirebon empat hari kemudian, yaitu pada tanggal 5 Januari 1681<sup>72</sup>. Iring-iringan Jacob van Dyck disambut oleh tembakan meriam dari Kapten Joachim Michiefs yang telah terlebih dahulu ada di Cirebon.<sup>73</sup>

Pada keesokan harinya tanggal 6 Januari 1681, dengan bertempat di alun-alun diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon dengan disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari 1681 tersebut dibacakan. Pada tanggal 7 Januari 1681<sup>74</sup> dimulailah perundingan di antara VOC dan para penguasa Cirebon serta memaksa mereka untuk

---

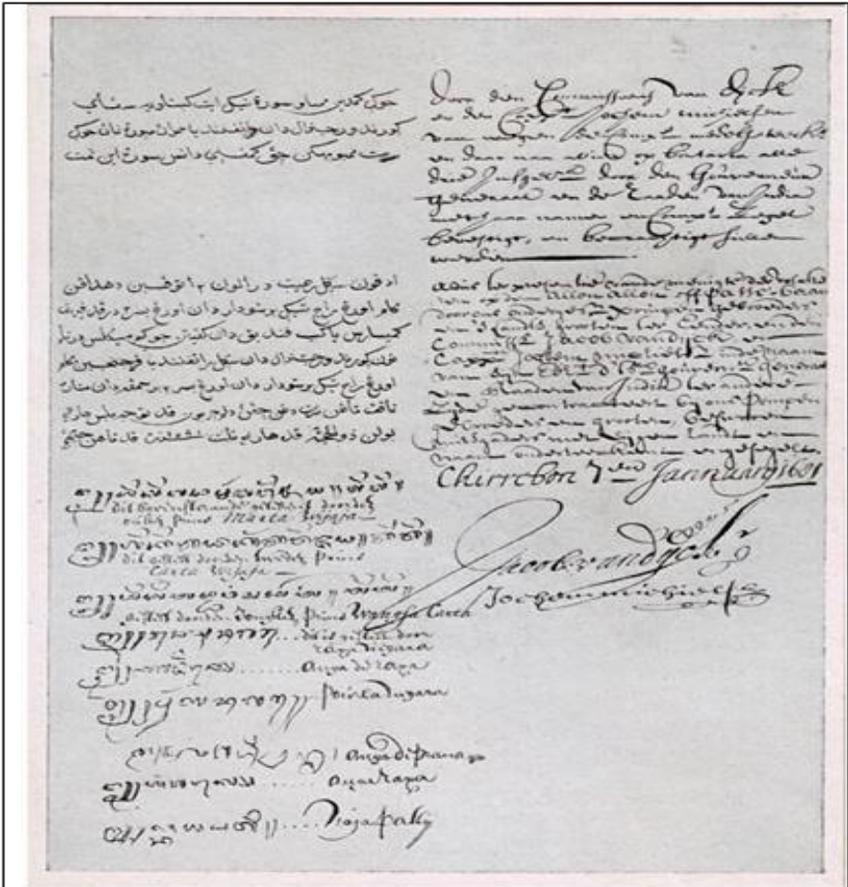
<sup>72</sup>Pada tanggal 4 Januari 1681, para penguasa Cirebon yakni Sultan Sepuh dan Sultan Anom dipaksa untuk membuat perjanjian bahwa Cirebon menjadi sekutu setia dari *Vereenigde Oostindische Compagnie*. Lihat Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 69.

<sup>73</sup>Lihat Molsbergen, Everhardus Cornelis Godee. *Uit Cheribon's geschiedenis en Gedenkboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*. (Bandung : Nix., 1931), hlm. 40.

<sup>74</sup>Pada tahun 1681 ditunjuklah Letnan Benjamin van der Meer sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon. Jan Mulder dan van der Meer pernah memberikan laporan berkaitan dengan hubungan antara keluarga bangsawan di Cirebon. Keduanya menyebut bahwa Sultan Anom (Kartawijaya) masih terhitung sebagai kerabat Kesultanan Banten, sementara Pangeran Nasiruddin (Wangsakerta) sama sekali bukan kerabat Kesultanan Banten. Laporan dari Jan Mulder dan van der Meer tersebut sejalan dengan naskah *wawacan* yang selama ini beredar terbatas di kalangan para kerabat keraton Cirebon dimana dikisahkan bahwa Pangeran Kartawijaya (Sultan Anom) sesungguhnya berbeda ibu dengan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta. Lihat Hoadley, Mason Claude. *Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680-1792*. (New York : Cornell University Press, 2018); Ekadjati, Edi S. Ekadjati, *Polemik naskah Pangeran Wangsakerta*. (Bandung: Pustaka Jaya, 2005), hlm.

menyetujuinya. Pada malam harinya dicapaiilah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon.

Gambar 3.3. Naskah Perjanjian 7 Januari 1681



Sumber : Dokumentasi Komunitas Pusaka Cirebon

Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon<sup>75</sup>. Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh komisioner Jacob van Dijk dan Kapten Joachim Michiefs. Perjanjian persahabatan yang ditandatangani tersebut adalah

<sup>75</sup>Sartono Kartodihardjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900 (dari Emporium sampai Imperium)*. (Jakarta: Gramedia, 1988); Edi Roseno, 1993. *Perang Kedondong 1818*. Depok: Universitas Indonesia, 1993), hlm.

perjanjian yang berkaitan dengan kegiatan monopoli perdagangan di wilayah Cirebon di antaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula lada serta jati sekaligus menjadikan kesultanan-kesultanan di Cirebon sebagai protektorat Belanda yakni sebagai wilayah yang berada dibawah perlindungan Belanda.<sup>76</sup>

Perjanjian antara Belanda - Cirebon pada tahun 1681 tersebut juga telah membatasi perdagangan, membatasi pelayaran penduduk dan memastikan VOC memperoleh hak di sana. Pada tahun yang sama juga kesultanan- kesultanan di Cirebon menegaskan kembali klaimnya atas wilayah-wilayahnya di selatan yaitu Sumedang, Galuh dan Sukapura kepada Belanda.<sup>77</sup>

Selanjutnya, untuk memperkuat persekutuan tersebut pada bulan Januari 1681 ditandatangani kembali perjanjian politik antara Cirebon dengan VOC. Dalam perjanjian itu antara lain dinyatakan bahwa para penguasa Cirebon dianggap sebagai sahabat susuhunan Mataram, bukan sebagai *vassal* Kerajaan Mataram; para penguasa Cirebon akan membantu menyediakan tentara dan menyatakan daerah mereka tertutup bagi musuh-musuh VOC; para penguasa Cirebon tidak dibenarkan menyatakan damai dan perang serta tidak dibolehkan mendirikan benteng pertahanan; VOC berhak menyerang musuh-musuh Cirebon, baik di darat maupun di laut; perdagangan orang-orang pribumi berada dalam pengawasan VOC; VOC memegang hak monopoli impor candu dan pakaian serta hak monopoli ekspor lada, beras, kayu, gula dan produk lain yang dihasilkan oleh Cirebon; VOC dibebaskan dan

---

<sup>76</sup>Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm.

<sup>77</sup>E.B. Kielstra, *loc. cit.*, hlm. 68; Hageman, *Geschiedenis der Soendalandsche Tijdschrieffoor Indische Tool-Lan en Volkenkunde*, T.B.G XVI Batavia: Lange & co's Hage M. Nijhoff, 1869), hlm. 244; Lubis, Nina H. Lubis, *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*. (Bandung : Alqaprint Jatinangor, 2000), hlm. 39.

berkewajiban membayar bea cukai; dan VOC berhak untuk mendirikan benteng pertahanan. Dengan perjanjian tersebut, maka pengaruh dan kekuasaan VOC di Cirebon mulai tertanam di bidang politik maupun perekonomian.<sup>78</sup>

Perlu diketahui bahwa pada saat VOC menanamkan dominasinya di Cirebon sejak tahun 1681, keterpisahan Kesultanan Cirebon dengan perdagangan laut semakin jauh. Berdasarkan isi perjanjian tanggal 7 Januari tahun 1681 antara Kesultanan Cirebon dengan VOC yang sangat mempengaruhi perjalanan Cirebon sebagai kota dagang adalah bahwa VOC mendapatkan hak monopoli impor pakaian, kapas, opium, dan monopoli ekspor seperti lada, kayu, gula, beras dan produk lain apapun yang dikehendaki oleh kompeni yang semuanya itu bebas dari bea impor yang sebelumnya pernah dikenakan oleh keraton sebesar 2% dari nilai barang. Isi perjanjian itu juga mengatur bahwa pelayaran pribumi harus mendapatkan lisensi dari VOC dan sangat dibatasi. Selanjutnya tidak semua kapal boleh masuk, kecuali atas izin dari VOC. Kemudian tanaman lada yang diusahakan di wilayah Cirebon diatur oleh VOC dan VOC pula yang menentukan harganya.<sup>79</sup>

Semenjak Kesultanan Cirebon dibagi menjadi dua kesultanan dan satu peguron, kisruh dan konflik di antara keluarga keraton tidak langsung selesai begitu saja. Berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan kedudukan tertentu<sup>80</sup> dalam kekeluargaan di Kesultanan Cirebon dahulu telah menjadi bahan pertikaian yang berlarut-larut hingga akhirnya pihak Belanda mengirimkan utusan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kesultanan-kesultanan di Cirebon.

---

<sup>78</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 270.

<sup>79</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 201.

<sup>80</sup> Bahasa Cirebon: *pribawa*

Dengan adanya berbagai perjanjian tersebut, baik secara politis maupun militer Kerajaan Cirebon telah berada di bawah perlindungan langsung dari VOC. Kontrol terhadap Kesultanan Cirebon dipegang langsung oleh VOC. Dalam situasi seperti ini, kedudukan para penguasa Cirebon tidak lebih hanya sebagai perantara antara VOC dengan masyarakat pedesaan di pedalaman. Sebagai konsekuensi selanjutnya, dalam perjalanannya sebagai dampaknya kondisi di Kesultanan Cirebon kehidupannya semakin berorientasi ke dalam (*inward orientation*) dengan mengembangkan kehidupan kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton yang *adliluhung* dengan landasan ekonomi agraris yang berpusat di keraton. Inilah yang disebut sebagai *barokisasi* peradaban.

Dengan demikian seperti yang dikemukakan Nina Herlina Lubis, di Kesultanan Cirebon semakin jelas terlihat mulai adanya dikotomi dalam kehidupan kota Cirebon, yaitu sebagai *ceremonial town* (kota pusat seremonial) yang berpusat di istana-istana Cirebon dan *comercial town* (kota pusat bisnis) yang mengacu pada munculnya wilayah baru yang merupakan daerah bisnis di sekitar pelabuhan dengan pusat di benteng VOC. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin lama VOC juga berhubungan langsung dengan masyarakat pedesaan. Kekuatan ekonomis agraris sebagai perantara yang dimiliki oleh keraton-keraton Cirebon sedikit demi sedikit mulai diambil alih dan dirampas oleh VOC.<sup>81</sup>

Selanjutnya, seiring dengan munculnya pusat bisnis baru di sekitar pelabuhan Cirebon, maka Cirebon lama yang berpusat di Keraton semakin jauh dari aktivitas ekonomi perdagangan. Sumber-sumber Belanda yang berbicara mengenai periode 1700-an melaporkan bahwa wilayah Cirebon, digambarkan sebagai kota pribumi atau *Indis de Inlandsche Stad*) atau dipandang sebagai *Het geminachte strandnest* (kota pantai yang dilecehkan).

---

<sup>81</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 202.

Hal ini mengesankan bahwa posisi Cirebon bukan hanya daerah lama yang memang agak jauh dari pelabuhan, tetapi juga tidak lagi menjadi pusat aktivitas ekonomi perdagangan yang mulai bergeser ke arah daerah pelabuhan tempat VOC memusatkan aktivitasnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di samping karena faktor lingkungan yang dipandang kurang sehat, hal ini telah berimbas terhadap keberadaan orang-orang Belanda yang tidak mau bertempat tinggal menetap di Cirebon.<sup>82</sup>

Pembagian kekuasaan di Kesultanan Cirebon terhadap tiga orang, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon (1677) serta masuknya pengaruh VOC di Kesultanan (1681) yang terkenal dengan senang melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Kesultanan Cirebon, bukan tanpa dampak negatif terhadap kehidupan di dalam Kesultanan Cirebon. Sebagai bukti konkret dari itu, ternyata, kemudian telah membawa kepada terjadinya persaingan di antara para pejabat tinggi keraton, bahkan dari adanya persaingan itu telah menjurus sampai kep[ada persaingan keras dan konflik. Untuk meredakan persaingan keras itu, semua pihak minta bantuan kepada VOC untuk menyelesaikannya.<sup>83</sup>

Sementara itu, ketika ketiga penguasa Cirebon mulai terlibat dalam persaingan di antara mereka, ketiga-tiganya sama-sama meminta bantuan VOC untuk menyelesaikan persaingan di antara mereka. Tentu saja dengan senang hati VOC mengabulkan permintaan ketiga penguasa tersebut. Pada tanggal 3 November 1685, empat tahun setelah perjanjian monopoli dagang Belanda terhadap Cirebon, Belanda mengirimkan pejabat penghubung Belanda yaitu Francois de Tack.<sup>84</sup> Pada akhirnya terciptalah sebuah

---

<sup>82</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 202.

<sup>83</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 197.

<sup>84</sup> Hoadley, Mason Claude. *Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680-1792*. (New York : Cornell University Press, 2018), hlm. 112.

perjanjian baru yang ditandatangani ketiganya pada tanggal 4 Desember 1685, di mana di dalam isi perjanjian tersebut diantaranya berisi pernyataan tentang pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh para Sultan Cirebon, bahwa VOC adalah penguasa Cirebon, masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultannya seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian sebelumnya, para sultan Cirebon tetap menjalankan pemerintahannya akan tetapi tetap di bawah kekuasaan VOC, para sultan Cirebon tidak boleh mengeluarkan perintah sendiri-sendiri melainkan harus melalui perundingan dengan para *mantri* (pejabat kesultanan), masing-masing sultan Cirebon memiliki lebih dari satu *mantri*, Sultan Sepuh memiliki 3 *mantri*, Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin (gusti Panembahan) masing-masing memiliki 2 *mantri*, para *mantri* harus dipilih oleh VOC maka seluruh keputusan para *mantri* harus dengan sepengetahuan pihak VOC, pihak VOC diperkenankan untuk membangun benteng di Cirebon sementara pihak kesultanan dilarang untuk membangun pertahanan di sekitar keraton.<sup>85</sup>

Pada tanggal 4 Desember 1685<sup>86</sup> Francois Tack dan ketiga penguasa Cirebon menandatangani perjanjian kembali yang terdiri dari 13 pasal. Berdasarkan perjanjian ini, Sultan Sepuh menduduki tempat tertinggi dalam jenjang kedudukan penguasa di Cirebon. Kedudukan di bawahnya ditempati oleh Sultan Anom dan Panembahan Cirebon menduduki kedudukan yang paling bawah. Meskipun menempati kedudukan terbawah, panembahan Cirebon memiliki peranan strategis karena ia bertanggung jawab atas pengangkatan hakim dan mantra dari ketiga penguasa Cirebon atas nasehat VOC. Sejak

---

<sup>85</sup> Heni Rosita, *Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752*. (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 110.

saat itu setiap ada pergantian kekuasaan di Cirebon selalu atas persetujuan VOC.

Pada tanggal 8 September 1688 dan 4 Agustus 1699 telah diadakan perjanjian kesepakatan bersama di antara penguasa Cirebon yang disaksikan oleh para pejabat VOC. Dalam teks perjanjian itu dengan jelas dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal VOC Raad van Nederlansch Indie bertindak sebagai pemrakarsa dan pelindung Kesultanan Cirebon dengan perantaraaan masing-masing Kapten Francois Tack, Johannes de Hartog dan Komisaris VOC di Cirebon. Dengan adanya kesepakatan tersebut telah menunjukkan adanya pengakuan masuknya pengaruh VOC ke dalam kekuasaan Kesultanan Cirebon. Dengan adanya perjanjian Perjanjian tahun 1688 dan 1699 dimaksudkan secara tersurat untuk memperbaiki persahabatan antara tiga bersaudara keluarga keraton Cirebon, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Pangeran Adipati Tohpati atau Panembahan Cirebon. Dari naskah perjanjian itu dapat diketahui adanya tingkatan kedudukan di antara ketiganya. Dalam hal ini, Sultan Sepuh berada pada tingkat paling atas, disusul Sultan Anom, baru kemudian Panembahan Cirebon. Dalam urutan tersebut termasuk pula putra mahkota masing-masing.<sup>87</sup>

Dalam perjanjian tersebut merinci pula hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, seperti upacara rutin di alun-alun, pengeluaran perintah, pembagian hasil dari pelabuhan, penerimaan dan jawaban surat, penerimaan dan penyampaian pesan pada utusan dari negara lain, penanganan masalah, yang bertalian dengan rakyat seperti pembuatan dan perbaikan pengairan, jalan, kampung, pengadilan, perselisihan para pedagang, pembuatan stempel, pengolahan bandar pelabuhan, pembagian pendapatan dari hasil tanah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat kerajaan, dan

---

<sup>87</sup> Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad. 1991. *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*. (Bandung: Pemda Tingkat I Jawa Barat dan Fakultas Sastra Unpad), hlm. 81; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 198.

penetapan putera mahkota, yaitu pangeran Dipati Anom dan Pangeran Ratu.<sup>88</sup>

Untuk memperkuat kekuasaannya di Cirebon, Francois Tack kemudian mengusulkan untuk mendirikan sebuah benteng pertahanan sebagaimana diatur dalam perjanjian bulan Januari 1681<sup>89</sup>. Benteng itu kemudian diberi nama *de Fortrese de Bsecherming* (Benteng Perlindungan). Marten Samson merupakan pejabat VOC pertama yang menempati benteng tersebut. Perjanjian tanggal 4 Desember 1685 ternyata tidak berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari suatu kenyataan bahwa persaingan di antara para penguasa Cirebon muncul kembali dan tidak dapat di atasi. Oleh karena itu, pada 8 September 1688 VOC menandatangani perjanjian lagi dengan ketiga penguasa Cirebon.<sup>90</sup>

Pada masa Gubernur Jenderal Johannes Camphuys dan pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon masih dipegang oleh Kapten Willem de Ruijter<sup>91</sup>, tepatnya pada tahun 1688 diadakan lagi sebuah perjanjian baru antara Belanda dengan para penguasa di Cirebon. Dalam perjanjian tersebut VOC mengirimkan utusan yang bernama Johannes de Hartog<sup>92</sup> untuk menyelesaikan masalah internal di Cirebon. Di dalam upaya mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut, Sultan Sepuh Syamsuddin diwakili oleh Ki Raksanegara, sementara Sultan Anom Badruddin meminta bantuan Pangeran Suradinata<sup>93</sup> untuk mewakilinya. Para utusan yang hadir mewakili pemerintahan masing-masing Kesultanan

---

<sup>88</sup> Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, *ibid.*, hlm. 81; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 198.

<sup>89</sup> Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, *ibid.*, hlm. 82; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 198.

<sup>90</sup> Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, *ibid.*, hlm. 82; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 198.

<sup>91</sup> Mason Claude Hodley, *Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792*. (New York : Cornell University Press, 2018), hlm.

<sup>92</sup> Prana Dwija Iswara, *Sejarah Kerajaan Cirebon*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009), hlm. 45.

<sup>93</sup> Heni Rosita, *loc. cit.*, hlm. 109.

Cirebon tersebut akhirnya bersepakat agar dalam pemerintahan Kesultanan Cirebon yang sudah terpecah itu untuk mengangkat 12 orang *Mantri*. Berdasarkan perjanjian tersebut Sultan Kasepuhan mendapatkan hak untuk mengangkat lima orang *mantri*, Sultan Kanoman mendapatkan hak untuk mengangkat empat orang *mantri* sementara Gusti Panembahan diberikan hak untuk mengangkat tiga orang *mantri*. Melalui perjanjian tahun 1688 yang dimediasi oleh Belanda tersebut juga ditegaskan bahwa ketiga penguasa Cirebon yaitu Sultan Sepuh Syamsuddin, Sultan Anom Badruddin dan Gusti Panembahan Cirebon Nasiruddin berjanji untuk menyerahkan kepengurusan Cirebon kepada Pangeran Dipati Anom, yang merupakan anak dari Sultan Sepuh dan Pangeran Ratu. Tampaknya perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1688<sup>94</sup> berakhir dengan kesimpulan bahwa kesultanan-kesultanan di Cirebon yang berada dalam perlindungan VOC tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.<sup>95</sup>

Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Aria Adiwijaya diakui sebagai ahli waris kekuasaan Sultan Sepuh. Akan tetapi, kedudukan mereka tidak sama dengan Sultan Anom dan Panembahan Cirebon. Jika Sultan Sepuh meninggal dunia, maka kedudukannya dalam jenjang kekuasaan di Cirebon digantikan oleh Sultan Anom dan kedudukan Sultan Anom digantikan oleh Panembahan Cirebon. Dengan demikian. Kedua anak Sultan Sepuh menempati kedudukan yang paling bawah. Perjanjian itu dipertegas kembali oleh perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 1699, dua tahun setelah Sultan Sepuh meninggal dunia.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Prana Dwija Iswara. *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>95</sup> John Preston Ball, 1982. *Legal History 1608 - 1848*. (Sydney: Oughtershaw Press, 1982), hlm. 50.

<sup>96</sup> Hoadley, Mason Claude. *Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680-1792*. (New York : Cornell University Press, 2018), hlm. 117.

Pengaruh dan kekuasaan VOC di Kesultanan Cirebon semakin mantap seiring dengan penyerahan wilayah ini oleh Paku Bueno I (Pangeran Puger) dari Kerajaan Mataram. Oleh karena Paku Buwono I merasa berhutang budi kepada VOC terkait dengan “kontribusi” VOC di dalam membantu memperoleh singgasananya di Kerajaan Mataram pada bulan September 1705 maka ia menyerahkan wilayah Cirebon kepada VOC<sup>97</sup>. Penyerahan wilayah Cirebon kepada VOC tertuang dalam sebuah perjanjian antara Paku Bueno I dan VOC yang ditandatangani tanggal 5 Oktober 1705. Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa Cirebon menjadi daerah perwaklian VOC. Dengan demikian, sejak tahun itu Cirebon sepenuhnya berada di bawah kekuasaan VOC.<sup>98</sup>

Pada tahun 1705, Pejabat penghubung VOC untuk wilayah Kesultanan Cirebon secara resmi mulai berkantor di Cirebon. Selanjutnya, guna menyelesaikan masalah dengan Kerajaan Mataram yang masih merasa bahwa Kesultanan Cirebon adalah wilayah bawahannya, maka pada tanggal 5 Oktober 1705 diadakan perjanjian kembali antara Kerajaan Mataram dengan VOC. Sebagai hasil dari perjanjian tersebut, isi dari perjanjian ini menegaskan kembali bahwa yang menjadi tapal batas wilayah Kesultanan Cirebon sebagai bagian dari wilayah protektorat Belanda adalah sungai Losari di sebelah utara.<sup>99</sup>

Pada tahun 1708, VOC turut campur lagi untuk menempatkan perbedaan kedudukan dan hirarki dari ketiga keluarga kesultanan Cirebon, setelah Panembahan Wangsakerta wafat pada tahun 1714. Seperti diketahui bersama, bahwa selama

---

<sup>97</sup> M.C. Rickhefs, *loc. cit.*, hlm. 130-131; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 271.

<sup>98</sup> Bernhard Vlekke, *Nusantara a History of Indonesia*. (The Hague: W. van Hoeve, 1959), hlm. 182-183; Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 271.

<sup>99</sup> Sekarang sungai Losari menjadi batas antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Sungai Donan di sebelah selatan menjadi batas antara kecamatan Cilacap Selatan dan Cilacap Tengah dengan kecamatan Kawunganten di Kabupaten Cilacap

dalam periode tahun 1715 - 1733 di Kesultanan Cirebon telah berkali-kali diadakan perubahan berkaitan dengan kedudukan tinggi rendahnya seseorang dalam menduduki tingkatan di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon yang pada waktu itu sebenarnya telah memiliki kesultannya masing-masing, seperti anak-anak Sultan Sepuh I yaitu Pangeran Depati Anom Tajul Arifin Djamaludin yang telah menjadi Sultan Sepuh II di Kesultanan Kasepuhan dan Pangeran Arya Cirebon Abil Mukaram Kamarudin yang telah membentuk cabang keluarga sendiri yaitu sebagai Sultan Kacirebonan pertama.

Begitu juga dengan anak dari Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Depati Halal Rudin yang telah menggantikan ayahnya sebagai penguasa Kesultanan Kanoman serta Pangeran Adipati Kaprabon yang menguasai *peguron* Kaprabonan. Hal yang tidak jauh berbeda berkaitan dengan anak dari Pangeran Nasirudin Wangsakerta yaitu Pangeran Muhammad Muhyiddin yang melanjutkan tugas ayahnya sebagai pemimpin *peguron* (tempat pendidikan) dan keputakaan Cirebon. Permasalahan tentang keluarga dari yang mana yang berhak menduduki tingkat tertinggi dalam keluarga besar Kesultanan Cirebon atau *pribawa*, bagi VOC telah menjadi modus untuk senantiasa melakukan intervensi terhadap persoalan intern keluarga besar Kesultanan Cirebon. Masalah *pribawa* telah menimbulkan pertikaian yang berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang terus menerus. Pada akhirnya peristiwa inilah yang mempercepat hilangnya kewibawaan keluarga besar Kesultanan Cirebon.

Dengan adanya perjanjian antara Kesultanan Cirebon dengan VOC yang ditandatangani sejak tanggal 7 Januari 1681 dan kemudian diikuti dengan berbagai rangkaian perjanjian-perjanjian berikutnya. Bila dicermati, momentum perjanjian tanggal 7 Januari 1681 ini dapat dipandang sebagai titik tolak kemunduran Cirebon yang pada gilirannya menjadi buah *simalakama* dalam ranah sosial politik Cirebon. Dengan mengacu

kepada berbagai perjanjian yang telah dilakukan dengan VOC, dalam konteks itu, di seluruh wilayah *wewengkon* Keraton Kanoman dan Kasepuhan, VOC dapat melakukan apa saja sesuai dengan bunyi butir-butir perjanjian itu yang secara keseluruhan merugikan Cirebon dan sebaliknya VOC atau Kompeni Belanda sangat diuntungkan. Perjanjian itu berlaku untuk selamanya, hingga ke anak-cucu. Dalam teks surat perjanjian itu ditulis, “sabab itu raja Carbon tiga bersodara berjanji sampai kepada anak cucu dan ganti berganti sarta dengan rakyatnya”<sup>100</sup> dan “surat perjanjian ini dengan sesungguhnya tiada berubah selamanya.”<sup>101</sup>

Sebagai akibat dari perjanjian ini dampaknya sangat terasa. Sejak tahun 1780 masyarakat di Kesultanan Cirebon merasakan penindasan yang dilakukan oleh VOC yang semakin menjadi-jadi. Sekalipun VOC dinyatakan bangkrut pada tanggal 31 Desember 1799, namun pengaruh VOC masih terus berlanjut hingga era kolonial Belanda. Mereka tetap mencengkeram seluruh wilayah Cirebon dan bahkan Nusantara. Hal tersebut, karena pemerintah kolonial Belanda masih perlu melanjutkan perjanjian yang telah disepakati antara VOC dan Cirebon di masa lalu.<sup>102</sup>

Campur tangan Belanda terhadap seluruh kebijakan yang ada di semua aspek pemerintahan Kesultanan Cirebon itu jelas tertuang dalam Perjanjian Cirebon 7 Januari 1681 yang ditandatangani oleh pihak VOC dan Kesultanan Cirebon. Dalam salah satu poin dari perjanjian itu menyebutkan bahwa urusan sosial, ekonomi, dan politik, diatur oleh VOC dan perjanjian itu mengikat tak berkesudahan.<sup>103</sup> Dari berbagai pengaturan yang semuanya diatur oleh VOC, bagaimanapun telah memunculkan kebijakan VOC yang tidak berpihak kepada rakyat sehingga

---

<sup>100</sup> *Arsip Cirebon No. 38.3*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, hlm. 2.

<sup>101</sup> *Arsip Cirebon No. 38.3, ibid.*, hlm. 2.

<sup>102</sup> Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, hlm. 6.

<sup>103</sup> Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, hlm. 6.

telah menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada praktik-praktik penindasan. Dari penindasan itulah, akhirnya mendorong kepada timbulnya gerakan perlawanan rakyat yang kemudian disebut perjuangan.

Pada 14 Februari 1772 gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para bangsawan Cirebon ini pertama sekali dilakukan melalui pertunjukkan seni dengan menggelar Seni Genjring Rudat yang permainannya sarat dengan olah kesaktian yang disebut dengan Debus untuk menarik minat masyarakat Cirebon agar bergabung dalam gerakan ini. Gerakan ini awalnya berbasis di penantren-pesantren yang ada di wilayah Cirebon. Untuk tujuan ini, mereka keluar dari keraton Cirebon dan membangun basis-basis di pesantren-pesantren. Hal ini tampak sekali seperti yang dilakukan Sultan Sepuh V Syafiudin.

Pada masa kepemimpinan Sultan Sepuh V Syafiuddin (1773 - 1786), Taman Sari Gua Sunyaragi pernah dipergunakan sebagai markas besar prajurit, gudang dan tempat pembuatan senjata. Di dalam keraton, penjajah Belanda berusaha membujuk Sultan Sepuh V Syafiuddin untuk bekerjasama dalam berbagai bidang. Kendati demikian, sultan Sepuh V Syafiuddin menolaknya, karena ia mengalami berbagai tekanan. Berdasarkan informasi yang bersumber dari tradisi lisan yang berkembang secara turun temurun disebutkan bahwa Sultan Sepuh V Syafiuddin pergi meninggalkan keraton Kasepuhan. Dalam perjalanannya, Sultan Sepuh V Syafiuddin berjalan ke arah blok Capar lalu meneruskannya lagi ke arah Bukit Pasir Anjing di Desa Sidawangi untuk mencari tempat yang lebih aman. Di desa tersebut sultan membangun sebuah pesantren di tempat yang sekarang disebut blok pesantren (dusun pesantren) yang kemudian banyak didatangi orang untuk belajar mengaji dan ilmu keagamaan. Oleh karena letak desa Sidawangi yang dirasa kurang aman, maka sultan kembali melakukan perjalanan menuju pedalaman Cirebon dan tiba di daerah yang sekarang disebut Desa Matangaji. Di desa ini akhirnya dibuat sebuah

tempat peristirahatan kecil yang oleh masyarakat hingga kini dikenal dengan nama blok Pedaleman (dusun Pedaleman) yang berarti tempatnya para pembesar keraton. Di desa tersebut sultan juga kembali membangun sebuah pesantren dan mengajarkan ilmu keislaman dan berpesan jika ingin mengaji harus sampai matang. Dari kronologi itu, maka wilayah itu menjadi populer dengan nama Matangaji.

Aktivitas yang dilakukan Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji di Taman Sari Gua Sunyaragi akhirnya diketahui oleh Belanda. Tampaknya Belanda merasa takut dan khawatir jika angkatan perang Cirebon di kemudian hari akan semakin bertambah kuat dan menghalangi kepentingannya. Oleh karena itu Taman Sari Gua Sunyaragi diserang<sup>104</sup> dan dihancurkan hingga tinggal puing-puing.<sup>105</sup>

Kedekatan Sultan Sepuh V Syafiuddin dengan masyarakat dan para santri membuat banyak dari mereka yang turut serta dalam perjuangan Sultan Sepuh V Syafiuddin. Dalam perjuangannya, Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji banyak mendapatkan dukungan dari para kiyai, di antaranya datang dari Kyai Abdullah dari Lontang Jaya, Kiyai Jatira dari Babakan Ciwaringin dan Kyai Idris dari Kempek<sup>106</sup>. Kyai Jatira misalnya, ia tidak menyukai sikap para penjajah, terlebih saat kaum penjajah Belanda berencana merobohkan pesantren Babakan Ciwaringin untuk membangun jalan raya. Kiyai Jatira kemudian memindahkan patok penanda pembangunan jalan ke sebelah utara pesantrennya. Di wilayah antara Desa Gintung<sup>107</sup> hingga Desa Kedongdong inilah yang menjadi pusat dari

---

<sup>104</sup>Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998), hlm.

<sup>105</sup>P.S. Sulendraningrat, *Sejarah Cirebon*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm.

<sup>106</sup>Ali Mursyid, *Perjuangan Santri Cirebon untuk Kemerdekaan*. (Cirebon: Tanpa Penerbit, 2008), hlm. 79.

<sup>107</sup> Sekarang sudah berkembang menjadi Desa Gintung Ranjeng, Desa Gintung Tengah, Desa Gintung Kidul dan Desa Gintung Lor.

pertempuran besar para santri dan masyarakat Cirebon yang dipimpin oleh Sultan Sepuh V Syafiuddin. Dalam pertempuran tersebut banyak dari para santri yang meninggal, sehingga di desa Gintung ada sebuah lapangan yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai *Blambangan*. Di lapangan itulah para santri banyak yang terbunuh.<sup>108</sup>

Selanjutnya, di antara para bangsawan Cirebon yang keluar dari keraton selain Sultan Sepuh V Syafiudin Matangaji adalah Pangeran Raja Kanoman dan Mbah Muqayim. Mereka berdua keluar dari Keraton Kanoman dan membuat pesantren di Buntet. Tempat lain yang pernah menjadi pusat kegiatan ini adalah Sunyaragi, tepatnya di blok Lebu. Hingga sekarang di sana masih ada *tajug* (langgar) yang pernah dibangun oleh Mbah Muqayim. Langgar itu bernama *Tajug Al-Muqayim*. Orang yang ketiga yang berasal dari keraton Kasepuhan yang keluar untuk melakukan perjuangan ialah Pangeran Asyrafuddin yang di kemudian hari mendirikan pesantren di Sumedang.<sup>109</sup>

Gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Raja Kanoman ini membuat pihak Belanda berang dan dalam sebuah kesempatan Belanda berusaha untuk mengepungnya. Pengepungan yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1798 di Pesantren Buntet membuat Pangeran Raja Kanoman tertangkap, sedangkan Mbah Muqayim berhasil meloloskan diri dan lari ke Pernalang.<sup>110</sup>

Semenjak kekuasaan Sultan Anom I, Belanda telah berusaha menanamkan kekuasaannya ke dalam keraton di Kesultanan Cirebon melalui ikatan perjanjian persahabatan yang berisi monopoli dagang Belanda serta dengan politik pendekatan persuasif kepada pihak-pihak di kesultanan dan tokoh-tokoh

---

<sup>108</sup>Hazmirullah, Titin Nurhayati Ma'mun, dan Undang A. Darsa. 2017. *Jumantara : Surat Pengunduran Diri Sultan Sepuh VII Cirebon: Suatu Kajian Filologis*. (Jakarta : Perustakaan Nasional, 2017), hlm. 139.

<sup>109</sup> Muhamad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, hlm. 6.

<sup>110</sup> Rohmin Dahuri dkk., *Budaya Bahari, Sebuah Apresiasi di Cirebon*. (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2004), hlm. 133.

masyarakat. Sebagai responnya, Pangeran Raja Kanoman, Putera Mahkota Kesultanan Kanoman, putera pertama Sultan Anom Chaeruddin dari permaisurinya, pada saat itu berusaha melakukan perlawanan terbuka terhadap Belanda. Akhirnya Pangeran Raja Kanoman berhasil ditangkap dalam perjuangannya melawan penjajah dan kemudian diasingkan ke Ambon.

Pada tahun 1798, tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting yang telah menangkap Pangeran Raja Kanoman dan mengasingkannya ke Ambon. Pada masa pemerintahannya ia telah membangun proyek pembuatan rumah *Raad van Indie*-nya (Dewan Hindia) di Indramayu yang diperkirakan banyak dibantu oleh Sultan Muhammad Chaeruddin. Ia kemudian pensiun dan digantikan oleh penggantinya, Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pemimpin untuk pesisir utara Jawa bagian timur pada 17 Februari 1797.

Pada masa Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten tersebut di Kesultanan Kanoman muncul permasalahan terkait dengan tidak adanya putera mahkota di tempat jika seandainya terjadi sesuatu dengan Sultan Muhammad Chaeruddin. Pada tahun 1798 itu juga, Sultan Muhammad Chaeruddin membuat keputusan dengan mengangkat Imamuddin, adik lain ibu dari Pangeran Raja Kanoman, putra mahkota Kesultanan Kanoman yang dibuang oleh Belanda ke Ambon, guna menggantikan posisinya sebagai Putera Mahkota Kesultanan Kanoman.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Seperti yang dikemukakan Abdullah Al-Misri, seorang cendekiawan keturunan Arab, dalam tulisannya menarasikan bahwa Imamuddin adalah anak dari Sultan Muhammad Chaeruddin dengan istrinya yang bukan permaisuri. Lihat Monique Zaini-Lajoubert, *Karya lengkap Abdullah bin Muhammad al-Misri: Bayan al-asma', Hikayat Mareskalek, Arsy al-muluk, Cerita Siam, Hikayat tanah Bali*. (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.

Menurut Muhamad Mukhtar Zaedin, dalam tradisi Cirebon disebutkan bahwa akumulasi kekecewaan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Cirebon terhadap Belanda itu acapkali terjadi sepanjang kurun waktu 1780 yang puncaknya terjadi di Kedondong. Dari sekian banyak perang rakyat, ada beberapa perang rakyat yang mengusung sebuah tuntutan kepada Kompeni dan Kesultanan Kanoman. Saat itu isi tuntutan yang mereka teriakkan adalah pengangkatan Pangeran Raja Kanoman agar diangkat menjadi Sultan Kanoman VI.<sup>112</sup>

Pada tahun 1792, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon Johan Lubbert Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat<sup>113</sup>. Apa yang dilakukan Johan Lubbert Umbgrove, kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh Belanda pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang berkuasa dari 1753 - 1773, yang menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang berkuasa dari tahun 1723 - 1753. Johan Lubbert Umbgrove berusaha agar para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui VOC yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan. Hal ini dilakukan oleh VOC dengan alasan dalam rangka penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis di tangan kesultanan. Kendati demikian langkah-langkah itu hanyalah dalam rangka mencari alasan yang dibuat-buat karena pada saat yang bersamaan di belakang itusemua VOC justru sedang bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya, yang terdiri dari orang-orang Cina, untuk menguasai tanah-tanah di

---

<sup>112</sup> Muhamad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, hlm. 7.

<sup>113</sup> Noerdin Noer, "Dongeng dari Negeri Kanoman : Cirebon Trust". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-30. Diakses tanggal 2016-06-04.; Setiawan, D A. 2018. "Catatan Van der Kemp di Cirebon". Cirebon : Radar Cirebon

Cirebon dan menerapkan pajak tanah (*landrente*) yang tinggi kepada masyarakat.<sup>114</sup>

Dari berbagai rangkaian peristiwa dan kasus ini, para penguasa di Kesultanan Cirebon jelas sekali mereka lebih bertendensi memperlihatkan reaksi yang lebih lunak, yang sangat berbeda dengan dari Kesultanan Banten. Perlu diketahui bahwa sejak abad ke-17 Kerajaan Cirebon lebih memilih untuk bersahabat dengan VOC dibandingkan dengan Kerajaan Banten. Berangkat dari realita ini, tentu saja telah membuat sebagian pembesar dan rakyat Kesultanan Cirebon merasa kecewa, apalagi pengangkatan sultan betul-betul ditentukan oleh VOC. Pada akhir abad ke-18 kekecewaan pembesar dan rakyat Cirebon semakin mengkristal sehingga pada akhirnya melahirkan perlawanan bersenjata terhadap VOC. Perlawanan tersebut diawali dari keputusan VOC yang mengangkat Pangeran Surantaka, yang dimusuhi oleh Rakyat Cirebon, untuk menggantikan Sultan Anom yang meninggal pada tahun 1798 sebagai penguasa Cirebon-Kanoman. Sebenarnya, rakyat Kanoman menginginkan Pangeran Suryanegara yang menggantikan kedudukan Sultan Anom sebagai penguasa Cirebon Kanoman. Dalam rangka melaksanakan keputusan tersebut, VOC kemudian mengusir Pangeran Suryanegara beserta Pangeran Kabupaten dan Pangeran Lautan dari istananya. Keputusan ini ternyata telah memberikan yang besar yang berbuntut berbuntut panjang dan bermuara pada meletusnya perlawanan Ki Bagus Rangin terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1802. Dengan meletusnya Perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin ini menunjukkan bahwa walaupun para penguasa Cirebon memperlihatkan reaksi lunak terhadap perluasan kekuasaan VOC, namun rakyat yang berada di Kesultanan Cirebon justru memperlihatkan

---

<sup>114</sup>Abdul Rosyidi, Perang Kedondong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818. (Cirebon: Fajar Muda, 2014), hlm. 111.

reaksi yang sebaliknya, yaitu mereka berusaha mengangkat senjata dengan melawan pemerintah kolonial Belanda.<sup>115</sup>

Dilihat dari latar belakang penyebabnya, kemunculan pemberontakan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin memiliki keterkaitan dengan tanah-tanah miliknya yang dirampas Residen Cirebon. Menurut A. Sobana Hardjasaputra dan Tawalimudin Haris,<sup>116</sup> mulai tahun 1812 pada masa Raffles, Bagus Rangin mengumpulkan beberapa kelompok rakyat pengikutnya. Rumah-rumah orang Belanda/Eropa dan Cina yang telah merampas tanah desa dan tanah petani dibakar. Thomas Stamford Raffles menganggap terjadinya pembakaran terhadap rumah-rumah orang Belanda/Eropa dan China tersebut memiliki keterkaitan kaitannya dengan merosotnya kedudukan sultan-sultan Cirebon. Oleh karena itu pada tahun 1813, Thomas Stamford Raffles menghapuskan Kesultanan Cirebon. Namun akibatnya justru mendorong rakyat makin melawan.<sup>117</sup>

Van der Kemp seperti yang dikutip kembali oleh Supali Kasim menulis, setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi pecahnya gerakan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin, yaitu: *pertama*, pada tahun 1792, Residen Cirebon, J.L. Umbgrove telah mengurangi jumlah Pangeran dan Ratu, kemudian merubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat. *Kedua*, pada tahun 1473 berdiri Kesultanan Kacirebonan (sebelumnya, sudah ada Kasepuhan & Kanoman). Raffles kemudian menghapus kekuasaan ketiganya di mana gelarnya tetap diakui, dan seorang sultan diberi pensiun. Pada awalnya, sultan diberi pensiun berupa uang tunai & hasil sawah. Namun sejak masa pemerintahan Van der Capellen, hasil sawah diganti uang tunai F 1500/tahun. *Ketiga*, pecahnya gerakan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya didorong

---

<sup>115</sup> Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, hlm. 191 dan 290.

<sup>116</sup> A. Sobana Hardjasaputra dan Tawalimudin Haris, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*, (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 183-184.

<sup>117</sup> Supali Kasim, *loc. cit.*, hlm. 4.

oleh sikap rasa tidak puas di kalangan para Sultan yang diturunkan oleh Raffles, terkait gelar maupun tunjangan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari Surat Residen yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal tanggal 2 Juni 1818 No. 44 yang menyampaikan dua pucuk surat dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Inti dari surat itu permohonan dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom yang meminta penambahan tunjangan pensiun. Sebagai balasannya yang tertuang dalam surat tanggal 16 Juni 1818, No.4 diperintahkan agar dibuat kalkulasi keperluan secara terperinci.<sup>118</sup>

Ketiga latar persoalan seperti itu secara sepintas tampaknya bisa jadi sepintas hanya dipandang sebagai persoalan politis dan ekonomis semata, akan tetapi bila dianalisis secara lebih mendalam sesungguhnya ada persoalan besar yang menyangkut harga diri selaku bangsa, yang merasa diinjak-injak oleh bangsa asing. Tragisnya, cengkeraman bangsa asing itu juga dirasakan sebagai sebuah keuntungan oleh sebagian bangsa sendiri. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika Ki Bagus Rangin akhirnya harus berhadapan pula dengan bangsa (saudara) sendiri. Pola gerakan seperti ini juga terjadi pada kurun waktu berikutnya. Perlu dicatat pecahnya Perang Diponegoro tahun 1825-1830 juga memiliki latar dan pola yang sama. Perbedaannya, dalam peristiwa perang Diponegoro para sejarawan sudah lama mengangkat peristiwa itu sebagai perang besar yang dilakukan oleh bangsa pribumi melawan penjajah Belanda di pulau Jawa, bahkan disebut pula Perang Jawa. Namun anehnya dalam peristiwa pemberontakan yang dilakukan Ki Bagus Rangin yang justru lebih dahulu dilakukan, dan kemungkinan turut mengilhami pecahnya perang Diponegoro, justru masih belum banyak terekspose sebagai catatan sejarah bangsa. Sampai di sini, seperti yang dikatakan Supali Kasim,

---

<sup>118</sup>Van der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 201; Supali Kasim, *loc. cit.*, hlm. 4.

kiprah, jejak dan perjuangan Ki Bagus Rangin belum diapresiasi secara mendalam.<sup>119</sup>

### **3. Kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Thomas Stamford Raffles, dan Tindakan Para Bupati Yang Menyewakan tanah kepada Orang Cina di Wilayah Cirebon yang Menimbulkan Penderitaan bagi Rakyat.**

Secara umum bangsa Belanda mulai menginjakkan kakinya ke Indonesia pada tahun 1595 ketika mereka tiba di Kerajaan Banten. Untuk selanjutnya selama beberapa abad mereka secara masif berhasil mengembangkan praktik-praktik imperialismenya melalui VOC yang dibentuknya, sampai kemudian berhasil mengalahkan Kerajaan Banten, Jayakarta, Kerajaan Mataram Islam, bahkan sukses melebarkan kekuasaannya ke wilayah Maluku. Ke wilayah Cirebon sendiri, bangsa Belanda mulai menguasai wilayah Cirebon secara penuh pada tahun 1705. Kekuasaan tersebut diperolehnya sebagai bentuk imbalan atas bantuan yang telah mereka berikan kepada Pakubuwono I dalam menduduki tahta Mataram. Sejak masa itu pula dalam perjalanannya bangsa Belanda terutama pada abad ke-19 mulai menjadikan wilayah Cirebon sebagai salah satu keresidenannya. Keresidenan Cirebon terbagi menjadi beberapa wilayah, antara lain Indramayu, Gebang, daerah Kesultanan Cirebon, yang meliputi daerah-daerah yang kemudian menjadi wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan serta tanah partikelir di Kandanghaur, dan Indramayu; dan daerah Cirebon Priangan, yang meliputi Galuh, Limbangan dan Sukapura.<sup>120</sup>

Sejak menguasai Kerajaan Belanda, Kaisar Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yang bernama Louis Napoleon menjadi penguasa di Belanda. Selama Louis Napoleon berkuasa di negeri Belanda, ia selalu merasa khawatir kalau pulau Jawa

---

<sup>119</sup> Supali Kasim, *loc. cit.*, hlm. 4.

<sup>120</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 122.

sebagai jajahan Belanda direbut oleh Inggris. Padahal, Inggris pada saat itu mulai meluaskan daerah jajahannya di Indonesia dengan menduduki wilayah Bengkulu, Padang, Pulau Pinang, Ternate, dan beberapa daerah lain di Maluku.<sup>121</sup>

Louis Napoleon segera mengirimkan seorang ahli militer yang bernama Herman Willem Daendels ke Pulau Jawa sebagai Gubernur Jenderal untuk mengantisipasinya. Pada tanggal 1 Januari 1802 Daendels bersama ajudannya mendarat di Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese menyerah kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Daendels ke Indonesia sebagai gubernur jenderal mempunyai tugas pokok mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan di tanah jajahan.<sup>122</sup>

Mulai 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (A.H. Wiese) menyerahkan estapeta kepemimpinannya atas Jawa kepada Herman Willem Daendels (Daendels). Kedatangannya ke Jawa, Daendels mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu mengupayakan Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Untuk itu, strategi yang dilakukan oleh Daendels adalah dengan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun Jalan raya pos (*Postweg*) Anyer-Panarukan yang merupakan mega proyek pertama di Hindia Belanda;
2. Membangun benteng-benteng (Forts) pertahanan;
3. Membangun Dermaga Angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon;
4. Memperkuat pasukan dengan beranggotakan orang-orang pribumi;

---

<sup>121</sup>Djoko Marihandono, "Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Intruksi Napoleon Bonaparte." *Disertasi*. Depok: FIB- UI, 2005), hlm. 234; Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 122.

<sup>122</sup> Djoko Marihandono, *ibid.*, hlm. 234; Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 122.

5. Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang.<sup>123</sup>

*Gambar 3.4. Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (A.H. Wiese)*



Sumber: <https://www.wikiwand.com/>

Selain memperkuat militer dan pertahanan, Daendels juga melakukan beberapa perbaikan atas pulau Jawa, terutama menyangkut tata pemerintahan, sebagai berikut:

1. Membagi pulau Jawa ke dalam sembilan *prefektur*, yaitu suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang mandiri;
2. Menjadikan para Bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintahan Hindia Belanda;

---

<sup>123</sup>Zamzami Amin, Sejarah Pesantren Babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1802-1919, (Bandung: Humaniora, 2019), hlm. 122-123.  
178 | Geger Ciayumajakuning

3. Memperbaiki besaran gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman berat bagi para pegawai yang berbuat curang;
4. Mendirikan badan-badan pengadilan untuk mengadili warga negara sesuai dengan adat istiadatnya.<sup>124</sup>

*Gambar 3.5. Herman Willem Daendels*



*Sumber : Dokumentasi Posthumous Portrait of Herman Willem Daendels; [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Besar\\_Cirebon](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Besar_Cirebon) diakses tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.18*

Usaha dan langkah-langkah yang dilakukan Herman Willem Daendels untuk mempertahankan pulau Jawa, termasuk wilayah Cirebon dan sekitarnya bagaimanapun membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara Daendels tidak mendapat bantuan keuangan yang memadai dari Kerajaan Belanda sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan Perancis. Untuk itu, Daendels berusaha memperoleh biaya yang diperlukan dengan cara sebagai berikut: pertama, tetap menerapkan aturan

---

<sup>124</sup>Zamzami Amin, *Ibid*, hlm. 123.

penyerahan sebagian hasil bumi sebagai pajak (*contingenten*) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan (*verpligte leverantijne*). Kedua, menerapkan kerja paksa (*rodi*) yang memberi manfaat besar bagi Belanda. Ketiga, menjual tanah-tanah kepada swasta bangsa Belanda dan Tionghoa lengkap dengan penduduknya. Dengan demikian, lahir praktik-praktik penghisapan dan kesewenang-wenangan oleh tuan-tuan tanah swasta terhadap rakyat Indonesia. Kelima, memperluas areal penanaman kopi.<sup>125</sup>

Selama Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintah di pulau Jawa, ia dikenal sebagai gubernur jenderal yang dalam kebijakan-kebijakannya banyak membawa penderitaan terhadap rakyat. Selain harta kekayaan dikeruk, tenaga kerja juga diperas dengan kejam. Pembuatan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang dilakukan melalui praktik-praktik kerja paksa (*rodi*) telah mengakibatkan ribuan rakyat meninggal. Begitu juga dengan banyak melakukan penjualan tanah di daerah Bogor dan Probolinggo kepada para pengusaha swasta telah menimbulkan reaksi yang mendorong meletusnya benih-benih gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah. Hal ini tentu saja dapat dipandang sebagai kesalahan besar yang dilakukan Daendels. Oleh karena itu, pada tahun 1811 ia dipanggil pulang ke negeri Belanda. Selanjutnya Louis Napoleon mengangkat Jansen sebagai gubernur Jenderal baru di Hindia-Belanda menggantikan Daendels.<sup>126</sup>

Pada tahun 1811 Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda, karena kebijakannya terlalu memberatkan pribumi dan mengakibatkan banyaknya jatuh korban nyawa pribumi. Sebagai gantinya ditunjuk Jan Willem Janssens dengan masa jabatan antara 15 Mei-1811. Ketika Janssens berkuasa, kondisi Nusantara yang ditinggalkan oleh Daendels sudah sangat kacau. Pada sisi

---

<sup>125</sup>Djoko Marihandono, *ibid.*, hlm. 235; Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm.124.

<sup>126</sup> Djoko Marihandono, *ibid.*, hlm. 235-238; Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm.124.

yang lain, Inggris semakin mengancam posisinya. Singkatnya, kekuasaan Republik Bataaf di Indonesia berakhir pada masa pemerintahan Jan Willem Janssens. Akhir kekuasaan tersebut ditandai dengan disepakatinya penandatanganan perjanjian damai oleh kedua belah pihak yang disebut Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Mulai tanggal itu, Jawa menjadi daerah jajahan Inggris.<sup>127</sup>

Namun, pada saat Jansen memerintah sebagai gubernur jenderal di pulau Jawa, kedudukan Inggris di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara semakin kuat dan makin dekat untuk menguasai pulau Jawa. Akhirnya, dengan menghadapi kondisi seperti ini, tidak lama waktu berjalan pada tahun itu juga Gubernur Jenderal Jansen menyerah kepada Inggris di daerah Tuntang, Salatiga (Jawa Tengah). Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai oleh kedua belah pihak yang disebut Kapitulasi Tuntang. Sejak penandatanganan perjanjian damai, seluruh pulau Jawa menjadi jajahan Inggris.

Fondasi pemerintahan Inggris dibangun oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Gaya kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh pengalamannya saat memimpin India.<sup>128</sup> Dalam usaha kepemimpinannya di Jawa, khususnya di wilayah Cirebon, Raffles berpedoman kepada tiga azas, sebagai berikut:<sup>129</sup>

1. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apa pun.
2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan Kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang

---

<sup>127</sup>Zamzami Amin, *Ibid.*, hlm. 123-124.

<sup>128</sup>Zamzami Amin, *Ibid.*, hlm. 123-124I.

<sup>129</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc.cit.*, 333.

sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri-negeri Barat.

3. Pemerintah Kolonial adalah pemilik tanah, para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (*tenant*) tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah.<sup>130</sup>

Memahami kebijakan pemerintahan Raffles, pada awalnya tampak mengikuti kebijakan Daendels. Namun kemudian Raffles mengubah beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sebutan *prefectur/landdrostambt* menjadi *residency*,
2. Terdapat jabatan baru dalam pemerintahan Inggris, yaitu asisten residen dan wedana yang bertugas mengepalari distrik,
3. Memberikan tanah persawahan bebas pajak kepada Sultan, dan memberikan subsidi uang gaji.<sup>131</sup>

Baik pada masa pemerintahan Daendels maupun Raffles, kehidupan sosial masyarakat *Jawa Kulwan* (Jawa bagian barat) tetap bertahan dalam budaya tradisional. Namun demikian, dalam bidang ekonomi ada perbedaan yang mencolok, terutama di Cirebon dan Banten. Kehidupan ekonomi masyarakat pribumi sangat bergantung kepada kebijakan penguasa (Kolonial).<sup>132</sup> Karena itu, bagi masyarakat Jawa Barat pedalaman (Priangan), kegiatan ekonomi lebih tergerakkan oleh produksi pertanian. Sedangkan Cirebon dan Banten, karena daerahnya lebih rendah dan pantai, kegiatan perdagangan mendapatkan porsi lebih dibandingkan pertanian.

Kebijakan *Preangerstelsel* (sistem Priangan), khususnya kewajiban menanam kopi memberi keuntungan tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat pedalaman (Priangan). Bagi para petani

---

<sup>130</sup>Sulaeman Anggapraja, *loc. cit.*, hlm. 39.

<sup>131</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, 334

<sup>132</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc. cit.*, 334

Priangan, menanam dan mengurus kopi merupakan pekerjaan mereka yang telah diwariskan secara turun temurun sejak masa VOC. Karena itu, meskipun dilakukan tanam paksa, mereka tetap mendapat bayaran dari hasil produksi yang mereka hasilkan. Ditemukan catatan, rata-rata produksi kopi Priangan antara tahun 1810-1819 mencapai 3,7 metrik ton/tahun. Dicatat pula, sampai tahun 1816, sebagian produksi kopi Jawa Barat pedalaman (Priangan).<sup>133</sup>

Sementara untuk kehidupan ekonomi masyarakat Cirebon dan Banten berbanding terbalik dengan Priangan. Bagi masyarakat Banten, kegiatan ekonomi mereka yang semula umumnya pedagang di laut, harus beralih menjadi petani lada. Hal itu semakin diperparah, pemerintah Kolonial turut campur sampai ke tingkat desa. Adapun Cirebon, kegiatan ekonomi mereka lebih parah lagi. Dari yang semula pedagang di laut, menjadi petani lada, nila, dan tebu. Sementara tanah mereka sudah dikuasai para pemilik modal swasta berkebangsaan Belanda dan orang-orang Tionghoa. Menurut Edi S. Ekadjati, ketika menggambarkan rakyat Cirebon saat itu, sebagai berikut: "tenaganya habis dikuras oleh orang-orang Cina yang menyewa desa mereka. Pajak yang ditarik oleh orang Cina pun dirasakan terlalu besar dan banyak macamnya, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak jembatan, dan lain-lain".<sup>134</sup> Kebijakan tanam paksa, lada, nila, dan tebu bagi Cirebon sangat memberatkan, karena tanah digunakan di wilayah itu juga sebelumnya merupakan lahan pertanian padi, yang ketika ditanami lada, nila, dan tebu, praktis mereka tidak bisa menanam padi.

Dengan latar belakang perubahan kebijakan pemerintahan Daendels yang dilanjutkan Raffles berakibat kepada perubahan penggunaan dan konsentrasi kepemilikan tanah di Cirebon. Menurut Eva Nur Arovah, di Keresidenan Cirebon terjadi

---

<sup>133</sup>Nina H. Lubis dkk., *loc.cit.*, 334

<sup>134</sup>Edi S. Ekadjati, *loc. cit.*, hlm. 99.

peningkatan jumlah petani yang tidak mempunyai tanah. Imbasnya mereka menjadi tidak mempunyai tanah garapan sendiri. Akibatnya lebih lanjut, mereka sangat bergantung kepada sektor kerja yang dibayar.<sup>135</sup> Model kasus untuk hal tersebut, sebut saja misalnya, di daerah Palimanan. Mereka mulai terganggu keadaan daerahnya, karena tindakan sewenang-wenang penguasa yang melakukan hal-hal yang menyengsarakan rakyat Palimanan. Pasalnya daerah tempat tinggal rakyat Palimanan banyak yang disewakan oleh Bupati kepada orang-orang Tionghoa berikut dihisap tenaganya dan dikenakan pajak yang tinggi.<sup>136</sup> Kejadian serupa bukan hanya terjadi di Palimanan, namun terjadi pula di wilayah-wilayah lainnya, seperti di kampung Celeng, Lohbener, Indramayu dan Gebanghilir Cirebon. Itulah yang kemudian menyulut rakyat secara lambat laun ingin membebaskan diri dari beban berat yang menimpa mereka. Mereka pun mulai berani melakukan gerakan perlawanan.

Hingga di sini, apabila dilihat dari lokasinya, perlawanan petani dapat dibedakan menjadi dua tempat, yaitu di pusat kerajaan dan di wilayah pinggiran. Daerah pinggiran biasanya dijadikan basis perlawanan. Namun, aliansi dua lokasi terjadi karena keduanya saling tergantung dalam memimpin dan mengalokasikan kekuatan dalam menghadapi penguasa. Selain itu, konflik di dalam istana terus berkembang ke luar dan pecah sebagai gerakan pemberontakan petani di pedesaan. Pemberontakan rakyat Cirebon 1802-1818 merupakan ekspresi ketidakpuasan petani dalam bentuk gerakan pemberontakan yang meluas dari pusat kerajaan ke pedesaan. Protes sosial para petani Cirebon terjadi di daerah pertanian. Para petani merasa dirugikan oleh orang-orang Tionghoa dan residen. Oleh karena

---

<sup>135</sup>Eva Nur Arovah, *loc. cit.*, hlm. 216.

<sup>136</sup>M. Sanggupri Bochari dkk., *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hlm. 47.

itu, mereka melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dan mengadakan pembunuhan

*Gambar 3.6. Pemandangan Perkebunan Tebu Dengan Latar Gunung Ciremai*



*Sumber: Bank Indonesia Institute-KITLV*

terhadap orang-orang Tionghoa. Permasalahan kehidupan sosial-ekonomi yang lama terpendam dan buruk, sistem persewaan desa, dan penarikan pajak, memunculkan pemerasan oleh residen dan orang Tionghoa yang dibiarkan bupati, karena sudah menjadi bagian dari persekongkolan di antara mereka.



## | BAB IV

Berbagai Perjuangan Yang Dilakukan  
Ki Bagus Rangin Di Dalam Menentang  
Pemerintah Kolonial Belanda Dan Inggris

### A. Konsolidasi dan Penggalangan Massa

Periode dari masa hidup Ki Bagus Rangin (1761-1812) dapat dikatakan sebagai periode di mana di wilayah Kesultanan Cirebon banyak ditandai dengan sering terjadinya pergolakan yang tidak jarang banyak menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat di Kesultanan Cirebon. Tentu saja hal ini terjadi karena yang menjadi salah satu penyebabnya adalah ketika di Kesultanan Cirebon terjadi pergantian sultan karena ada salah seorang sultan yang meninggal dunia, seringkali disertai dengan munculnya pertikaian dan perebutan kekuasaan yang membawa kepada perpecahan atau disintegrasi.

Kondisi di Kesultanan Cirebon ini semakin bertambah parah, karena pada saat yang bersamaan ketika terjadi pergantian sultan sering diikuti dengan munculnya tindakan intervensi yang dilakukan orang-orang Belanda melalui *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC)-nya yang berupaya untuk mengadu domba dan mengambil keuntungan dari pertikaian tersebut. Sebagai dampaknya, selama dalam pada periode ini, dalam bidang politik terjadinya pergantian kepemimpinan yang teratur dan damai sangat jarang ditemukan. Begitu juga dalam bidang ekonomi, secara perlahan-lahan tetapi pasti, kekuasaan terhadap sumber ekonomi Cirebon banyak dimonopoli oleh orang-orang Belanda melalui VOC sebagai perusahaan dagangnya. Di wilayah pesisir, VOC banyak mengambil alih jalur-jalur perdagangan, tempat-tempat

strategis, rute-rute pelayaran, sekaligus melakukan kontrol atas harga-harga komoditi dari para petani.<sup>1</sup>

Sekali lagi, kemunculan gerakan perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari terjadinya kekacauan politik di wilayah Kesultanan Cirebon yang terjadi pada waktu itu. Adanya kekacauan politik yang terjadi menjelang berakhirnya abad ke-18 hingga dekade pertama abad ke-19 tersebut, benar-benar dialami oleh Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Seperti diketahui bahwa ketika orang-orang Belanda mulai banyak melakukan intervensi terhadap persoalan kesultanan Cirebon, di antara sultan Cirebon yang berupaya melepaskan diri dari intervensi tersebut adalah Sultan Sepuh Amir Sena Zaenudin. Ia merupakan seorang Sultan dari Kasepuhan yang menjabat dari tahun 1753-1773. Dalam upaya melawan kekuatan VOC, bentuk perlawanan yang dilakukan Sultan Sepuh Amir Sena Zaenudin adalah dengan membangun kompleks makam Sunan Gunung Jati dengan ciri khas gaya arsitektur berupa ruangan-ruangan bertangga dan dilengkapi dengan beberapa pintu di mana di dalam ruangan-ruangan kompleks makam tersebut bisa dipergunakan sebagai tempat persembunyian. Selanjutnya, selain membangun makam Sunan Gunung Jati, Sultan Amir Sena Zaenudin pun berupaya merenovasi Goa Sunyaragi yang pernah dibangun oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1702.<sup>2</sup>

Pada tahun 1773 ketika Sultan Muhammad Syafiudin Matangaji<sup>3</sup> naik tahta dan memerintah. Ia sangat tergugah ketika menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat

---

<sup>1</sup>Eva Nurarovah, "Perjuangan Ki Bagus Rangin dalam Sumber-sumber Tradisional Cirebon", *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Pengusulan Ulang Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional, Bandung, tanggal 21 Maret 2019, hlm. 4.

<sup>2</sup>Aah Syafaah, "Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat dalam Perang Kedondong (1802-1818 M)", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8 Issue 2, Desember 2020, hlm. 234.

<sup>3</sup>Ia dikenal juga dengan nama Amir Shidiq

Cirebon yang berada di bawah penguasaan VOC Belanda dan kaki tangannya. Ia kemudian memanfaatkan keberadaan Goa Sunyaragi untuk dijadikan sebagai tempat latihan bagi para prajuritnya sekaligus sebagai gudang penyimpanan persenjataan dengan nama *Benteng Pendem*. Oleh karena dianggap membahayakan, selanjutnya tempat ini dibombardir<sup>4</sup> oleh pasukan pemerintah Kolonial sampai hancur, karena ternyata diketahui oleh tentara VOC menjadi tempat persembunyian Sultan Muhammad Syafiudin Matangaji yang memberontak kepada pemerintah Kolonial Belanda.<sup>5</sup>

Perjuangan Sultan Amir Sena Zaenuddin kemudian dilanjutkan oleh kedua orang putranya yaitu Pangeran Penengah Abul Khayat Suryanegara dan Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara atau Pangeran Aryajanegara. Kedua putra mahkota tersebut rela meninggalkan keraton untuk berguru kepada ulama sufi keturunan Pangeran Trusmi yang bernama Syekh Muji/Ki Buyut Muji/Kiyai Abdul Muhyi/Kiyai Abdullah yang berlokasi di Desa Tengah Tani di wilayah Cirebon.<sup>6</sup> Berkat *gemblengan* yang diperoleh dari Ki Buyut

---

<sup>4</sup>Dengan adanya peristiwa pengeboman tersebut, Sultan Muhammad Syafiudin Matangaji keluar dari keraton bersama pasukannya ke tempat yang kelak di kemudian hari bernama Desa Matangaji. Selanjutnya ia membangun pondok pesantren sebagai wadah baru untuk mempersiapkan perlawanan-perlawanannya terhadap kolonial. Dalam bentuk perlawanan yang dilakukannya, Sultan Muhammad Syafiudin Matangaji memerintahkan orang kepercayaannya untuk membangun pesantren di Balerante. Selanjutnya banyak pula pesantren-pesantren lain yang dibangun oleh tokoh-tokoh dari keraton, yang letaknya sengaja dibangun jauh dari pusat pemerintahan Cirebon dengan tujuan sebagai basis perlawanan menentang kolonialisme. Dengan didirikannya pesantren-pesantren tersebut, banyak rakyat yang berbondong-bondong masuk pesantren sebagai santri, yang kelak ingin turut berperan dalam perlawanan terhadap penjajahan. Mereka tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama namun juga mereka dilatih bela diri untuk bekal dalam gerakan perlawanan yang kelak dilancarkan.

<sup>5</sup>Aah Syafaah., *ibid.*, hlm. 234.

<sup>6</sup>Selanjutnya Ki Buyut Muji menikahkan kedua putrinya kepada dua orang putra mahkota tersebut yaitu Pangeran Penengah Abul Khayat Suryanegara yang dinikahkan dengan Layyinah, dan menurunkan anak cucunya di daerah Mertasinga, sedangkan Pangeran Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara dinikahkan dengan adiknya yaitu Jamaliyah yang menurunkan anak cucunya yang kebanyakan tinggal di daerah Plered Cirebon dan sebagian ada di Ciwaringin. Lihat Ulya Qanita, "Peran K.H. Muhammad 188 | Geger Ciayumajakuning

Muji, baik dalam kapasitas sebagai guru ataupun sebagai mertuanya, akhirnya kedua putra mahkota tersebut memiliki kemampuan yang saling mendukung satu sama lain. Pangeran Penengah Abul Khayat Suryanegara merupakan seorang ahli dalam bidang ilmu fikih, sedangkan Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara sebagai seorang ahli dalam bidang penyusunan strategi.<sup>7</sup> Pangeran Penengah Abul Khayat Suryanegara dan Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara atau Pangeran Aryajanegara, di antara keduanya dalam perjuangannya kelak kemudian banyak berbagi tugas untuk mendatangi pesantren-pesantren dalam rangka melakukan konsolidasi untuk menyusun kekuatan, bersama para ulama, santri dan rakyat Cirebon untuk menyerang Belanda.

Pada tanggal 27 Maret 1808, atas saran dari Ki Buyut Muji juga, mereka berdua mendirikan “keraton bayangan” yang ditempatkan di Desa Matangaji sebagai pusat perjuangan dan perumusan strategi perang melawan Belanda. Selain itu, bersama dengan semangat jihadnya yang sudah tertanam, mereka bersama melatih diri dengan ilmu beladiri pencak silat yang dikemas dalam bentuk kesenian Rudat.<sup>8</sup>

Kepergian kedua putra mahkota Sultan Amir Sena Zaenuddin tersebut ternyata sampai juga ke telinga Raja Kanoman, Sultan Anom Muhammad Khaeruddin yang pada akhirnya telah mendorong Sultan Anom Muhammmad Khaerudin untuk memutuskan keluar juga dari istana karena menolak untuk tunduk terhadap tekanan VOC dan memilih

---

Jauhar Arifin (1895-1941) dalam Mengembangkan Pondok Pesantren Al-Jauhariyah di Desa Balerante Palimanan Cirebon”, *Laporan Penelitian*, (Cirebon: Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati, 2015), hlm. 44.

<sup>7</sup> Aah Syafaah, *op. cit.*, hlm. 234.

<sup>8</sup> Kesenian Rudat atau yang lebih populer dengan nama Genjring Rudat merupakan salah satu kesenian tradisional Cirebon yang menampilkan gerak Pencak Silat yang dipadu dengan musik Rebana atau Genjring. Lihat <https://budayajawa.id>.

merelakan haknya atas tahta kesultanan untuk ikut berjuang bersama ulama dan rakyat di wilayah Cirebon Timur.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dalam naskah *Brahmakawi Perang Jaya*, bahwa puncak kekacauan politik yang terjadi di Keraton Kasepuhan mulai pecah ke permukaan tepat pada masa pemerintahan Sultan Sepuh Muhammad Syafiudin Matangaji (memerintah 1773-1786), yang melakukan gerakan perlawanan terhadap kompeni dengan membangun basis militernya di Sunyaragi.

Pada tahun 1783, dengan berbekal informasi yang diperoleh dari arsitek Sunyaragi tentara VOC berhasil menyerang ke jantung pertahanan Sunyaragi sehingga Sultan Sepuh Muhammad Syafiudin berupaya meloloskan diri ke daerah Matangaji. Dari daerah ini kemudian Sultan Sepuh Muhammad Shafiuddin dikenal juga dengan Sultan Matangaji. Usaha VOC Belanda untuk menghabsi Sultan Sepuh Muhammad Syafiuddin Matangaji menemukan jalannya dengan mengutus Ki Muda<sup>10</sup> untuk mengajak berunding. Setelahnnya sesampainya di Keraton Kasepuhan, Sultan Sepuh Muhammad Syafiudin Matangaji bukannya diajak berunding, ia malah meninggal dibunuh kompeni Belanda. Selanjutnya Ki Muda kemudian diangkat kompeni sebagai Sultan Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Muhammad Hasanuddin (memerintah 1786-1791).<sup>11</sup>

Dengan adanya kejadian tersebut di atas, kondisi ini tidak dengan sendirinya telah menghentikan pemberontakan yang sudah dirintis oleh kerabat Keraton Kasepuhan yang sudah keluar dari lingkungan keraton. Sebagai buktinya salah satunya, Pangeran Arya Panengah Abu Hayat Suryakusuma atau Pangeran Suryanegara, sebagai adik dari Sultan Sepuh V Muhammad Syafiudin Matangaji, ia melanjutkan perjuangan

---

<sup>9</sup> Aah Syafaah, *op. cit.*, hlm. 234.

<sup>10</sup> Paman Sultan Matangaji dari pihak ibu

<sup>11</sup> Eva Nurarovah, *loc. cit.*, hlm. 5.

kakaknya dengan mempersiapkan gerakan perlawanan berikutnya kepada kompeni. Pada tahun 1773, ia mendirikan Keraton Mertasinga sekaligus mempersiapkan perlawanan terhadap kompeni Belanda. Ia juga mengancam terhadap keluarga keraton yang seolah membiarkan kompeni turut campur terhadap kebijakan keraton.

Fenomena yang sama terjadi juga di Keraton Kanoman. Di Keraton Kanoman, puncak kekacauan dan munculnya api pemberontakan semakin meningkat seiring dengan meninggalnya Sultan Kanoman IV, Sultan Anom Muhammad Khaerudin (memerintah 1798-1803). Seperti diketahui bersama, bahwa Kompeni Belanda di samping telah menguasai sumber-sumber ekonomi yang vital, membebani rakyat dengan pajak yang tinggi, mereka juga telah mengangkat sultan Kanoman bukan dari putra mahkota, melainkan adik pangeran yang kemudian bergelar Sultan Anom Muhammad Abu Sholeh Imamuddin (1803-1811), sebagai Sultan Kanoman V. Peristiwa ini telah mengakibatkan munculnya protes warga dan pecahnya kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat sampai kepada terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang Cina. Sebagai buntut dari peristiwa ini, pihak kompeni Belanda bukannya menyelesaikan apa yang menjadi akar permasalahan mengapa muncul protes warga dan pecahnya kerusuhan tersebut, mereka malah menuduh Putra Mahkota Keraton Kanoman yang dikenal dengan nama Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Muhammad Khaerudin<sup>12</sup> sebagai dalang dari keseluruhan peristiwa tersebut. Akhirnya Pangeran Raja Kanoman pun ditangkap dan dibawa ke Batavia untuk selanjutnya kemudian

---

<sup>12</sup>Pangeran Raja Kanoman atau Pangeran Muhammad Khaerudin kemudian dikenal dengan nama Pangeran Santri, karena berguru kepada Kiyai Muqoyyim dan Kiyai Ardisela terutama dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan selama masa perjuangan melawan VOC Belanda seperti ilmu beladiri dan ketatanegaraan. Lihat Aah Syafaah, *Perjuangan Kiyai Muqoyyim (1689-1785) dalam Pendirian Pesantren di Cirebon Timur*. (Cirebon: Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2013), hlm. 41.

dibuang ke Ambon. Kendatipun Pangeran Raja Kanoman dibuang ke Ambon, dalam peristiwa ini bukan berarti menghentikan gerakan perlawanan rakyat di Kesultanan Cirebon, justru sebaliknya, gerakan perlawanan rakyat di Kesultanan Cirebon malah semakin menjadi-jadi.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas, di antara kerabat keraton Cirebon yang dicabut haknya sebagai sultan dan disingkirkan kedudukannya ialah pertama, Sultan Raja Kasepuhan Pangeran Muhammad Syafiudin Matangaji (1773-1786), dan kedua adalah Pangeran Khaeruddin II atau Pangeran Raja Kanoman (1798-1803). Selanjutnya, berangkat dari kekecewaan atas perlakuan yang dilakukan oleh kompeni tersebut mereka berdua keluar dari keraton.

Sebagai seorang santri, Ki Bagus Rangin merasakan dan melihat betul apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Sultan Raja Kasepuhan Pangeran Muhammad Syafiudin Matangaji dan Pangeran Khaeruddin II atau Pangeran Raja Kanoman. Pada masa ini terutama pada dekade kedelapan sampai dengan dekade terakhir dari abad ke-18, segala jejak langkah dari Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Arsitek, Ki Bagus Serit dan lain sebagainya dapat dipandang sebagai penerus dari generasi awal yang berlatih ilmu bela diri pencak silat yang dikemas dalam bentuk seni rudat ini. Ki Bagus Rangin aktif bergabung untuk ikut mengembangkan ilmu bela diri pencak silat ini.<sup>14</sup> Tampaknya, apa yang dilakukan Sultan Raja Kasepuhan Pangeran Muhammad Syafiudin Matangaji dan Pangeran Khaeruddin II atau Pangeran Raja Kanoman untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap Kompeni Belanda pada waktu itu telah memberikan inspirasi dan mendorong Ki

---

<sup>13</sup>Nina H. Lubis, "Cirebon" dalam Nina H. Lubis (Ed.), *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, (Bandung: Alqaprint, 2000), hlm. 45-47; Eva Nurarovah, *ibid.*, hlm. 5.

<sup>14</sup>*Naskah Kitab Mujarobat Naskah Mertasinga*, Penyunting R. Rapan Safari Hasyim. Tanpa Tahun hlm. ; Eva Nurarovah, *ibid.*, hlm. 5.

Bagus Rangin untuk ikut bahu membahu membantu agar bisa bersama-sama berjuang melawan Kompeni Belanda.

Untuk merealisasikan perjuangan tersebut, selama dalam kurun waktu kurang lebih dua puluh tahun, terutama dari dekade ke delapan sampai dengan dekade terakhir dari abad ke-18 telah dilakukan beberapa kordinasi dan penggalangan yang melibatkan tokoh-tokoh dari keraton dan elemen-elemen masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam naskah *Mertasinga Kitab Mujarobat*, sebagai penasehat dari perjuangan yang dilakukan rakyat di Kesultanan Cirebon pada waktu itu dipegang oleh seorang guru syufi, yaitu Syekh Muji<sup>15</sup> atau Ki Buyut Muji<sup>16</sup>. Untuk pimpinan umum perjuangan dipegang oleh Pangeran Muhammad Syafiudin (Keraton Kasepuhan). Sebagai panglima perang dipegang oleh Pangeran Muhammad Khaerudin II (Keraton Kanoman). Penyusun strategi perang dipegang Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara atau Pangeran Aryajanegara. Untuk kordinator lapangan pusat dipegang oleh Pangeran Panengah Abdul Hayat Suryanegara. Selanjutnya, sebagai kordinator lapangan bagian barat di pegang oleh Ki Bagus Rangin, sedangkan kordinator lapangan wilayah tengah dipegang oleh K. Jamaludin Bukhari/Ki Buyut Jabin, dan kemudian kordinator lapangan timur dipegang oleh Mbah Mukoyim, pendiri Pesantren Buntet, sekaligus mufti Keraton Kanoman.

Beberapa tokoh penggerak seperti Sultan Muhammad Syafiudin, Pangeran Raja Kanoman, dan Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara, di antara mereka banyak melakukan

---

<sup>15</sup>Ada beberapa nama terkait dengan Syekh Muji, yaitu Ki Buyut Muji/Kiyai Abdul Muhyi/ Kiyai Abdullah. Semuanya mengacu kepada orang yang sama.

<sup>16</sup>Selanjutnya Ki Buyut Muji menikahkan kedua putrinya kepada dua orang putra mahkota tersebut yaitu Pangeran Panengah Abdul Hayat Suryanegara dinikahkan dengan Layyinah, dan menurunkan anak cucunya di daerah Mertasinga, sementara Pangeran Idrus Jayanegara dinikahkan dengan adiknya yaitu Jamaliyah yang menurunkan anak cucunya yang kebanyakan tinggal di daerah Plered Cirebon dan sebagian ada di Ciwaringin. Lihat Ulya Qanita, *loc. cit.*, hlm. 44.

pertemuan dan bermusyawarah di sebuah tempat yang bernama Tengah Tani, yang kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya ialah di antara mereka bersepakat untuk: *Pertama*, mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa kolonial di Cirebon dengan tujuan untuk memulihkan kedudukan Cirebon sebagai penguasa politik dan penentu kebijakan tradisi yang bersendikan syariat Islam, termasuk untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. *Kedua*, mereka bersepakat untuk mengkonsolidasi perjuangannya dengan mengajak tokoh-tokoh lain seperti Mbah Muqoyyim, Jamaluddin Bukhori, Raden Atas Angin, Sya`roni, Pangeran Arya Sukmadiningrat dan Syarif Abdur Rahman yang merupakan seorang pendakwah keturunan Arab. *Ketiga*, mereka juga bersepakat untuk menyembunyikan identitasnya dengan mengganti nama asli mereka dengan nama sandi agar tidak diketahui baik oleh pihak keraton yang telah memihak pemerintah maupun oleh pemerintah itu sendiri.<sup>17</sup> Hasil yang telah diperoleh dari kesepakatan itu kemudian segera disebar secara diam-diam.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 1801, mereka berkumpul kembali bersama tokoh-tokoh lainnya di tempat yang sama. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Tengah Tani ditetapkan sebagai tempat Keraton Perjuangan atau Bayangan, yang bisa dipergunakan untuk melanjutkan berbagai pembahasan perjuangan sebelumnya. Beberapa hasil dari pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa Pangeran Muhammad Khaerudin II (Keraton Kanoman) ditunjuk sebagai panglima tertinggi, Pangeran Pangeran Panengah Abdul Hayat Suryanegara sebagai koordinator lapangan, Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara atau Pangeran Aryajanegara sebagai

---

<sup>17</sup>Abi Kayis Al-Mahdawy, *Detik-Detik Terjadinya Perang Kedondong*. Di akses dari <http://nurussyahid.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-perang-kedondong-perang-rakyat.html?m=1> pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.00 WIB; Lihat juga Islamiyati Rahayu, "Strategi-strategi Perlawanan frakyat Cirebon dalam Perang Kedondong tahun 1802-1818", *Jurnal Tamadun*, Volume IV Edisi 1, Januari-Juni 2026, hlm. hlm. 157.

penyusun strategi dan untuk pimpinan daerah ditunjuk Mbah Muqoyyim dan tokoh lainnya seperti Jamaluddin Bukhori, Pangeran Arya Sukmadiningrat, Sya`roni dan Syarif Abdurrahman.<sup>18</sup>

Dalam pertemuan itu juga, para tokoh tersebut mengganti nama mereka dengan nama-nama sandi di antaranya ialah Pangeran Suryanegara dan Pangeran Jayanegaradiganti menjadi satu nama yaitu Suryajanegara (namun kemudian nama itu hanya digunakan oleh Pangeran Suryanegara, dan Pangeran Jayanegara diganti dengan nama Rancang), Raden Atas Angin diganti dengan nama Bagus Rangin, Syarif Abdur Rahman diganti dengan nama Bagus Sidong, Jamaludin Bukhori diganti dengan nama Bagus Jabin, Sya`roni diganti dengan nama Bagus Serit, dan Pangeran Arya Sukmadiningrat diganti dengan nama Bagus Arsitem.<sup>25</sup>

Gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh mereka diawali dengan mengganggu stabilitas keamanan daerah, menghancurkan beberapa infrastruktur masyarakat seperti jalan-jalan penghubung dan jembatan, menghancurkan daerah-daerah dengan membakar rumah-rumah, serta melakukan penyerbuan dan penyerangan yang terus-menerus kepada pihak pemerintah kolonial. Selain itu kepada para kordinator diberikan tugas untuk merekrut kuwu-kuwu yang berada di wilayah Cirebon agar bisa bergabung dalam gerakan penentangan dan perlawanan tersebut.<sup>19</sup>

Pola penyerangan yang dilakukan itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa barisan perlawanan rakyat ingin memberikan dampak kerugian pada pihak lawan dengan cara menguras harta benda dan tenaganya. Kendati apa yang

---

<sup>18</sup> Islamiyati Rahayu, *ibid.*, hlm. 157.

<sup>19</sup> Islamiyati Rahayu, *ibid.*, hlm. 157.

dilakukan oleh pasukan perlawanan rakyat ini memiliki peluang yang kecil untuk berhasil, namun demikian, setidaknya-pasukan rakyat Cirebon sudah berusaha dan terus berjuang untuk mengobarkan semangatnya melanjutkan gerakan penentangan dan perlawanan sebagai bagian dari perjuangan. Setidaknya, jika kemenangan belum dapat diperoleh, maka pihak lawan harus membayar kemenangannya dengan harga yang cukup tinggi.<sup>20</sup>

Akhirnya berbagai gerakan perlawanan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah kolonial yang berkuasa dalam bentuk huru-hara dan kerusuhan pun pecah secara sporadis di berbagai wilayah Cirebon, setidaknya hal itu dimulai sejak tahun 1802. Huru-hara dan kerusuhan tersebut mungkin dilakukan rakyat Cirebon dengan maksud untuk menunjukkan bahwa rakyat Cirebon mempunyai kekuatan dan keberanian untuk melawan. Sebagai sasaran pertama gerakan perlawanan tersebut adalah orang-orang Cina yang mereka anggap sebagai pemeras rakyat.

Dalam gerakan perlawanan itu, orang-orang Cina banyak yang menjadi sasaran pengusiran dan pembunuhan dari wilayah Cirebon, seperti di Palimanan, Lohbener, Dermayu dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Selain itu, gerakan perlawanan juga dilancarkan dalam bentuk penyerbuan terhadap keberadaan gudang-gudang yang menjadi tempat penyimpanan harta benda dan makanan. Para pasukan perlawanan memandang bahwa semua barang-barang yang diambil itu pada dasarnya

---

<sup>20</sup> Islamiyati Rahayu, *ibid.*, hlm. 157.

<sup>21</sup> Edi S. Ekajati dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Jawa Barat*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990, hal. 100.

merupakan kumpulan hasil dari pajak-pajak dan penanaman wajib yang pernah dibebankan terhadap rakyat. Oleh karena itu, para pasukan perlawanan mengambil kembali barang-barang itu untuk kemudian dibagikan pada rakyat.<sup>22</sup>

Kemenangan memang tidak berpihak kepada rakyat yang berada di wilayah Cirebon, namun demikian setidaknya perjuangan mengangkat senjata sudah mulai dilakukan oleh para ulama, petinggi keraton, masyarakat Cirebon baik dari kalangan petani maupun dari para pelaku kesenian. Semuanya bersatu mengikuti garis komando yang diberikan dengan strategi perang yang sangat luar biasa, meskipun dengan senjata yang seadanya dan terbilang tradisional. Di sini, patut mendapat apresiasi dan perhatian bahwa semangat untuk melawan penjajahan dan kesadaran untuk membela negara mereka agar tidak lagi dijajah oleh kekuatan asing dan nonmuslim ini, merupakan catatan peristiwa yang sama sekali tidak perlu dihilangkan dalam rangkaian perlawanan rakyat Cirebon yang begitu besar dan masif.<sup>23</sup>

Seperti itulah gambaran kordinasi dan penggalangan massa dari perjuangan rakyat di Kesultanan Cirebon di dalam menentang Kompeni Belanda, sebelum dipimpin langsung oleh Ki Bagus Rangin. Berikut ini adalah bagan sistematika dari hirarki dan pembagian tugas terkait dengan perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di awal-awal perjuangannya dalam usaha menentang pemerintah Kompeni Belanda yang

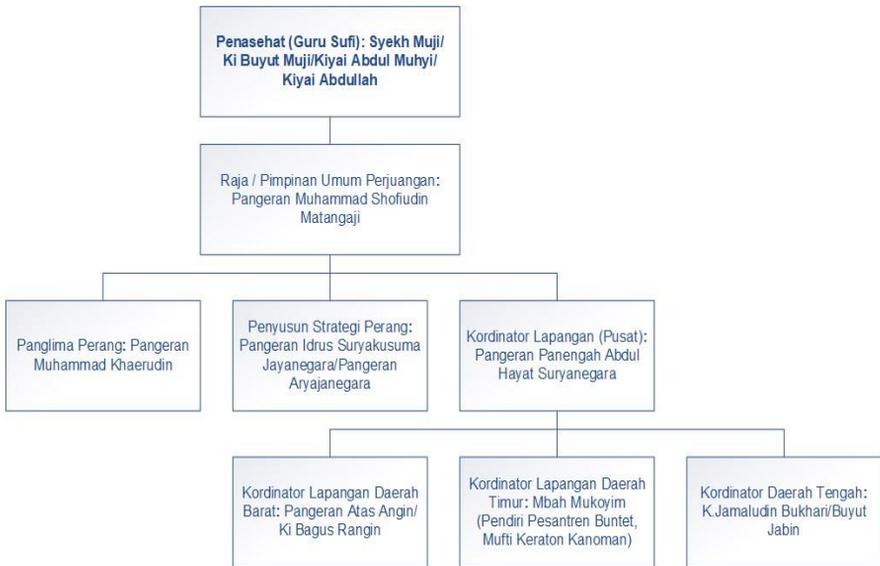
---

<sup>22</sup>R. A. Opan Safari Hasyim, t.t. "Perjuangan Ki Bagus Rangin Menentang Kolonial Belanda 1805-1818 (Menurut Sumber-Sumber Tradition)", *Makalah Seminar*, hlm.6-7.

<sup>23</sup>Aah Syafaah, *loc. cit.*, hlm. 239.

dilakukan bersama beberapa sultan dari Kesultanan Cirebon dalam rangka konsolidasi dan penggalangan massa:

**Bagan 4.1 Hirarki dan Pembagian Tugas Ki Bagus Rangin di Awal-awal Perjuangannya dalam Usaha Mmentang Pemerintah Kompeni Belanda Bersama Sultan-sultan Cirebon**



Sumber: *Naskah Mertasinga Kitab Mujarobat*, Penyunting R. A. Opan Safari Hasyim, Tanpa Tahun.

Setelah terbentuk susunan perjuangan di atas, sebagai langkah awal yang dilakukan Ki Bagus Rangin adalah melakukan perekrutan dengan merekrut para pejuang melalui pendirian pesantren atau tempat mengaji yang diikuti dengan pemberian pelatihan ilmu *olah kanuragan*. Selama kurang lebih dari setahun berjuang, Ki Bagus Rangin berhasil melatih dan mengumpulkan 10.000 orang *mujahidin*.

Pada tahun 1802 di wilayah Kesultanan Cirebon pecah perang melawan Belanda yang mengakibatkan banyak korban dari pihak Belanda. Sebagai buntut dari peperangan tersebut,

pihak Belanda pun kemudian meminta bantuan ke Batavia dan bahkan kepada tentara Portugis. Mereka akhirnya mendapat bantuan enam kapal perang beserta pasukannya. Dengan bantuan tersebut, satu persatu pimpinan pejuang ada yang berhasil ditangkap atau tewas dibinasakan. Dalam peperangan tersebut, ribuan korban jatuh dari kedua belah pihak.

Peperangan yang berlangsung di wilayah Kesultanan Cirebon antara Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di masa *interregnum* versus rakyat di wilayah tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dalam perjalanan sejarahnya, peperangan yang terjadi antara Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris dengan rakyat yang berada di Kesultanan Cirebon tersebut, selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu banyak yang dilanjutkan secara sporadis, yang dilakukan di berbagai daerah di wilayah Keresidenan Cirebon. Dari perlawanan rakyat yang banyak dimotori oleh para ulama, santri, kerabat di lingkungan keraton, serta penduduk pada umumnya ini kemudian lahir istilah perang Santri atau Perang Kedondong dengan pemimpinnya Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Jabin, Bagus Serit dan lain-lain.<sup>24</sup>

## **B. Memulai Gerakan Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda**

Perlu dikemukakan bahwa, diskursus perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dalam usaha melaksanakan gerakan penentangan dan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di wilayah Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat perhatian berbagai kalangan pada waktu itu, secara komprehensif banyak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sepuh VII, Pangeran Muhammad Joharudin (memerintah 1791-1815) dan Sultan Sepuh VIII, Pangeran Muhammad

---

<sup>24</sup> Eva Nurarovah, *ibid.*, hlm. 7

Syamsudin Raja Udaka (memerintah 1815-1845) dari Keraton Kasepuhan Cirebon.<sup>25</sup>

Sementara di Keraton Kanoman pada saat itu pemerintahan dipegang oleh Sultan Anom IV, Pangeran Muhammad Khaerudin I (memerintah 1719-1797); Sultan Anom V, Pangeran Muhammad Imamudin Abu Shaleh (memerintah 1797-1803); Sultan Anom VI, Sultan Muhammad Komarudin I (memerintah 1803-1811); dan Sultan Anom VII, Sultan Muhammad Komarudin II (memerintah 1811-1858). Namun demikian, di masa-masa sebelumnya juga telah ada, yaitu dimulai sekitar tahun 1680-an meletus di Galunggung yang dipimpin oleh Pangeran Kusumajaya. Namun demikian, pengaruh dari gerakan perlawanannya tidak sebesar yang terjadi di rentang waktu 1802 sampai tahun 1818 yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya.<sup>26</sup>

Gerakan perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan kemudian dilanjutkan kembali oleh pengikut-pengikutnya yang telah menggegerkan masyarakat di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan yang telah berlangsung selama rentang waktu 16 tahun, yaitu mulai dari tahun 1802 sampai dengan tahun 1818, setelah dilakukan analisis secara mendalam, gerakan penentangan dan perlawanan yang terjadi di wilayah Keresidenan Cirebon ini dapat difragmentasikan ke dalam empat periode.

Periode yang pertama, terjadi pada tahun 1802-1808. Sebagai tokoh utama gerakan ini adalah Ki Bagus Sidong, Ki Bagus Arisim, Ki Bagus Suwasa, dan Ki Bagus Rangin. Periode yang kedua terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1809-1811). Tokoh utama gerakan perlawanan pada periode ini masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu Ki Bagus Rangin yang menolak untuk berunding, sementara Ki

---

<sup>25</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, "Perjuangan Rakyat Cirebon Melawan Penjajah", *Makalah Seminar*, tanggal 18 Juli 2022, hlm. 1-26.

<sup>26</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *ibid.*, hlm. 1-26.

Bagus Sidong, Ki Bagus Arisim, Ki Bagus Suwasa sudah menyerah kepada pemerintah kolonial. Periode yang ketiga terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada periode ini, gerakan perlawanan masih dipimpin oleh tokoh yang sama, yaitu Ki Bagus Rangin sebagai sentral. Kendatipun Ki Bagus Rangin pada tahun 1812 tertangkap dan dihukum mati, namun perjuangannya tetap berjalan dan dilanjutkan oleh para pengikutnya. Periode yang keempat gerakan perlawanan terjadi dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1818. Pada periode ini dapat dikatakan bahwa gerakan penentangan dan perlawanan banyak dilakukan oleh para pengikut Ki Bagus Rangin, seperti Ki Bagus Serit yang masih memegang spirit perjuangan Ki Bagus Rangin. Periode gerakan perlawanan ini terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1817, dan tahap kedua pecah kembali pada tahun 1818. Perlawanan tahap kedua juga yang pecah pada tahun 1818 terjadi dalam dua fase, yaitu yang pertama terjadi pada bulan Januari-Februari tahun 1818 dan kedua, terjadi pada bulan Juli-Agustus tahun 1818.

Bila dianalisis secara lebih spesifik, di antara sebab-sebab yang melatar belakangi munculnya gerakan penentangan dan perlawanan ini memang berbeda-beda pada setiap periodenya. Kendati demikian, sekalipun ditemukan adanya perbedaan latar belakang kemunculan gerakan perlawanan itu, namun dapat ditarik benang merah yang sama bahwa pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang ditujukan kepada pemerintah pada waktu itu semuanya memiliki hubungan langsung dengan kebijakan pemerintah kolonial yang diambil pada setiap periode terjadinya peristiwa.

Pada periode pertama, yang menjadi penyebab utama terjadinya pergolakan ini berawal dari adanya kebijakan pemerintah kolonial yang mencampuri urusan internal keraton

Kesultanan Cirebon dalam suksesi pergantian Sultan. Selain itu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang mendorong terjadinya penentangan dan perlawanan ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah terutama dengan persoalan persewaan tanah desa yang melibatkan orang-orang Cina, yang pada akhirnya memberatkan dan menyengsarakan rakyat.

Pada periode kedua, yang menjadi latar belakang terjadinya pergolakan juga disebabkan terkait dengan kebijakan “tangan besi” yang diterapkan H.W. Daendels yang selama memerintah belum memenuhi harapan tuntutan rakyat, bahkan sebaliknya banyak menekan dan menyengsarakan rakyat dengan program kerja paksa di wilayah Cirebon. Sedangkan yang menjadi latar belakang terjadinya pergolakan pada periode ketiga, memiliki hubungan erat dengan kebijakan yang diterapkan Thomas Stamford Raffles yang banyak menekan ditambah dengan beratnya beban yang dirasakan oleh rakyat, terutama terkait dengan kebijakan tentang penjualan tanah, pemborongan/persewaan monopoli, dan kerja wajib.

Adapun sebab utama pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan pada periode keempat juga masih sama memiliki keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang berakhir dengan adanya perlakuan yang dialami penduduk baik di tanah pemerintah maupun di tanah partikelir, sehubungan dengan adanya kerja wajib dan penyeteroran wajib yang dipungut dari penduduk.

Keadaan ini diperparah dengan langkah yang dilakukan pemerintah kolonial yang masih membiarkan praktik-praktik lama orang Cina berupa persewaan desa-desa Sultan dan penjualan kredit terhadap penduduk. Dalam kasus yang ditemukan di Indramayu dan Karawang para pemilik tanah-tanah partikelir menuntut hasil panen yang melebihi kemampuan penduduk, bahkan dituntut melakukan kerja wajib tanpa upah.

## 1. Periode Pertama Perjuangan Ki Bagus Rangin (1802-1808): Ki Bagus Rangin sebagai Tokoh Utama Gerakan

Pada periode yang pertama, kronologi pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin terhadap Pemerintah Kolonial Belanda meletus pada tahun 1802. Seperti diketahui bahwa dalam perjuangan-perjuangan yang ditempuh sebelumnya yang dilakukan di pusat kekuasaan Kesultanan Cirebon Ki Bagus Rangin sudah banyak melakukan upaya konsolidasi dan penggalangan kekuatan dengan Pangeran Muhammad Khaerudin, Pangeran Panengah Abdul Hayat Suryanegara, Pangeran Idrus Suryakusuma Jayanegara, Mbah Muqoyyim, Jamaluddin Bukhori, Pangeran Arya Sukmadiningrat, Sya`roni dan Syarif Abdurrahman. Ki Bagus Rangin melihat dan merasakan bahwa ia dan pengikutnya tidak mendapatkan tempat yang nyaman untuk membangun pasukan perlawanan kepada Belanda.

Menyikapi keadaan tersebut, Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya berusaha menyusun kekuatan di pedalaman yang lokasinya berada di hutan Bantarjati. Pada saat itu daerah Bantarjati secara administratif pemerintahan berada di bawah pengawasan Adipati Dermayu yang bergelar Wiralodra VI, Raden Semanggun Benggala. Raden Semanggun Benggala sering mendapat kesulitan untuk menghentikan gerakan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin, sehingga seringkali Raden Semanggun Benggala menghadap dan melapor ke Sultan Kanoman Cirebon. Kemudian Sultan Kanoman Cirebon memberikan saran dan masukan kepada Raden Semanggun Benggala.<sup>27</sup>

Menurut informasi yang diperoleh dalam naskah *Babad Dermayu*, bahwa pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin pada tahun 1802

---

<sup>27</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, hlm. 1-26.

dimulai dari adanya pergerakan sekitar 1.000 orang bersenjata lengkap di Bantarjati di mana di sana ada Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, dan Ki Bagus Kandar yang akan melancarkan pemberontakan terhadap Pemerintah Dermayu sebagai kepanjangan pemerintah kolonial, yang kemudian dilaporkan oleh seorang penduduk Dermayu bernama Nyi Jaya<sup>28</sup> kepada Adipati Kadipaten Indramayu, Raden Semangun Benggala.<sup>29</sup>

Muhammad Mukhtar Jaedir mengemukakan bahwa pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin diawali dari adanya pergerakan orang-orang yang berkumpul di Bantarjati yang berasal dari daerah Biyawak, Jatitujuh, Kalinyar, dan Pancaripis. Mereka berkumpul dengan dimotori oleh Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Kandar, Ki Bagus Surapersanda, Ki Bagus Sena, dan Ki Bagus Leja. Begitu juga di Bantarjati berkumpul para senapati perang seperti Ki Bagus Seling, putra Ki Bagus Rangin, Raden Nuralim, Bagus Gana, Bagus Wagana, dan Bagus Jari Pamayahan. Pada saat menyusun kekuatan di Bantarjati, setiap hari banyak orang yang berdatangan guna bermusyawarah untuk menyerang dan menduduki negara Dermayu (Indramayu). Dalam kumpulan di Bantarjati tersebut semua peralatan perang yang diperlukan seperti tumbak, keris, bandring, tulup, panah, suligi, jolen, dan kendaraan yang ada pada waktu itu telah dipersiapkan.<sup>30</sup>

Menyikapi keadaan tersebut, Raden Semangun Benggala (Wiralodra VI) selanjutnya memerintahkan untuk melakukan penyerbuan bersama 1.200 pasukan dan masyarakat, yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu satu pasukan ke Bantarjati yang dipimpin Patih Astrasuta, dan satu pasukan lagi ke Jatitujuh yang dipimpin oleh dirinya. Dalam *Babad Dermayu* yang telah

---

<sup>28</sup> Atas jasanya melaporkan keadaan tersebut, Raden Semangun Benggala memberikan penghargaan kepada Nyi Jaya berupa gelar Nyi Resik, yang artinya hati yang bersih dan setia kepada Wiralodra. Hingga kini, nama Nyi Resik Jaya menjadi nama jalan di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, 3 km dari Pendopo Kabupaten Indramayu.

<sup>29</sup> Muhamad Mukhtar Zaedin dan Ki Tarka Sutarahardja, *Babad Dermayu*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2019), hlm. 86.

<sup>30</sup> Muhamad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 10.

diterjemahkan oleh Muhammad Mukhtar Zaedin dan Ki Tarka Sutarahardja<sup>31</sup>, tentang kronologi dari peperangan tersebut dikemukakan:

Ki Dalem Wiralodra Raden Semangun, berunding dengan Ki Patih Astrasuta untuk menyikapi atas laporan Nyi Resikjaya. Maka atas saran Ki Patih bahwasannya laporan itu harus diperiksa kebenarannya. Pemeriksaan itu disertai dengan prajurit pilihan yang membawa peralatan perang. Maklumlah karena hendak datang ketempat musuh, jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Dalem Wiralodara menyetujui apa yang diusulkan oleh Ki Patih Astrasuta.

Pagi harinya, Ki Patih mengumpulkan para bopati, sentana, mantri, dan prajurit, seperti Trunaja, Wangsatruna, Tanujiwa, Jiwasuta, Tanujiwa, Wangsanaya, Sutawangsa, dan Tanujaya. Kemudian Kyai Patih berkata, “Hei saudara-saudaraku, para prajurit yang aku kumpulkan. Ketahuilah bahwa sekarang ada orang yang berbuat kerusuhan di desa Bantarjati, maka Gusti Dalem Dermayu ingin memeriksanya. Oleh karena itu harap saudara-saudara semua siaga lengkap peralatan perang masing-masing. Maklumlah kita ini akan memeriksa para berandal.”<sup>32</sup>

Ki Patih Astrasuta mundur dari Paseban Luar dengan diiring oleh para prajurit. Begitu terdengar suara *bende* (canang) upacara pun digelar. Para mantri, demang, rangga, aria, dan prajurit segera menaiki kuda. Ada yang membawa pedang, tumbak, dan busur. Para prajurit itu dengan memakai seragam yang berwarna-warni. Ki Patih berada di bagian depan dengan menunggang kuda yang nampak gagah. Di sepanjang perjalanan menjadi bahan tontonan para penduduk. Mereka ada yang menyediakan minuman, kelapa muda hijau, atau pun makanan. Mereka semua merasa senang karena selama ini baru bisa melihat atau pun bertemu dengan para pembesar negara. Sepanjang jalan barisan prajurit itu pun diiring dengan gamelan tayuban.<sup>33</sup>

Di Bantarjati, Ki Bagus Rangin dan pamannya, Ki Bagus Serit, sedang dihadap oleh para ponggawa serta para putra. Demikian juga Ki Bagus Sena, Ki Bagus Leja, Ki Bagus

---

<sup>31</sup>Muhamad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 14-18.

<sup>32</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 97-99.

<sup>33</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 100.

Kandar, Ki Surapersanda, Ki Bagus Seling putra bagus Rangin, Raden Nuralim, Kyai Betawi atau Ki Gede Kandanghaur, Ki Bagus Pangiwa, Ki Gana Wagana, dan Ki Jari. Semua Senapatinya berasal dari putra Pamayahan. Kemudian Ki Bagus Rangin berkata kepada paman Ki Bagus Serit, “Bagaimana menurut paman? Apakah kita akan bergerak menyerang Dermayu sekrang, sebab pasukan dirasa telah mencukupi?”

Ki Bagus Serit menyarankan agar bersabar terlebih dahulu. Sebaiknya Bergeraknya nanti saja pada hari Kamis Keliwon. Sebab pada hari itu perwatakannya baik sekali. Saat sedang bermusyawarah tiba-tiba datanglah Pecalang menghadap. Ia melaporkan bahwa para prajurit Dermayu akan datang memeriksa. Sekarang mereka masih berada di Jatitujuh.

Mendengar laporan Pecalang itu, Ki Bagus Rangin merasa suka cita kemudian meminta pendapat Ki Serit atas kedatangan Dalem Dermayu itu. Kemudian Ki Serit menjelaskan bahwa posisinya sedang dalam kejayaan. Sedangkan musuhnya yang saat itu datang dari arah utara, maka menurut perhitungan mereka sedang dalam kesialan.

Ki Bagus Rangin menyerahkan taktik perang itu kepada Ki Serit, yang kemudian membuat strategi penyambutan. Setelah selesai bermusyawarah, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk berpesta tayuban siang malam. Mereka sangat menanti-nantikan kedatangan tamu negara. Namun peralatan perang juga dipersiapkan.<sup>34</sup>

Di pagi harinya, Ki Patih berangkat bersama para prajurit pilihan lengkap dengan persenjataan perang seperti *bandring*, *tulup*, dan *suligi*. Ki Patih menunggang kuda berwarna hitam. Begitu rombongan sampai di perbatasan desa, maka terdengarlah suara gamelan. Umbul-umbul terlihat dipasang baris disepanjang jalan. Ki Patih bersama prajurit Dermayu terus berjalan dengan menunggang kuda menuju perkemahan agung yang terletak di Bantarjati.

Setelah rombongan prajurit Dermayu jauh melewati jembatan batas desa. Kemudian pasukan Bagus Rangin merusak jembatan itu dengan membakarnya hingga tiada kayu yang terisisa sedikit pun. Prajurit Dermayu telah tiba di perkemahan agung. Di jemput oleh pasukan dari pihak Ki Bagus Rangin. Kemudian dibawa masuk kedalam tarub

---

<sup>34</sup> Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 101-103.

perkemahan tersebut. Maka gamelan pun segera ditabuhnya sebagai tanda sambutan kehormatan atas tamu agung negara.

Ki Patih berkata, “Wahai sanak-saudaraku semua yang tinggal di sini, aku mendapatkan titah dari Dalem Dermayu untuk memeriksa kebenaran atas kabar yang kami terima. Apa yang hendak saudara lakukan? Karena terlihat senjata tumbak dan *pangrampogan*, bandring dalam ukuran besan, sepertinya sudah siaga mau berperang?”

Ki Bagus Rangin lalu menjawab tegas, “Benar, hamba hendak menyerang Dalem Dermayu!”

Ki Patih kemudian mengingatkan, jika dapat dinasehati agar Ki Bagus Rangin dan para prajuritnya jangan menuruti hawa napsu untuk menyerang atau memusuhi negara Dermayu. Sebab walaupun negaranya terlihat kecil, jika memberontak, maka pastilah akan terkena hukuman yang berat yang dapat berakhir pada kesengsaraan. Demikianlah nasehat Ki Patih kepada prajurit yang berkumpul di Bantarjati.<sup>35</sup>

Nasehat tak didengar, maka tak terhindarkan. Kemudian Ki Patih keluar dari tarub agung. Ki Rangin bertanding melawan Ki Patih. Mereka saling menghantam dan berkelit, kemudian saling mendorong. Ki Rangin mulai terdesak mundur. Lalu teman-temannya segera membantu tanpa memperdulikan tata tertib. Maklumlah perang melawan berandal. Mereka maju dengan rusuh dan sembrono. Di saat kacau seperti itu, kemudian Ki Serit mengeluarkan perintah agar mengepung Ki Patih bersama prajuritnya agar tidak bisa keluar jauh dari sekitar tarub agung. Ki Patih bersama prajuritnya mengamuk. Maka barisan dari Bantarjati dan Biawak banyak yang berguguran. Pertempuran itu sampai jam enam sore.

Selanjutnya Ki Serit memerintahkan agar jangan menyerang lagi menggunakan taktik perang *undur-unduran* (gerilya) supaya menunggu hingga jam sepuluh malam. Setelah jam sepuluh malam, maka orang-orang Kulinyar, Pancaripis,<sup>36</sup> dan Bantarjati bersatu menyerang secara serempak. Mereka mengincar kematian Ki Patih Astrasuta. Di saat genting itu, bertambah dengan kedatangan Ki Serit yang dengan menggenggam Tombak Sengkala. Ki Patih merasa terpojok karena diserang dari berbagai penjuru. Mau

---

<sup>35</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 104-106.

<sup>36</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc cit.*, hlm. 107.

melarikan diri pun ia tak tahu arah karena malam yang gelap. Ki Serit menyelinap membelakangi Ki Patih. Secepat kilat Ki Bagus Serit menghujamkan tumbak Sangkala tepat mengenai tubuh Ki Patih yang langsung ambruk. Ki Patih Astrasuta akhirnya gugur dengan jasad lebur yang tak dapat dikenali lagi. Para berandal pun bersorak hingga bergemuruh bagaikan langit mau runtuh. Keseokan harinya mereka pun berkumpul di tarub agung guna merayakan kemenangan. Gamelan tayub segera dipagelarkan. Para pasukan dan berandal pesta pora bersuka cita. Malahan banyak orang yang berdatangan ingin bergabung.

Syahdan, para mantri yang melarikan diri telah sampai dihadapan Ki Dalem Dermayu, Raden Semangun Wiralodra VI, yang berada di perkemahan Jatitujuh. Ia melaporkan kejadian tragis itu bahwa Raka Patih telah gugur dikeroyok oleh para berandal. Ki Dalem Dermayu sangat terkejut, kemudian segera berkata: “Hei semua mantra-mantriku, kalau begitu segera kita semua pulang kembali ke nagara.”

Kemudian rombongan pun bubar. Namun sesampainya di desa Bangodua, mereka dikepung oleh masyarakat karena disangka rombongan para berandal. Kemudian terjadilah perang tanding di tengah jalan itu. Pada saat itu ada kawula Pelayung yang tertembak bedil hingga gugur. Oleh karena itu di Bangodua itu ada nama kermat Rengas Payung.

Sampai di Dermayu, para garwa dan saudara segera menjemputnya di pintu gerbang. Setelah sampai di Pedeleman maka berkatalah Ki Dalem Dermayu kepada sang garwa, “Duh istriku, kakang patih telah gugur.”

Begitu garwa dan saudara-saudaranya mendengar berita itu, semuanya menangis sedih. Mereka tidak menduga sebelumnya atas kepergian Ki Patih yang meninggal mengenaskan ditangan musuh. Suara tangisan dari garwa, putra, dan putrinya bergemuruh. Demikian juga para saudara teringat akan nasib buruk yang menimpa Ki Patih.

Syahdan para pasukan Bagus Rangin yang ada di Bantarjati. Mereka berpesta pora sing malam selalu diiringi gamelan tayuban. Setiap hari kerbau sapi disembelih hasil dari menjarah di setiap desa.<sup>37</sup> Sementara itu Ki Rangin berkata kepada paman Bagus Serit: “Paman dan saudara-saudaraku, sebaiknya besok kita bergerak menyerang kota Dermayu, janganlah sampai terlambat.

---

<sup>37</sup>Muhammad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, 108-1109.

Dalam pertempuran itu, sekalipun pasukan Astrasuta pada awalnya mampu memukul mundur pasukan Ki Bagus Rangin, akan tetapi pasukan Ki Bagus Rangin pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran, bahkan Patih Astrasuta tewas oleh tombak Ki Bagus Serit.<sup>38</sup> Selanjutnya, oleh karena Raden Semangun Benggala Wiralodra VI tidak bisa memadamkan pergerakan pasukan Ki Bagus Rangin, ia pun kemudian melakukan langkah-langkah meminta bantuan kepada Gubernur Jenderal di Batavia.

Ki Bagus Rangin adalah seorang figur pejuang yang berjiwa pemberani dan siap berperang sehingga mudah sekali mendapatkan pengikut. Pada waktu itu jumlah pengikut Ki Bagus Rangin membentang dari ujung timur Semarang sampai Sumedang, Rajagaluh, dan berbagai wilayah lainnya, termasuk Indramayu. Ia menolak berunding dengan pemerintah kolonial. Sebagai dasar bahwa Ki Bagus Rangin dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah, karena ia dalam pandangan pemerintah kolonial dipandang banyak memprovokasi penduduk untuk tidak mengikuti wajib kerja yang dilaksanakan untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda di Bantarjati. Informasi ini telah dikuatkan melalui kesaksian Ki Bagus Manuh yang mengemukakan bahwa yang menjadi kepentingan Ki Bagus Rangin sebetulnya hanya mengumpulkan rakyat dan menunjuk seseorang menjadi pemimpin, ia sendiri tidak menginginkan apa-apa.<sup>39</sup>

Maksud dan tujuan Ki Bagus Rangin mendapatkan respon yang baik dari masyarakat di sekitarnya. Di mana pun Ki Bagus Rangin berada, ia selalu mendapat perlindungan dan dukungan

---

<sup>38</sup>Supali Kasim, "Perjuangan Bagus Rangin di Indramayu: Sayatan Sejarah yang Terluka", *Makalah* disampaikan pada Seminar Pengusulan Ki Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional di Majalengka. Tanggal 5 September 2015., hlm. 1.

<sup>39</sup>Djoko Marihandono, "Daendels dalam Naskah Cerita Rakyat: Cerita yang Berkaitan dengan Daendels di Pantai Utara Jawa". *Makalah dalam seminar Internasional Tradisi Lisan IV*. Jakarta: 2–5 Oktober 2003, hlm. 17.

dari penduduk setempat, sehingga sulit ditangkap. Ia banyak melakukan mobilisasi massa, melancarkan gerakan sporadis, dan menyalakan api semangat perlawanan. Kepada para pengikutnya, ia tidak hanya memberikan persenjataan dan ilmu kanuragan, tetapi juga banyak mengatur bagaimana menyusun strategi perang. Daerah Bantarjati (Jatitujuh) adalah sarang pasukan Ki bagus Rangin di daerah Majalengka, sedangkan di Indramayu sarangnya di daerah Pamayahan, Lohbener.<sup>40</sup>

Sementara itu, pergerakan pasukan Ki Bagus Rangin yang akan menuju Indramayu sudah sampai ke Lohbener (Celeng), yang kebetulan penduduknya kebanyakan orang-orang Cina. Di antara mereka tercatat di antara mereka terdapat nama-nama seperti Kwee Beng, Eng San, Eng Jin, Eng Lie, dan Tiang Lie. Oleh karena pada awalnya di antara orang-orang Cina tersebut tidak mengetahui informasi yang sebenarnya, bahkan berita yang didengar pun adalah informasi kedatangan para perusuh, bahkan disangka sebagai “garong.” Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, pada awalnya keberadaan pasukan Ki Bagus Rangin hendak dilawan, namun pada akhirnya upaya untuk menghalangi langkah pasukan Ki Bagus Rangin tersebut tidak dilakukan, karena beberapa di antara mereka sudah saling mengenal. Sebagai contoh, di antaranya Kwee Beng yang menjadi kuwu (kepala desa) di Lohbener sudah lama kenal dengan anak buah Ki Bagus Rangin yang bernama Bagus Surapersanda.<sup>41</sup>

Tentang terjadinya pertemuan antara pasukan Ki Bagus Rangin dengan orang-orang Cina tersebut, dalam *Babad Dermayu* diilustrasikan :

Para Cina Lohbener telah siaga untuk menjaga keamanan, mereka telah mengungsikan anak istrinya terlebih dahulu ke Dermayu. Tercatat nama-nama seperti

---

<sup>40</sup>Nurhata, “Babad Darmayu: Pemberontakan Bagus Rangin di Indramayu pada Awal Abad ke-19”, *Jurnal Sinau*, Volume 1, No. 01, Oktober 2015, hlm. 116.

<sup>41</sup>Supali Kasim, *loc. cit.*, hlm. 1-2

Babah Kwi Beng, Eng San, Eng Lie, Eng Jin, dan Ti Yang Lie. Mereka adalah orang-orang yang tangguh dalam pertempuran. Mereka adalah Cina Babah Kalibaru yang berjumlah 20 orang yang telah bersiap siaga berani mati melawan pasukan Bagus Rangin.

Mereka berhadapan dan langsung bertarung hebat. Barisan berandal pun porak poranda serta banyak yang mati oleh para Cina. Maklumlah karena mereka tidak memiliki kecakapan dalam pertempuran serta tidak bisa ilmu olah kanuragan. Mereka jatuh bergelimpangan bahkan banyak yang kepalanya pecah akibat sabetan pedang dan pukulan para Cina. Barisan pasukan Bagus Rangin kacau balau. Mereka sudah merasa ketakutan untuk melawan para Cina.

Ki Bagus Urang dan Ki Bagus Surapersanda segera menemui Babah Kwi Beng sebagai pemimpin para Cina. Babah Kwi Beng terkejut melihat sahabatnya itu, kemudian berkata, "Hayaah, oe kecewa kang Urang menjadi Berandal. Apakah tidak ingat bahwa kita ini berteman." Lalu Ki Bagus Surapersanda menjawab, "Hei sahabatku, oleh karena itu aku menemuimu. Aku minta ikhlas ridhomu saja. Sebenarnya kami tidak bermaksud memusuhi para Cina, sahabatku sendiri. Kejadian ini benar-benar salah alamat. Oleh karena itu, jagalah harta bendamu dengan baik. Kunci rapat-rapatlah rumah-rumah sahabatku dengan diberikan tanda. Kami tidak akan mengganggumu."<sup>42</sup>

Kemudian mereka saling berjabat tangan dan memberikan salam penghormatan. Maka para Cina itu pun bubar menuju ke Dermayu. Kemudian pasukan Bagus Rangin itu melanjutkan perjalanan ke Pamayahan dan membuat perkemahan di sana.

Dalam pertemuan di daerah Lohbener Kwee Beng pernah mengingatkan Ki Bagus Surapersanda<sup>43</sup> agar jangan ke Dermayu, sebab pemerintah yang ada di Dermayu sudah meminta bantuan pasukan dari Gubernur Jenderal di Batavia. Apa yang disampaikan Kwee Beng, menjadi kenyataan. Tampaknya Ki

---

<sup>42</sup> Supali kasim, *loc. cit.*, hlm. 111-112.

<sup>43</sup> Warga Lohbener (Celeng) menyebut Ki Bagus Surapersanda dengan panggilan "Kang Urang", karena seringkali Surapersanda menyebut dirinya "urang", yang artinya dalam bahasa Sunda, saya

Bagus Surapersanda tidak terlalu mempedulikan, sampai akhirnya dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah tersebut, ia meninggal dunia. Selanjutnya ia dimakamkan di Desa Pamayahan Kecamatan Lohbener. Nama Ki Surapersanda senantiasa dikenang, sehingga kini masyarakat menyebut makam tersebut sebagai makam Ki Buyut Urang.<sup>44</sup>

Pemerintah Dermayu dan Pemerintah Kolonial Belanda berusaha untuk menangkap Ki Bagus Rangin. Usaha untuk melakukan penangkapan terhadap Ki Bagus Rangin telah dilakukan dengan menerapkan berbagai tipu muslihat oleh Komodor Poster, pimpinan Pasukan Belanda. Sebagai contoh untuk merealisasikan maksud tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda berusaha menjebak Ki Bagus Rangin dengan dijanjikan akan diangkat sebagai Tumenggung yang akan memerintah di Indramayu. Untuk memuluskan rencananya sekaligus “menghormatinya”, supaya bisa berjalan lancar maka digelar kegiatan pesta semalaman. Sementara itu, di belakangnya pasukan dari Cirebon yang dipimpin Kartawijaya, yang sudah diminta bantuan oleh Raden Semangun Benggala (Wiralodra VI), telah dipersiapkan untuk menyerang.

Dalam *Babad Dermayu* diperoleh keterangan:

Para serdadu Belanda telah tiba di Dermayu. Mereka telah berembuk untuk mengatur siasat dalam menangani ulah pasukan para pemberontak, mereka adalah Dalem Dermayu, Tuan Poster, dan Komandan Deler utusan Gubernur Batavia. Setelah sepakat kemudian segera berangkat dengan diiringi oleh 300 serdadu Belanda, maksudnya supaya para pasukan Kebagusan itu melihat akan kekuatan serdadu Belanda yang bersenjata lengkap dengan bedil, pedang, dan juga meriam.

Ada 100 orang yang menggotong meriam dan juga ada meriam yang ditarik oleh kerbau. Ini dimaksudkan agar terlihat oleh para pasukan Kebagusan sehingga hati dan semangat mereka menjadi miris. Begitu rombongan serdadu Belanda sampai di Pamayahan, para pasukan Kebagusan itu

---

<sup>44</sup> Supali Kasim, *loc. cit.*, hlm. 1-2

terkejut. Kemudian ada yang memberikan laporan kepada Ki Bagus Rangin bahwa ada serdadu Belanda yang datang ke Pamayahan dengan membawa peralatan perang lengkap. Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Kandar menjemput barisan serdadu itu dan bertemu dengan Tuan Deler yang bisa berbahasa Jawa.

Tuan Deler menyampaikan kepada Ki Bagus Rangin bahwa dirinya diutus oleh Tuan Gubernur yang berkuasa di negara Batavia dikarenakan Dalem Dermayu telah menyerahkan negaranya kepada Tuan Gubernur Batavia. Maka ia diutus untuk mengajak perdamaian, yaitu kedudukan atau kekuasaan Dalem Dermayu dibagi dua. Jika Bagus Rangin menerima tawaran itu, maka akan diangkat menjadi Demang Pamayahan. Demikian juga dengan kawan-kawannya akan diangkat dan diposisikan menjadi mantri juru tulis. Adapun kekuasaannya sama dengan pangkat kedudukan Dalem Dermayu.

Ki Bagus Rangin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Deler, maka merasa legalah perasaan utusan Batavia tadi karena strateginya berhasil. Kemudian semua perangkat Kademangan diganti dengan memakai baju kehormatan dengan menggunakan celana, baju, dan topi *laken* dan juga diberi *peneng* [tanda pangkat] yang terbuat dari emas yang berkilauan.

Setelah selesai pelantikan Kademangan Pamayahan itu, maka gamelan pun mulai ditabuh sebagai bentuk pesta atas keberhasilan pelantikan Ki Demang Bagus Rangin dan para mantrinya. Sementara itu siang malam di Kademangan Pamayahan para pemberontak selalu berpesta pora dengan tayuban untuk merayakan jumenengan Demang baru. Bagus Rangin merasa sangat bersuka cita.<sup>45</sup>

Setelah itu para serdadu Kompeni Belanda menjaga ketat Pamayahan. Banyak orang yang melihat serdadu Belanda. Mereka merasa ngeri dengan perkakas persenjataan perang yang lengkap seperti bedil, pedang, dan meriam. Setiap sore hari, para kolonel, ajudan, seran, dan serdadu itu sengaja memperlihatkan latihan perang. Mereka memainkan *klewang* dan meriam. Sehingga sebagian para pasukan Kebagusan itu merasa ngeri dan banyak yang pulang kembali ke desanya masing-masing.

---

<sup>45</sup> Supali kasim., *loc. cit.*, hlm. 115-117.

Lama kelamaan kelompok Ki Bagus Rangin itu hanya tersisa kurang lebih dari 700 orang. Kemudian Tuan Deler segera berkirim surat kepada Dalem Dermayu untuk memberitahukan agar segera mengepung dan menangkap para pasukan Kebagusan di Pamayahan dalam sehari.

Setelah membaca surat yang berisi siasat perang dari Tuan Deler itu, kemudian Dalem Dermayu Raden Semangun, mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ponggawa Sultan yaitu Raden Kartawijaya di Negara Grage, Cirebon, bahwa Patih Dalem Dermayu telah meninggal dikeroyok oleh para pasukan Kebagusan dan sekarang pasukan itu sudah dijaga ketat oleh Tuan Komandan, yaitu bala bantuan dari Batavia. Maka dimohon agar Raden Kartawijaya segera menangkap pasukan Kebagusan di Pamayahan itu.

Setelah membaca isi surat itu, Kartawijaya sangat marah dan melaporkan keadaan yang terjadi di Negara Dermayu kepada Kanjeng Sultan Anom. Setelah mendengarkan laporan tersebut, kemudian Kanjeng Sultan memerintahkan kepada Raden Kartawijaya dan Raden Welang agar segera menangkap para pasukan Kebagusan itu. Jika tertangkap segera diikat. Adapun yang melawan agar dibunuh dengan dipotong lehernya".<sup>46</sup>

Raden Kartawijaya dan Raden Welang berangkat ke Pamayahan bersama dengan para prajurit pilihan Cirebon. Mereka telah sampai di pedaleman Dermayu dan bertemu dengan Dalem Dermayu Wiralodra VI Raden Benggala. Setelah mereka selesai berunding, maka dipukulah *bende (canang)* bertalu-talu sebagai tanda persiapan untuk maju perang. Semua para ponggawa dan para mantri bergembira karena tibalah saatnya untuk ikut perang sebagai tanda bela sungkawa kepada Ki Patih Dermayu yang telah gugur. Kemudian barisan pasukan bubar bergerak menuju Pamayahan. Suaranya bergemuruh mereka membawa tumbak, *pangrampogan*,<sup>47</sup> keris, dan pedang.

Barisan pasukan terlihat sangat kuat tangguh, yang berada di paling depan adalah Ki Dalem Wiralodra, Raden Kartawijaya, Raden Welang dan para putra Dermayu. Mereka tiba di Pamayahan. Bagus Rangin telah menerima

---

<sup>46</sup> Supali kasim., *loc. cit.*, hlm. 118-119.

<sup>47</sup> Pangrampogan adalah sejenis bandring yang berukuran besar sehingga dapat memuat lebih banyak biji bandring (batu, tanah liat yang sudah dibuat bulat dan dikeraskan).

laporan bahwa Dalem Dermayu bersama pasukannya bersiap menyerbu. Sementara itu Tuan Deler telah ikut mengepung dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Pelayahan telah dikepung ketat oleh para prajurit dan pasukan serdadu Kompeni. Kali ini pasukan Ki Bagus Rangin benar-benar telah dikepung dan berada di tengah-tengah.

Bagus Rangin segera maju berkata menyentak, “Aku ini telah diangkat menjadi Demang Pamayahan oleh Tuan Deler, maka aku bersama kawan-kawan adalah Demang yang sah dan tidak akan takut kepadamu. Walaupun kamu mempunyai banyak pasukan, tetapi aku tidak akan melarikan diri.

Kemudian Raden Welang menimpali dengan suara yang menusuk bahwa dirinya tak akan silau kepada pasukan Kebagusan. Ki Bagus Sena segera menyerang. Namun Raden Welang menjemputnya dengan tendangan sehingga ia pun tersungkur ke tanah. Suasana peperanganpun menjadi ramai dan tidak memakai tata tertib lagi. Merasa terjepit, Ki Bagus Rangin dan kawan-kawannya meloloskan diri.

Dalam pertempuran di Pamayahan, Ki Bagus Rangin masih bisa meloloskan diri. Ia melarikan diri ke Pegaden. Dengan adanya kejadian tersebut, Raden Semangun Benggala (Wiralodra VI) akhirnya harus membayar sebesar f. 1.103.000 gulden, karena mendatangkan pasukan Belanda dari Batavia. Ia tak mampu, sehingga harus menyerahkan tanah wilayah barat. Tanah tersebut oleh Belanda kemudian dijual kepada perusahaan swasta.<sup>48</sup>

Dengan jumlah pasukan yang banyak, korban yang banyak, baik dari pihak Ki Bagus Rangin maupun dari pihak Belanda dan sekutunya, bisa dibayangkan betapa besarnya gelombang-gelombang pertempuran yang terjadi antara pasukan Ki Bagus Rangin dan Belanda. Begitu pula dengan kerugian yang ditimbulkan dari pemberontakan tersebut. Sayangnya

---

<sup>48</sup>Supali Kasim, *loc. cit.*, hlm. 1-2.

kerugian tersebut harus ditanggung pemerintah Indramayu. Karena ketidakmampuan Bupati Indramayu, maka bupati Indramayu menyerahkan beberapa wilayah kekuasaannya kepada pihak yang telah membantu (Belanda).<sup>49</sup>

Tentang fakta-fakta peristiwa tersebut dalam *Babad Dermayu* dikemukakan:

Sesaat kemudian negara Cirebon diserahkan kepada Gubernur Jenderal Batavia. Gubernur Jenderal Batavia telah menerima penyerahan tanah dari Kanjeng Susunan Cirebon (Sultan Kanoman). Setelah mereka saling serah terima, kemudian Gubernur berpamitan untuk pulang kembali ke Batavia.

Setelah tiba di Batavia, lalu Gubernur memanggil Wiralodra VI (Raden Semangun) dari Negara Darmayu. Singkat cerita, Wiralodra pun telah datang di Batavia. Ia segera menghadap Gubernur Jenderal dengan penuh hormat. Sang Gubernur mengucapkan selamat datang kepada tamunya. Wiralodra menghaturkan terima kasih atas bantuan Kompeni dalam menumpas pemberontakan di Negara Darmayu. Oleh karena itu ia mendoakan kepada Hyang Maha Agung agar Gubernur Jenderal terus memerintah dan menguasai di Pulau Jawa sampai kepada anak cucunya. Semoga saja akan akan dijaga oleh Hyang Maha Kuasa. Sang Gubernur mengucapkan terima kasih atas doa dari Wiralodra. Demikian juga ia mengharapkan agar anak cucunya dan anak cucu Wiralodra kelak sama-sama memperoleh kemuliaan.

Selanjutnya Gubernur Jenderal memberitahukan kepada Wiralodra bahwa atas segala biaya yang telah dipergunakan untuk perbekalan dan persenjataan prajurit Kompeni selama membantu perang menumpas pemberontak di Darmayu. Semuanya telah dijumlahkan hingga mencapai f. 1.103.000,-<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Begitu pula dengan pergolakan yang terjadi di Cirebon. Meski tidak disebutkan jumlah nominalnya, nyatanya berbagai kerugian yang ditimbulkan oleh pemberontakan Bagus Sidong dibebankan kepada Kasepuhan dan Kanoman. Lihat Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 15.

<sup>50</sup>Mungkin maksud dari penulis Babad Dermayu adalah 1.103.000 Gulden. 1 Gulden pada kira-kira saat ini setara dengan dengan Rp. 8.323 Rupiah. Dengan demikian, 1.103.000 Gulden setara dengan Rp 9.182.617.769 Rupiah (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

Dalem Wiralodra diperintahkan agar segera membayarkan jumlah tersebut kepada Gubernur Jenderal Batavia. Mendengar pernyataan itu, Dalem Wiralodra tidak dapat berkata sepeatah kata pun. Lidahnya pun merasa kelu, karena Darmayu tidak mempunyai harta sebesar itu.

Kemudian segera bertutur, “Paduka Tuan, sungguh hamba tidak mempunyai harta sebanyak itu. Tetapi hamba menyerahkan tanah atau pun Negara Darmayu kepada Paduka, terserah atas kehendak tuan.”

Mendengar pernyataan Dalem Wiralodra, akhirnya Gubernur Jenderal menerima pasrahan Negara Darmayu tersebut. Tetapi Wiralodra agar tetap Jumeneng sebagai Dalem Darmayu sebagaimana biasanya. Tetapi harap menjadi tahu bahwa tanah Darmayu adalah menjadi milik Gubernur Jenderal Batavia.

Kemudian ditandatangani surat perjanjian. Dalam pernyataan itu tertulis bahwa Dalem Darmayu tak mempunyai tanah sejengkalpun. Darmayu adalah menjadi milik Tuan Gubernur Jenderal. Setelah serah terima tanah, Dalem Darmayu pun berpamitan untuk pulang. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1810.<sup>51</sup>

Gerakan penentangan dan perlawanan ini tidak hanya terjadi di Kesultanan Cirebon, tetapi meluas ke wilayah Kabupaten Karawang yang pada waktu itu beribu kota di Kandanghaur dan daerah Kabupaten Sumedang sebelah timur laut. Yang menjadi sasaran pertama dari gerakan perlawanan rakyat Cirebon ialah orang-orang Cina. Mereka menjadi sasaran dari gerakan perlawanan, karena keberadaan mereka telah dianggap sebagai orang yang secara langsung telah banyak melakukan praktik-praktik pemerasan kepada rakyat. Sebagai akibat dari adanya gerakan rakyat tersebut, banyak orang Cina yang dihabisi dan diusir dari wilayah Cirebon, seperti di daerah Palimanan, Lohbener, Darmayu, dan sebagainya. Selain itu, gerakan penentangan dan perlawanan rakyat Cirebon juga dilancarkan dalam bentuk penyerbuan terhadap gudang-

---

<sup>51</sup>Babad Dermayu, hlm. 162-164.

gudang yang menjadi tempat penyimpanan harta benda dan makanan. Mereka berusaha untuk mengambilnya dengan alasan bahwa barang-barang yang dicuri itu menurutnya merupakan barang-barang sebagai hasil dari pajak-pajak dan penanaman wajib yang diberikan dan dilaksanakan oleh rakyat. Oleh karena itu, para pasukan perlawanan mengambil kembali barang-barang itu kemudian dibagikan pada rakyat.<sup>52</sup>

Bagi Belanda sendiri dengan pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tersebut sebagai dampaknya mulai terasa. Seperti diketahui, bahwa kedudukannya sebagai sebagai penguasa mulai terancam, begitu juga penerimaan pajak dan penjualan wajib hasil bumi semakin berkurang. Oleh karena itu diambillah keputusan untuk menumpas gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tadi. Kemudian usaha-usaha untuk melakukan penumpasan terhadap gerakan perlawanan rakyat pun mulai dikerahkan. Sebaliknya, walaupun pihak pemerintah kolonial Belanda sudah melakukan penumpasan terhadap gerakan penentangan dan perlawanan tersebut, namun gerakan perlawanan tersebut tidak surut dan bahkan semakin meluas hingga ke Karawang dan Sumedang. Selain itu, dengan semakin intensifnya Pemerintah kolonial melakukan penumpasan terhadap gerakan perlawanan rakyat justru semakin banyak rakyat dan pejabat-pejabat daerah yang bergabung dalam gerakan perlawanan tersebut.<sup>53</sup>

Menyikapi keadaan tersebut, Raden Semangun Benggala Wiralodra VI sebagai penguasa di daerah Dermayu (Indramayu) yang berkuasa pada dekade tahun 1800-an segera meminta bantuan kepada Sultan Sepuh Muhammad Samsudin Raja Udaka (1815-1845). Kemudian Sultan Sepuh Muhammad Samsudin Raja Udaka juga meneruskan kembali dengan meminta bantuan kepada pemerintah Kolonial di Batavia.

---

<sup>52</sup>R. A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 3-4.

<sup>53</sup>Edi S. Ekajati, *loc. cit.*, hlm. 100.

Akhirnya pasukan gabungan pemerintah Kolonial, pasukan dari Kraton Kasepuhan dan pasukan dari Dermayu dapat mengepung pasukan Ki Bagus Rangin. Pertempuran yang tidak berimbangpun terjadi begitu sengit. Pasukan Ki Bagus Rangin banyak yang tewas, begitu juga sebaliknya. Ki Bagus Rangin sendiri akhirnya berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan gabungan tersebut. Ki Bagus Serit juga berhasil meloloskan diri. Namun demikian, nasib kurang beruntung dialami oleh Ki Bagus Seja dan Ki Bagus Kandar. Keduanya berhasil ditangkap pasukan Ngabehi Dalem Indramayu, yang dipimpin Raden Semangun Benggala Wiralodra VI. Selanjutnya, atas perintah pemerintah kolonial Belanda, kedua tahanan tersebut dibawa ke Batavia.<sup>54</sup>

Upaya pencarian terhadap Ki Bagus Rangin dan adiknya Ki Bagus Serit terus dilakukan secara masip oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah pribumi yang pro terhadap kolonialisme Belanda. Desa Bantarjati, Biawak dan Jatitujuh disisir dan diobrak-abrik pasukan gabungan kolonial dari Batavia, Cirebon dan Indramayu. Seluruh rumah dan fasilitas umum yang ada di desa itu dibakar habis. Banyak anak-anak dan wanita juga digelandang dibawa ke Dermayu untuk dijadikan tahanan. Kendati demikian, Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit tidak juga ditemukan, bahkan ada kabar dari pasukan telik sandi Indramayu bahwa Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit justru berada ada di daerah Kedongdong.<sup>55</sup> Ki Bagus Rangin dan Ki Bagus Serit, keduanya diduga sedang menyusun kekuatan di daerah Kedongdong tersebut.<sup>56</sup>

Menurut keterangan yang disampaikan Bupati Sumedang R.A. Surianagara (1791-1828) pada waktu itu, yang kemudian dikutip kembali oleh Rd. Asik Natanegara, kekacauan di seluruh wilayah Cirebon yang kemudian merembet juga ke daerah

---

<sup>54</sup>Lihat R. A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 5.

<sup>55</sup> Saat ini secara administratif berada di wilayah kecamatan Susukan.

<sup>56</sup> R. A. Opan Syafari Hasyim., *loc. cit.*, hlm. 5

Sumedang terjadi disebabkan oleh terlalu kejamnya sikap dan tindakan para penguasa kolonial dan pejabat pribumi pada waktu itu terhadap rakyat. Di Kabupaten Sumedang sendiri pernah terjadi seorang *cutak* dari Conggeang yang bernama Baen dan petinggi dari Cipicung melarikan diri dari daerahnya dan bergabung dengan kaum pemberontak bersama 77 orang pengikutnya. Mereka melarikan diri karena cutak Baen disiksa oleh pejabat Belanda Lawick van Pabst. Pejabat Belanda tersebut, seorang komisar, yang sangat terkenal sangat bengis dan kejam.<sup>57</sup>

Sebaliknya dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda mensinyalir bahwa pecahnya kerusuhan ini sesungguhnya digerakkan oleh Sultan Cirebon, Pangeran Suriawijaya. Informasi ini dikemukakan oleh SCL Rose yang pada waktu itu menjabat sebagai Residen Cirebon yang mengatakan, bahwa yang menyebarkan desas-desus untuk membenci Pemerintah Kolonial Belanda ialah Raja Kanoman dan sebagian lagi datang dari tokoh-toloh agama yang telah memihak Kanoman. Mereka semuanya harus ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>58</sup>

Selanjutnya Rose menyarankan kepada Pemerintah Kolonial Belanda di Batavia, bahwa untuk menumpas gerakan itu Pemerintah Kolonial Belanda harus membuat siasat dengan mengundang Raja Kanoman beserta dua orang saudaranya ke Batavia dengan alasan untuk berunding. Pemerintah Kolonial Belanda menerima saran itu dan kemudian disampaikan undangan tersebut kepada Raja Kanoman. Namun apa yang terjadi, setibanya di Batavia bukanlah perundingan yang dilakukan, melainkan penangkapan atas diri pemimpin Gerakan rakyat itu. Mereka ditahan dan kemudian dibuang ke Ambon.

---

<sup>57</sup> Rd. Asik Natanegara, "Sejarah Soemedang Ti Jaman Kompeni Toeg Nepi Ka Kiwari". *Volksalmanak Soenda*, (Batavia : Balai Pustaka, 1938), hlm. 90-91; Nina H. Lubis, *Sejarah Tatar Sunda*, Jilid 1, (Bandung: Satya Historika, 2003, Cetakan Kesatu), hlm.366.

<sup>58</sup> Nina H. Lubis, *ibid.*, hlm. 366.

Setelah mendengar berita bahwa pemimpin rakyat Cirebon tersebut ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia, maka pada tahun 1805 rakyat Cirebon yang terdiri dari kurang lebih 1.000 orang mengadakan perjalanan (*long march*) ke Batavia untuk menyampaikan tuntutan supaya Raja Kanoman dibebaskan dan dinobatkan sebagai sultan di Cirebon.<sup>59</sup>

Untuk mencegah supaya rombongan barisan rakyat Cirebon itu tidak sampai ke Batavia, seorang residen Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon pada waktu itu yang bernama Simon Hendrik-Rose pada tanggal 26 Februari 1805, kemudian mengajukan permohonan supaya pemerintah Kolonial Belanda di Batavia untuk segera mengeluarkan sebuah peraturan yang ditujukan kepada para bupati agar tidak memberikan jalan kepada rombongan masyarakat Cirebon yang akan menemui Gubernur Jenderal dengan maksud untuk menyampaikan tuntutan supaya Raja Kanoman dibebaskan dan dinobatkan sebagai sultan di Cirebon. Permohonan Simon Hendrik-Rose selaku pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon kemudian dikabulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan (*besluit*) tertanggal 15 Maret 1805 yang berisi perintah kepada para bupati, termasuk bupati Karawang yang wilayahnya dilewati agar tidak memberikan jalan kepada rombongan masyarakat Cirebon. Dengan mengacu kepada surat keputusan tersebut, maka bupati Karawang, R.A. Surialaga diperintahkan agar mencegah rombongan tersebut berangkat ke Batavia.<sup>60</sup> Atas dasar resolusi tersebut, pemerintah Belanda di Batavia memberitahukan kepada Bupati Karawang R.A. Surialaga supaya rombongan itu setibanya di Karawang dicegat dan diharuskan kembali ke Cirebon.

Selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda mengirimkan kapal ke pesisir Cilincing, yang berada di sebelah timur kota

---

<sup>59</sup> Nina H. Lubis, *ibid.*, hlm. 366.

<sup>60</sup>F. De Haan, *Priangan*, III, (Batavia: BGKW G. Kolff, 1912), hal. 485.

Batavia untuk mengangkut para rombongan masyarakat Cirebon. Pada tanggal 7 Mei 1805 rombongan barisan masyarakat Cirebon tersebut kembali ke Cirebon. Mendengar hal ini, Albertus Henricus Wiese, yang secara resmi pada tanggal 15 Juni 1805 mulai menjabat sebagai gubernur jenderal akhirnya mengabulkan permintaan perwakilan masyarakat Cirebon tersebut dengan memulangkan kembali Pangeran Raja Kanoman dari pengasingannya di Ambon. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda dengan pertimbangan Pemerintah Kolonial Belanda tidak mau masalah ini menjadi berlarut-larut lebih panjang lagi yang nantinya akan berimbas kepada peperangan yang lebih besar lagi dengan Cirebon, sebab dengan pertempuran yang sekarang sedang berlangsung dengan para pejuang sudah banyak korban dari pihak Belanda.

Persoalan hak waris Sultan Kanoman IVt, Sultan Anom Muhammad Chaerudin yang seharusnya diberikan kepada putera mahkotanya yaitu *Pangeran Raja Kanoman* yang telah diasingkan Belanda ke Ambon bagaimanapun dapat dianggap sebagai penyebab timbulnya pemberontakan. Rakyat melakukan pemberontakan dan mengidentifikasi diri dengan Sultan Kanoman yang tercabut hak warisnya.

Para pemberontak ini berhasil dihimpun Ki Bagus Rangin untuk melakukan pemberontakan yang lebih besar. Daerah Jatitujuh, merupakan pusat gerakan Ki Bagus Rangin dalam rangka membicarakan strategi perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Ki Bagus Rangin menganggap residen Belanda telah merampas tanah warisan nenek moyangnya, untuk digunakan sendiri oleh residen itu.

Dari catatan rangkaian perjalanan peristiwa itu, terlihat sangat jelas bahwa sekalipun pimpinan gerakan rakyat Cirebon telah ditahan dan dibuang ke Ambon, tetapi ternyata tidak bisa mengubah dan meredakan situasi pergolakan, bahkan sebaliknya, pergolakan itu semakin meningkat dan meluas.

Sebagai usaha untuk mengatasi pergolakan di daerah Cirebon itu, Dewan Penasehat Belanda di Batavia mencoba mengirimkan kembali sebuah delegasi yang dipimpin oleh bekas Residen Cirebon, P. Walbeek.

Selanjutnya P. Walbeek menyodorkan sebuah perjanjian yang di dalamnya berisi ketentuan sebagai berikut :

1. Raja Kanoman akan dikembalikan;
2. Belanda akan memperbaiki keadaan rakyat;
3. Orang Cina tidak akan diperbolehkan lagi menyewa desa dan tidak diizinkan tinggal di kampung;
4. Perhambatan dibatasi;
5. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda akan mengangkat patih dan beberapa menteri bagi tiap raja, supaya pemerintah lebih tetap;
6. Kepada Raja Kanoman akan diberi 1.000 cacah yang diperintah oleh Panembahan Cirebon sampai tahun 1773;
7. Penghasilan Residen dari kopi yang besar sekali jumlahnya akan dikurangi.<sup>61</sup>

Semua isi perjanjian itu ditolak oleh rakyat Cirebon yang sedang marah terhadap Pemerintah Kolonial Belanda, bahkan sebaliknya mereka mengadakan perlawanan lebih intensif lagi.

Yang menjadi alasan rakyat Cirebon melakukan penolakan terhadap perjanjian tersebut, dalam pandangan rakyat Cirebon dalam perjanjian itu tidak menyatakan jaminan yang konkret akan perbaikan kehidupan dan penghidupan rakyat. Akhirnya mereka melancarkan perlawanan terhadap orang Cina, Belanda, dan penguasa kesultanan yang memihak kepada Belanda. Mereka memberontak karena sendi-sendi kehidupan ekonominya diganggu dan tenaganya merasa diperas oleh golongan Cina, golongan feodal (kesultanan), dan Belanda. Gerakan perlawanan rakyat Cirebon pada babak pertama ini

---

<sup>61</sup> Nina H. Lubis, *op. cit.*, hlm. 366.

tidak berhasil dipadamkan oleh Belanda. Bahkan dari kehidupan sosial-ekonomi yang semakin buruk itu justru lahir kekuatan perlawanan yang lebih besar lagi yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin.

Sementara itu rakyat Palimanan yang lokasi daerah antara Jatitujuh dan Majalengka, mulai bangkit pula untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa daerahnya, karena daerah tempat kediamannya disewakan oleh Bupati kepada orang-orang Cina. Di wilayah Palimanan banyak tanah yang disewakan oleh bupati kepada orang-orang Cina, sementara masyarakat dihisap tenaganya dan dikenakan pajak yang tinggi. Atas tindakan orang-orang Cina itu, rakyat Palimanan mengajukan suatu permohonan kepada bupati supaya pajak bagi rakyat di daerah tersebut diringankan. Ternyata jawaban yang diberikan oleh Bupati tidak memuaskan dan seolah-olah memihak kepada kepentingan orang-orang Cina, bahkan kepala distrik seakan-akan membiarkan keadaan ini.

Masyarakat yang kecewa dengan tindakan bupati tersebut kemudian berniat untuk mengadakan gerakan perlawanan. Oleh karena jawaban bupati tidak memuaskan, akhirnya mereka melancarkan perlawanan. Mereka meminta bantuan dan nasehat kepada Ki Bagus Rangin yang dianggap sebagai pemimpin mereka. Ki Bagus Rangin menyetujui tujuan gerakan rakyat Palimanan dan menasehatkan, bahwa yang wajib dibunuh terlebih dahulu ialah bupati dan wakil residen Belanda, karena kedua orang pejabat itulah yang paling bertanggungjawab atas kesengsaraan dan kemelaratan rakyat.<sup>62</sup>

Setelah mendapat persetujuan Ki Bagus Rangin, rakyat Palimanan segera menyerbu kota Palimanan di bawah pimpinan Ki Bagus Serit (adik Ki Bagus Rangin). Mereka menyerbu ke

---

<sup>62</sup>R.A.A. Martanagara, Babad Sumedang, (Bandung : Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran, 1978), hlm. 124- 125. Edi S. Ekajati, loc. cit., hlm. 104; Lihat Edi Roseno, Perang Kedondong 1818 : Suatu Perlawanan Rakyat Cirebon, (Depok : Universitas Indonesia, 1993), hlm. 58.

dalam pendopo kabupaten untuk membunuh Bupati Tumenggung Madenda, kemudian mendobrak rumah dan membunuh wakil Residen Belanda. Rumah para bangsawan setempat dan orang Cina pun dikepung dan diserang pula oleh mereka. Beberapa orang yang dijumpainya dibinasakan, termasuk rakyat yang dianggap sebagai pengabdikan kaum kolonial. Mereka memandang, bahwa Bupati Tumenggung Madenda, wakil residen Belanda, orang Cina dan para bangsawan pengabdikan kolonial itu yang menyebabkan kemelaratan hidup mereka.<sup>63</sup>

Setelah membunuh bupati dan asisten pejabat penghubung Belanda di Palimanan, gerakan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Ki Bagus Serit kemudian mulai mengepung dan menyerang rumah-rumah para bangsawan dan orang-orang Cina. Rumah orang-orang Cina dan para bangsawan setempat yang dianggap berpihak pada Pemerintah Kolonial Belanda pun tak luput dari serangan mereka. Setelah selesai dengan itu mereka semua kembali ke tempat asalnya masing-masing, sementara sebagian yang lainnya bergabung dengan Ki Bagus Rangin. Banyaknya rakyat yang bergabung dengan kelompok Ki Bagus Rangin membuat jumlah pasukannya bertambah antara 300 hingga 500 orang yang terlatih untuk berperang.<sup>64</sup> Untuk kesekian kalinya, perlawanan rakyat Cirebon meletus di mana-mana. Jumlah rakyat yang mengangkat senjata sangat banyak yakni sekitar 40.000 orang. Mereka terbentuk dari orang-orang yang telah siap untuk bertempur dan dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari berbagai wilayah Cirebon, seperti wilayah kabupaten-kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Karawang dan Subang.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Frederick De, *loc. cit.*, hlm. 594.

<sup>64</sup> Edi S. Ekajati, *loc. cit.*, hlm. 104; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 368-369.

<sup>65</sup> Edi S. Ekajati, *loc. cit.*, hlm. 104; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 368-369.

Menurut F.W. Stapel, sampai tahun 1806 jumlah kaum pemberontak yang membawa senjata sudah mencapai sekitar 40.000 orang.<sup>66</sup> Pasukan terlatih yang langsung dipimpin Ki Bagus Rangin berjumlah antara 280 - 300 orang.<sup>67</sup> Dalam perlawanan tahun 1806 itu, Ki Bagus Rangin tampil sebagai pemimpin umum. Adapun beberapa pemimpin perlawanan lainnya ialah Bagus Wariem dan Bagus Ujar dari Bayawak, Bagus Sakti dan Bagus Kondur dari Jatitujuh, Rontui dari Baruang Wetan, Bagus Sidung di Sumber, Bagus Arisem dari Loyang, Bagus Suara dari Bantarjati, Bagus Sanda dari Pamayahan, Bagus Narim dari Lelea, Bagus Jamani dari Depok, Demang Penangan dari Kandanghaur, Demang Wargagupita dari Kuningan, Wargamanggala dari Cikao, Wirasraya dari Manis, Jurangprawira dari Linggajati, Jayasasmita dari Ciminding, Jangbaya dari Luragung, Harmanis dari Cikao, Anggasraya dari Timbang, Demang Jayaprawata dari Nagarawangi, Demang Angonklangkon dari Weru, Ingabei Martamanggala dari Pagebangan dan Demang Jayapratala dari Sukasari.<sup>68</sup>

Asal-usul dari pemimpin-pemimpin perlawanan tersebut mencerminkan betapa luasnya wilayah perlawanan itu, yang meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten: Subang, Karawang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan sekarang. Memang mereka didukung oleh masyarakat daerah-daerah tersebut dalam bentuk tenaga manusia dan senjata, logistik (beras dan bahan makanan lainnya), dan moril. Beberapa desa yang membantu pasukan Ki Bagus Rangin adalah Benuang Kulon, Malandang, Conggeng, Cililin, Depok, Selaawi dan Sukasari. Sedangkan kepala-kepala desa yang mendukung kaum perlawanan ialah kepala-kepala desa Batununggal, Tegal,

---

<sup>66</sup> G.F.W. Stapel, *Geschiedenies Van Nederlansch Indie*, V, (Batavia: Tanpa Penerbit, 1940), hlm. 25.

<sup>67</sup> Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 89. Informasi ini disampaikan berdasarkan keterangan dari Bagus Rangin sendiri yang dikemukakan sewaktu diinterogasi pada tanggal 22 Juli 1812.

<sup>68</sup> Edi S. Ekajati, *loc. cit.*, hlm. 105; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 369.

Bentang, Gerudu, Cinaka, Tanggulun, Tambal, Ayer, dan lain-lain. Selain dari rakyat, dukung dan bantuan itu diperoleh pula dari beberapa orang penguasa daerah setempat terutama dalam bentuk perlengkapan perang sangat penting (seperti senapan, meriam, dan lain-lain) dan bahan makanan.<sup>69</sup> Adapun senjata yang digunakan oleh pasukan Ki Bagus Rangin ialah tumbak, pedang, bedog, keris, senapan, dan meriam.<sup>70</sup>

Selain itu, beberapa desa yang turut membantu pasukan perlawanan tersebut di antaranya ialah Benuang Kulon, Malandang, Conggeng, Cililin, Depok, Selaawi dan Sukasari. Adapun beberapa kuwu yang turut mendukung di antaranya ialah kuwu-kuwu Batununggal, Tegal, Bentang, Gerudu, Cinaka, Tangulun, Tambal, Ayer, dan kuwu lainnya. Untuk dapat menghimpun mereka, strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan pengaruh tokoh-tokoh penting di daerahnya. Sebelumnya para pemimpin pergerakan mengajak para kuwu untuk bergabung dan turut berpartisipasi dalam gerakan perlawanan tersebut. Kemudian para kuwu yang bersedia untuk bergabung akan mengajak dan merekrut para warganya. Masyarakat yang bergabung memberikan segala dukungannya baik berupa tenaga, bahan makanan, senjata maupun dukungan moril.

Hadirnya para penggerak dan pemimpin perlawanan memperoleh tanggapan baik oleh sebagian besar para kuwu dan masyarakat yang diajak. Mereka menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat di wilayah Cirebon untuk melepaskan penderitaannya atas pemerintahan yang sewenang-wenang. Namun demikian, tidak semua kuwu yang ikut bergabung dalam kelompok perlawanan itu berangkat karena dorongan hati sendiri, melainkan ada juga di antara mereka yang ikut

---

<sup>69</sup>Bagoes Rangin 1812, *Bundel Cheribon Nomor 39/8*, Jakarta: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

<sup>70</sup>Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 89.

bergabung karena didasari oleh perasaan takut terhadap para tokoh penggerak dan para pemimpin perlawanan. Bagaimana pun, para pemimpin perlawanan itu telah berhasil mengajak sebagian besar masyarakat di wilayah Cirebon untuk menyatukan tujuan sehingga mampu melancarkan perlawanan yang secara terus menerus kepada Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>71</sup>

Setelah melancarkan serangan ke Palimanan, para penyerang itu kemudian mengundurkan diri dan menyebar ke tempat-tempat asalnya, dan sebagian dari mereka bergabung kepada Ki Bagus Rangan. Seorang pejabat Pemerintah Kolonial Belanda di Cirebon yang bernama Van Lawick memberitakan dalam resolusi tanggal 25 Februari 1806 tentang adanya gerakan yang melawan pemerintah kolonial. Menurut berita tersebut, di daerah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Cirebon, yaitu daerah Jatitujuh dan sekitarnya terdapat gerombolan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Untuk menghadapi mereka, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese segera mengirimkan puluhan orang upas dan beberapa orang serdadu.<sup>72</sup>

Selanjutnya, guna menyelesaikan kerusuhan-kerusuhan di daerah Cirebon, Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese (1805 - 1808) melalui persetujuan yang diberikan oleh Dewan Penasehat Pemerintah Hindia Belanda di Batavia segera menugaskan Nicolas Engelhard Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicolas Engelhard sebagai pemimpin pasukan untuk menyelesaikan dan menumpas gerakan perlawanan rakyat Cirebon yang dipimpin Ki Bagus Rangan itu. Ia kemudian memperkuat barisan pasukannya dengan diperkuat pasukan dari putera bupati Bangkalan, yaitu Bupati Mangkudiningrat. Dalam pertempuran melawan kelompok pasukan Ki Bagus Rangan, dua orang putera Patih Sumedang telah menjadi korban

---

<sup>71</sup> Islamiati Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 160.

<sup>72</sup> F.De Haan, *loc. cit.*, hlm. 485.

dan dua puluh lima orang pasukan Sumedang yang berhasil ditawan kemudian dihukum mati, sementara pasukan Ki Bagus Rangin banyak yang berhasil meloloskan diri.

Pada tanggal 1 Juli 1806, Albertus Henricus Wiese mengirim surat pemberitahuan kepada Nicolas Engelhard yang berisi informasi dengan semakin memburuknya situasi di wilayah Cirebon. Wiese memerintahkannya agar satu kompi pasukan Madura dikirimkan untuk menangani huru-hara. Berdasarkan surat P. Walbeek tanggal 5 Juli 1806 dan surat dari residen van Braam, pengganti Residen Cirebon P. Walbeek, tertanggal 10 Juli 1806, dikatakan bahwa kondisi wilayah Cirebon semakin parah sehingga menuntut diperlukan pemulihan keamanan. Mengingat begitu besarnya rasa kekhawatiran yang terjadi di kalangan pejabat Eropa terhadap apa yang terjadi di wilayah Cirebon yang bisa menjalar ke seluruh pulau Jawa, Nicolas Engelhard segera memerintahkan kepada putera sulung Panembahan Madura, Pangeran Secodiningrat, agar segera berangkat ke Cirebon. Selanjutnya turut serta juga komandan militer ujung timur Carel Von Franquemont.<sup>73</sup>

Pemberontakan baru mereda setelah Engelhard pada tanggal 13 Juli 1806 menyetujui surat dari Bagus Sidong dan kedua putranya, Bagus Arisim dan Bagus Suwasa. Adapun isi surat tersebut adalah: mengembalikan Raja Kanoman, Raja Laut, dan Raja Kabupaten; menyingkirkan orang Cina; dan menjauhkan tentara Batavia, pasukan dalem Indramayu, Sukasari, dan Tomo.<sup>74</sup>

Pada tanggal 16 Juli 1806 Nicolas Engelhard berangkat ke Cirebon bersama J.A. van Middlekoop, Letnan Kolonel Carel von Wolzogen, Letnan Fresszt dan Letnan Mentges. Mereka berangkat Bersama-sama dari Semarang menuju Cirebon dengan

---

<sup>73</sup> Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 3.

<sup>74</sup> Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 12-14.

menggunakan kapal Debora dan Phoenix, yang diiringi dengan kapal-kapal kecil yang disediakan oleh Adipati Semarang, Bupati Kendal dan Bupati Jepara. Engelhard berangkat ke Cirebon dengan membawa satu batalyon militer. Setibanya di Cirebon tak seorang pun yang bisa dimanfaatkan oleh Engelhard untuk mengakhiri pemberontakan, sebagaimana disampaikan mantan Residen Cirebon yang tidak mampu menghentikan kerusuhan, Walbeck. Ia mendapati aktivitas di wilayah Cirebon sudah terhenti. Banyak abdi dalem keraton yang keluar dan bergabung dalam gerakan perlawanan. Sementara pada saat yang bersamaan penyakit epidemi sedang mewabah.<sup>75</sup>

Di Kesultanan Cirebon, Nicolas Engelhard tidak dapat melanjutkan aktivitasnya karena banyak di antara para abdi dalem telah meninggalkan para rajanya. Para abdi dalem sudah tidak mepedulikan lagi loyalitasnya, bahkan di antara mereka banyak yang memanggul senjata melawan para sultan. Dengan melihat gejala tersebut, akhirnya disimpulkan bahwa semua penduduk dan abdi dalem yang berada di lingkungan keraton telah memberontak. Kepercayaan antara raja-raja Cirebon dan penduduk telah hilang sama sekali. Mereka tidak bersedia untuk mematuhi janji atau kesanggupannya.<sup>76</sup> Rakyat melakukan perlawanan terhadap orang Cina, Belanda dan penguasa kesultanan yang memihak pemerintah kolonial. Tidak hanya itu, berdasarkan laporan yang disampaikan Residen Servatius disebutkan bahwa selama gerakan perlawanan tahun 1806 penduduk telah membakar semua pabrik gula serta mkerusak dan menghancurkan tanaman tebu.<sup>77</sup>

Karena gerakan perlawanan rakyat yang sudah begitu masif dan tidak mau diajak berunding, akhirnya Simon Hendrik Rose dan Letnan Kolonel Gauf selaku komandan

---

<sup>75</sup> Ipik Ernaka, "Perlawanan Bagus Rangin di Cirebon Tahun 1806-1812," *Tesis*, (Depok :Universitas Indonesia, 2007), hlm. 90.

<sup>76</sup> Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 4.

<sup>77</sup>Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta : LP3ES Jakarta, 1986), hlm 21

ekspedisi memutuskan untuk menyelesaikan pemberontakan tersebut dengan senjata dan pasukan yang besar pula sebelum pemberontak mencapai kota. Pasukan Belanda dan pasukan pribumi pun dikerahkan. Kepada para sultan dan bupati yang daerahnya berada di sekitar daerah pemberontakan diperintahkan untuk mempersiapkan dan mengirim pasukannya untuk menghentikan pemberontakan.<sup>78</sup>

Menurut SA Buddingh untuk memadamkan pemberontakan dengan kekerasan melalui senjata, pemerintah kolonial Belanda di Cirebon telah menyiapkan pasukan yang berada di Cirebon dan Indramayu sekitar 2017 pasukan termasuk 1852 pasukan bumi putera yang ditempatkan di berbagai pos pedalaman, dengan perincian Cirebon 278 pasukan, Indramayu 332 pasukan, Karangsambung 151 pasukan, Cibitung 189 pasukan dan perbatasan Losari 1.067 pasukan. Sementara itu jumlah penduduk yang memberontak diperkirakan berjumlah 35.000-40.000 orang, semuanya laki-laki yang dilengkapi dengan senapan, tombak, pelempar batu, dan berbagai senjata tradisional lainnya.<sup>79</sup>

Bupati Sumedang Pangeran Kusumadinata ( 1798 - 1828) dan Bupati Karawang R.A. Surialaga diangkat sebagai komandan pasukan masing-masing. Kedua pasukan itu dibantu oleh serdadu Belanda dari Batavia yang dipimpin seorang Mayor Belanda ditambah dengan para opsiener.<sup>80</sup> Sebagai penunjuk jalan ditetapkan Soeriabarata dan Raden Soeriakusumah. Setelah sampai di medan pertempuran, kedua orang penunjuk jalan tadi disuruh pulang, karena sudah selesai melaksanakan tugasnya.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ipik Ernaka, *loc. cit.*, hlm. 91.

<sup>79</sup> SA Buddingh, "Rapport over de Onlusten te Cheribon in !806 ingediend door wijlen N. Engelhard, in lessen Gouverneur van Java's", dalam *Indische Archieftijdschrift de Indien*, Jilid III. hlm. 83; Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 4.

<sup>80</sup> F. De Haan, *loc. cit.*, hlm. 486.

<sup>81</sup> R.A.A. Martanegara, *loc. cit.*, hlm. 132-133.

Pada 1807, seorang pejabat Belanda yaitu Carl Willem Thalman yang merupakan *Voorzitter*<sup>82</sup>, pemeriksa tanah di wilayah Priangan menjelaskan bahwa dalam persiapannya menumpas ruang gerak kelompok Ki Bagus Rangin, Pemerintah Kolonial Belanda telah memerintahkan kepada setiap kabupaten yang berada di wilayah Priangan, dalam hal ini dari kabupaten Sumedang, Subang, dan Karawang, serta Kesultanan Cirebon sendiri untuk mengirimkan pasukannya, terutama kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan daerah pergolakan. Menurut Komisi Thalman tahun 1807, dalam rangka persiapan perang menumpas perlawanan rakyat pimpinan Ki Bagus Rangin, Pemerintah Kolonial Belanda pula mulai mengeluarkan perintah agar dari tiap kabupaten di wilayah Priangan dan Kabupaten Karawang mengirimkan sejumlah pasukan, terutama kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan daerah perlawanan.

Selain itu kepada para kepala daerah pribumi (sultan dan bupati) yang daerahnya terletak di sekeliling daerah pergolakan diperintahkan untuk mempersiapkan pasukan ke tempat yang dilanda kekacauan dalam rangka ikut serta memadamkan pemberontakan tersebut. Sebagai contoh Pangeran Kusumadinata IX (bupati Sumedang) dan Raden Surialaga II<sup>83</sup>, putera Raden Surialaga I (bupati Sumedang periode 1765-1773) ditetapkan sebagai komandan bersama pasukan dari Batavia yang dipimpin oleh seorang Mayor. Bupati Sumedang Pangeran Kusumahdinata (1798 - 1828) dan Bupati Karawang R.A. Surialaga diangkat sebagai komandan pasukan masing-masing. Kedua pasukan itu dibantu oleh serdadu Belanda dari Batavia yang dipimpin seorang Mayor Belanda ditambah dengan para opsiener.<sup>84</sup> Sebagai penunjuk jalan ditetapkan Soeriabarata dan Raden Soeriakusumah. Setelah sampai di medan pertempuran,

---

<sup>82</sup> Setingkat Kepala

<sup>83</sup>Raden Surialaga II kelak menjadi bupati Karawang menggantikan Raden Adipati Singasari yang menjadi bupati Brebes setelah ikut serta dalam sayembara Belanda dalam menumpas pemberontakan Raden Wangsanangga.

<sup>84</sup> F. De Haan, *loc. cit.*, hlm. 486.

kedua orang penunjuk jalan tadi disuruh pulang, karena sudah selesai melaksanakan tugasnya.<sup>85</sup>

Pasukan Belanda tersebut dibantu oleh pasukan dari Bangkalan, Madura di bawah pimpinan Mangkudiningrat, putra Bupati Bangkalan. Pasukan dari Kabupaten Sumedang dan Cirebon ditugaskan mengepung daerah perlawanan dari arah selatan dan timur, sedangkan pasukan dari kabupaten Subang dan Karawang mengepung dari arah barat dan utara. Pasukan dari Kabupaten Sumedang mendirikan markasnya di Darmawangi dan Tomo, sedangkan pasukan Cirebon menjaga daerah sepanjang Sungai Cimanuk.

Selanjutnya, pasukan Sumedang dipimpin oleh bupati dan patih Sumedang sendiri, yaitu R.A. Surianagara dan Raden Wangsayuda, sedangkan pasukan Cirebon melancarkan serangan terhadap daerah pemusatan pasukan Ki Bagus Rangin di sekitar Bantarjati, Jatitujuh, daerah yang menjadi perbatasan Sumedang dan Cirebon. Sementara itu, pasukan Karawang pun yang dipimpin oleh bupatinya, R.A. Suryalaga turut bergerak maju pula sambil menyerang tempat-tempat posisi kaum perlawanan. Sebagai akibat dari pertempuran-pertempuran yang terjadi selama berbulan-bulan korban berjatuhan dari kedua belah pihak pun tak bisa dicegah. Dari pihak Sumedang saja sampai puluhan jatuh korban, termasuk dua orang Kepala Distrik dan seorang putera Patih Sumedang. Selain itu 25 orang prajurit Sumedang tertawan, tetapi kemudian mereka dihukum mati. Korban dari pihak pasukan Ki Bagus Rangin pun lebih besar lagi, karena diserang oleh berbagai pasukan dari segala arah. Namun demikian sebagian besar pasukan pengikut Ki Bagus Rangin berhasil meloloskan diri dari kepungan dan serangan pasukan-pasukan para bupati. Mereka menyelamatkan

---

<sup>85</sup> R.A.A. Martanegara, *loc. cit.*, hlm. 132-133.

diri dan bersembunyi serta untuk sementara menghentikan kegiatan perlawanan.<sup>86</sup>

Menurut informasi yang disampaikan Zamzami Amin yang menjadi salah satu tempat berlindung dan bersembunyi para pejuang perlawanan tersebut adalah rumah-rumah saudara atau warga yang berpihak dan bersimpati terhadap perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin. Kemudian untuk memudahkan komunikasi di antara para pejuang yang berlindung dan bersembunyi tersebut, di samping rumah-rumah itu ditanami pohon sawo yang dimaksudkan sebagai tanda bahwa ditempat itu ada pasukan Ki Bagus Rangin.<sup>87</sup>

Nicolas Engelhard menyadari bahwa rakyat tidak akan berhenti melakukan gerakan pemberontakan. Bila keadaan ini terus berlanjut, bagaimanapun akan merugikan pemerintah. Untuk itu, Nicolas Engelhard mencoba untuk mengajak rakyat yang berada di wilayah Cirebon untuk berunding kembali dengan mengirim beberapa utusan. Melalui para utusan tersebut para tokoh perlawanan dapat berkomunikasi dengan Nicolas Engelhard melalui surat.<sup>88</sup> Secara umum, surat yang dikirim pada Nicolas Engelhard banyak berisi beberapa tuntutan, harapan dan keluhan rakyat di wilayah Cirebon atas keadaan yang tengah dialaminya. Menanggapi surat tersebut, pertama-tama Nicolas Engelhard meminta agar seluruh rakyat yang berada di wilayah Cirebon untuk menghentikan kerusuhan dan beraktivitas seperti semula, lalu mengajak para pemimpin pemberontak untuk berunding.

Dalam rangka mewujudkan itu komandan ekspedisi Nicolas Engelhard berusaha melakukan perundingan dengan para pemberontak. Langkah ini diambil didasarkan atas pertimbangan antara lain bahwa sejak tahun 1760, penduduk di

---

<sup>86</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 370.

<sup>87</sup>Zamzami Amin, *wawancara*, tanggal 18 Agustus 2022 di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.

<sup>88</sup>Djoko Marihandono, *loc. cit.*, . hlm. 5.

wilayah Cirebon tidak pernah memberontak terhadap rajanya, apalagi melawan pemerintah. Oleh karena itu, Nicolas Engelhard berusaha untuk menemukan orang-orang yang pro pemerintah kolonial dan bisa dipercaya, termasuk beberapa ulama dengan janji upah yang tinggi, yang dilengkapi dengan surat jalan untuk dikirim menemui para pemberontak. Tujuannya tidak hanya sekedar mengamati kondisi medan, tetap juga mencari informasi penting siapa saja yang melakukan pemberontakan, di mana mereka bertahan, siapa yang menggerakannya, dan bagaimana menemukan senjata.<sup>89</sup>

Akhirnya perundingan pun dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1806 yang berakhir dengan diperolehnya beberapa kesepakatan di antara kedua belah pihak. Di antara kesepakatan-kesepakatan tersebut di antaranya adalah pertama, raja Kanoman akan dikembalikan. Kedua, Pemerintah Kolonial Belanda akan memperbaiki keadaan rakyat. Ketiga, orang-orang Cina tidak akan diperbolehkan lagi tinggal di pedalaman Cirebon. Kemudian, keempat para pemimpin pemberontak harus menyerahkan diri sebelum tanggal 17 Agustus 1806<sup>90</sup>. Sebagai tindak lanjut dari perundingan tersebut, ternyata bahwa sebelum tanggal yang ditetapkan, banyak diantara pemimpin gerakan penentangan dan perlawanan yang menyerahkan diri seperti Ki Bagus Sidong, Bagus Arisim dan Bagus Suwasa, namun, walaupun begitu tidak dengan Ki Bagus Rangin. Ia tetap tidak mau menyerah dan terus berjuang melanjutkan perjuangan bersama para pengikutnya yang masih setia.<sup>91</sup>

Menurut Djoko Marihandono setelah pertemuan dengan Ki Bagus Sidong yang sudah menyerahkan diri, Pemerintah

---

<sup>89</sup> Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 5.

<sup>90</sup> Pada tanggal 17 Agustus 1806 Tumenggung Kendal melaporkan kepada Nicolas Engelhard bahwa Bagus Suwasa, Bagus Arisim dan Bagus Sidom beserta istri dan anak-anaknya menyerah sekaligus meminta ampunan kepada Pemerintah Kolonial Belanda dengan mengikuti upacara seremonial secara resmi. Lihat Djoko Marihandono, *loc. cit.* hlm. 8.

<sup>91</sup> Islamiati Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 165.

Kolonial Belanda mulai memikirkan kembali tentang langkah-langkah penaklukan yang direncanakan untuk menangkap Ki Bagus Rangin, Demang Kuningan, Warga Kutipa, Demang Losari, Sangbaya, paramantri Gargo MInggolo, Wirisroyo, Jurang Prawiro, Joyosemito, Hangabehi Lanlang, Raden Jareng, Bagus Kelor, Bagus Santin, dan Macan Putih yang masih aktif melakukan penentangan dan perlawanan. Pemerintah kolonial Belanda merasa beruntung dengan menyerahnya 6 orang<sup>92</sup> di antara para pembangkang yang bagi Pemerintah Kolonial Belanda bisa dimanfaatkan untuk melacak dan mendapatkan informasi lebih jauh tentang keberadaan tokoh-tokoh para pemberontak tersebut. Sebaliknya dengan Ki Bagus Rangin, ia tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan perjuangannya. Ia malah berangkat mengungsi ke tempat lain, bahkan bersembunyi di Gunung Haji, dan dengan dalih untuk melindungi penduduk.<sup>93</sup>

Sementara itu pada tanggal 1 September 1806 telah tercapai persetujuan dengan diadakannya perjanjian yang berlangsung antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan Sultan Sepuh dan Sultan Anom yang isinya antara lain pertama dengan menetapkan, bahwa Raja Kanoman beserta saudaranya dikembalikan ke Cirebon dan dinobatkan sebagai sultan. Selanjutnya, yang kedua, orang-orang Cina tidak diijinkan lagi untuk tinggal di daerah pedalaman dan kepada para sultan tidak diperkenankan memeras rakyatnya.<sup>94</sup>

Sebagai realisasi dari tercapainya perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya, pada tanggal 25 Maret 1808 Pangeran

---

<sup>92</sup>Selain Bagus Arisim dan Bagus Suwasa, di antara yang keenam orang yang sudah menyerahkan diri tersebut adalah adalah Bagus Manuk, Bagus Ranrang, dan Macang Bansu Djoko Marihandono, *ibid.*, hlm. 8

<sup>93</sup>Djoko Marihandono, *loc. cit.*, hlm. 8.

<sup>94</sup>E.Suhardi Ekadjati, "Perjuangan Bagus Rangin ( 1806- 1812 )", Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran , Bandung, 1968, hlm.125. Menurut E. Suhardi Ekadjati keterangan itu diperoleh dari hasil wawancaranya dengan Bapak Masdji, Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, di rumahnya di Desa Jatitujuh, pada tanggal 22 Nopember 1967. Ia mengakui keturunan keenam dari Bagus Rangin.

Raja Kanoman diangkat menjadi Sultan Cirebon. Dengan diangkatnya Pangeran Raja Kanoman sebagai Sultan Cirebon, Pemerintah Kolonial Belanda mengharapkan dengan langkah ini bisa meredakan pergolakan yang masih ada di masyarakat di wilayah Cirebon. Tampaknya harapan itu masih jauh dari harapan, karena beberapa perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan, sehingga pergolakan rakyat pun kembali terjadi. Berdasarkan hasil perundingan sebelumnya, Pemerintah Kolonial menyepakati akan memperbaiki keadaan rakyat Cirebon dan membebaskan mereka dari semua kewajiban yang membebankan, tetapi dalam praktiknya rakyat Cirebon tetap harus memenuhi kewajiban membayar pajak dengan jumlah yang cukup tinggi.<sup>95</sup>

## **2. Periode Kedua Perjuangan Ki Bagus Rangin: Masa Pemerintahan Gubernur Jenderal H. W. Daendels (1808-1811)**

Periode kedua dari perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels<sup>96</sup> (1808-1811). Seperti diketahui bahwa sekalipun sejak tanggal 1 september 1806 sudah diadakan persetujuan perjanjian antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan Sultan Sepuh dan Sultan Anom, ternyata dengan diberlakukannya perjanjian tersebut belum juga dapat meredakan pergolakan rakyat daerah Jatitujuh dan sekitarnya. Bahkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H. W.

---

<sup>95</sup> Djoko Marihandono, "Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte", *Disertasi*, (Depok: Universitas Indonesia, 2005, hal. 171.

<sup>96</sup> Menurut D.G.E. Hall dalam kebijakannya H.W. Daendels berusaha untuk melakukan reformasi pemerintahan yang bersifat menyeluruh dengan tujuan memasukan sentralisasi yang lebih lengkap dan baku. Selanjutnya ia berusaha untuk meletakkan tekanan-tekanan khusus pada militernya dengan tugas-tugas menyelidiki kemungkinan penghapusan tanaman kopi dan penyerahan-penyERAHAN wajib, dan memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan rakyat. Lihat D.G. hall, *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha nasional, 1988), hlm. 446.

Daendels (1808 - 1811) justru perlawanan rakyat itu makin meluas ke daerah Indramayu sebelah selatan, karena H.W. Daendels dalam kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan dalam pemerintahannya secara terus menerus mengurangi kekuasaan sultan.

Dengan menyerahnya sebagian besar pengikut Ki Bagus Sidong, pemerintah kolonial menganggap bahwa terjadinya kerusuhan sebagai bentuk dari penentangan dan perlawanan di wilayah Cirebon telah selesai, sementara situasi keamanan di kota ini mulai dapat dikendalikan. Ternyata laporan yang dibuat Nicolas Engelhard yang menyatakan bahwa kerusuhan Cirebon telah diselesaikan dengan baik, tidak benar adanya. Hal ini terbukti dengan masih adanya pemberontakan Ki Bagus Rangin ketika terjadi pergantian penguasa di wilayah koloni ini dari Albertus Henricus Wiese kepada Herman Willem Daendels. Pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin masih tetap menjadi persoalan yang belum dapat ditangani oleh pemerintah secara tuntas.<sup>97</sup> Memang H.W. Daendels pada tahun 1810 telah melakukan reorganisasi dengan memecat Sultan Kanoman sebagai sultan Cirebon, dan memang dalam kenyataannya tidak menimbulkan kekacauan yang berarti bagi masyarakat Cirebon. Namun pemberontakan Ki Bagus Rangin tetap berlangsung tanpa dapat dibendung.<sup>98</sup>

Gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Daendels memiliki hubungan langsung dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh H.W. Daendels itu sendiri. Seperti diketahui H.W. Daendels setelah menerima jabatan gubernur jenderal menerima laporan dari Gubernur Pantai Laut Jawa Nicolas Engelhard bahwa pemberontakan

---

<sup>97</sup> Djoko Marihandono, "Bagus Rangin Berdasarkan Arsip-arsip Kolonial", *Makalah dalam Seminar Nasional Pengusulan Ulang Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional*, tanggal 21 Maret 2019 di Gedung Sate, Bandung, hlm. 8.

<sup>98</sup> Djoko Marihandono, *Ibid.*, hlm. 8-9.

Cirebon telah selesai dipadamkan. Dengan telah selesai dipadamkannya gerakan penentangan dan perlawanan di wilayah Cirebon, H.W. Daendels merasa perlu ikut campur tangan dalam hal penyelesaian pemberontakan tersebut. Untuk itu ia menyodorkan reorganisasi pemerintahan di wilayah Cirebon sebagai dampak dari pergolakan yang terjadi akibat penindasan yang dilakukan oleh Sultan Cirebon. Pengangkatan kembali Sultan Kanoman sebagai raja Cirebon tidak disetujui oleh Daendels, karena sekalipun sudah ada upaya dengan dilakukannya pengangkatan kembali Sultan Kanoman sebagai raja Cirebon ternyata tidak menunjukkan hasil yang positif. Bahkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1806 telah terjadi dan pecah kembali.

Tuntutan mengembalikan Raja Kanoman hingga hak-haknya dipulihkan memang terpenuhi ketika H.W. Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal. Kendati demikian, ia menolak bekerja sama, oleh karenanya Raja Kanoman dibuang kembali pada tahun 1810. H.W. Daendels kemudian membagi wilayah Cirebon menjadi dua, dan keduanya harus patuh kepada kekuasaan residen-residen Belanda. Di sepanjang pemerintahan H.W. Daendels ini pemberontakan bersenjata tidak pernah berhenti. Akibatnya, gubernur jenderal itu menghapus dua kesultanan yang baru dipecahnya untuk selamanya.<sup>99</sup> Akan tetapi, pada tanggal 13 Maret 1809 Daendels kembali memecah Cirebon menjadi tiga daerah, dan kedudukan sultan sama dengan bupati. Indramayu adalah salah satu wilayah administratif Karesidenan Cirebon bagian utara, yang pada tahun 1809–1815 dikepalai oleh Sultan Panembahan Kacirebonan.<sup>100</sup> Kemudian di masa transisi, tepatnya diakhir

---

<sup>99</sup>Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 80

<sup>100</sup>A. Sobana Hardjasaputra dan Tawalimudin Haris, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20)*. (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 131-134.

masa kekuasaan H.W. Daendels dan memasuki masa kekuasaan Thomas Stamford Raffles, para pemegang jabatan kesultanan yang sah hanya diberi uang pensiun. Dalam perjalanannya posisi para pejabat itu banyak yang diisi oleh para bupati.<sup>101</sup>

Pada tanggal 2 Februari 1809, berdasarkan *Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen*<sup>102</sup> wilayah kesultanan Cirebon dijadikan wilayah yang berada dibawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai konsekuensi dari peraturan tersebut, sultan-sultan di Cirebon kemudian dijadikan pegawai Belanda dan diberikan gaji oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pemisahan kekuasaan kesultanan-kesultanan di Cirebon ini bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Sepuh VII Sultan Djoharudin di Kesultanan Kasepuhan, Sultan Anom V Abu Soleh Muhammad Immamudin di Kesultanan Kanoman dan Sultan Kacirebonan I, Sultan Carbon Amirul Mukminin di Kesultanan Kacirebonan yang baru saja dibentuk dari hasil perundingan keluarga untuk membagi kesultanan Kanoman.<sup>103</sup>

Selama setahun Gubernur Jenderal H.W. Daendels setelah kedatangannya ke Hindia Belanda, ia telah menetapkan berbagai langkah dan tindakan dalam rangka pengendalian wilayahnya yang ada di Jawa bagian barat, menjadi dua *Regentschappen* (wilayah) yaitu : Pertama, *Batavia en Jacatrasche Preanger Regentschappen* (wilayah Batavia dan Priangan-Jakarta) yang meliputi Batavia, Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung dan Sumedang. Kedua, *Kesultanan Cheribon en Cheribonsche-Preanger Regentschappen* (wilayah kesultanan Cirebon dan Priangan-Cirebon), yang meliputi wilayah kesultanan Cirebon, Limbangan (saat ini sebagai bagian dari Kabupaten Garut), Sukapura (saat ini bagian

---

<sup>101</sup>Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>102</sup>Peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon

<sup>103</sup>Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 352.

dari Kabupaten Tasikmalaya) dan Galuh (saat ini Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar)<sup>104</sup>

Di wilayah Cirebon, Gubernur Jenderal H. W. Daendels memperoleh hak untuk mengangkat pegawai kesultanan menjadi pegawai Belanda, hal ini sesuai dengan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh H. W. Daendels di pulau Jawa di mana ia memiliki keleluasaan untuk mengangkat semua bupati menjadi pegawai Belanda dengan maksud menyetarakan mereka dengan para pegawai yang berasal dari Eropa. Hal ini perlu dilakukan oleh H.W. Daendels dimaksudkan untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang oleh para bupati Jawa yang memperoleh keuntungan langsung dari penduduknya.<sup>105</sup> H.W. Daendels mendapat kekuasaan lebih besar dalam urusan keuangan, tidak hanya di wilayah Cirebon. H.W. Daendels juga memperketat pengawasan administrasi dan keuangan atas para penguasa pribumi lainnya. H.W. Daendels juga masih melakukan intervensi dalam pemerintahan internal kesultanan.

Sebagai imbas dari kebijakan yang diberlakukan oleh H.W. Daendels ini, hasilnya mulai terasa. Sejak tahun 1809 kesultanan-kesultanan yang ada di Cirebon tidak lagi memiliki kekuasaan politik karena telah dijadikan pegawai pemerintah Hindia Belanda dan fungsi mereka sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh para bupati yang diangkat oleh Gubernur Jenderal. Wilayah-wilayahnya kemudian diawasi oleh seorang *prefect* (kepala wilayah) yang telah ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Nina H. Lubis., "Cirebon" dalam Nina H. Lubis dkk. (Ed.), *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, (Jatinagor: Alqaprint, 2000), Cetakan Pertama), hlm. 45

<sup>105</sup> Nina H. Lubis., *ibid.*, hlm. 45

<sup>106</sup> Nina H. Lubis., *ibid.*, hlm. 45

Dalam *Algemeene Bepalingen*<sup>107</sup> wilayah kesultanan Cirebon terbagi ke dalam dua *prefectuur*<sup>108</sup> yaitu *Kesultanan Cheribon Landen* (termasuk di dalamnya wilayah kepangeranan Gebang) dan *Cheribonsche-Preanger Landen* yang masing-masing dikepalai oleh seorang *prefect* (kepala wilayah). Dengan mengacu kepada ketentuan umum tersebut juga secara jelas bahwa *pertama*, kedudukan para penguasa Cirebon dengan terbitnya *Reglement op het beheer van Cheribonsche Landen*<sup>109</sup> menjadi seorang pegawai Belanda dengan posisi yang berada langsung dibawah *prefect*.<sup>110</sup> Selanjutnya, yang kedua, ketiga penguasa Cirebon diberikan gelar *hoofd-regent* dan tetap diperkenankan untuk menggunakan tanda atau simbol-simbol kebesaran serta tata cara penghormatan yang selama ini berlaku di lingkungan kesultanan dalam rangka menjaga citra dari para penguasa Cirebon. Ketiga, *prefectuur Kesultanan Cheribon Landen* dibagi lagi menjadi 12 distrik yang dikepalai oleh seorang *districts-tommongong* (*Tumenggung* wilayah). Keempat, para penguasa Cirebon yang diberikan jabatan *hooft-regent* diwajibkan untuk menyediakan beras sebesar 2.000 *koyan* (1 *koyan* = 1.853 kilogram) atau sekitar 3.706.000 kilogram per tahun dan pengakuan hutang sebesar 30.000 *Rijksdaalder*<sup>111</sup> atau ringgit per tahun.<sup>112</sup>

Pada tanggal 13 Maret 1809, Gubernur Jendral H.W. Daendels menunjuk Sultan Sepuh yang pada masa itu dijabat oleh Sultan Sepuh Djoharuddin untuk mengepalai wilayah kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sultan Anom Imamuddin ditunjuk sebagai kepala wilayah di Maja (Majalengka), sementara Pangeran Raja Kanoman yang sudah naik tahta sebagai Sultan Kacirebonan dijadikan kepala wilayah

---

<sup>107</sup> Ketentuan umum

<sup>108</sup> Wilayah

<sup>109</sup> Peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon

<sup>110</sup> Kepala wilayah),

<sup>111</sup> Bahasa Cirebon : *Reyal Selaka*

<sup>112</sup> Nina H. Lubis., *loc. cit.*, hlm.371-372.

Indramayu. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 1809 tersebut menyatakan bahwa wilayah yang berada di bawah pengelolaan masing-masing penguasa Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Sultan Sepuh, yang pada saat itu dijabat oleh Sultan Sepuh Joharuddin, mengelola wilayah Talaga, Gebang, Kuningan, Cikaso, Losari dan sebagian *Cheribon hoofd-negorij* (wilayah pusat kesultanan Cirebon) dengan tanah pertanian seluas 4.239 *jung* (1 *jung* = 28.000 m<sup>2</sup>) atau seluas 118.692.000 m<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 80,739 jiwa.
2. Sultan Anom, yang pada saat itu dijabat oleh Sultan Anom Abu Sholeh Imamuddin, mengelola wilayah Panjaluh, Matangaji, Rajagaluh, Sindang Kasih, sebagian Bengawan Wetan<sup>113</sup> serta sebagian *Cheribon hoofd-negorij* (wilayah pusat kesultanan Cirebon) dengan tanah pertanian seluas 4.304 *jung* atau seluas 120.512.000 m<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 76.622 jiwa.
3. Sultan Kacirebonan, yang pada saat itu dijabat oleh Sultan Kacirebonan I Amirul Mukminin Muhammad Chaeruddin II mengelola daerah Kandang Haur, Bengawan Kulon<sup>114</sup> dan sebagian Bengawan Wetan<sup>115</sup> dengan tanah pertanian seluas 4.293 *jung* atau seluas 120.204.000 m<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 80.250 jiwa.<sup>116</sup>

Pada tanggal 25 Maret 1808 Raja Kanioman, setelah dikembalikan dari tempat pembuangannya di Ambon, diangkat menjadi Sultan Cirebon. Oleh H.W. Daendels, wilayah Cirebon dibagi menjadi dua *prefektur*, yaitu prefektur pertama meliputi

---

<sup>113</sup> Sekarang mencakup daerah Palimanan sampai Plumbon

<sup>114</sup> Sekarang daerah sebelah barat sungai Cimanuk

<sup>115</sup> Sekarang mencakup daerah Indramayu, Jatibarang, Karang Ampel dan sekitarnya

<sup>116</sup> Nina H. Lubis., *loc. cit.*, hlm. 352-353.

daerah Cirebon utara dan *prefektur* kedua meliputi Galuh, Limbangan dan Sukapura. *Prefektur* utara dibagi atas tiga kabupaten, yaitu: (a) daerah Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh Sultan Sepuh; (b) daerah Majalengka dikepalai oleh Sultan Anom dan (c) daerah Indramayu dikepalai oleh Sultan Cirebon.

Tindakan H.W. Daendels tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1809 daerah Cirebon dijadikan hak milik pemerintah Belanda. Para sultan dijadikan pegawai negeri dengan mendapat gaji dari pemerintah. Tanggal 2 Maret 1810 Sultan Cirebon, Raja Kanoman (Pangeran Suriawijaya) dipecat, karena sikap dan tindakannya dianggap selalu menentang pemerintah.

Pada tanggal 20 Juni 1810, Gubernur Jenderal H.W. Daendels membagi wilayah Priangan berdasarkan hasil panen komoditas kopi. Wilayah Cianjur, Bandung, Parakan Muncang, dan Sumedang yang merupakan daerah yang menghasilkan banyak kopi dimasukkan dalam *Landdrost-ambt der Jacatrasche en Preanger bovenlanden* (wilayah Jakarta dan dataran tinggi Priangan). Sementara *Prefectuur Cheribonsche-Preanger Regentschappen* (wilayah Cirebon Priangan) yang menghasilkan sedikit kopi dihapus dan diganti menjadi *Landdrost-ambt den Cheribonsche Preanger-regentschappen*.

Itulah berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Di satu sisi bagi pemerintah kolonial dengan diberlakukannya kebijakan tersebut bisa jadi tujuan utama yang bisa diperoleh bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda tentunya dalam usaha melanggengkan kegiatan imperialisme dan kolonialisasi dipandang sangat baik dan bisa menguntungkan, namun di sisi lain bagi penduduk yang berada di wilayah Cirebon dengan diberlakukannya kebijakan tersebut sangat membingungkan dan merugikan. Puncaknya, dengan diterapkannya berbagai rangkaian kebijakan-kebijakan tersebut, kondisi ini telah menimbulkan kegelisahan yang sangat besar di kalangan rakyat Cirebon. Rakyat Cirebon merasa kehilangan pemimpin yang membela

kepentingan dan nasib mereka. Sebagai akibat dari langkah-langkah yang dilakukan H.W. Daendels yang dipandang keras dan bertangan besi tersebut telah membawa ketegangan dan keresahan di semua lapisan masyarakat. Sebagai akibat dari tindakannya pula gerakan-gerakan perlawanan rakyat di daerah-daerah pedalaman yang semula akan meredam, akhirnya berkobar kembali, bahkan makin menghebat.

Dalam pada itu menyadari dengan adanya perkembangan-perkembangan seperti ini, Ki Bagus Rangin pun mulai menghimpun dan menggalang kembali para pengikutnya. Ki Bagus Rangin yang selalu terpanggil untuk memperjuangkan rakyat berhasil mengumpulkan dan membina para pasukannya lagi. Perlawanan-perlawanan berupa perang terbuka maupun penyerangan tiba-tiba terus dilancarkan.

Tampaknya Pemerintah Kolonial Belanda tidak menyadarinya, bahwa bagaimanapun pengaruh Ki Bagus Rangin di kalangan para pengikutnya dan masyarakat setempat pada umumnya masih sangat besar. Perlu diketahui bahwa Ki Bagus Rangin sangat dipercaya dan diharapkan menjadi pemimpin oleh para pengikutnya. Begitu besarnya pengaruh Ki Bagus Rangin, bahkan di kalangan para pengikutnya kemudian ia dipercayai sebagai titisan Sang Ratu Adil yang akan melenyapkan kezaliman dan ketidakadilan serta membawa keadilan dan kemakmuran.<sup>117</sup>

Sebagai pemimpin masyarakat pada waktu itu, berdasarkan informasi Ki Bagus Rangin sering menyepi di tempat-tempat tertentu untuk mencari ilham, dan kekuatan ghaib serta memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar harapan masyarakatnya terkabul. Kegiatan menyepi terakhir yang dilakukan Ki Bagus Rangin dilakukan di daerah Pasir Luhur, sebuah daerah yang merupakan bagian dari wilayah

---

<sup>117</sup>*Bagoes Rangin 1812, Bundel Cheribon Nomor 39/8*, Jakarta: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

Banyumas, yang menjadi perbatasan tanah Sunda dan Jawa. Berdasarkan informasi kegiatan menyepi di daerah Pasir Luhur dilakukan oleh Ki Bagus Rangin sampai dua kali. Ki Bagus Rangin melakukan kegiatan menyepi yang kedua dan terakhir dilakukan pada tahun 1811 selama satu bulan lamanya.

Para pengikutnya menjemput Ki Bagus Rangin yang sedang nyepi di Pasir Luhur untuk melanjutkan kembali perjuangan melawan pemerintah kolonial yang dipandang dzalim dan banyak melakukan penindasan. Pada periode ini apa yang menjadi tujuan dari perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin lebih ditingkatkan lagi. Kini ia mengadakan gerakan penentangan terhadap pemerintah kolonial tidak lagi dilakukan untuk melakukan peperangan, melainkan untuk membela rakyat yang sedang sengsara akibat masalah yang bertalian dengan penanaman padi dan berusaha untuk meringankan beban rakyat dari kewajiban untuk melaksanakan kerja paksa.<sup>118</sup> Sasaran gerakannya sendiri bukan lagi merusak dan menghancurkan, akan tetapi juga mendirikan negara sendiri. Dengan mendirikan negara dan pemerintahan yang akan dibentuknya itulah Ki Bagus Rangin memiliki keyakinan bahwa tujuan perjuangannya ini dapat tercapai. Berdasarkan rencana ini pula Ki Bagus Rangin rencananya akan dijadikan sebagai raja di negara yang akan dibentuknya. Adapun negara yang akan dibentuknya bernama Kerajaan Panca Tengah dengan ibukotanya di Bantarjati.<sup>119</sup>

Di dalam rangka memantapkan persiapan menghadapi perang melawan pemerintah kolonial yang berkuasa, Ki Bagus Rangin mulai mengadakan penggemblengan khusus terhadap pemimpin pasukan dan sebagian anak buahnya. Biasanya aktivitas *penggemblengan* yang diberikan Ki Bagus Rangin

---

<sup>118</sup>Bagoes Rangin 1812, *Bundel Cheribon Nomor 39/8*, Jakarta: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

<sup>119</sup>Bagoes Rangin 1812, *Bundel Cheribon Nomor 39/8*, Jakarta: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

dilakukan setelah melaksanakan shalat Jumat dengan bertempat di Masjid Jatitujuh. Dalam kegiatan *pengemblengan*, para pengikut Ki Bagus Rangin biasanya memakai pakaian serba putih sebagai simbol bahwa perjuangan yang dilakukan didasari rasa ikhlas, rela berkorban, baik harta, jiwa maupun raga demi tanah air, bangsa dan agama. *Pengemblengan* dan komando terutama diberikan oleh Ki Bagus Rangin dengan tujuan agar para pengikutnya senantiasa siap, baik mental dan spiritualnya di dalam menghadapi kondisi apapun. Dalam kegiatan *pengemblengan* tersebut biasanya senjata yang mereka pergunakan adalah keris, tombak, cangak, gada, panah dan wareng.<sup>120</sup>

Berdasarkan pengintaian yang dilakukan oleh para “pasukan telik sandi” yang dikirimkan Ki Bagus Rangin dapat diketahui bahwa gabungan tentara Belanda dan para para Bupati telah bergerak dari kadipaten menuju Jatitujuh. Ki Bagus Rangin selaku Panglima perang berpendapat, bahwa sebelum tentara gabungan musuh masuk ke daerah Jatitujuh terlebih dahulu pasukannya harus menyerang. Ki Bagus Rangin memerintahkan pasukannya supaya segera memasang umbul-umbul di lapangan Jawura, Bantarjati. Maksud pemasangan umbul-umbul tersebut sebagai tanda “menantang perang” kepada musuh. Pemilihan lapangan Jawura sebagai tempat pertempuran merupakan tempat yang sangat menguntungkan menurut perhitungan Ki Bagus Rangin dan kawan-kawannya. Lapangan tersebut berada di sebelah barat daerah Kertajati, kira-kira lima kilometer dari Jatitujuh. Bentuknya memanjang ke arah timur-Barat dengan luas kira-kira lima hektar.

Seluruh pasukan Ki Bagus Rangin ditempatkan di bagian utara lapangan Jawura. Komandan-komandan pasukan yang

---

<sup>120</sup>Bagoes Rangin 1812, *Bundel Cheribon Nomor 39/8*, Jakarta: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

terkenal di antaranya ialah Buyut Merat , Buyut Deisa, Buyut Sena, Buyut Jayakusuma, Buyut Jago, Buyut Teteg, Buyut Huyung, Buyut Bongkok, dan Buyut Jasu. Seperti itulah beberapa rangkaian persiapan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam upaya mempersiapkan diri untuk menentang dan melawan pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pasukan Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Pangeran Kusumahdinata IX dan Raden Surialaga II kemudian bergerak menuju wilayah Jatitujuh. Ki Bagus Rangin yang mengetahui hal ini berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya dengan memulai serangan terlebih dahulu. Adapun sebagai taktik yang ditempuh oleh Ki Bagus Rangin adalah dengan memasang umbul-umbul di lapangan Jawura guna menantang Belanda untuk berperang. Lapangan Jawura merupakan sebuah lapangan yang sangat strategis yang memanjang dari timur ke barat dengan luas sekitar lima hektar yang berada di sebelah barat desa Kertajati.

Ketika pasukan gabungan pemerintah tiba di perbatasan Kertajati dan Babakan, terlihat oleh mereka umbul-umbul merah yang dipasang oleh pasukan Ki Bagus Rangin sebagai pertanda tantangan perang. Pimpinan serdadu Belanda segera memerintahkan supaya setiap pasukan dipencar. Sebagai tanda dimulainya perang terdengarlah dentuman meriam dan sejak saat itu terjadilah pertempuran di lapangan Jawura.

Pertempuran di lapangan Jawura sangat penting dan menentukan. Tentang situasi dan jalannya perang Jawura itu, De Haan menginformasi dengan menulis catatan berdasarkan maklumat tanggal 22 Juli 1810 yang menyatakan, bahwa Ki Bagus Rangin beserta pasukannya dapat mengalahkan pasukan Sumedang di dekat Bantarjati, di tepi Sungai Cimanuk. Walaupun pasukan Ki Bagus Rangin dapat mengalahkan

pasukan Sumedang, tetapi Ki Bagus Rangin menyatakan juga, bahwa pasukannya banyak yang meninggal.<sup>121</sup>

Pada tanggal 22 Juli 1810, pasukan Ki Bagus Rangin dapat mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Pangeran Kusumahdinata IX dari Sumedang di dekat wilayah Bantarjati. Sementara itu pasukan Ki Bagus Rangin lainnya yang dibawah komando Ki Buyut Merat dan Ki Buyut Deisa dapat mematahkan juga pertahanan dari pasukan Belanda yang dipimpin oleh Raden Surialaga II. Walaupun pasukan Ki Bagus Rangin dengan keterbatasan persenjataan dan personil berhasil memenangkan peperangan, pasukan Ki Bagus Rangin kemudian terpaksa mundur, hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pasukan Pemerintah Kolonial Belanda untuk melawan balik dengan memblokade wilayah Jatitujuh. Hal tersebut dilakukan untuk memutus hubungan antar kelompok pasukan Ki Bagus Rangin sekaligus mempersempit ruang geraknya. Pangeran Kusumahdinata IX kemudian dapat membangun kekuatan pasukannya kembali dan memukul mundur pasukan Ki Bagus Rangin hingga ke wilayah Panongan.

Selanjutnya, Pasukan Ki Bagus Rangin yang dipimpin Buyut Merat dan Ki Buyut Deisa pelan-pelan dapat pula mematahkan kekuatan pasukan Karawang. Akan tetapi karena pasukan Pemerintah Kolonial Belanda lebih lengkap persenjataan dan jumlah pasukannya lebih banyak, pada akhirnya pasukan Ki Bagus Rangin terpaksa harus mundur. Di samping itu pula dengan telah diblokadanya Jatitujuh oleh musuh, hal ini tentu saja telah membuat ruang gerak pasukan Ki Bagus Rangin menjadi terjepit dan hubungan pun terputus.

Setelah pasukan Sumedang dikonsolidasi oleh Pangeran Kornel, pasukan Ki Bagus Rangin dapat dipukul mundur ke daerah Panongan.<sup>122</sup> Kendatipun kegiatan penumpasan

---

<sup>121</sup> F. De Haan, *loc. cit.*, hlm. 486.

<sup>122</sup> E. Suhardi Ekadjati, *loc. cit.*, hlm. 31 .

perlawanan rakyat di sekitar wilayah Cirebon itu belum dapat terselesaikan seluruhnya, terlebih karena terhalang oleh penggantian pemerintahan kolonial dari tangan Belanda ke tangan Inggris pada tahun 1811 tetapi upaya untuk melakukan penumpasan perlawanan rakyat tetap berjalan. Dengan adanya pergantian pemerintahan kolonial ini, kondisi ini bagi Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya untuk sementara merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan dengan banyak melakukan konsolidasi dan menyusun kekuatan kembali kepada para para pengikutnya.

### 3. Periode Ketiga Perjuangan Ki Bagus Rangin: Masa Pemerintahan *Interegnum* (Penyelang) (1811-1816)

Periode ketiga dari perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Perlu dikemukakan bahwa situasi dan kondisi di wilayah Cirebon pada masa Pemerintahan Kolonial Inggris belum juga membaik setelah Pemerintah Kolonial Inggris<sup>123</sup> menggantikan Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>124</sup>

Pada masa Pemerintahan Kolonial Inggris, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811- 1816) mengeluarkan kebijakan berupa pungutan pajak tanah pusaka dalam bentuk

---

<sup>123</sup>Thomas Stamford Raffles dalam usaha menyerang Belanda di pulau Jawa telah mengirimkan mata-matanya ke beberapa wilayah di Nusantara. Selain mata-mata pribumi, ia juga mengirimkan mata-mata berkebangsaan asing. Mata-mata pribumi yang ditugaskan oleh Thomas Stamford Raffles bertugas untuk meneliti situasi di nusantara, sementara tugas untuk mencari jalur laut yang aman menuju pulau Jawa dibebankan kepada mata-matanya yang berkebangsaan asing seperti David Macdonald, John Scott, Charles Tait, William Greigh serta Letnan Smith. Pada laporan yang diterima beberapa bulan sebelum pulau Jawa berhasil direbut oleh Thomas Stamford Raffles, ia mendapat kesimpulan bahwa sistem administrasi yang dijalankan oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* di pulau Jawa dinilai sangat buruk. Adapun terkait dengan Cirebon, Thomas Stamford Raffles menerima laporan bahwa wilayah Cirebon yang subur dinilai oleh Belanda selalu mengecewakan secara finansial padahal para penguasanya selalu menyertorkan berbagai komoditas yang diperoleh dari masyarakatnya terutama kopi kepada Belanda melalui pejabat penghubungnya di Cirebon.

<sup>124</sup> M.C. Rickhiefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, Cetakan Keempat, hlm. 173.

sewa tanah setelah H.W. Daendels menghilangkan pemilikan tanah sultan pada tahun 1808. Mereka yang memiliki tanah pusaka mendapat ganti rugi. Kebijakan ini ternyata tidak memberikan kepuasan bagi anggota kerabat dan pejabat-pejabat sultan, karena dalam praktiknya sering kali dikorupsi oleh pegawai pemerintah.<sup>125</sup>

Sebenarnya pada masa Pemerintahan Kolonial Inggris, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles bermaksud menerapkan kebijakan politik kolonial seperti yang dijalankan di India, menurut sistem yang kemudian terkenal sebagai pajak tanah (*landrent system*). Kesejahteraan rakyat hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan serta jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa serta ada dorongan untuk menambah penghasilan serta perbaikan tingkat hidup. Pemerintahan Stamford Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan menanam dan perdagangan.<sup>126</sup> Di antara pokok-pokok yang menjadi kebijakan pemerintahan Thomas Stamford Raffles ialah : 1). Penghapusan seluruh pengerahan wajib dan wajib kerja dengan memberi kebebasan penuh kultur dan berdagang. 2) Pemerintah secara langsung mengawasi tanah-tanah, hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara Bupati yang tugasnya terbatas pada dinas-dinas umum. 3). Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya.<sup>127</sup>

Kesejahteraan rakyat yang hendak dicapai dengan memberikan dengan memberikan kebebasan serta jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan dari para penguasa serta adanya

---

<sup>125</sup> Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1988). hlm. 291.

<sup>126</sup> Sartono Kartodirdjo, *ibid.*, hlm. 292.

<sup>127</sup> Sartono Kartodirdjo, *ibid.*, hlm. 292-293.

dorongan untuk menambah penghasilan dan perbaikan tingkat hidup dari apa yang maksudkan oleh Raffles ternyata hanyalah isapan jempol belaka. Dalam realitanya, apa yang ditemukan di wilayah Cirebon adalah banyak dijumpainya kesenjangan dan ketimpangan hidup di antara para penguasa dengan rakyat.

Diinformasikan bahwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah Cirebon sangat timpang. Para pejabat penghubung Belanda di Cirebon banyak yang memperoleh penghasilan sekitar 80.000 hingga 100.000 Real Spanyol (Dollar Spanyol) per tahun, sementara para penguasa Cirebon terus menerus dimiskinkan. Sebagai implikasinya banyak para penguasa Cirebon untuk menutupi kehidupan sehari-harinya yang kekurangan berusaha melakukan penekanan terhadap masyarakatnya. Kendati demikian, tetapi ironisnya banyak di antara para penguasa Cirebon dan pejabat kolonial penghubung yang Belanda memperlakukan orang-orang Cina dengan istimewa. Tentu saja, keadaan ini membuat masyarakat Cirebon tidak kuat lagi menerima tekanan dan berusaha mencari jalan keluar dengan melakukan gerakan perlawanan rakyat kembali.

John Crawford<sup>128</sup>, seorang pejabat komisioner khusus Britania untuk bidang agraria di Cirebon, pada catatannya menyatakan bahwa sejak masa jabatan Gubernur Jenderal H.W. Daendels sampai Jan Willem Janssens masyarakat Cirebon dikenakan delapan jenis pungutan yang pembayarannya jarang sekali ditanggihkan. Adapun ke delapan jenis pungutan atau pajak tersebut adalah:

1. Upeti hasil padi sebesar lima belas persen dari hasil panen, namun pada kenyataannya persentase diterapkan sesuka hati;

---

<sup>128</sup> John Crawford diangkat sebagai Komisioner Khusus Britania untuk bidang agraria di Cirebon pada 19 Juli 1813 dan berakhir jabatannya pada Desember 1815.

2. Pajak keluarga atau pajak per kepala, sebagian dipungut atas nama pemerintah dan sebagian lagi atas nama kepala daerah setempat;
3. Pajak pasar dipungut untuk setiap barang komoditas yang dihasilkan;
4. Pajak pemotongan sapi dipungut sebagai upaya pengembangbiakan sapi;
5. Pajak penginapan dan makanan bagi orang yang bepergian, pengangkutan, bagasi dan penyimpanan barang;
6. Kewajiban untuk membangun dan memperbaiki sarana umum;
7. Kewajiban untuk menanam dan menyetorkan komoditas ekspor, terutama kopi;
8. Pajak keagamaan sebesar satu per dua puluh dari total padi hasil panen, namun pada kenyataannya yang diambil adalah sepersepuluh dari total padi hasil panen.<sup>129</sup>

Pemberontakan pun kembali meletus di beberapa daerah, antara lain di Kedondong-Cirebon, yang dikenal dengan Perang Kedondong. Di desa itu pasukan Ki Bagus Rangin dihadang oleh tentara Cirebon dan tentara Belanda yang bersenjata api. Dua pasukan gabungan tersebut berhasil memukul mundur pasukan Ki Bagus Rangin. Dengan tetap semangat, pasukan Ki Bagus Rangin berlarian ke daerah Kaliwedi, Arjawinangun, Cirebon untuk mengajak penduduk setempat melakukan perlawanan. Akan tetapi, mereka kembali diserang sehingga banyak pasukan Ki Bagus Rangin yang tewas.

Sampai dengan tahun 1816 pemberontakan di wilayah Cirebon terus bergejolak. Ki Bagus Rangin dan putranya, Bagus Kandar, memiliki peran yang sangat besar di dalam memimpin

---

<sup>129</sup> Sartono Kartodirdjo, *ibid.*, hlm. 293.

pemberontakan tersebut. Dengan mudah mereka mengajak sejumlah kepala desa untuk memberontak, dan hasilnya tidak sia-sia, banyak yang turut bergabung. Bahkan, salah seorang pemimpin pemberontakan, Ki Bagus Serit, sukses mendulang keberhasilan yang merekrut 50 kader bersenjata lengkap di daerah Babadan dalam waktu singkat. Ia juga menyampaikan surat anjuran menghasut dan memberontak yang ditujukan kepada tiga sultan Cirebon (Kacirebonan, Kanoman, dan Kaprabonan) yang berisi ajakan bergabung untuk membebaskan Cirebon dari tangan kolonial. Namun demikian, Sultan Sepuh tidak meresponnya, justru surat itu diberikannya kepada Residen Servatius.<sup>130</sup>

Pada tanggal 9 Januari 1812 Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles memerintahkan Komisararis Couperus yang berkedudukan di Cianjur supaya mengumpulkan 500 orang prajurit dari Kabupaten Cianjur yang akan dipimpin oleh bupati Cianjur Raden Wiranegara (Raden Adipati Wira Tanu Datar VI) untuk diberangkatkan ke Karawang guna menumpas perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin. Raden Wiranegara merupakan seorang bupati yang dihormati oleh para bupati lainnya di wilayah Priangan. Ia juga termasuk bupati yang memerintah sangat lama yaitu sejak tahun 1776, bahkan ada bawahan beliau dahulu yang menjadi bupati seperti Pangeran Kusumahdinata IX (bupati Sumedang) yang ketika masih muda pernah menjadi *cutaknya* (bawahan). selain memerintahkan Couperus di Cianjur, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles juga memerintahkan hal yang sama kepada Mangkunegaran di Surakarta, pasukan Mangkunegaran

kemudian berangkat dengan dipimpin oleh Pangeran Mayor Surianegara dan Suriadipura. Demikian juga Raden

---

<sup>130</sup> Van der Kemp, P.H., *Pemberontakan di Cirebon Tahun 1818*, (Jakarta: Yayasan Idayu: Jakarta, 1979), hlm. 44-45  
254 | Geger Ciayumajakuning

Surialaga II kembali diperintahkan untuk mengerahkan kembali pasukannya di medan perang Bantarjati.<sup>131</sup>

Pergantian kekuasaan kolonial di Cirebon dijadikan kesempatan oleh kelompok Ki Bagus Rangin untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatan pasukannya. Raden Semanggun Benggala (Adipati Wiralodra VI) dari Dermayu kemudian meminta bantuan Pangeran Muhammad Samsudin Udaka dari Kesultanan Kasepuhan\_\_ untuk menumpas perlawanan Ki Bagus Rangin. Terkait masalah ini, Pangeran Muhammad Samsudin Udaka kemudian menghubungi Pemerintah Kolonial Inggris. Pasukan gabungan dari pemerintah Britania, para bupati Priangan, Indramayu dan Kesultanan Kasepuhan segera bergerak dengan tujuan untuk mengepung kelompok Ki Bagus Rangin.

Pada tanggal 16 sampai dengan 29 Februari 1812 pertempuran pun terjadi lagi di medan tempur Bantarjati. Pertempuran berjalan sengit. Namun tak lama kemudian pengikut Ki Bagus Rangin dapat dipukul dan sebagian mundur secara teratur, kemudian melarikan diri, termasuk pimpinannya, Ki Bagus Rangin. Dalam kesempatan tersebut Ki Bagus Rangin dan Bagus Serit berhasil meloloskan diri. Dalam pertempuran tersebut kerugian dari pihak Ki Bagus Rangin adalah 87 orang prajurit tewas, 227 orang dan dua orang pemimpinnya tertangkap dan dapat dirampas, 23 pucuk senapan, 19 buah tombak, 27 buah pedang atau bedog, dan tiga buah keris. Selain itu dirampas pula payung kebesaran Ki Bagus Rangin dan perlengkapan wayang serta 776 orang keluarga kaum perlawanan yang terdiri dari wanita dan anak-anak ditahan.<sup>132</sup>

Daerah Panongan ditinggalkan dan pasukan Ki Bagus Rangin kemudian bertahan di sebuah daerah yang kini bernama Pangayoman. Karena mendapat serangan yang terus-menerus

---

<sup>131</sup> Rd . Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 88.

<sup>132</sup> Rd . Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 88; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 375.

dari serdadu Belanda, pasukan Ki Bagus Rangin bergerak mundur lagi ke kampung Sindang, yang berada di sebelah barat daerah Panongan<sup>133</sup>. Tampaknya kondisi tidak menguntungkan menimpa Pasukan Ki Bagus Rangin. Di sebuah tempat yang sekarang disebut Rancabolong secara tiba-tiba salah seorang komandan pasukannya yang bernama Buyut Sena dikepung Belanda sehingga ia tidak dapat melarikan diri. Karena badannya penuh dengan tusukan senjata musuh, akhirnya ia gugur dan dimakamkan di sebelah timur Desa Kertajati. Sementara Buyut Jayakusuma dan Buyut Jasu yang dikepung dan dikejar-kejar pasukan gabungan Pemerintah Kolonial Inggris, para bupati Priangan, Indramayu dan Kesultanan Kasepuhan Belanda, berhasil melarikan diri.<sup>134</sup>

Pencarian terhadap Ki Bagus Rangin dan kelompoknya yang berhasil melarikan diri dilakukan Pemerintah Kolonial Inggris dengan menyisir daerah-daerah di sekitar Bantarjati seperti Biyawak dan Jatitujuh. Berbagai fasilitas umum dan rumah-rumah warga yang ada di desa-desa tersebut dibakar. Wanita dan anak-anak banyak yang dibawa ke Indramayu untuk dijadikan tahanan. Oleh karena Ki Bagus Rangin dan pasukannya belum dapat ditemukan, operasi militerpun terus dilakukan di daerah-daerah lainnya yang diduga sebagai tempat persembunyian Ki Bagus Rangin dan pasukannya, termasuk di daerah Kedondong. Operasi militer yang dilakukan pasukan pemerintah kolonial terus dilanjutkan ke daerah-daerah yang dianggap atau dijadikan tempat persembunyian kaum perlawanan.

Dalam sebuah kesempatan kegiatan operasi militer, pada tanggal 27 Juni 1812 pasukan kolonial yang terdiri dari pasukan Britania, para bupati Priangan, Indramayu dan Kesultanan Kasepuhan berhasil menangkap pemimpin perlawanan Ki

---

<sup>133</sup> Kusen, *Asal-usul Nama Desa Panongan*, (Djatitujuh: Tanpa Penerbit, 1967), hlm. 1.

<sup>134</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 375.  
256 | Geger Ciayumajakuning

Bagus Rangin di Panongan.<sup>135</sup> Menurut Sobana Hardjasaputra, pasukan gabungan Britania, para bupati Priangan, Indramayu dan Kesultanan Kasepuhan secara intensif telah melakukan operasi militer di daerah-daerah yang dianggap menjadi tempat persembunyian Ki Bagus Rangin dan para pengikut-pengikutnya. Dalam sebuah operasi dan pencarian tersebut, pada tanggal 27 Juni 1812 ia tertangkap oleh musuh di Panongan.<sup>136</sup> Menurut keterangan Mayor William Thorn yang dituangkan dalam catatan *Memoir of the Conquest of Java* yang diterbitkan pada 1815, ia menjelaskan bahwa Ki Bagus Rangin ditangkap bersama dengan keponakannya yang bernama Bagus Manuh dan pamannya yaitu Grissen atau Sidja Djuda pada tanggal 27 Juni 1812. Ki Bagus Rangin selanjutnya dihukum mati tepatnya di tepi sungai Cimanuk di daerah Karang Sembung<sup>137</sup> pada tanggal 12 Juli 1812.

Seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin di dalam menentang pemerintah kolonial pada waktu itu. Ki Bagus Rangin telah merelakan seluruh jiwa dan raganya

---

<sup>135</sup>Rd . Asik Natanegara , *loc. cit.*, hlm. 88-89. Ki Bagus Rangin ditangkap di Panongan, Majalengka oleh bupati Karawang (Kandanghaur, R.A. Suryalaga), Tumenggung Raksayuda dari Rajagaluh (Sindangkasih), dan Mantri Sultan Kanoman R. Jayanagara dari Cirebon. Keterangan ini sama dengan informasi dari sumber Pemerintah Kolonial Inggris yang dicatat pada waktu Bagus Rangin tertangkap tanggal 27 Juni 1812 dan kemudian dieksekusi mati tanggal 12 Juli 1812.

<sup>136</sup>Berita Tentang tertangkap dan meninggalnya Ki Bagus Rangin sampai saat ini tampaknya masih ada kontroversi. Menurut Opan Syafari Hasyim dengan merujuk kepada sumber-sumber lokal yaitu dari *Babad Mertasinga* dan *Babad Darmayu*, sampai dengan tahun 1817 Ki Bagus Rangin masih hidup dan menjadi salah satu pahlawan di Perang Kedondong. Berdasarkan catatan informasi dari Ki Marsita S. Adhikusuma yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar desa Kedondong. Pada pertengahan tahun 1817 di Balemangu Kedondong diadakan perundingan membahas rencana pemberontakan melawan pemerintah penjajah Belanda. Pertemuan itu dihadiri oleh: 1). Ki Bagus Rangin, Mantan Panglima Perang Keraton Kanoman; 2) Ki Bagus Serit, Mantan Panglima Perang Keraton Kacirebonan; 3) Ki Arsitem, Mantan Senopatih Keraton Kasepuhan; 4) Ki Kuwu Sarmen, Kuwu desa Kedondong; 5) Ki Kuwu Berong, Kuwu desa Gintung Kidul; 6) Ki Kuwu Raksa Penanga, Kuwu Desa Wiyeng; 7) Ki Kuwu Ganisem, Kuwu Desa Nambo Tangkil; dan 8) Ki Buyut Kinten, Sesepuh desa Kedondong. Lihat R. A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 6

<sup>137</sup>Daerah ini dahulu merupakan tempat penyeberangan yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur sungai Cimanuk.

untuk kepentingan rakyat banyak, sekalipun pada tanggal 12 Juli 1812 ia harus rela dihukum mati ditepi sungai Cimanuk dekat Karangsembung.<sup>138</sup> Dengan berhasil dihukum matinya Ki Bagus Rangin di tepi sungai Cimanuk dekat Karangsembung, sejak itu pemerintah kolonial memandang Ki Bagus Rangin sudah tidak ada, dan gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di wilayah Cirebon dengan sendirinya akan berakhir. Kendati demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh dengan bersumber dari karya historiografi tradisional seperti *Babad Mertasinga* dan *Babad Dermayu* disebutkan bahwa Ki Bagus Rangin masih hidup dan turut menjadi bagian dalam perlawanan di Kedondong tahun 1818.<sup>49</sup> Terlepas dari kontroversi, dengan tertangkapnya pemimpin perlawanan rakyat Cirebon tersebut untuk sementara waktu memang dapat menghentikan gerakan perlawanan selanjutnya.

#### **4. Periode Keempat Perjuangan Para Pengikut Ki Bagus Rangin : Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1818)**

Periode keempat dari gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin berlangsung dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1818. Sebenarnya, pada periode ini merupakan periode perjuangan yang dilakukan oleh para pengikut Ki Bagus Rangin yang terus meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh Ki Bagus Rangin sendiri, karena Ki Bagus Rangin sebagai pemimpinnya sudah tertangkap dan meninggal dunia, tetapi spirit perjuangannya masih tetap berkobar di kalangan para pengikutnya. Bila ditelusuri lebih lanjut, pada periode ini gerakan perjuangan di dalam menentang dan melawan pemerintah kolonial terjadi dalam dua tahap lagi, yaitu pada tahap yang pertama terjadi pada tahun 1816-1817, dan pada tahap yang kedua pecah pada tahun 1818. Gerakan

---

<sup>138</sup> Sobana Hardjasaputra dan Haris Tawaludin, *loc. cit.*, hlm. 8.

penentangan dan perlawanan pada tahap yang kedua juga terjadi dalam dua fase, yaitu yang pertama terjadi pada bulan Januari-Februari 1818 dan kedua, terjadi pada bulan Juli-Agustus 1818.

Gerakan perlawanan yang terjadi pada periode tahun 1816-1817 pecah berawal di Keresidenan Karawang. Tokoh utama gerakan perlawanan ini adalah Ki Bagus Jabin, putera Ki Bagus Sanda, pamannya Ki Bagus Rangin. Selain Ki Bagus Jabin, tokoh lainnya adalah Ki Bagus Bulun, pamannya; Ki Bagus Urang, kakeknya; dan beberapa anggota keluarganya yang lain seperti Ki Bagus Wangsa, Ki Bagus Asidin, Ki Bagus Brata, Candra Wijaya dan Talok. Ke semuanya nama-nama itu adalah saudara atau saudara tiri Ki Bagus Jabin.

Berita tertangkapnya Ki Bagus Rangin, untuk sementara waktu memang telah menghentikan gerakan penentangan dan perlawanan yang ditujukan kepada pemerintah kolonial sampai kemudian muncul kembali pada tahun 1816 sampai tahun 1818 yang dipimpin oleh Bagus Jabin lalu oleh Ki Bagus Serit.

Perlu diketahui bahwa pada tanggal 8 Desember 1816 telah tersiar berita bahwa orang-orang penduduk Karawang, Ciasem, dan Pamanukan yang jumlahnya sekitar 2.500 orang laki-laki bersenjata lengkap yang bermaksud untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Mereka dipirnpin oleh seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Ki Bagus Jabin. Ia adalah putera Ki Bagus Sanda, keponakannya Ki Bagus Rangin. Pemuda ini berusaha melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan menggantikan kedudukan Ki Bagus Rangin sebagai pimpinan perlawanan. Ki Bagus Jabin dianggap orang sakti oleh para pengikutnya.

Para pemimpin perlawanan itu sebenarnya masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Bagus Jabin, antara lain Bagus Bulun, Bagus Wangsa, Bagus Asidin, Bagus Brata, Candrawijaya, dan Taluk. Mereka semuanya berkumpul di

kampung Lohbener, pinggir Sungai Cimanuk sebelah barat. Mereka sudah siap-siap untuk berperang, jika serdadu dan polisi pemerintah kolonial menyerang. Berulangkali W.N. Servatius, sebagai Residen Cirebon mengirimkan utusan kepada mereka untuk menanyakan tentang alasan mereka akan berontak dan menasehatinya agar mereka mengurungkan maksudnya. Utusan Residen Cirebon berulangkali mengingatkan kepada mereka, bahwa daripada memberontak terhadap pemerintah, lebih baik minta damai dan berunding dengan pemerintah secara baik-baik.

Ki Bagus Jabin dan pengikutnya menolak ajakan berdamai dan menjawab pertanyaan itu, bahwa mereka banyak dibebani pajak dan kewajiban yang terlalu berat. Ki Bagus Jabin juga menyampaikan sudah terlalu banyak ditekan oleh kepala kepala “desa” dan orang-orang Cina, serta merasa diperlakukan tidak adil.<sup>139</sup>

Ki Bagus Jabin dan pengikutnya mempunyai maksud untuk mengadakan penyerbuan ke Kandanghaur, bekas ibukota kabupaten Karawang dan Indramayu. Penyerbuan ke daerah itu dimaksudkan untuk :

- 1) Menggulingkan kedudukan kepala daerahnya yang tidak disenangi rakyat, karena sikap dan tindakannya selalu memeras serta menindas rakyat lagi pula bekerja sama dengan Belanda;
- 2) Menuntut kepada pemerintah kolonial supaya pajak diperingan dan penyerahan upeti dihentikan;
- 3) Menyerang kedudukan Belanda yang ada di daerah itu.<sup>140</sup>

Pada tanggal 9 Desember 1816 Ki Bagus Jabin dan pengikutnya melancarkan serangan ke kota Kandanghaur. Mereka menduduki kota itu, mengusir dan menganiaya penduduk yang dicurigai, dan merampas harta benda penduduk. Akibatnya banyak penduduk mengungsi ke luar kota

---

<sup>139</sup>P.H. van der Kemp, *loc cit.*, hlm. 7-9; Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 94-95.

<sup>140</sup>Lihat E. Suhardi Ekadjati, *loc. cit.*, hlm. 32. Nina H. Lubis. *loc. cit.*, hlm. 376.

karenanya.<sup>141</sup> Ia bersama 20 anak buahnya telah pindah dari Laummalang (Orimalang) ke daerah Legun, Cirebon. Melalui keputusan pemerintah No. 41 tanggal 8 Desember kepada residen diberitahukan agar jangan melakukan penahanan bila tidak terpaksa. Namun segala sesuatu diserahkan kepada kewaspadaannya. Ki Bagus Jabin harus diikuti secara seksama, diperiksa semua alasan dan sebabnya ia pindah tempat dan diusahakan agar ia kembali ke tempat semula.<sup>142</sup>

Peristiwa pendudukan Kandanghaur oleh para pengikut Ki Bagus Jabin telah mengakibatkan Residen Cirebon, W. N. Servatius marah sekali. Ia segera mengirimkan pasukan ke daerah kerusuhan. Kandanghaur dikepung dari segala arah oleh pasukan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1816 ia mengeluarkan ultimatum kepada Ki Bagus Jabin agar segera menyerahkan diri. Jika tidak mau menyerah, ia akan ditangkap dengan cara kekerasan. Karena Ki Bagus Jabin tidak mengindahkan ultimatum tersebut, keesokan harinya, pada tanggal 20 Desember 1816 Kandanghaur diserang oleh pasukan dan polisi Belanda dari tiga arah, yaitu dari arah Indramayu, Ujung Losarang, dan Lohbener Wetan.

Kendatipun serangan pasukan Belanda dilancarkan dari berbagai arah, tetapi pengikut Ki Bagus Jabin tidak gentar menghadapinya. Semua serangan ditahan dengan gagah berani. Sementara itu kelompok pengikut Ki Bagus Jabin yang menahan serangan dari arah Indramayu diperbesar jumlahnya dengan tujuan, bukan hanya menahan serangan itu, tetapi menghancurkan mereka dan sekaligus melakukan serangan ke arah Indramayu. Pasukan-pasukan Belanda yang datang dari arah Indramayu berhasil dipukul mundur, sementara tiga

---

<sup>141</sup> Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 95; Nina H. Lubis. *loc. cit.*, hlm. 376.

<sup>142</sup>Lihat Zamzami Amin, *Sejarah Pesantren babakan Ciwaringin dan Perang Nasional Kedondong 1902-1919*, (Cirebon: Penerbit Humaniora, 2019, Cetakan keenam), hlm. 181.

kelompok pasukan lainnya dapat ditahan, sehingga kota Indramayu terancam.<sup>143</sup>

Ketika prajurit-prajurit Ki Bagus Jabin akan menyerang kota Indramayu, tiba-tiba datang bantuan pasukan pemerintah secara serentak dari wilayah Priangan. Pasukan dari Priangan yang dipimpin oleh Residen Priangan W.C. van Motman itu datangnya dari arah Wanayasa (Subang), terus ke Lohbener Kulon, dan sampai di Losarang. Pasukan serdadu Belanda dari Priangan itu dibantu oleh pasukan dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Limbangan di bawah pimpinan bupatinya masing-masing, yaitu R.A. Surianagara dan R.A. Aiwijaya. Pada saat yang bersamaan Pemerintah Kolonial Belanda juga mendatangkan balabantuan pasukan dari Jawa Tengah, berupa 160 orang serdadu Belanda dari detasemen Semarang dan pasukan Bangawan Wetan (Solo) yang dipimpin oleh bupatinya sendiri, R.A. Nitidiningrat.<sup>144</sup>

Dalam situasi seperti itu, kini pasukan perlawanan Ki Bagus Jabin harus menghadapi musuh yang juga datang dari arah belakang yang justru kekuatannya lebih besar. Oleh karena itu maksud untuk menduduki Indramayu dibatalkan, mereka perlu berhadapan dengan pasukan yang datang dari Priangan. Pertempuran hebat pun segera terjadi. Dalam pertempuran tersebut, tampaknya karena faktor kekuatan pasukan yang tidak seimbang, para prajurit Ki Bagus Jabin akhirnya banyak yang terdesak sampai ke pinggir Sungai Cimanuk. Mereka yang akan menyeberangi sungai ke arah timur dan selatan banyak yang terpotong oleh pasukan Belanda dari Cirebon sehingga mereka terkepung rapat.

Dalam pertempuran tersebut, hanya sekitar 25 orang di antara pengikut Ki Bagus Jabin yang berhasil meloloskan diri. Selebihnya sekitar 500 orang dapat ditangkap, 60 orang tewas dalam pertempuran, dan 100 orang mengalami luka-luka berat.

---

<sup>143</sup> Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 95; Nina H. Lubis. *loc. cit.*, hlm. 376.

<sup>144</sup> Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 96; Nina H. Lubis. *loc. cit.*, hlm. 377.

Selanjutnya para tawanan perang dibawa ke Cianjur untuk diadili. Sedangkan korban dari pihak Belanda adalah empat orang serdadu bangsa Belanda dan 11 orang tentara pribumi.<sup>145</sup> Dengan adanya pukulan berat yang disebabkan oleh kekalahan yang diterima kaum perlawanan pimpinan Ki Bagus Jabin di daerah Lohbener itu untuk sementara telah mengakibatkan berhentinya gerakan perlawanan tersebut.

### a) Fase Bulan Januari-Februari 1818

Sesungguhnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat yang berada di wilayah Cirebon tidak berhenti sampai dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Desember 1816 saja. Walaupun korban di pihak gerakan perlawanan telah banyak, baik yang tewas, luka-luka atau pun tertangkap, tetapi gerakan penentangan dan perlawanan yang ditujukan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda terus berlangsung. Hal itu terbukti dengan munculnya kembali gerakan penentangan yang pecah kembali pada tahun 1818. Seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 1818 di wilayah Cirebon telah terjadi dua kali peristiwa yang menggoncangkan Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu peristiwa yang terjadi sekitar bulan Januari - Februari dan sekitar bulan Juli - Agustus 1818.

Pada pertengahan bulan Januari 1818 telah terjadi keributan di Distrik Blandong, Cirebon. Kota Distrik Blandong diserang oleh 116 kaum perlawanan pimpinan Ki Bagus Jabin, Ki Bagus Serit, dan Nairem.<sup>146</sup> Perlawanan rakyat itu secara umum dipimpin oleh Bagus Jabin dan merembet dengan berkembang ke daerah Majalengka yang menjadi perbatasan dengan Priangan. Dalam peristiwa itu Demang Among Pances, kepala Distrik Blandong, dan juru tulisnya terbunuh. Pengikut Ki Bagus Jabin

---

<sup>145</sup> Rd. Asik Natanegara, *loc. cit.*, hlm. 96; Nina H. Lubis. *loc. cit.*, hlm. 377

<sup>146</sup>Nairem adalah seorang demang di desa Padagangan, Distrik Indramayu. Ia pernah menjadi pengikut Ki Bagus Rangin, dalam gerakan penentangan dan perlawanan pada tahun 1811

yang melakukan kegiatan itu berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka berkedudukan di Kedondong.<sup>147</sup>

Terkait sebab-sebab terjadinya perlawanan yang terjadi Distrik Blandong tersebut, menurut Residen Cirebon, W. N. Servatius, ia pun belum bisa memberikan jawaban secara pasti. Ia hanya menjelaskan bahwa para pejuang seringkali mempengaruhi para kepala desa agar para kepala desa memihaknya. Ajakan tersebut tampaknya tidak sia-sia. Meski banyak para kepala desa yang berusaha untuk menghindari pengaruh para kelompok perlawanan, namun banyak juga di antara mereka yang memperkuat barisan. Tampaknya baru menjelang akhir Januari, diperoleh titik terang informasi bahwa dalam perlawanan tersebut terdapat nama-nama baru sebagai tokoh yang mengangkat senjata.<sup>148</sup>

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 23-24 Januari 1818 kaum perlawanan itu menyerbu Palimanan, sebuah kota kecil di sebelah barat kota Cirebon. Mereka berhasil mendobrak penjara yang ada di kota itu dan membebaskan rekan mereka yang berada di dalamnya. Selain itu jembatan-jembatan yang menuju ke kota itu dihancurkan. Pada tanggal 27 Januari 1818 juga kaum perlawanan melancarkan serangan ke Rajagaluh, yang terletak di Majalengka dan desa-desa di sekitarnya, seperti Banjaran dan juga Palimanan. Dalam penyerangan itu sejumlah rumah dibakar, antara lain rumah Residen di Rajagaluh dan rumah Prudent<sup>149</sup> di Banyaran.<sup>150</sup>

Setelah memperoleh laporan pertama tentang munculnya perlawanan itu, Residen Cirebon, W. N. Servatius segera mengutus Raden Adipati Nitidiningrat dan Prudent, yang

---

<sup>147</sup>H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hal. 18.

<sup>148</sup>Lihat Zamzami Amin, *loc. cit.*, 183.

<sup>149</sup>Menurut Zamzami Amin, nama Prudent pada saat itu sudah dikenal sebagai orang yang disegani dan sanggup mempertahankan nama baiknya. Menurut informasi tempat kediamannya seringkali diserbu para pejuang, namun ia selalu bisa menyelamatkan diri. Ia merupakan opsiner kehutanan Banyaran. Lihat Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 183.

<sup>150</sup>H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 18.; Edi S. Ekajati, *loc. cit.*, hlm. 116.

masing-masing merupakan Bupati Bengawan Wetan dan opsiner kehutanan Banyaran, untuk pergi ke daerah yang melakukan perlawanan sebagai pendamai. Selain itu, W. N. Servatius juga mengutus Bupati Linggarjati ke sana yang dalam surat perintahnya disebutkan menginformasikan bahwa kondisi di Blandong, Rajagaluh dan Palimanan sudah mencemaskan dan gawat sekali. Namun demikian, ketiganya tidak mampu menghadapi gerakan para pejuang perlawanan rakyat itu dan akhirnya menyingkir. Bahkan Raden Adipati Nitidiningrat<sup>151</sup> terbunuh beserta dua orang mantrinya dalam misi pendamaian itu.<sup>152</sup> Dalam peristiwa ini pihak Belanda juga telah kehilangan tiga orang perwira yaitu Letnan van Hoorn, Letnan Wesel, dan Kapten Kalberg. Perwira ini menurut anak buahnya yang masih hidup mereka terbunuh oleh pasukan Ki Bagus Rangan, Ki Bagus Jabin, Ki Bagus Serit. Termasuk 50 orang prajurit Belanda yang tenggelam di sungai Ciwaringin Cirebon.<sup>153</sup>

Dalam peristiwa itu Opsier Prudent berhasil melarikan diri, namun asisten Residen Cirebon, Heydenreich membuat langkah yang sangat berbahaya dengan menunggang kuda bersama 60 orang pembantunya tanpa diiringi tentara justru menyerbu tempat-tempat yang diduga menjadi basis kelompok perlawanan. Ia mendapat serangan yang berlangsung tiba-tiba, dan pada tanggal 27 Januari 1818 mayatnya ditemukan di sekitar Rajagaluh dalam kondisi terbunuh. Ia telah menjadi korban “kepolosannya” sendiri dalam memikul beban berat yang sangat berbahaya. Dengan melihat kondisi

---

<sup>151</sup> Menurut Zamzami Amin, sosok Bupati Raden Adipati Nitidiningrat adalah seorang bupati yang telah beruban, usianya sekitar 70 tahun, dan dihormati semua bawahannya. Nasib malang menimpa Sang Bupati yang sudah sepuh ini. Ia tidak sanggup lagi berhadapan dengan para pejuang dan ia tewas bersama dua orang mantrinya. Keperkasaan Ki Bagus Jabin, Ki Bagus Rangan, Ki Bagus Serit, dan Ki Bagus Kunder telah membuat pasukan yang dipimpin Bupati Bengawan Wetan ini kocak-kacir. Lihat Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 183.

<sup>152</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 16; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 378.

<sup>153</sup> Laporan van Deventer, *Catatan Panglima Belanda*, hlm. CLXIX-CLXX, 17 September 1818; Lihat Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 183.

seperti ini, berangkat dari alasan bahwa para pemberontak telah begitu berani melakukan gerakannya. W. N. Servatius, sebagai Residen Cirebon segera mengambil keputusan untuk melakukan tindakan militer.<sup>154</sup>

Tidak hanya Residen Cirebon, setelah mengetahui peristiwa perlawanan tersebut, Residen Priangan yaitu Van Motman pun segera berangkat menuju perbatasan untuk melindungi gudang-gudang kopi di daerah Tomo dan Karangsembung dengan maksud meneruskan perjalanan ke Cirebon untuk berunding dengan W.N Servatius. Keberangkatan Van Motman ke Cirebon tidak terlaksana karena pasukan rakyat yang melakukan perlawanan telah memutuskan segala perhubungan.

Bupati Sumedang mendapat perintah lagi untuk mengirimkan pasukan bersenjata ke medan perang. Dalam pada itu serdadu-serdadu kembali dikerahkan. Menyikap kondisi yang terjadi di wilayah Cirebon ini, dari Batavia dikirimkan pasukan infantri dari resimen 5 batalyon I yang berkedudukan di Weltevreden (Batavia), kompi pribumi dari batalyon 19 infantri, dan 36 orang pasukan artileri berikut dua pucuk meriam di bawah pimpinan Letnan Kolonel Richemont.<sup>155</sup> Seluruh pasukan ini berangkat dari Batavia dengan sebuah kapal tanggal 26 Januari 1818 dan tiba di Cirebon dua hari kemudian. Dalam pada itu, pada tanggal 27 Januari 1818 dari Bogor diberangkatkan pula dua pasukan yang terdiri atas pasukan tombak Benggal untuk pengawalan yang dipimpin Halsuher von Harlach yang diperuntukan membantu Residen Cirebon dan pasukan Hzar /Berkuda (kavaleri) yang beranggotakan 50 orang yang dipimpin oleh Letnan Helberg.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 184.

<sup>155</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 21-22; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 378.

<sup>156</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 21-22; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 379.

Pada tanggal 25 Januari 1818 diperintahkan secara lisan kepada Laksamana Muda Wolterbeek agar memberangkatkan kapal meriam nomor 7 dikirim ke Cirebon di bawah pimpinan Letnan W.H. Hunther serta membawa pesan kilat untuk Residen Cirebon bahwa pasukan bantuan akan segera datang. Selanjutnya, untuk menggempur kelompok perlawanan rakyat, karena dirasa pasukan yang ada belum cukup kuat, untuk memperkuat pasukan ditunggu pasukan bantuan dari Semarang yang akan ditempatkan di Karangsembung sebelum akhirnya dikirim ke medan tempur.<sup>157</sup>

Satu detasemen serdadu Belanda yang berada di Semarang pimpinan Kapten Couvreur diperbantukan pula ke Cirebon. Pasukan-pasukan pemerintah kolonial tersebut ditampung di tiga tempat dahulu sesuai dengan arah datangnya sebelum diberangkatkan menuju medan tempur. Ketiga tempat penampungan itu adalah Karangsembung bagi pasukan yang datang dari Priangan dan Bogor, Cirebon bagi pasukan yang datang dari Batavia dan Semarang, dan Indramayu bagi pasukan yang telah berada di daerah tersebut. Serangan umum terhadap kaum perlawanan akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 1818. Pengiriman pasukan secara besar-besaran ke Cirebon langsung atas perintah Gubernur Jenderal itu dilakukan berhubung dengan perlawanan Ki Bagus Jabin dan kawan-kawan dianggap sangat berbahaya, terutama setelah Asisten Residen Heydenreich dan Bupati R.A. Nitidiningrat tewas disergap mereka.

Sebelumnya, Residen Cirebon dalam suratnya tanggal 30 Januari 1818 memberitahukan bahwa serangan umum pada kaum perlawanan ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1818 dan dengan arogan ia mengatakan bahwa semua permasalahan yang muncul dan terjadi akan diketahuinya setelah berhasil melaksanakan operasi militer. Apa yang disampaikan Residen Cirebon tersebut tidak sesuai dengan realitanya, karena ternyata

---

<sup>157</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 27; Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 379.

dalam serangan umum yang dilakukan pada awal bulan Februari yang telah dipersiapkan dengan lengkap itu justru mengalami kekalahan yang disebabkan karena adanya permasalahan pemegang komando yang kemudian berdampak buruk pada mental dan kedisiplinan pasukannya.<sup>158</sup>

Sebagai informasi, ketika pasukan Pemerintah Kolonial Belanda menunggu kedatangan semua rekannya dan perintah penyerangan. Kelompok-kelompok pasukan perlawanan telah meningkatkan kegiatan mereka dengan melakukan penyerbuan terhadap beberapa desa di sekitar Kedondong. Mereka telah menguasai jalan raya Sumedang - Cirebon di sekitar Palimanan, sehingga Residen Priangan van Motman harus menempuh jalan lain untuk sampai ke Cirebon dari Karang Sembung. Para pengikut Ki Bagus Jabin bermaksud untuk menyeberang (Priangan), tapi dapat segera dicegah oleh pasukan Belanda. Begitu pula mereka telah bergerak untuk menyerang Sindangkasih, dekat kota Majalengka sekarang. Pasukan Benggal terpaksa diberangkatkan ke tempat yang akan menjadi sasaran serangan untuk mencegahnya.<sup>159</sup>

Pada tanggal 1 Februari 1818 pasukan Belanda mulai bergerak dari Cirebon menuju Desa Jamblang. Pada hari berikutnya serangan umum ke pusat kedudukan kaum perlawanan di Kedondong telah diputuskan akan dilaksanakan. Tetapi keputusan tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan, karena terjadi penggantian Komandan Operasi dari Letkol Richemont yang diangkat oleh Gubernur Jenderal kepada Letkol Hoorn yang diangkat oleh Panglima Pasukan Belanda.

Adanya penggantian pimpinan pasukan tersebut tampaknya telah berakibat kepada, selain timbulnya perasaan tidak puas, juga telah mengakibatkan disiplin para pasukan kolonial Belanda mengalami kemerosotan. Sejumlah tentara kolonial Belanda, termasuk pimpinan kelompok pasukannya,

---

<sup>158</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 380.

<sup>159</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 380.

mengabaikan tugas mereka dan bahkan meninggalkan medan tempur. Hal ini terjadi seperti yang diperlihatkan oleh Kapten Mulder Letnan Van Steenis, Kapten Van Gent yang diberi tugas mengepung dan menyerang Kedondong. Akibatnya semua rencana penyerangan itu mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Bahkan sebaliknya pasukan Belanda berhasil dikocar-kacirkan oleh serangan pengikut Ki Bagus Jabin dan Nairem.<sup>160</sup>

Pasukan Belanda kemudian melarikan diri ke Palimanan, tetapi terus dikejar oleh pasukan perlawanan. Dalam peristiwa tersebut Letnan Van Hoorn, Letnan Wessel, dan Kapten Kalberg menjadi korban. Namun demikian, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Residen Cirebon tanggal 4 Februari 1818, terdapat sebuah berita yang menarik dan kontradiktif yang menyudutkan keberadaan pasukan pribumi yang membantunya yang menyatakan bahwa kekalahan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap pengecut dari pasukan pribumi dan pasukan Madura yang lari dari medan pertempuran sebelum melepaskan tembakan.<sup>161</sup>

Kekalahan pasukan Belanda dapat ditolong dengan majunya pasukan Benggal dan pasukan berkuda pimpinan Letnan Borneman dan Kapten Elout. Walaupun tidak sepenuhnya, pada tanggal 9 Februari 1818 gerak maju pasukan perlawanan dapat dihentikan oleh pasukan Benggal dan pasukan berkuda, bahkan kemudian para pengikut Ki Bagus Jabin itu dapat didesak mundur sampai ke seberang Sungai Karu, anak Sungai Cimanuk. Selanjutnya, untuk meningkatkan semangat tempur dan harapan untuk mencapai kemenangan serdadu-serdadunya, Pemerintah Kolonial Belanda membuat pengumuman akan memberi hadiah 500 Sp. M. bagi siapa saja yang dapat menangkap dan menyerahkan hidup-hidup

---

<sup>160</sup> H. van Der Kemp, loc. cit., hlm. 30.

<sup>161</sup> H. van Der Kemp, loc. cit., hlm. 30.

tokoh pemimpin perlawanan terpenting, 250 Sp. M. bagi yang dapat menyerahkan seorang pemimpin perlawanan, dan 1 00 Sp. M. bagi yang dapat menyerahkan anggota kaum perlawanan.<sup>162</sup>

Operasi pasukan Belanda terus ditingkatkan dan diperluas wilayah operasinya serta kekuatannya pun ditambah. Pada tanggal 13 Februari 1818 kekuatan inti pasukan perlawanan berhasil diceraikan-beraikan, daerah-daerah yang pada awalnya memihak kaum perlawanan dapat ditertibkan kembali, dan jalan raya dapat diamankan lagi. Sementara itu, pemimpin perlawanan Nairem dapat ditangkap pada tanggal 25 Februari 1818.

Pada bulan Maret 1818 keadaan daerah Rajagaluh, Kedondong, dan Palimanan telah kembali bebas dari gangguan kaum perlawanan. Untuk menjaga keamanan daerah itu dibangunlah markas militer yang akan ditempati oleh sejumlah pasukan di Palimanan, Kedondong dan Indramayu.

## **b) Fase bulan Juli-Agustus 1818**

Anggapan, bahwa semangat perlawanan telah padam dan perlawanan rakyat di daerah Cirebon telah lenyap sama sekali seperti yang dinyatakan dalam laporan pejabat setempat pemerintah kolonial terhadap atasannya, ternyata tidak benar. Sebagai bukti dari ketidakbenaran berita tersebut, pada awal Juli 1818 diberitakan adanya kegiatan sekelompok rakyat di daerah Talaga, Majalengka yang bertindak dengan menjurus ke arah timbulnya perlawanan lagi. Pada waktu itu seorang yang menamakan diri Rama Gusti mengumpulkan pengikut di daerah Ciputri dengan tujuan melakukan gerakan perlawanan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Ketika akan ditangkap, ia berhasil meloloskan diri, namun pada akhirnya dapat ditangkap pula. Gerakan perlawanan yang dilakukan Rama Gusti dapat dikendalikan, dan tidak menjalar ke mana-mana. Kendatipun demikian, pada fase ini kemunculan gerakan perlawanan yang

---

<sup>162</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 381.  
270 | Geger Ciayumajakuning

dianggap paling berbahaya ialah bangkit dan munculnya kembali tokoh Ki Bagus Serit yang sudah berhasil mengumpulkan 50 orang pengikut bersenjata di daerah Keraton Babadan. Ia bahkan berhasil menghindari sewaktu polisi akan menangkapnya. Ia kemudian mengajak penduduk yang berada di daerah-daerah yang lain untuk bergabung dalam barisan perjuangannya.<sup>163</sup>

Pada tanggal 6 Agustus 1818 kaum perlawanan melakukan serangan ke Palimanan. Mereka merusakkan kompleks bangunan untuk pertahanan Belanda yang sedang dibangun, merampas pakaian dan persenjataan tentara Belanda yang disimpan di kompleks bangunan itu. Dinding gardu yang sedang dalam proses pembangunan diserbu dan mereka berhasil merebut sebagian dari persenjataan. Pasukan pelopor Belanda yang bersiaga di sana merasa gentar dan mundur ke Kali Tanjung karena takut berhadapan dengan para penyerang. Namun kemudian, pasukan perlawanan juga mundur setelah Krieger datang dan mengerahkan pasukannya, sehingga tak ada pasukan perlawanan yang tertangkap termasuk Ki Bagus Serit. Pasukan perlawanan mengundurkan diri kembali, setelah Krieger, Komandan Pasukan Belanda menghimpun kekuatan kembali.<sup>164</sup>

Dalam rangka menyusun kekuatan Ki Bagus Serit pernah mengajak ketiga orang sultan di Cirebon melalui suratnya agar bergabung dengan gerakannya guna membebaskan Cirebon dari genggaman kaum kolonial. Ajakan yang disampaikan Ki Bagus Serit bertepuk sebelah tangan, karena Sultan Sepuh menolak ajakan tersebut. Ia lalu melaporkan ajakan itu kepada pejabat Belanda di Cirebon dan menangkap pembawa suratnya.

Berhubung mobilitas gerakan pengikut perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Serit sangat tinggi, sehingga sulit untuk dihadapi, apalagi ditangkap, maka pemerintah Kolonial Belanda

---

<sup>163</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 381.

<sup>164</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 30.

mengeluarkan pengumuman yang berbunyi, bahwa barang siapa yang dapat menyerahkan pemimpin pemberontak Ki Bagus Serit hidup atau mati akan diberi hadiah oleh pemerintah sebesar F.2.200.<sup>165</sup>

Pada tanggal 8 Agustus 1818 telah terjadi kontak senjata antara pasukan Belanda dengan pasukan perlawanan di dekat desa Sumber. Pasukan Ki Bagus Serit berhasil melemahkan pasukan Pemerintah Kolonial Belanda yang dipimpin J. Franken sekalipun Krieger, Wiros Donso dan lima orang pasukan Benggal yang sempat terkepung oleh pasukan perlawanan pun dapat menyelamatkan diri.<sup>166</sup> Dalam kontak senjata itu pasukan perlawanan berhasil menceraikan musuh menjadi dua kelompok dan hampir dapat membunuh komandan pasukan Belanda yang bernama Kapten Krieger. Namun sayang dalam kontak-kontak senjata selanjutnya pasukan perlawanan mengalami kemunduran.

Keikutsertaan Sultan Sepuh beserta pasukannya dalam peperangan menumpas pasukan gerakan perlawanan telah menambah dan memperkuat pasukan kolonial Belanda. Dalam sebuah pertempuran yang terjadi di daerah Sumber tersebut, akhirnya Ki Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh. Atas keberhasilan ini, Sultan Sepuh mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial. Sementara itu, terhadap sejumlah anggota perlawanan yang tertangkap dilakukan pembuangan ke ebrbagai wilayah. Berdasarkan *Besluit* tanggal 12 Desember 1818 No. 6, ke- 14 orang tahanan dikirim ke Banda untuk bekerja seumur hidup di perusahaan pemerintah, 7 orang tahanan dibuang ke Banyuwangi untuk bekerja di kebun kopi gubernemen.

Sebaliknya, Nairem dan Ki Bagus Serit sendiri, berdasarkan pengadilan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 31 Oktober 1818. Sedangkan para pemimpin perlawanan lainnya

---

<sup>165</sup> Nina H. Lubis, *loc. cit.*, hlm. 382.

<sup>166</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 46

yang bernama Sapie, Lejo, dan Ribut dijatuhi hukuman dera dan dibuang selama 7 tahun pakai rantai.<sup>167</sup>

Seperti inilah uraian rangkaian perjuangan dan patriotisme yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya terhadap pemerintah kolonial yang berkuasa di Hindia Belanda, yang berlangsung selama kurang lebih 16 tahun. Rangkaian peperangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya dalam konteks sekarang di kalangan masyarakat yang berada di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan lebih populer dengan sebutan Perang Kedongdong. Sebenarnya episode perjalanan peperangan yang dilakukan oleh pasukan para pengikut Ki Bagus Rangin belum berakhir. Namun demikian, pertarungan mereka di dalam Perang Kedongdong adalah pertarungan yang paling lama sehingga banyak menghabiskan sumber daya alam dan manusia Cirebon.<sup>168</sup>

Dari keseluruhan jalannya perang yang berkobar di wilayah Cirebon dapat diketahui bahwa kemunculannya gerakan perlawanan rakyat Cirebon cukup gigih ini bisa jadi karena masih adanya pemimpin kharismatik serta manunggalnya petani dan santri Cirebon untuk melawan pemerintah kolonial. Setelah ditangkannya para pejuang dapat dipastikan Belanda semakin merajalela di Cirebon. Hal ini menjadi lebih terbukti bahwa setelah berakhirnya perang tersebut di wilayah Cirebon semakin luasnya Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan kegiatan kerja rodi, penarikan pajak yang sewenang-wenang serta peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang semakin menindas rakyat.<sup>169</sup>

Setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada paruh terakhir tahun 1818 itu, gerakan perlawanan rakyat Cirebon yang

---

<sup>167</sup> H. van Der Kemp, *loc. cit.*, hlm. 47.

<sup>168</sup> Muhamad Mukhtar Zaedin, *loc. cit.*, hlm. 26.

<sup>169</sup> Zamzami Amin, *loc. cit.*, hlm. 198-199.

dikenal dengan istilah “Perang Kedondong” pun berhenti. Namun menurut penuturan Akbarudin, perlawanan rakyat tersebut masih berlanjut setelah peristiwa tahun 1818 itu dan baru berhenti setelah Belanda mengancam akan mengebom makam Sunan Gunung Jati.

Perjalanan Perang Kedondong ini telah melekat di pesantren-pesantren yang ada di wilayah Cirebon. Sebenarnya, di antara kedua pasukan, dalam hal ini pasukan keraton Cirebon dan pasukan Ki Bagus Rangin adalah teman, saudara, dan kerabat dekat. Mereka berperang dan berjuang untuk sebuah kebesaran dan kebebasan yang mereka cita-citakan atas dasar tanggungjawab masing-masing. Demikian, akhir dari perlawanan rakyat Cirebon yang berlangsung selama 16 tahun. Sesudah itu selama abad ke-19 tidak terdengar lagi perlawanan serupa di daerah Cirebon.

### **C. Strategi Perjuangan Ki Bagus Rangin dan Para Pengikutnya di dalam Menentang dan Melawan Pemerintah Kolonial**

#### **1. Menerapkan Strategi Perang *Suluh*/*Gasiran*/*Gerilya* (Serang dan Menghilang)**

Dalam menghadapi musuh, Ki Bagus Rangin dan pasukan santri banyak menggunakan strategi atau gelar perang. Ada dua jenis strategi perang yang dihadapi oleh pasukan Ki Bagus Rangin atau lasykar santri. Jenis strategi perang yang pertama adalah strategi perang *Suluh*/*Gasiran*/*gerilya*. Strategi perang *Suluh*/*Gasiran*/*gerilya* ini dalam cerita perang jaya pernah digunakan oleh Senopatih Aswatama putra Mahadwija Dornacharya. Strategi perang *Suluh*/*Gasiran*/*Gerilya* adalah strategi perang yang dilakukan dengan menyusup ke pusat pertahanan lawan dengan cara menunggu kelengahan lawan,

kemudian lawan diserang dengan cara mendadak, setelah itu pelaku serangan menghilang.<sup>170</sup>

Para pejuang Cirebon sering menggunakan strategi perang *Suluhan/Gasiran* ini untuk melemahkan sistem pertahanan pasukan Pemerintah Kolonial Belanda. Sasaran yang diserang adalah gudang penyimpanan harta benda dan makanan. Harta benda dan makanan yang dicuri dari pemerintahan kolonial Belanda dengan sistem *culturestelsel*-nya diambil kembali oleh para pejuang untuk dibagikan kepada rakyat yang sengsara akibat ulah kompeni ini. Pelaku dari gelar *suluhan/gasiran* ini sering disebut oleh musuh dan masyarakat dengan sebutan *maling durjana*. Ki Bagus Rangin sendiri tidak luput dari julukan itu. Sebagaimana disebutkan dalam naskah *sejarah Wiralodra (Dermayu)* yang mengatakan bahwa:

Anggene jaya durjana // kadang wismanipun //  
putrane purwadinata // saking susah ribute wong Negara  
// wenten malih ingkang warta // tiang ngeraman sampun  
siyagi // makumpulaken tiyang wong desa // bantarjati //  
anang pernahe biawak jatitujuh // tiang kulincar lan panca  
ripis // sesek katahipun tiang // sangking pitungatus //  
juragane bagus kandar Ki Bagus Rangin // surapersanda  
niki // bagus seja lan bagus sena//.<sup>171</sup>

*Suluhan* berasal dari kata *Suluh* yang artinya api yang menyala sebagai obor, yang kemudian dinyalakan secara berjajar di sepanjang jalan wilayah Cirebon. Hal itu untuk menipu, seolah-olah warga Cirebon telah siap menyerang saat malam buta. Untuk semakin meyakinkan, turut disebar ratusan kunang-kunang dari hutan di kegelapan yang bagi Belanda seolah-olah terlihat sebagai rakyat yang maju menyerang.

Taktik perang *Suluhan/Gasiran* cukup efektif dalam memukul mundur musuh. Sebabnya dari obor serta

---

<sup>170</sup> R.A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 7.

<sup>171</sup> R. A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 7.

kunang-kunang yang dilepaskan pejuang, Belanda langsung melepaskan tembakan hingga meriam ke arah obor yang menyala. Di sana pejuang masih terus bersembunyi di balik hutan, sampai peluru dari senjata Belanda habis. Saat suara tembakan, dan meriam sudah tidak terdengar, pasukan rakyat Cirebon lantas balik menyerang dengan menggunakan alat seadanya seperti panah, pisau hingga golok. Seketika pasukan Belanda yang kehabisan senjata lari tunggang langgang.

Perang yang berlangsung selama 16 tahun itu memang tidak terjadi setiap hari, beberapa strategi pun turut digunakan salah satunya adalah taktik perang *suluhan/gasiran* yang tak kalah ampuh dalam membunuh tentara Belanda saat berperang di tengah hutan. Berdasarkan informasi yang disampaikan Zamzami Amin dalam peristiwa itu perang Kedondong pasukan Pemerintah kolonial acapkali dibuat dibuat ketar-ketir, karena adanya taktik Suluhan yang tak tertebak.

Gelar perang *suluhan* adalah gelar perang yang dilakukan pada waktu malam hari. Perang ini pernah dicatat oleh Ki Konjem dan Ki Siti Siwan (1896 - 1946) dalam naskah *Brahmakawi Perang Jaya*. Taktik gelar perang *Suluhan/Gasiran* ini merupakan salah satu taktik yang diadaptasi dari strategi perang dalam lakon wayang Perang Jaya suluhan di mana tokoh andalan Kurawa, Adipati Karna, yang memiliki senjata pusaka untuk membunuh Arjuna dipancing untuk mengeluarkan senjatanya pada target lain sehingga setelah senjatanya habis, Adipati Karna mudah diserang dan dikalahkan.

Pada episode Perang Jaya Suluhan. R. Gatot Kaca merupakan inisiator dari gelar perang ini. Dalam gelar

perang *Suluh* Raden Gatotkaca diperintahkan untuk memancing senopati kurawa, yaitu Adipati Karna untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Senjata Panah Konta wijayadanu dilepaskan Adipati Karna untuk mengakhiri perlawanan Gatot Kaca. Kemenangan atas gugurnya Gatot Kaca disambut gembira oleh pasukan Kurawa. Namun Adipati Karna sangat sedih dengan kemenangannya, sebab keesokan harinya ketika berhadapan dengan Arjuna, yaitu musuh yang lebih penting yang harus dihadapinya, Karna tidak memiliki senjata sakti yang dapat melawan Pasopati. Pasopati adalah senjata milik Arjuna. Di dalam lakon jaya tandingan ini senopati Karna tewas ditangan Arjuna.<sup>172</sup>

Adegan perang dalam lakon Jayasuluh dalam naskah *Brahmakawi Perang Jaya*<sup>173</sup>, berhadapan antara Raden Gatot Kaca dengan Adipati Karna, dalam perang dimalam hari itu, Gatot Kaca memancing agar Adipati Karna mengeluarkan senjata pusaknya. Akhirnya Adipati Karna melepaskan senjata Kontawijayadanu untuk membunuh Gatot Kaca. Gelar perang ini ditiru oleh pasukan Cirebon ketika menyalakan lampu di Situs Pedamaran, kemudian diikuti oleh ribuan kunang-kunang dari kejauhan pemandangan ini dianggap sebagai pasukan obor. Pasukan kolonial Belanda menghabiskan semua amunisinya untuk menyerang kunang-kunang yang dikiranya pasukan obor. Peristiwa yang terjadi di Padamaran itu, kemudian diabadikan oleh Ki Siti Siwan atas perintah Ki Dalang Konjem. Ki Dalang Konjem sendiri adalah salah satu anak

---

<sup>172</sup> R. A. Opan Safari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 10.

<sup>173</sup>Naskah berilustrasi itu, ditulis oleh Ki Siti Siwan pada sekitar Tahun 1896 - 1946

buah Ki Bagus Rangin yang ikut dalam pertempuran di Kedondong.

**Gambar 4.1. Strategi Perang Suluhan/Gasiran yang Dipergunakan Ki Bagus Rangin dalam Menghadapi Pasukan Pemerintah Kolonial**



Sumber : R. A. Opan Safari Hasyim. Tanpa Tahun. "Perjuangan Ki Bagus Rangin Menentang Kolonial Belanda 1805-1818 (Menurut Sumber-sumber Tradisional)". Makalah Seminar, hlm. 12. Gambar berilustrasi itu, ditulis oleh Ki Siti Siwan dari periode tahun 1896 - 1946 M.

Petikan adegan perang di atas yang menggunakan gelar perang *Jaya Suluhan*, juga digunakan oleh para pejuang untuk melawan Belanda. Pada awal Januari 1818 Residen Servatius menugaskan Letnan Veerden berjaga di jembatan Ciwaringin untuk menahan gerakan pemberontak pimpinan Ki Bagus Serit. Pada waktu itu gelap gulita para pejuang menyalakan obor pertama di situs Pedamaran, kemudian dari arah tegalan muncul ribuan kunang-kunang. Kunang-kunang ini terlihat oleh pasukan oleh pasukan kolonial pimpinan Letnan Veerden seperti titik-titik

api. Mereka menduga itu adalah segerombolan pasukan pemberontak yang akan menyerang. Letnan Veerden memerintahkan pasukannya untuk menembak dengan meriam sebanyak 4 kali setelah dentuman meriam itu disusul dengan tembakan, dalam keadaan panik pasukan kompeni terus menembakkan peluru sampai habis. Ketika peluru mereka habis dari arah selatan datang pasukan pejuang yang menyerang mereka dari arah belakang, pasukan kompeni berhamburan lari menuju arah utara, ke arah timur dan barat. Kebetulan tempat itu banyak ditumbuhi pohon tebu. Kemudian para pejuang yang berada di arah tempat pelarian kompeni membakar kebun tebu itu. Tidak ada satupun pasukan kompeni yang selamat dari jebakan para pejuang Cirebon.<sup>174</sup>

Kejadian pertempuran di Pedamaran ini masih dikenang oleh keluarga besar Martasinga, Ciwaringin, dan penduduk sekitar desa Kedongdong. Tempat penyalaan obor pertama disebut *Pedamaran* dan diabadikan menjadi situs Pedamaran. Para pejuang Cirebon seperti Ki Bagus Rangin dan lain-lainnya sangat menguasai medan perang dan strategi perang yang dipelajarinya dari literatur Perang Parit (*Khandaq*) yang diinisiasi Salman Al-Farisi seorang sahabat Nabi Muhammad. Selain itu juga para pemimpin perjuangan di Cirebon juga mempelajari strategi perang yang digunakan dalam Perang Jaya (*Bharatayudha*). Ki Konjem dan Ki Gedog dan tokoh dalang-dalang lainnya adalah seniman yang aktif mensosialisasikan propaganda anti kolonialisme. Oleh karena itu pemerintah kolonial juga pernah memberlakukan larangan kepada para dalang untuk melakukan episode *Bharatayudha* atau lakon *Perang Jaya*.<sup>175</sup>

Strategi perang *Suluhan/Gasiran* pun dilakukan oleh Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya di daerah Kedongdong.

---

<sup>174</sup> R. A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 11

<sup>175</sup> R. A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 11

Ketika pasukan kaum perlawanan telah mengetahui rencana penyerangan yang akan dilakukan pasukan pemerintah kolonial dari mata-matanya, mereka telah siap siaga dan menyusun salah satu strategi perlawanan yakni *suluhan*. Strategi ini digunakan ketika pasukan rakyat yang dipimpin Bagus Jabin melawan pasukan pemerintah kolonial yang dipimpin Letkol Hoorn di Kedongdong. Strategi yang dilakukan pada malam hari ini memanfaatkan kunang-kunang sebagai pengecoh pasukan pemerintah yang ditugaskan berjaga di jembatan Ciwaringin. Pengecohan ini dilakukan agar pasukan lawan mengerahkan semua amunisinya untuk menyerang kunang-kunang yang terlihat seperti “pasukan obor” bagi mereka. Setelah lawan menyadari bahwa amunisinya telah habis dan “pasukan obor” masih bertahan, mereka akan merasa gentar dan putus asa hingga akhirnya mudah diserang oleh pasukan perlawanan yang sebenarnya telah bersembunyi dan bersiap dari arah lain. Dalam perang tersebut Ki Bagus Rangin yang diikuti oleh para pengikutnya telah melakukan perlawanan dengan menggunakan strategi perang *Suluhan/Gasingan* untuk mengelabui Belanda.

Menurut penuturan Opan Safari Hasyim<sup>176</sup> kunang-kunang itu banyak terdapat di sawah-sawah yang telah dipanen. Dan keberadaan kudang-kunang tersebut dimanfaatkan para penggerak perlawanan sebagai salah satu alat strategi perlawanannya. Karena sifat kunang-kunang yang biasanya mendekati cahaya, kemudian dikumpulkanlah kunang-kunang tersebut di daerah Pedamaran dengan menyalakan obor-obor agar terlihat oleh pasukan pemerintah seperti pasukan obor kaum perlawanan. Sehingga pasukan pemerintah terus melancarkan serangan pada “pasukan obor” tersebut hingga mengeluarkan “senjata pusakanya”, meriam, namun pasukan tersebut belum juga tumbang. Setelah semua senjatanya habis,

---

<sup>176</sup> R. A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 11-12.  
280 | Geger Ciayumajakuning

pasukan pemerintah bermaksud melarikan diri namun dari arah belakang pasukan perlawanan telah mengepung dan siap menyerang. Kemudian mereka lari ke barat pun telah dikepung. Akhirnya mereka lari ke sebelah timur yang ternyata mereka justru banyak yang terperosok dalam sungai dan tetap terkepung pasukan perlawanan.

Dalam persiapan semua perlawanan rakyat ini, dimensi ekonomi dan logistik menjadi salah satu perhatian dalam perencanaan strategi karena berperan penting dalam persiapan dan pelaksanaan perlawanan, seperti ketersediaan senjata dan bahan makanan. Mengenai senjata, perlawanan tersebut menggunakan senjata mulai dari senjata tradisional seperti keris dan bedog bahkan alu (alat penumbuk padi) hingga senjata-senjata berupa senapan, tombak, pedang dan meriam. Sementara senjata yang biasa digunakan Bagus Rangin sebagai pemimpin perlawanan yang paling termashur itu adalah sebuah cambuk. Beberapa pedang yang digunakan dalam Perang Kedondong adalah hasil buatan pasukan Sultan Amir Sena Zaenudin di salah satu gua di Sunyaragi, Gua Paron. Ketika putranya, Sultan Muhammad Syafiudin, keluar dari Keraton Kasepuhan, dia membawa serta pasukan dan persenjataannya. Senjata berupa pedang dan cambuk digunakan oleh pemimpin dan pasukan perang yang sudah terlatih. Penggunaan senjata berupa benda tajam yang biasa digunakan sehari-hari merupakan salah satu strategi dalam persenjataan mereka karena pedang yang dibuat tidak sebanyak pasukan rakyat yang ada, hal ini juga dapat dipahami jika dilihat dari latar belakang sebagian besar pasukannya yang terdiri dari masyarakat pedesaan. Sedangkan untuk senjata berupa senapan atau meriam diperoleh dengan melakukan perampasan pada lawan. Selain itu, strategi yang digunakan untuk menyembunyikan senjata yang telah terkumpul untuk digunakan ketika akan melancarkan

perlawanan adalah dengan menguburnya di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Makam senjata itu umumnya berbentuk.<sup>177</sup>

Perang yang berlangsung selama 16 tahun itu memang tidak terjadi setiap hari, beberapa strategi pun turut digunakan salah satunya gerilya yang tak tak kalah ampuh dalam membunuh tentara Belanda saat berperang di tengah hutan. Dalam melancarkan aksi perlawanannya, pejuang perlawanan menggunakan strategi gerilya berbeda-beda dalam setiap penyerangannya. Hal itu membuat pihak Pemerintah Kolonial tidak mudah membaca pergerakan mereka. Pasukan-pasukan Perang Kedondong di antaranya terdiri dari Pasukan Pengawal Raja, Pasukan Santri dan Pasukan Suratani serta pasukan masyarakat Cirebon pada umumnya. Pasukan pengawal raja merupakan pasukan yang berasal dari keraton-keraton Cirebon seperti beberapa Pasukan Keraton Kasepuhan yang dibawa Pangeran Muhammad Syafiudin ketika meninggalkan keraton. Sementara Pasukan Santri merupakan para santri yang telah dibekali kemampuan bela diri di pesantren-pesantren Cirebon. Adapun pasukan Suratani merupakan pasukan yang terdiri dari para petani yang peran utamanya adalah sebagai penyedia bahan makanan ketika pelaksanaan gerakan perlawanan tersebut. Untuk pasukan yang terdiri dari masyarakat sendiri, mereka direkrut dan dilatih oleh kepala desa masing-masing yang sebelumnya para kepala desa telah dilatih oleh para pemimpin perlawanan, seperti Ki Bagus Rangin.<sup>178</sup>

Strategi estafet yang digunakan dalam melatih pasukan rakyat itu merupakan suatu cara yang cukup efektif jika melihat jumlah mereka yang banyak dan tersebar di mana-mana sedangkan waktu yang dimiliki tidak banyak. Sementara itu,

---

<sup>177</sup>Islamiati Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 162.

<sup>178</sup> Islamiati Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 162.

untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan musuh (pihak Pemerintah Kolonial) tanpa diketahui adalah dengan cara spionase. Orang-orang tertentu ditunjuk untuk menjadi mata-mata, namun secara umum masyarakat sekitar berperan sebagai mata-mata kaum perlawanan. Sehingga ketika ada penyerangan mendadak dari pasukan pemerintah dapat segera diantisipasi oleh pasukan perlawanan.<sup>179</sup>

Berbagai unsur masyarakat Cirebon dimanfaatkan dalam gerakan perlawanan ini termasuk budaya masyarakatnya seperti penggunaan pagelaran seni tari tayuban untuk memancing kehadiran musuh dan pemanfaatan kesenian wayang yang digunakan sebagai media penyampaian strategi kepada masyarakat (pasukan) dalam bentuk kisah lakon pewayangan dan sebagai alat propaganda. Beberapa tokoh yang berperan dalam strategi wayang ini adalah Ki Dalang Gedog yang melakukan propaganda di daerah kidulan atau daerah Palimanan dan sekitarnya dan Ki Konjem di daerah Gegesik dan sekitarnya. Pertunjukan wayang tersebut digelar sebelum dan sesudah gerakan perlawanan dilancarkan dengan tujuan untuk mengenalkan strategi yang digunakan dan memberikan rasa bangga pada masyarakat atas perjuangan yang telah dilakukan.<sup>180</sup>

Strategi perang *Suluhan/Gasiran* yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya sangat efektif dan sangat menyulitkan Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda pun semakin kewalahan untuk menghadapinya. Sementara itu, pasukan Belanda yang mulai kewalahan turut menyusun strategi agar pemberontakan kedongdong bisa segera diakhiri. Selama beberapa waktu akhirnya mereka mengamati kelemahan pasukan Cirebon, sampai akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda menemukannya lewat makam Sunan Gunung

---

<sup>179</sup> Islamiati Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 162.

<sup>180</sup> Islamiati Rahayu, *loc. cit.*, hlm. 162.

Jati sebagai tokoh yang paling dihormati di sana. Taktik licik pun disusun, yakni dengan mengancam akan mengebom makam Sunan Gunung Jati ketika para pejuang tidak menghentikan pemberontakannya.<sup>181</sup>

## 2. Menerapkan Strategi Perang *Buaya Mangap*

Strategi perang yang kedua yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan pasukannya di dalam menentang dan melawan pasukan Pemerintah Kolonial Belanda ialah dengan menerapkan strategi perang *Buaya Mangap*. Strategi perang *Buaya Mangap* merupakan strategi perang yang menggabungkan antara kekuatan pasukan gerilya, kesenian tradisional seperti tayub dan kemampuan untuk menyamar dan bersembunyi. Strategi ini dipergunakan dengan cara menaruh janur kuning menuju tenda pasukan. Pada jalan menuju tenda terdapat 20 janur dan pada setiap janur tersebut dijaga oleh tiga orang prajurit. Sementara di sekitar tenda disiapkan prajurit inti yang bersembunyi dan akan keluar jika ada komando.

Strategi perang *Buaya Mangap* dilakukan Ki Bagus Rangin dalam pertempuran di Bantarjati ketika melawan gabungan pasukan kompeni Bekanda dan pasukan Indramayu. Strateginya disusun dengan menempatkan satu kelompok pasukan yang terdiri dari 40 orang untuk menjaga setiap jembatan yang menuju Bantarjati. Ki Bagus Rangin memerintahkan anak buahnya untuk membuat lengkungan janur, memasang umbul-umbul merah dan ranting pohon beringin. Setiap lengkung janur dijaga oleh tiga orang prajurit, ada dua puluh lengkung janur yang dipasang sebelum menuju tenda. Setiap jengkal jarak antara satu tenda dengan yang lainnya dijaga lima puluh prajurit yang tidak terlihat. Ditenda agung inilah pusat kekuatan Ki Bagus Rangin bersembunyi, sedangkan di dalam tenda para penari dan

---

<sup>181</sup><https://www.merdeka.com/jabar/mengenal-suluhan-taktik-perang-warga-cirebon-usir-belanda-pakai-obor-amp-kunang-kunang.html>, Diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 15.05 WIB

penabuh gamelan semuanya adalah prajurit Ki Bagus Rangin sibuk memainkan pertunjukan. Di sekeliling tenda disiapkan parjurit inti yang bersembunyi dan akan keluar menunggu perintah komando. Jebakan bentuk *buaya mangap* ini sangat efektif dalam menghancurkan seluruh kekuatan musuh.<sup>182</sup>

Menurut R.A. Raffan Syafari Hasyim strategi perang yang digunakan oleh Ki Bagus Rangin memiliki kesamaan dengan strategi yang digunakan oleh Sultan Sepuh V Muhammad Syafiuddin Matangaji yang menggunakan strategi perang *Buaya Mangap*, Ki Bagus Rangin memerintahkan anak buahnya untuk memasang lengkungan-lengkungan janur, umbul-umbul merah dan ranting-ranting dari pohon beringin, setiap lengkungan janur dijaga oleh tiga orang prajurit Ki Bagus Rangin, ada sekitar dua puluh lengkungan janur yang dipasang sebelum menuju ke tenda kesenian, antara satu tenda dengan tenda lainnya dijaga sekitar lima puluh pasukan Ki Bagus Rangin yang bersembunyi, di dalam tenda kesenian tersebut para penari dan wiyaga (penabuh gamelan) yang juga merupakan para prajurit Ki Bagus Rangin yang sibuk memainkan keseniannya. Ketika sudah menjelang tengah malam pasukan Ki Bagus Rangin mulai mengadakan serangan, dalam kesempatan tersebut banyak pasukan dari Ngabehi Dalem Indramayu yang memihak Belanda tewas, bahkan patih Indramayu yang bernama Astrasuta juga ikut tewas.<sup>183</sup>

Ketika Patih dan pasukan Indramayu melewati jembatan-jembatan tersebut, mereka diberi penghormatan dan disambut dengan gamelan. Mereka berpikir rakyat masih setia dan mendukung mereka padahal itu merupakan strategi Bagus Rangin untuk mengecoh mereka, karena setelah pasukan Indramayu telah melewati jembatan-jembatan itu lalu jembatan tersebut dihancurkan agar mereka terkepung dan tidak dapat

---

<sup>182</sup>R.A. Opan Syafari Hasyim, *loc.cit.*, hlm. 8.

<sup>183</sup> R.A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.*, hlm. 8

kembali dengan mudah. Kemudian pertempuran antara kedua pasukan tersebut terjadi dan berakhir dengan kemenangan pasukan Bagus Rangin.

Strategi *Buaya Mangap* dipergunakan juga oleh Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya dalam pertempuran di lapangan Jawura. Ki Bagus Rangin pada persiapannya di lapangan Jawura menempatkan pasukannya di bagian utara dari lapangan tersebut, para komandan dari pasukan Ki Bagus Rangin yang bersiap di lapangan Jawura diantara adalah Ki Buyut Merat, Ki Buyut Deisa, Ki Buyut Sena, Ki Buyut Jayakusuma, Ki Buyut Jago, Ki Buyut Teteg, Ki Buyut Huyung, Ki Buyut Bongkok, dan Ki Buyut Jasu. Pasukan Belanda Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Kusumahdinata IX dan Raden Surialaga II melihat umbul-umbul yang dipasang oleh Ki Bagus Rangin di lapangan Jawura kemudian segera membagi pasukannya, untuk menyerang pasukan Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin yang mengetahui pasukan Pemerintah Kolonial Belanda sudah terperangkap dalam jebakannya segera berusaha mengkonsolidasikan kekuatannya untuk memulai serangan terlebih dahulu. Strategi yang ditempuh oleh Ki Bagus Rangin dengan memasang umbul-umbul di lapangan Jawura guna menantang Belanda untuk berperang sangat efektif di dalam menghancurkan kekuatan musuh.

### **3. Menerapkan Strategi Perang *Tutup Kumbu* (Tutup Wadah ikan Hasil Memancing)**

Strategi ketiga yang dipergunakan Ki Bagus Rangin dalam perjuangan menentang Pemerintah Kolonial Belanda adalah dengan menerapkan strategi *Tutup Kumbu*. *Tutup kumbu* adalah wadah ikan hasil tangkapan memancing. Adapun strategi perang *tutup kumbu* adalah strategi gelar perang untuk menjebak musuh dengan cara menjebak musuh agar masuk dalam lingkaran jebakan *tutup kumbu*, sehingga tidak ada yang berhasil keluar dengan selamat.

Strategi perang *Tutup Kumbu* dipergunakan Ki Bagus Rangin dan pasukannya diilhami dari kisah Perang Cakravayu yang digunakan Senopati Kurawa Mahadwija Dornacharya untuk menjebak Abimayu yang kemudian diadopsi oleh para pejuang perlawanan di wilayah Cirebon dalam menjebak pasukan pemerintah kolonial dalam pertempuran di Palebon Tiang.

**Gambar 4.2.**  
**Strategi Perang Tutup Kumbu dari perang Cakravayu yang Dipergunakan Ki Bagus Rangin dalam Menghadapi Pasukan Pemerintah Kolonial**



Sumber : R. A. Opan Safari Hasyim. Tanpa Tahun. "Perjuangan KI Bagus Rangin Menentang Kolonial Belanda 1805-1818 (Menurut Sumber-sumber Tradisional)". Makalah Seminar, hlm. 9. Gambar berilustrasi itu, ditulis oleh Ki Siti Siwan dari periode tahun 1896 - 1946 M.

Menurut Zamzami Amin, gelar perang *Tutup Kumbu* ini sangat efektif menghadapi lawan. Apabila musuh sudah masuk dalam lingkaran jebakan *Tutup Kumbu* sangat sulit untuk berhasil keluar dengan selamat. Strategi perang *Tutup Kumbu* pernah dilakukan oleh Ki Bagus Rangin dan pasukannya

dalam pertempuran yang terjadi di area wilayah yang sekarang bernama Palebon Tiang.<sup>184</sup>

Perlu dikemukakan bahwa ketika Ki Bagus Rangin menerapkan strategi perang *tutup kumbu* di Palebon Tiang yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa yang menjadi pintu masuk sekaligus tutup untuk menjebak musuh adalah sungai Ciwaringin, sedangkan jebakan ada di sekitar tegalan yang sekarang disebut Palebon atau Kebon Tiang. Pada beberapa titik yang telah ditentukan dijaga oleh sekelompok pasukan dan pemimpinnya yaitu Ki Bagus Serit, Kuwu Sarman, Buyut Bala Ngatong dan kelompoknya berada di barisan timur menghadapi pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Mulder. Ki Bagus Rangin, Ki Kuwu Berong, dan Ki Buyut Beber Layar beserta anak buahnya berada di lingkaran utara menghadapi divisi pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Le Couvreur. Ki Bagus Arsitek, Ki Kuwu Raksa Penanga, Ki Buyut Salimudin beserta anak buahnya di lingkaran selatan berperang menghadapi Kapten van Bent dan pasukannya. dan Buyut Kinten Kuwu Ganisem, dan Buyut Singunala berada di sekitar sungai Ciwaringin menghadapi pasukan Belanda pimpinan Letnan Van Steenis.<sup>185</sup>

#### **D. Langkah-langkah Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di dalam Menyelesaikan Gerakan Perlawanan Ki Bagus Rangin**

Hingga di sini, Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris tidak tinggal diam. Menyikapi sejumlah gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan rakyat di wilayah Cirebon sebagai reaksi atas kebijakannya, pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya. Selama dalam kurun waktu 16 tahun,

---

<sup>184</sup> *Palebon tiang* artinya tempat masuknya tentara musuh. Disekitar Palebon ini berdiri suatu monument yang ditumbuhi dua buah pohon jati atau dalam bahasa Cirebon disebut *Jatiro (jati loro)*. Jatiro atau jatira juga berarti sejatinya darah.

<sup>185</sup> R.A. Opan Syafari Hasyim, *loc. cit.* hlm. 9.

Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris berusaha untuk menyelesaikan pergolakan ini, meminjam konsep yang dikemukakan Simel dengan menerapkan pola “sepakat untuk tidak sepakat” mengenai suatu masalah tertentu dan kemudian mereka yakin bahwa hubungan itu tidak didominasi oleh perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Dalam bahasa M. Atho Mudzhar, tampaknya langkah-langkah untuk menyelesaikan pergolakan yang terjadi antara pemerintah kolonial Belanda dan Inggris hanya dapat diakhiri dengan melalui cara perjuangan kalah menang. Artinya di sini gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya hanya dapat diakhiri dengan cara menumpas pemberontakan tersebut sampai titik akhir, sehingga tidak kekuatan-kekuatan lagi yang tersisa.

Hal tersebut, misalnya tercermin dari beberapa langkah yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda: *Pertama*, menurut komisi Thalman, pada tahun 1807 dalam persiapannya menumpas pasukan Bagus Rangin, pemerintah Hindia Belanda telah memerintahkan agar tiap kabupaten di wilayah Priangan dan terutama Kabupaten Sumedang dan Karawang agar mengirimkan pasukannya. Kabupaten Sumedang dan Karawang harus dalam keadaan siaga, karena berbatasan langsung dengan daerah perlawanan. *Kedua*, komandan pasukan dari kedua kabupaten tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang (Pangeran Kusumahdinata) dan Bupati Karawang (R.A. Suryalaga). Kedua pasukan dari Kabupaten Sumedang dan Karawang dibantu oleh pasukan Belanda dari Batavia di bawah pimpinan seorang Mayor, 50 orang upas dan beberapa orang serdadu.<sup>186</sup>

Begitu tiba di perbatasan wilayah Kertajati dan Babakan,<sup>187</sup> pasukan gabungan dari Sumedang dan Karawang melihat

---

<sup>186</sup> F. De Haan, *loc. cit.*, hlm. hlm. 485.

<sup>187</sup> Sekarang daerahnya bernama Babakan Cuyu.

umbul-umbul merah yang dipasang oleh pasukan Bagus Rangin. Melihat hal tersebut, pasukan harus segera berpencar dan sebagai tanda dimulainya perang diawali dengan dentuman Meriam. Perang pun tidak terelakkan di Lapangan Jawura. Namun karena jumlah pasukan pemerintah Hindia Belanda lebih banyak dengan persenjataan lengkap, akhirnya pasukan Ki Bagus Rangin harus mundur teratur. Untuk selanjutnya, Jatitujuh berhasil diblokade Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga pasukan Ki Bagus Rangin ruang geraknya menjadi sempit dan hubungannya terputus. Pasukan Sumedang dapat dikonsolidasi oleh Pangeran Kornel sehingga pasukan Bagus Rangin dapat dipukul mundur sampai ke Desa Panongan.

Sementara itu, gerakan perlawanan di wilayah Cirebon belum selesai. Hal itu, sebagai *efek domino* dari penggantian pemerintahan Hindia Belanda yang jatuh ke tangan Inggris pada 1811. Kesempatan demikian sangat dimanfaatkan oleh Ki Bagus Rangin dan pendukungnya untuk melakukan konsolidasi dan menghimpun kembali kekuatan pasukannya. Namun demikian, pada 9 Januari 1812, Gubernur Jenderal Inggris Raffles memerintahkan Komisaris Couperus yang berkedudukan di Cianjur agar mengumpulkan 500 orang prajurit dari Cianjur yang dipimpin Bupati sendiri untuk dikirimkan ke Karawang. Demikian pula, Bupati Karawang R.A. Suryalaga harus mengirimkan pasukannya ke area gerakan perlawanan rakyat di Bantarjati guna menumpas pasukan Ki Bagus Rangin.

Langkah-langkah perjuangan kalah menang atau sepakat untuk tidak sepakat yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menyelesaikan gerakan perlawanan rakyat di Keresidenan Cirebon, tampak pula saat Ki Bagus Rabin berencana untuk mengadakan serangan ke Indramayu. Secara tiba-tiba dan serentak, pasukan Hindia Belanda tiba di lokasi di bawah pimpinan langsung Residen Priangan, W. C. van Hotman. Pasukan itu tiba melalui arah Subang (Wanayasa) terus masuk ke wilayah Lohbener Kulon sampai ke Losarang. Pasukan tersebut

didukung oleh pasukan Hindia Belanda dari Kabupaten Sumedang di bawah pimpinan Bupati R.A. Adiwijaya. Selain itu, pihak pemerintah Hindia Belanda juga mendatangkan 160 orang tentara dari Jawa Tengah yang berasal dari *Detasemen* Semarang serta pasukan Bengawan Wetan (Solo) dipimpin langsung oleh Bupati R.A. Nitidiningrat.

Dengan demikian, pasukan pemerintah Hindia Belanda menjadi kuat. Bala bantuan datang dari berbagai penjuru dan dalam penyerangannya terhadap pasukan perlawanan Ki Bagus Jabin menghadapi serangan yang hebat. Pertempuran pun kembali tidak bisa dihindari. Pada pertempuran tersebut, pasukan Ki Bagus Jabin mulai terdesak sampai ke pinggir Sungai Cirnanuk. Pada saat yang hampir bersamaan, pasukan yang akan menyebrang sungai ke arah timur dan selatan harus berhadapan dengan pasukan pemerintah Hindia Belanda dari Cirebon.<sup>188</sup>

Langkah-langkah menyelesaikan konfrontasi dengan cara perjuangan kalah menang atau sepakat untuk tidak sepakat yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda dan Inggris dalam menyelesaikan gerakan perlawanan rakyat di Keresidenan Cirebon, tampak pula ketika Residen Priangan, van Motman mendengar peristiwa kerusuhan di Rajagaluh. Tanpa menunggu komando, dalam waktu cepat datang ke daerah Tomo dan Karangsembung. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan gudang-gudang kopi dari serangan kaum perlawanan. Demikian pula atas perintah Gubemur Jendral Hindia Belanda dari beberapa kabupaten segera mengirimkan pasukan secara besar-besaran ke daerah Keresidenan Cirebon. Dari Batavia dikirim sejumlah pasukan infanteri yang berasal dari resimen 5 batalyon 1 yang berkedudukan di Weltevreden. Hal yang sama, kompi pribumi dari batalyon 19 infanteri dan 36 orang pasukan artileri berikut dua buah Meriam dikirim ke wilayah pertempuran di bawah pimpinan Letnan Kolonel Richemont. Keseluruhan

---

<sup>188</sup>Edi S. Ekadjati, *loc. cit.*, , hlm. 115.

pasukan dan peralatan perang yang dibawa dari Batavia diangkut dengan sebuah kapal pada tanggal 26 Januari 1818 dan tiba di Cirebon dua hari kemudian.<sup>189</sup>

Sehari sebelumnya, yaitu tanggal 25 Januari 1818 kapal meriam nomor 7 dikirim ke Cirebon dipimpin Letnan W. H. Hunther. Dari Semarang satu detasemen serdadu Belanda pimpinan Kapten Couvreur diperbantukan pula ke wilayah Keresidenan Cirebon. Pada tanggal 27 Januari 1818, dua pasukan dari Bogor terdiri atas pasukan Benggal dan pasukan berkuda di bawah pimpinan Halshuher van Harloch dikirim juga ke wilayah pertempuran Keresidenan Cirebon. Pasukan-pasukan pemerintahan Hindia Belanda ditampung di tiga tempat sesuai dengan arah datangnya sebelum dikirim ke area pertempuran. Ketiga tempat penampungan dimaksud adalah: *Pertama*, Karangsambung untuk pasukan yang datang dari Priangan dan Bogor. *Kedua*, Cirebon untuk pasukan yang datang dari Batavia, Semarang, dan Indramayu bagi pasukan yang telah berada di wilayah tersebut. Direncanakan, serangan akan dilaksanakan pada 2 Februari 1818. Pihak pemerintah Hindia Belanda sangat berhati-hati, dalam pandangannya bahwa pasukan gerakan perlawanan di bawah pimpinan Ki Bagus Jabin sangat berbahaya. Benar saja, bahwa pada pertempuran melawan pasukan Ki Bagus Jabin, van Hooru, Letnan Wessel, dan Kapten Kalberg menjadi korban. Beruntung ketidakberdayaan pasukan pemerintah Hindia Belanda segera dapat ditolong oleh pasukan Benggal dan pasukan berkuda di bawah pimpinan Letnan Borneman dan Kapten Elout. Pasukan gabungan mereka dapat menghentikan pasukan Ki Bagus Jabin, hingga dipaksa mundur ke seberang sungai Karu, anak sungai Cimanuk.

Untuk meningkatkan semangat pasukannya pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat sayembara dengan memberi hadiah sebesar bagi yang bisa menangkap hidup-hidup

---

<sup>189</sup>Edi S. Ekadjati, *loc. cit.*, hlm. 117.

pemimpin perlawanan terpenting; menyerahkan pemimpin perlawanan, dan siapa saja yang dapat menyerahkan anggota pasukan perlawanan.<sup>190</sup> Setelah pasukan pemerintah Hindia Belanda kembali pulih kekuatannya, desa-desa dan jalan-jalan yang semula dikuasai pasukan gerakan perlawanan dapat diambilalih kembali. Dengan demikian, pada 25 Februari 1818, pimpinan gerakan perlawanan Ki Bagus Nairem dapat ditangkap. Dengan demikian, daerah Rajagaluh, Kedongdong, dan Palimanan menjadi aman dari gangguan kaum gerakan perlawanan. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan di daerah-daerah itu dibangun markas militer dan ditempatkan pasukan dari Palimanan, Kedongdong, dan Indramayu.

Agaknya gerakan perlawanan rakyat Cirebon belum benar-benar dapat dihentikan. Di dekat Desa Sumber, pada 8 Agustus 1818 terjadi lagi pertempuran antara pemerintah Hindia Belanda dan gerakan perlawanan rakyat dan berhasil menghancurkan pasukan pemerintah Hindia Belanda. Kali ini, pasukan pemerintah Hindia Belanda segera mendapat bantuan dari pasukan Sultan Sepuh. Akhirnya dalam kontak senjata tersebut Ki Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh dan atas keberhasilannya Sultan Sepuh mendapat hadiah penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda. Demikian akhir dari gerakan perlawanan rakyat Cirebon terhadap pemerintah Hindia Belanda yang dapat bertahan selama kurang lebih 16 tahun.

### **E. Dampak Kemunculan Gerakan Pemberontakan Ki Bagus Rangin terhadap Perkembangan Sosial-Politik dan Ekonomi di Wilayah Keresidenan Cirebon dan sekitarnya**

Terjadinya konflik atau konfrontasi yang terjadi antara Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di satu sisi versus rakyat yang berada di wilayah keresiden Cirebon yang dipimpin

---

<sup>190</sup>Edi S. Ekdjati, *loc. cit.*, hlm. 119.

Ki Bagus Rangin telah memberikan pengaruh tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Belanda dan Inggris, tetapi juga dirasakan oleh rakyat yang berada di wilayah Keresidenan Cirebon dan sekitarnya. Dapat dikatakan, di kalangan rakyat dan Pemerintah Kolonial Belanda serta Inggris, telah dibuat 'gêgêr' oleh gerakan itu. *Gêgêr* gerakan perlawanan itu meliputi wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bahkan daerah-daerah di sekitar wilayah tersebut. *Gêgêr* itu paling tidak dapat dilihat pada aspek sosial, ekonomi, dan politik sebagai berikut:

## 1. Dampak Sosial

Pada pembahasan ini dikemukakan beberapa peristiwa sosial yang berujung pada gerakan perlawanan rakyat terhadap pemerintah Kolonial Belanda di wilayah Keresidenan Cirebon. Beberapa peristiwa sosial tersebut ditengarai sebagai dampak dari terlalu ikut campurnya pemerintah Kolonial (VOC, Belanda, dan Inggris) terhadap kebijakan Kesultanan Cirebon. Dilihat dari dampak sosial, beberapa peristiwa sosial tersebut dapat dirinci, sebagai berikut:

### a) Kekecewaan Rakyat atas Pengangkatan Putra Mahkota

Sukses di Kesultanan Cirebon umumnya berjalan lancar sampai masa pemerintahan Sultan Anom IV. Namun ketika pergantian pemerintahan untuk pengangkatan Sultan berikutnya (Sultan Anom V) terjadi persoalan.<sup>191</sup> Pada tahun 1798, Sultan Kanoman mendahulukan putra kesayangannya yang tidak sah melampaui putra sahnya untuk duduk dalam kursi kesultanan. Penobatan itu menuai konflik, karena Sultan Kanoman telah melanggar tradisi, bahwa seorang yang berhak menduduki tahta Sultan adalah pewaris yang sah dari perkawinan. Namun Sultan Kanoman melanggarnya dengan menaikkan putra yang tidak sah menduduki tahta Sultan.<sup>192</sup> Keputusan itu menjadi perhatian bagi keluarga kerajaan dan sangat menyakitkan bagi para bangsawan

---

<sup>191</sup>Yanti, *Keraton-Keraton di Indonesia*, (Jakarta: Ghina Walafafa, 2011), hlm. 105.

<sup>192</sup>Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia, op.cit, hlm. 59.

dan pemuka Cirebon. Mereka sangat terpuakul atas keputusan Sultan Kanoman dan menimbulkan pertentangan. Reaksi yang ditimbulkan masyarakat dan para bangsawan kerajaan adalah sebagai rasa *empati* mereka kepada ahli waris yang sah yang seharusnya menduduki tahta Sultan. Mereka mengajukan protes atas kejadian tersebut. Bahkan orang-orang dari Kasepuhan ikut mempersoalkan putra yang telah dicabut hak warisnya. Pada peristiwa tersebut, titik sumbu konflik terletak pada pencabutan hak waris antara semua kelas, bukan persoalan sah atau tidak sahnya seorang yang duduk menjadi pemimpin.

### **b) Terjadinya Kelaparan di Wilayah Keresidenan Cirebon**

Di tengah kemajuan kebudayaan istana Cirebon pada abad ke-18 dan 19, rakyat dapat dikatakan tidak merasakan kesejahteraan sama sekali dari perubahan kehidupan di Keresidenan Cirebon. Meskipun terjadi perubahan kebudayaan mengarah ke yang lebih maju, rakyat Cirebon dilanda bencana kelaparan di mana-mana. Dapat dicatat, pada tahun-tahun 1719, 1721, 1756, 1757, 1773, 1775, 1776, 1792, dan 1812 merupakan kehidupan yang sulit bagi rakyat Cirebon dengan adanya bencana kelaparan di wilayah mereka.<sup>193</sup> Dalam laporan tahun 1765 disebutkan, bahwa tidak ada perdagangan di antara kaum pribumi, karena mereka menjadi miskin dan bahkan kekayaan mereka dirampas habis oleh pemerintah Kompeni akibat eksploitasi dan bencana alam. Pada tahun 1773 dan 1775, di Wilayah Cirebon terjadi wabah yang mengerikan. Terhitung setiap hari 50 orang meninggal dunia. Berbagai penyakit mewabah. Penyakit pes merajalela di masyarakat. Situasi itu terjadi antara tahun 1853 sampai 1855.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup>Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia, op.cit, hlm. 57.

<sup>194</sup>ibid., hlm. 57-58.

## 2. Dampak Politik

### a) Hilangnya Kekuasaan Sultan

Menurun dan bahkan hilang kekuasaan Sultan mulai dirasakan ketika VOC melakukan perjanjian dengan pihak keraton, tanggal 7 Januari 1681. Perjanjian itu merupakan titik balik kekuasaan sultan atas wilayah Cirebon. Perjanjian antara VOC dengan para Sultan Cirebon berlanjut dengan perjanjian tahun 1752. Melalui perjanjian itu, pihak VOC memberlakukan peraturan tentang pergantian sultan. Hal tersebut membuat kedudukan sultan semakin lemah.<sup>195</sup> Kekuasaan sultan tidak lagi dominan dalam urusan mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Cirebon. Kekuasaan kesultanan bukan lagi menjadi prioritas, melainkan lebih berorientasi ke dalam mengatur kesenian, keagamaan, dan kebudayaan. Masih melalui perjanjian itu, kesultanan tidak diberi ruang gerak oleh VOC, Belanda dan Inggris untuk menjalankan roda pemerintahan. Kesultanan hidup dengan aturan-aturan yang diikat oleh pemerintah mereka. Meskipun kehadiran sultan tetap ada, namun kepemimpinannya hanya dijadikan sebagai simbol. Bahkan pada masa-masa selanjutnya posisi sultan diubah menjadi bupati yang mendapat gaji. Dengan demikian, posisi sultan tidak lebih dari petugas pemerintah Belanda dan Inggris.

### b) Munculnya Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon

Selama bertahun-tahun Kompeni menjadi penguasa di Cirebon, sudah banyak terjadi pertentangan dan gangguan stabilitas masyarakat. Rakyat merasakan kesengsaraan akibat perbuatan Kompeni yang kejam. Hal ini menyebabkan huru-hara dan kekacauan yang berlangsung selama belasan tahun. Puncak meledaknya amarah masyarakat Cirebon terjadi pada tahun 1802, berupa gerakan perlawanan rakyat menentang Belanda beserta kaki tangannya. Sasaran utama dari gerakan

---

<sup>195</sup>H.J. de Graaf, dkk, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 134.

perlawanan rakyat Cirebon ialah orang Tionghoa. Alasannya, karena mereka dianggap sangat memeras dan menghisap tenaga rakyat. Ketidakpuasan rakyat Cirebon pada waktu itu mendesak pemimpin pemberontakan untuk segera melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial. Perlawanan tidak hanya ditujukan untuk pihak kolonial saja, melainkan juga terhadap etnis Tionghoa yang dianggap sebagai kaki tangan kolonial.<sup>196</sup> Ketika terjadi kerusuhan di Cirebon yang didasarkan atas pemerasan rakyat oleh orang-orang Tionghoa, disaat itu pulalah pemimpin mengutus kepada Ki Ngabehi Dipamanggala, untuk menghimpun ataupun melindungi rakyat dari para kuwu Cirebon di Kasepuhan dan orang-orang Tionghoa.<sup>197</sup> Akibat perlawanan rakyat Cirebon ini orang-orang Tionghoa banyak yang mati terbunuh dan diusir dari daerah Cirebon, misalnya di Palimanan, Lohbener, Darmayu, dan sebagainya.

Rakyat Cirebon melakukan perlawanan terhadap orang Tionghoa, Belanda, dan penguasa kesultanan yang memihak kepada Belanda. Mereka memberontak karena kehidupan ekonominya diganggu dan tenaga rakyat diperas oleh golongan Tionghoa, golongan feodal (kesultanan), dan Belanda. Gerakan perlawanan rakyat pertama ini tidak berhasil dipadamkan oleh pemerintah Belanda. Bahkan dari kehidupan social-ekonomi yang semakin buruk tersebut justru melahirkan kekuatan perlawanan yang lebih besar lagi yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin.<sup>198</sup> Perjuangan Ki Bagus Rangin beserta pasukannya semakin memperkuat pembuktian, bahwa sejak dahulu rakyat Cirebon sangat anti penjajahan dan penindasan, bahkan

---

<sup>196</sup>Herni Purnaningsih & Agus Mulyana, "Perlawanan Bagus Rangin: Perang Nasional yang Terlupakan" Dalam *Jurnal Vactum* (Vol. 6, No. 1, April 2017), hlm. 88.

<sup>197</sup>Arsip Keraton Kasepuhan Cirebon, Surat Perjanjian dengan VOC, 1782.

<sup>198</sup>Van Der Kemp P.H., *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), hlm. 25.

mampu menghancurkan keangkaramurkaan dalam berbagai bentuk.<sup>199</sup>

### c) Terancamnya Stabilitas Pemerintahan.

Perjuangan perlawanan terhadap pemerintah VOC, Belanda, dan Inggris diawali dengan memprovokasi stabilitas keamanan daerah yang merupakan tugas koordinator daerah. Pekerjaan selanjutnya adalah merekrut para kuwu di wilayah-wilayah Cirebon agar turut bergabung dalam gerakan perlawanan tersebut.<sup>200</sup> *Al-hasil*, berbagai gerakan perlawanan rakyat berupa huru-hara terbuka pun pecah secara sporadis di wilayah-wilayah Cirebon. Berdasarkan *kala mangsa*, hal itu dimulai sejak tahun 1802. Gerakan perlawanan yang berupa huru-hara tersebut mungkin dilakukan *wong* Cirebon dengan maksud untuk menunjukkan bahwa rakyat Cirebon mempunyai kekuatan dan keberanian untuk melawan.

Sasaran pertama dari gerakan perlawanan tersebut adalah orang-orang Tionghoa yang mereka anggap sebagai penyewa tanah dan pemerias rakyat. Dalam gerakan perlawanan itu, orang-orang Tionghoa banyak yang dibunuh dan diusir dari wilayah Cirebon. Gerakan itu semakin hari semakin meluas, tidak hanya di satu wilayah, akan tetapi di beberapa titik wilayah Cirebon. Sebut saja misalnya gerakan perlawanan rakyat yang terjadi di Palimanan, Lohbener, Indramayu dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya.<sup>201</sup> Selain itu, gerakan perlawanan juga dilancarkan dalam bentuk penyerbuan dan perampokan pada gudang-gudang penyimpanan harta benda dan makanan. Barang-barang

---

<sup>199</sup>T. D. Sudjana, dkk, *Legenda Cirebon: Cerita Tentang Asal-Usul Tokoh Peristiwa*, (Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, 2006), hlm. 162.

<sup>200</sup>Berdasarkan pemaparan materi oleh Bapak Opan Safari dalam Seminar Sejarah dengan tema “Menarik Benang Merah Perang Kedondong dan Pengaruhnya dalam Sejarah Nasional” pada tanggal 17 Februari 2016 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon di gedung Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon lantai 3. Ia merupakan salah satu dosen di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan merupakan tokoh budayawan Cirebon.

<sup>201</sup>Edi S. Ekajati, *loc. cit.*, hlm. 100

yang dirampok tersebut terutama yang disinyalir sebagai hasil dari pajak-pajak dan penanaman wajib (tanam paksa) yang diberlakukan bagi rakyat. Karena itu, dalam keyakinan pasukan gerakan perlawanan, mereka mengambil kembali barang-barang itu yang merupakan hak mereka sendiri yang kemudian dibagikan kembali kepada rakyat.<sup>202</sup>

Akibat gerakan perlawanan tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengalami kerugian yang cukup besar. Hal yang lebih memberatkan, adalah posisinya sebagai penguasa Cirebon pun turut terancam. Penerimaan pajak serta penjualan wajib hasil bumi menjadi semakin berkurang. Satu-satunya jalan adalah dengan mengupayakan penumpasan gerakan perlawanan rakyat tersebut. Untuk itu, segala upaya dikerahkan oleh residen Cirebon. Pada sisi yang lain, gerakan perlawanan dari rakyat Cirebon tidak kunjung surut. Bahkan semakin hari semakin menunjukkan meluas hingga ke Sumedang dan Karawang. Rakyat dan pejabat di daerah-daerah semakin banyak yang ikut bergabung dalam gerakan perlawanan itu.

Pada tahun 1806, menurut kesaksian Nicholaus Engelhard (Gubernur Pantai Timur Laut Jawa) yang bertugas membasmi gerakan perlawanan rakyat malah menjumpai aktivitas pemerintahan di Cirebon terhenti. Situasi dan kondisi itu seiring banyaknya abdi dalem keraton yang keluar dan bergabung dengan gerakan perlawanan.<sup>203</sup> Gerakan perlawanan rakyat terutama ditujukan kepada orang-orang Tionghoa, Belanda, dan penguasa kesultanan yang memihak kepada pemerintah Hindia Belanda. Kesaksian itu dikuatkan oleh laporan Residen Servatius pada tahun 1817. Disebutkan, bahwa selama berlangsungnya gerakan perlawanan masyarakat Cirebon tahun 1806 penduduk telah membakar seluruh pabrik gula dan membumihanguskan

---

<sup>202</sup>R. A. Opan Safari Hasyim, *loc cit.*, hlm. 10-12.

<sup>203</sup>Ipik Ernaka, *loc. cit.*, hlm. 90.

perkebunan tebu.<sup>204</sup> Kesaksian Nicholaus Engelhard dan laporan Servatius dikuatkan pula oleh laporan Daendels, bahwa korban jiwa akibat gerakan perlawanan masyarakat Cirebon diperkirakan mencapai 1/5 (satu perlima) jumlah penduduk Cirebon.<sup>205</sup>

### 3. Dampak Ekonomi

Hal yang sama dalam perkembangan sector ekonomi di wilayah Keresidenan Cirebon. Ikut campurnya pihak VOC yang dilanjutkan oleh pemerintah Belanda dan Inggris dalam kebijakan para Sultan Cirebon membawa dampak, sebagai berikut:

#### a) Munculnya Perbedaan Ideologi Ekonomi

Pada periode kolonial, ada dua tipe yang menjadi penetapan kebijakan politik-ekonomi saat itu, yaitu politik konservatif<sup>206</sup> dan liberal. Kedua kebijakan ini merupakan sistem yang sama-sama dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki wilayah Cirebon. Sistem politik tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masa VOC. Namun terdapat perbedaan berupa sudah adanya usaha yang nampak dari pemerintah Belanda dan Inggris untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi. Sementara pada masa VOC perubahan-perubahan tersebut belum terlihat atau bahkan tidak ada. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada kebijakan yang diterapkan pada masa kepemimpinan Dirk van Hogendorp (1799-1808). Sedangkan untuk ideologi politik ekonomi liberalisme diterapkan oleh Raffles.

---

<sup>204</sup>Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta : LP3ES Jakarta, 1986), hal. 21.

<sup>205</sup>Jan Breman, *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>206</sup>Nyoman Wijaya, *Kekaisaran Kompeni Kecil: Korupsi, Kolusi, Nepotisme Abad 19*, (Yogyakarta: Yayasan Mahavhira, 2001), hlm. 79.

## b) Terjadinya Kemiskinan dan Kejahatan

Pemerintahan di wilayah Keresidenan Cirebon selama kekuasaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), Belanda, dan Inggris menjadi sumber kemiskinan dan kejahatan bagi semua kalangan. Pengangguran terjadi di mana-mana. Sementara penguasa Kompeni hidup dari hasil perasan keringat rakyat. Situasi dan kondisi tersebut menyebabkan munculnya kegelisahan dan gangguan keamanan. Perubahan sedianya bakal terjadi pada masa pemerintahan Daendels dan Raffles. Di tangan Daendels dan Raffles terjadi beberapa perubahan kebijakan di Cirebon. Namun pada saat yang bersamaan terjadi semacam ancaman pemberontakan rakyat. Diawali oleh keadaan yang serba tidak menguntungkan --yang oleh orang Belanda disebut kejahatan dan kerusuhan-- telah menghiasi wilayah Priangan Cirebon sepanjang abad ke-18. Gerombolan-gerombolan perampok atau pemberontakan merajalela. Sulit untuk membedakan antara gerakan politik atau kejahatan. Tidak jarang gerombolan perampok atau pemberontak menghancurkan daerah-daerah Cirebon sampai pada daerah terpencil. *Al-hasil*, pada saat itu terjadi ketidaktentraman di mana-mana. Masyarakat pun menjadi tidak punya pegangan. Pada akhir abad ke-18, ketidakpuasan dan kejahatan menemukan momentumnya. Saking kuatnya gerakan ketidakpuasan dan kejahatan, sehingga membuat *gêgêr* di seantero wilayah Priangan Cirebon, meliputi: Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Terjadinya kemiskinan dan kelaparan semakin parah, karena pasca berakhirnya gerak penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan *drainage politic* (politik pemerasan) di mana Pemerintah Kolonial Belanda mengharuskan penduduk Jawa untuk melaksanakan tanam paksa dengan keharusan melakukan penanaman berbagai pohon yang dibutuhkan di pasaran Eropa

seperti tebu, nila, kopi, teh dan tembakau.<sup>207</sup> Adapun di antara aturan-aturan yang diberlakukan seperti yang dikemukakan oleh Suhartono<sup>208</sup> di antaranya setiap penduduk diharuskan menyediakan 1/5 tanah dari tanah yang dimiliki. Selain itu waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman tidak boleh melebihi dari waktu memelihara tanaman padi.

Penyelenggaraan tanam paksa<sup>209</sup> membawa akibat-akibat buruk bagi rakyat. Kemiskinan terjadi dan diikuti oleh bahaya kelaparan. Daerah yang parah kelaparannya menyebabkan banyak penduduk meninggal, seperti yang terjadi di Demak dan Grobogan. Daerah Demak pada awalnya berpenduduk 336.000 orang tinggal 120.000 orang sedangkan di Grobogan dari 89.500 orang tinggal 9000 orang.<sup>210</sup>

Akibat tanam paksa pada tahun 1840 M timbul peceklik. Harga beras menjadi goyang dengan beberapa kenaikan harga yang tajam. Pada tahun 1843 di Cirebon terjadi kelaparan hebat. Pada tahun 1846-1849 wabah-wabah penyakit berjangkit dan kelaparan meluas di Jawa Tengah. Kepergian penduduk dari desa-desa telah mengakibatkan semakin turunnya hasil pertanian padi.<sup>211</sup>

---

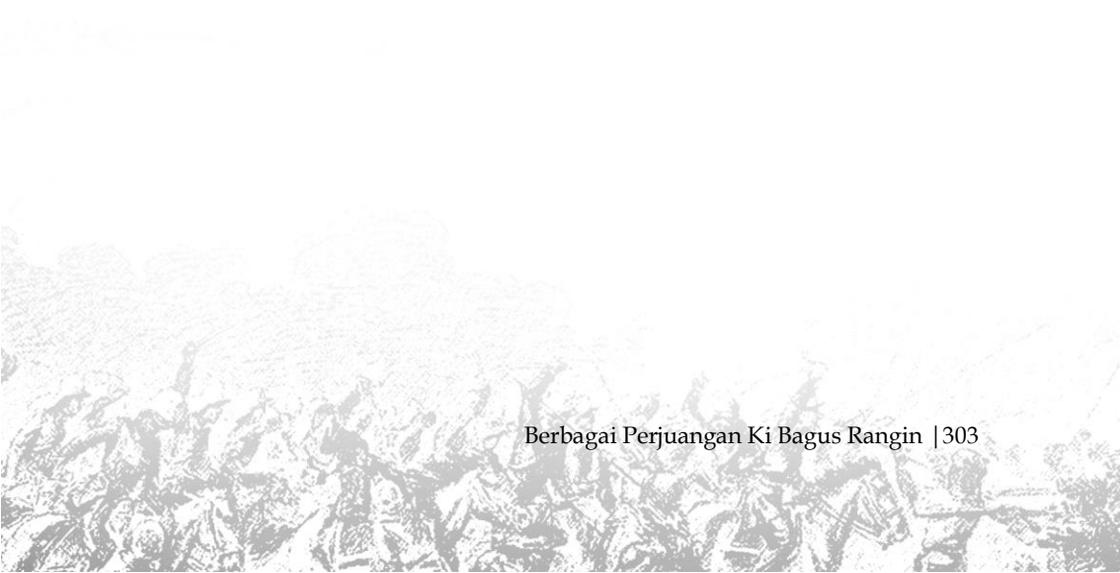
<sup>207</sup> Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid II, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.13-17.

<sup>208</sup>Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 12.

<sup>209</sup>Sampai dengan tahun 1870 dengan adanya kebijakan tanam paksa, Belanda telah mendapatkan keuntungan sebesar 823 juta Gulden. Keuntungan ini telah dipergunakan untuk membangun perdagangan dan pelayaran yang lumpuh, industri yang macet dan memperkaya pemilik pabrik. Slogan yang berbunyi memajukan dan mendidik rakyat tidak berlaku dan hasilnya berbeda dengan kenyataan. Lihat Suhartono, *ibid.*, hlm. 13.

<sup>210</sup>Sartono Kartodirdjo, *loc. cit.*, hlm. 312.

<sup>211</sup>M.C. Ricklefs, *loc. cit.*, hlm. 188.





## | BAB V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Pada abad ke-19, tepatnya dari tahun 1802 sampai dengan tahun 1818 di wilayah Keresidenan Cirebon telah terjadi gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya yang telah menggegerkan masyarakat yang berada di wilayah keresidenan tersebut terutama di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.

Penyebab utama pecahnya gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya memiliki hubungan langsung dengan kebijakan pemerintah kolonial yang banyak mencampuri urusan internal keraton Kesultanan Cirebon, yang diikuti dengan kebijakan yang banyak memberatkan dan menyengsarakan rakyat yang berakhir dengan adanya perlakuan yang dialami penduduk baik di tanah pemerintah maupun di tanah partikelir, sehubungan dengan adanya praktik-praktik penjualan tanah, pemborongan/persewaan monopoli, kerja wajib dan penyetoran wajib yang dipungut dari penduduk yang melibatkan orang-orang Cina.

Ki Bagus Rangin selama hidupnya banyak berperan besar di dalam melawan praktik-praktik ketidakadilan dari Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris. Ia telah mengobarkan semangat perjuangan untuk bersama-sama menentang imperialisme. Ia juga telah merelakan harta, jiwa, dan raganya untuk membela bumi pertiwi ini. Perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di wilayah Keresidenan Cirebon dapat difragmentasikan ke dalam empat

periode. Periode yang pertama, terjadi pada tahun 1802-1808. Periode ini merupakan periode pemerintahan Gubernur Jenderal Johanes Siberg dan Albertus Henricus Wise. Sebagai tokoh utama gerakan ini adalah Ki Bagus Rangin. Periode yang kedua terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels (1809-1811). Tokoh utama gerakan perlawanan pada periode ini masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu Ki Bagus Rangin yang menolak untuk berunding. Periode yang ketiga terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Pada periode ini, gerakan perlawanan masih dipimpin oleh tokoh yang sama, yaitu Ki Bagus Rangin. Kendatipun Ki Bagus Rangin pada tahun 1812 tertangkap dan dihukum mati, namun perjuangannya tetap berjalan dan dilanjutkan oleh para pengikutnya. Periode yang keempat gerakan perlawanan terjadi dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1818. Periode ini merupakan masa pemerintahan Gubernur Jenderal van der Capellen. Pada periode ini dapat dikatakan bahwa gerakan penentangan dan perlawanan banyak dilakukan oleh para pengikut Ki Bagus Rangin, seperti Ki Bagus Serit yang masih memegang spirit perjuangan Ki Bagus Rangin. Periode gerakan perlawanan ini terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung dari tahun 1816 sampai dengan tahun 1817, dan tahap kedua pecah kembali pada tahun 1818. Perlawanan tahap kedua juga yang pecah pada tahun 1818 terjadi dalam dua fase, yaitu yang pertama terjadi pada bulan Januari-Februari tahun 1818 dan kedua, terjadi pada bulan Juli-Agustus tahun

Dalam menghadapi musuh, Ki Bagus Rangin dan pasukannya banyak menggunakan strategi perang. Ada dua jenis strategi perang yang dihadapi oleh pasukan Ki Bagus Rangin. Jenis strategi perang yang pertama adalah strategi perang *Suluhan/Gasiran*/gerilya. Strategi perang yang kedua yang dilakukan Ki Bagus Rangin dan pasukannya di dalam

menentang dan melawan pasukan Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris ialah dengan menerapkan strategi perang *Buaya Mangap*. Strategi perang ketiga yang dipergunakan Ki Bagus Rangin adalah dengan menerapkan strategi perang *Tutup Kumbu*.

Selama dalam kurun waktu 18 tahun Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris berusaha untuk menyelesaikan pergolakan yang terjadi di wilayah Keresidenan Cirebon ini dengan menerapkan pola “sepakat untuk tidak sepakat”. Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris telah mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri pergolakan tersebut dengan melalui cara perjuangan kalah menang. Artinya di sini gerakan penentangan dan perlawanan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin dan para pengikutnya hanya dapat diakhiri dengan cara menumpas pemberontakan tersebut sampai titik akhir, sehingga tidak kekuatan-kekuatan lagi yang tersisa.

## **B. Saran-saran**

Figur Ki Bagus Rangin, bagaimanapun, diakui ataupun tidak, ia telah memiliki kontribusi yang besar terhadap negeri ini. Ia pernah melakukan gerakan penentangan dan perlawanan kepada pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris melalui Perang Kedondong, yang area peperangannya mencakup wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan sekitarnya. Berdasarkan analisis, pecahnya pemberontakan Ki Bagus Rangin melalui Perang Kedondong waktunya tidak terlalu jauh atau sezaman dengan peristiwa Perang Diponegoro dan Perang Paderi. Satu hal yang patut mendapatkan perhatian dari seluruh elemen bangsa, bahwa sampai saat ini masih banyak di antara masyarakat di Jawa Barat, bahkan Indonesia yang belum mengenal dan mengetahui perjuangan yang sudah dilakukan Ki Bagus Rangin. Berdasarkan realita tersebut perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: pertama, ditujukan untuk para akademisi dan para peneliti perlu disampaikan bahwa perjuangan yang telah dilakukan Ki Bagus Rangin perlu ada

penelitian lebih lanjut. Hal ini sangat penting untuk memperkuat informasi-informasi yang lebih lengkap tentang perjuangan yang sudah dilakukan Ki Bagus Rangin terhadap bangsa ini, sehingga bisa menjadi dasar untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan berikutnya bagi pemerintah untuk menghargai jasa-jasa yang sudah dikorbankan oleh putera terbaiknya. Apa yang telah dilakukan peneliti melalui penelitian ini mungkin baru sebatas melengkapi untuk sampai ke depan “pintu gerbang pertama” dari informasi-informasi tentang perjuangan yang telah dilakukan Ki Bagus Rangin hyang selama ini belum tergali. Kedua, ditujukan untuk elemen pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten atau kota. Tampaknya perlu sikap proaktif dan tidak pernah berhenti untuk senantiasa mencari dan menemukan keberadaan putera daerah terbaik untuk dihargai sesuai dengan jasa, pengabdian dan kontribusinya sehingga bisa menjadi teladan bagi kemajuan bangsa ini. Ini semua bisa dilakukan dengan menjalin kerjasama/kemitraan dengan para peneliti, akademisi dan semua elemen masyarakat. Tanpa ada kerjasama /kemitraan dengan semua pihak tidak mungkin bisa mencari dan menemukan figur putera terbaik, termasuk Ki Bagus Rangin.

*Wallahu a'lam bi as-shawab*



# | Daftar Pustaka

## A. Sumber Tertulis

### 1. Arsip

*Arsip Cirebon No. 38.3*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

*Arsip Keraton Kasepuhan Cirebon, Surat Perjanjian dengan VOC, 1782*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

*Aardrijkskunding en Stetisch Wordenboek van Nederlandsch Indie, 1861*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

*Bagoes Rangin 1812, Bundel Cheribon Nomor 39/8*, Jakarta: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia.

*Indische Verlag, 1940*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

*Memorie van Overgave van G.J Oudemas aftredent Resident van Cheribon aan opvolg er den heer F.Ch.N van deer Moore, Assisten Resident van Bloro, 1911,38*.

*Regeeringsalmanak voor Nederlandcsh-Indie1871*. Jakarta: Arsip Nasional R.I.

*Regeeringsalmanak voor Nederlandcsh-Indie, 2: 1864*. Jakarta: Arsip Nasional R.I.

### 2. Buku

Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Amin, Zamzami. 2019. *Sejarah Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dam Perang Nasional Kedongsong 1801-1919*. Edisi Revisi. Bandung : Humaniora, 2019, Cetakan Keenam.

Anggapraja, Sulaeman. 1982. *Sejarah Perkembangan Wilayah Pemerintahan di Jawa Barat (Sejak Abad ke XVII)*. Garut: TP.

Azra, Azyumardi. 2002. *Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas, dan Akar Sejarah*. Bandung : Mizan.

- Baggelaar, J. 1931. "De Haven van Cheribbon" dalam *Gedenboeke de Gemeente Cheirbon Door 1906-1931*, Door de Stadgemeente Cheribon Uitgegeven Tergeleneheid van Het 25-jaring Bestaan Der Gemeente op 1 April 1931.
- Ball, John Preston. 1982. *Legal History 1608 - 1848*. Sydney: Oughtershaw Press.
- van den Berg, L.W.C. 2010. *Orang Arab di Nusantara*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Breman, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa pada Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES.
- Brandes, J. L.A. 1894. *Eenige Officiele Stukken met Betrekking tot Tjirebon TBG*.
- Bochari, M. Sanggupri dkk., 2001. *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Buddingh, SA. t. t. "Rapport over de Onlusten te Cheribon in 1806 ingediend door wijlen N. Engelhard, in lessen Gouverneur van Java's", dalam *Indische Archief Tijdschrift de Indien*, Jilid III.
- Burger, D. H. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnjaparamita,
- Busytoni, Omi. Tanpa Tahun. *Dakwah dan Perjuangan Ulama Cirebon*. Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit
- Dahuri, Rohmin dkk., 2004. *Budaya Bahari, Sebuah Apresiasi di Cirebon*. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Danasasmitha, Shaleh dkk. 1986. *Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. 2006. *Potensi Wisata Budaya Kota Cirebon*, Cirebon: Disbudpar Cirebon.
- Ekadjati, E. Suhardi. 1968. "Perjuangan Bagus Rangin ( 1806-1812 )", *Skripsi Sarjana Muda*, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- (dkk.). 1990. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonial di Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- . 1995. *Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya.

- , 2005. *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta*. (Bandung: Pustaka Jaya.
- Ernaka, Ipi. 2007. "Perlawanan Bagus Rangin di Cirebon Tahun 1806-1812," *Tesis*. Depok :Universitas Indonesia.
- Farihin dkk. 2019. "Jaringan Ulama Cirebon Abad ke-19 Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab dan Sanad". *Jurnal Tamaddun*, 7 (01), 2019
- de Graaf, H.J. 1949. *Geschiedenis van Indonesie*. Bandung: N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve- s"Gravenhage.
- dan T.H. Peagead. 2003. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*. Jakarta: PT Grafitti Pers dan KITLV.
- Garaghan, Gilbert J. 1946. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- George, Vic dan Paul Wilding. 1992. *Ideologi dan Kesejahteraan rakyat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hageman. 1869. *Geschiedenis der Soendalande Tijdschrieffoor Indische Tool-Lan en Volkenkunde*, T.B.G XVI Batavia: Lange & co's Hage M. Nijhoff
- de Haan, Frederick. 1911. *Priangan; De Preanger Regenschapens onder het Nederlansch-Bestuur tot 1811*. I-IV. Batavia: BGKW.
- , 1912. *Priangan*, III, Batavia: BGKW G. Kolff.
- Hall, D.G. E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional
- Handal, Waren H. 1993. *Comporary Sociological Theory*. New Jersey: Printice Hall, Englewood Cliffs.
- Hardjasaputra, A. Sobana dan Tawalimudin Haris, *Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20*. Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Hasyim, R. Achmad Opan Safari Hasyim. 2015. "Ki Bagus Rangin dalam Sumber-sumber Tertulis di Cirebon". *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Pengusulan Ki Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional di Majalengka, tanggal 5 September 2015.
- Hazmirullah, Titin Nurhayati Ma'mun, dan Undang A. Darsa. 2017. *Jumantara : Surat Pengunduran Diri Sultan Sepuh VII*

*Cirebon: Suatu Kajian Filologis*. Jakarta : Perpustakaan Nasional.

- Herlina, Nina. 2008. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hernawan, Wawan dkk. 2021. "Religious moderation in Naskah Wawacan Babad Walangsungsang: A Sundanese religious diversity wisdom," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77 (4).
- Hernawan, Wawan dan Ading Kusdiana. 2021. *Biografi Sunan Gunung Djati, Sang Penata Agama*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hidayatullah, Mashum. Tanpa Tahun. *Sejarah Singat Ki Bagus Rangin*. Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit.
- Hoadley, Mason Claude. 2018. *Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration, 1680–1792*. New York : Cornell University Press.
- Horton, Paul B dan Chester. 1999. *Sosiologi*, Alih bahasa Aminudin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga.
- Ira M. Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, Terj. Ghufroon A. Mas'adi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iswara, Prana Dwija. 2009. *Sejarah Kerajaan Cirebon*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Jayanto. 2015. "Industri Gula di Karesidenan Cirebon Tahun 1860-1930 dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Skripsi*, Yogyakarta: FIS UNY, 2015.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi; Klasik dan Modern*. Jilid I & II. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Kartani. Tanpa Tahun. *Perang Kedondong*. Tanpa Kota Penerbit: Tanpa Penerbit.
- Kartodirdjo, Sartono. 1988. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, Jakarta: Penerbit Gramedia
- , 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasim, Supali. 2015. "Perjuangan Bagus Rangin di Indramayu Sayatan Sejarah yang Terluka," *Makalah*, disampaikan pada Seminar Pengusulan Ki Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional di Majalengka. Tanggal 5 September 2015.

- Van der Kemp. 1920. " De Cherribonshe Onlusten van 1811 naar Oorspronkelijke Stukken" dalam *Bijragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde*
- Van der Kemp, P.H. 1979. *Pemberontakan di Cirebon Tahun 1818*. Yayasan Idayu: Jakarta.
- Kern, R.A. 1898. *Geschiedenis de Preanger-Regenschappen Kort Over Zich*. Bandoeng: Uingegeven Door de Vries en Fabricius.
- Kielstra, E.B. 1917. *De Sulthan van Chirebon De Indische Archief*, Harleem: De Erven F. Bohr.
- Kruger, Th. Muller. 1959. *Sedjarah Geredja di Indonesia*, Djakarta: BPK Kristen, 1959.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kusdiana, Ading. 2013. *Sejarah dan Kebudayaan Islam pada Periode Pertengahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kusen. 1976. *Asal-usul Nama Desa Panongan*, Djatitujuh: Tanpa Penerbit.
- Lenczowski, George. 1992. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo.
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, Nina H. 2000. "Cirebon" dalam Nina H. Lubis (Ed.), *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, Bandung: Alqaprint.
- . 2002. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*. Bandung : Alqaprint Jatinangor.
- . 2003. *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid I. Bandung: Satya Historika.
- Marihandono, Djoko. 2003. "Daendels dalam Naskah Cerita Rakyat: Cerita yang Berkaitan dengan Daendels di Pantai Utara Jawa". *Makalah*, dalam seminar Internasional Tradisi Lisan IV. Jakarta: 2 – 5 Oktober 2003.
- . 2005. "Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808-1811: Penerapan Intruksi Napoleon Bonaparte." *Disertasi*. Depok: FIB- UI.
- . 2019. "Bagus Rangin Berdasarkan Arsip-arsip Kolonial", *Makalah dalam Seminar Nasional Pengusulan Ulang Bagus Rangin sebagai Pahlawan Nasional*, tanggal 21 Maret 2019 di Gedung Sate, Bandung.
- Martanagara, R.A.A. 1978. *Babad Sumedang*, Bandung : Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran.

- Molsbergen, Everhardus Cornelis Godee.1931. *Uit Cheribon's geschiedenis en Gedenboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*. Bandung : Nix.
- Monique , Zaini-Lajoubert. 2008. *Karya lengkap Abdullah bin Muhammad al-Misri: Bayan al-asma', Hikayat Mareskalek, Arsy al-muluk, Cerita Siam, Hikayat tanah Bali*. Jakarta: Gramedia.
- Muhaimin A.G., 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret Dari Cirebon*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Ford Foundation.
- Mumtazah, Afwah. 2015. "KDRT dalam Persepsi Ibu Nyai Pesantren Studi Kasus Pesantren-pesantren Cirebon", dalam *Jurnal Islam Indonesia*, 02 (01)
- Mursyid, Ali. 2008. *Perjuangan Santri Cirebon untuk Kemerdekaan*. (Cirebon: Tanpa Penerbit).
- M. Atho Mudzhar, 2003. "Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik Sosial Bernuansa Agama" dalam Mohammad Soleh Isre (Ed.), *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Beragama, hal. 2.
- van Niel, Robert . 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Natanegara, Rd. Asik "Sejarah Soemedang Ti Jaman Kompeni Toeg Nepi Ka Kiwari" *Volksalmanak Soenda*, Batavia : Balai Pustaka.
- Nurhata 2015. "Babad Darmayu: Pemberontakan Bagus Rangin di Indramayu pada Awal Abad ke-19", *Jurnal Sinau*, Volume 1, No. 01, Oktober 2015.
- Nurarovah, Eva. 2018. "Cirebon 1681-1945: Dinamika Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya." *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.
- Poesponegoro, Marwatie Djoened & Nugroho Notokusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnaningsih, Herni & Agus Mulyana. 2017. , "Perlwanan Bagus Rangin: Perang Nasional yang Terlupakan" Dalam *Jurnal Vactum* ,Vol. 6, No. 1, April.
- Putri, Yulia Eka dkk. 2015. *Masjid Kuno Cirebon*, Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2015.
- Prawirareja, Mohammed Sugiyanto. 2005. *Cirebon: Falsafah, Tradisi, dan Alat Budaya*, Jakarta: Perum Percetakan Negara.

- Qanita, Ulya. 2015. "Peran KH. Muhammad Jauhar Arifin (1895-1941) dalam Mengembangkan Pondok Pesantren Al-Jauhariyah di Desa Balerante Palimanan Cirebon", *Laporan Penelitian*, Cirebon: LP2M IAIN Syekh Nurjati.
- Raffles, Thomas Stamford. 2008. *The History of Java*. Terj. Eko Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Ida Qoryati Mahbubah. Yogyakarta: Narasi.
- Rahayu, Islamiyati. 2016. "Strategi-strategi Perlawanan Rakyat Cirebon dalam Perang Kedondong tahun 1802-1818". *Jurnal Tamadun*. Volume IV, Edisi 1, Januari-Juni 2026.
- Van Rees. 1869. *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger Regenschappen*. Batavia: BGKW.
- Renier, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Terj. A. Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rickhiefs, M.C. 1994. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Roseno, Edi. 1993. *Perang Kedondong 1818 : Suatu Perlawanan Rakyat Cirebon*, Depok :Universitas Indonesia.
- Rosyidi, Abdul. 2014. *Perang Kedondong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818*. Cirebon: Fajar Muda.
- Romein, Jan.1956. *Aera Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*. Terj. Noer
- Roseno, Edi. 1993. *Perang Kedondong 1818*. Depok: Universitas Indonesia.
- Rosita, Heni. 2015. *Pecahnya Kesultanan Cirebon dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Cirebon Tahun 1667 - 1752*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ruhaliah. 2008. *Naskah Babad Dermayu (Babad Carbon II)*, Bandung: Disparbud Jabar dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara Cabang Bandung.
- Syafaah, Aah. 2020. "Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat dalam Perang Kedondong (1802-1818 M)", *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 8 Issue 2, Desember 2020.
- Syamsudin, Heliuss. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stapel, G.F.W. 1940. *Geschiedenies Van Nederlansch Indie, V*, Batavia: Tanpa Penerbit

- Sudjana, T.D. dkk, 2006. *Legenda Cirebon: Cerita Tentang Asal-Usul Tokoh Peristiwa*, Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.
- Sulendraningrat, P.S. *Sejarah Cirebon*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sulistiono, Singgih Tri. 1994. "Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial - Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon." *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suminto, Aqib. 1996. *Politik Islam Hindia Belanda*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sunarjo, Unang. 1983. *Masa Kejayaan Cirebon dan Kerajaan Cirebon 1478-1809*, Bandung : Penerbit Tarsito.
- Suryanegara, A. Mansur. 1999. *Amerika Menolak Presiden Amerika*,(Jakarta: Darul Falah.
- Taufik dan Huddy Husin. 2014. "Perubahan Sosial Cirebon 1918-1925", *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6. No. 1, Mei 2014, 31-36.
- Tamburaka, Rustam E. 1997. *Pengantar Ilmu Sejarah Teori Filsafat Sejarah Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Direktorat Jenderal Kebudayaan. 1982. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1998. *Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad. 1991. *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*. Bandung: Pemda Tingkat I Jawa Barat dan Fakultas Sastra Unpad.
- Van der Kemp. 1979. *Pemberontakan Cirebon 1818*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Vlekke, Bernhard H. M. 1959. *Nusantara a History of Indonesia*. The Hague: W. van Hoeve.
- Wahid, Abdul . 2006. "Bertahan di Tengah Gelombang Krisis: Komunitas China dan Ekonomi Kota Cirebon pada Masa Depresi Ekonomi 1930-1940". *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wardaya, B.T. 2002. *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- Wijaya, Nyoman. 2001. *Kekaisaran Kompeni Kecil: Korupsi, Kolusi, Nepotisme Abad 19*. Yogyakarta: Yayasan Mahavhira.

Williamson, J. A. 1971. "The Expansion of Euope" dalam John Bowle *The Concise Encyclopedia of World History*. London: Hutchinson.

Zaedin, Muhammad Mukhtar. 2022. "Perjuangan Rakyat Cirebon Melawan Penjajah", *Makalah*, disampaikan dalam salah satu seminar yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2022.

Zaedin, Muhammad Mukhtar dan Ki Tarka Sutarahardja. 2019. *Babad Dermayu*, Jakarta: Tanpa Penerbit.

## **Koran**

*Bintang Priangan*, Saptoe, 24 Januari 1931/5 Ramadan 1349. No. 1. Tahoen Ka I. Hlm. 1 Garoet.

Setiawan, D. A. 2018. "Catatan Van der Kemp di Cirebon". Cirebon : *Radar Cirebon*

Veth, P.J. 1882. "Java, Geographisch, Etnologisch, Historisch", Vol 3, Erven F Bohn, hlm. 195.

## **Tulisan dalam Internet**

Abi Kayis Al-Mahdawy, *Detik-Detik Terjadinya Perang Kedondong*. Di akses dari <http://nurussyahid.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-perang-kedondong-perang-rakyat.html?m=1> pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

Anonimous, "Direktori Vihara Kabupaten Cirebon", retrived Juni 03, 2022 from pikiran rakyat.com website <http://info.pikiran-rakyat.com/?q=direktori/vihara/kabupaten-cirebon/vihara-dharma-sukha>.

Anonimous, "Bagus Rangin", <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20446750&lokasi=lokal> Diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB.

Anonimous, "Asal Muasal Ki Bagus Rangin" [https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF\\_enID981ID981&q=Silsilah+keturunan+Ki+Bagus+Rangin&sa=X&ved=2ahUKEwjfh\\_Wf5LP5AhXHTmwGHaXXBEgQ1QJ6BAGtEAE&biw=1282&bih=552&dpr=1.5#imgrc=lcAmejWnCXOObM](https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enID981ID981&q=Silsilah+keturunan+Ki+Bagus+Rangin&sa=X&ved=2ahUKEwjfh_Wf5LP5AhXHTmwGHaXXBEgQ1QJ6BAGtEAE&biw=1282&bih=552&dpr=1.5#imgrc=lcAmejWnCXOObM), Diakses tanggal 07 Agustus 2022,pukul 14.00 WIB.

Anonimous, "Bagus Rangin", <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20446750&lokasi=lokal> Diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB.

- Aroengbinang, Bambang. "Kelenteng Dewi Welas Asih Cirebon". Retrieved Januari 13, 2019 from *aroengbinang.com* website <https://www.aroengbinang.com/2017/12/kelenteng-dewi-welas-asih-cirebon.-html>.
- Disparbud.iabarpov.go.id. "Direktori Pariwisata: Kawasan Jawa Barat Kota Cirebon Jawa Barat". Retrieved Juni 18, 2022 from *Disparbud.jabarpov.go.id* website <https://direktoripariwisata.id/unit/7893>.
- Hernawan, Wawan dkk., "Religious moderation in Naskah Wawacan Babad Walangsungsang: A Sundanese religious diversity wisdom", *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 77 (4), 2021.
- Niamillah, Svakir & Abdullah Alawi, "Mbah Muqoyyim, Kiai Rakyat Pendiri Buntet Pesantren", Retrieved November 15, 2016 from *NU online* website <https://www.nu.or.id/pesantren/mbah-muqoyyim-kiai-rakyat-pendiri-buntet-pesantren-jPwYn>.
- Ningsih, Widva Lestari. "Cheng Ho, Laksamana Muslim yang Berpengaruh di Indonesia", retrieved Oktober 07, 2021 from *Kompas.com* website <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/10/-140000179/cheng-ho-laksamana-muslim-yang-berpengaruh-di-indonesia?page=all>.
- Noer, Noerdin. "Dongeng dari Negeri Kanoman : Cirebon Trust". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-30. Diakses tanggal 4 Juni 2016.
- Redaktur Desa Sidawangi, "Sejarah Desa Sidawangi", Retrieved Agustus 20, 2022 from *wordpress.com* website <https://desasidawangi.wordpress.com/sejarah/aroengbinang.com> website.
- Redaksi Katolikana, "Gereja Santo Yusuf Cirebon: Gereja Katolik Pertama di Jawa Barat", retrived Maret 22, 2021 from *katolikana.com* website <https://www.katolikana.com/2021/03/22/gereja-santo-yusuf-cirebon-gereja-katolik-pertama-di-jawa-barat/#:~:text=Pembangunan%20Gereja%20Santo%20Yusuf%20Cirebon,Barat%20dan-20di%20Keuskupan%20Bandung>.
- Subekti, Riant. Gereja Kristen Pasundan, Dibangun Tahun 1788 Hingga saat Ini Kokoh Berdiri, retrieved Maret 19, 2022 from *cirebon.inews.id/* website <https://cirebon.inews.id/read/56595/gereja-kristen->

pasundan-dibangun-tahun-1788-hingga-saat-ini-kokoh-berdiri/2.

## Naskah

*Babad Dermayu (babad Carbon II)*, Ditulis antara 1818-1913, Disalin 1913 oleh penulis pertama tahun 1913, kemudian disalin kembali oleh Rochani Kusumawijaya tahun 1957, kemudian disalin kembali oleh R. Syarif Zaenal Asikin Tirtawijaya pada tahun 1977.

*Kitab Mujarobat Naskah Mertasinga*, Penyunting R. Rapan Safari Hasyim. Tanpa Tahun

## B. Sumber Benda

*Peta Keresidenan Cirebon 1857*. Data Arsip Foto. Dokumentasi Kaart Van De Residentie Cheribon 1857

*Foto Thomas Stamford Raffles*. Data Arsip Foto. [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Besar\\_Cirebon](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Besar_Cirebon) diakses tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.45 WIB.

*Foto Herman Willem Daendels*. Dokumentasi Posthumous Portrait of Herman Willem Daendels; [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Besar\\_Cirebon](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Besar_Cirebon) diakses tanggal 21 Juli 2022 pukul 20.18

*Foto Naskah Perjanjian 7 Januari 1681*. Data Arsip Foto . Dokumentasi Komunitas Pusaka Cirebon

*Foto Albertus Henricus Wiese*. Data Arsip Foto. <https://www.wikiwand.com/>

*Foto Pemandangan Perkebunan Tebu Dengan Latar Gunung Ciremai*. Data Arsip Foto. Dokumentasi Bank Indonesia Institute-KITLV

*Foto Klenteng Hok Keng Tong Plered Sumber*. Data Arsip Foto. Dokumentasi Pribadi Eva Nur Arovah

*Foto Klenteng Hok Tek Ceng Sin*. Data Arsip Foto. Sumber: Nurul Diva Kautsar/Merdeka.com @2022

*Foto Kelenteng Talang (Soeh Boen Pang Gie Soe)*. Data Arsip Foto. Sumber: [disparbud.jabarprov.go.id](http://disparbud.jabarprov.go.id)

*Foto Kelenteng Talang Tiao Kak Sie (Vihara Dewi Welas Asih)*. Data Arsip Foto. Sumber: [aroengbinang.com](http://aroengbinang.com)

*Foto Masjid Merah Panjunan*. Data Arsip Foto. Dokumentasi Bersama Peneliti

*Foto Gereja St. Yusuf Cirebon.* Data Arsip Foto. Dokumentasi katolikana.com

*Foto Gereja Kristen Pasundan Cirebon.* Data Arsip Foto. Dokumentasi cirebon.inews.id/

*Foto Ki Bagus Rangin.* Data Arsip Foto Dokumentasi detik.news

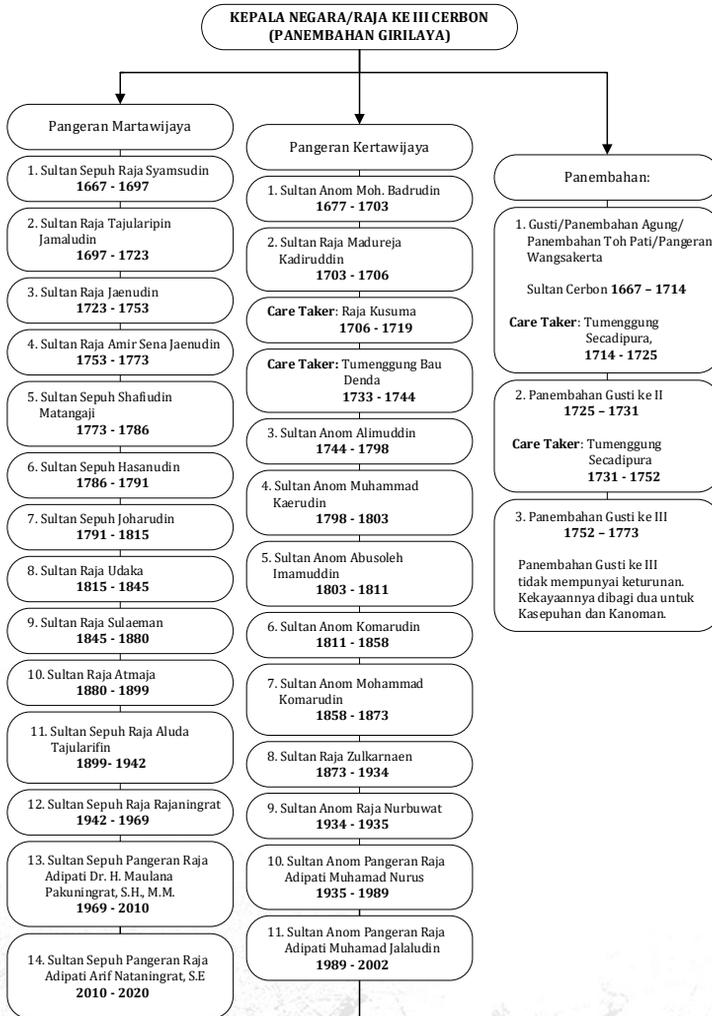
### **C. Sumber Lisan**

Zamzami Amin,

*Wawancara,* Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, tanggal 18 Agustus 2022

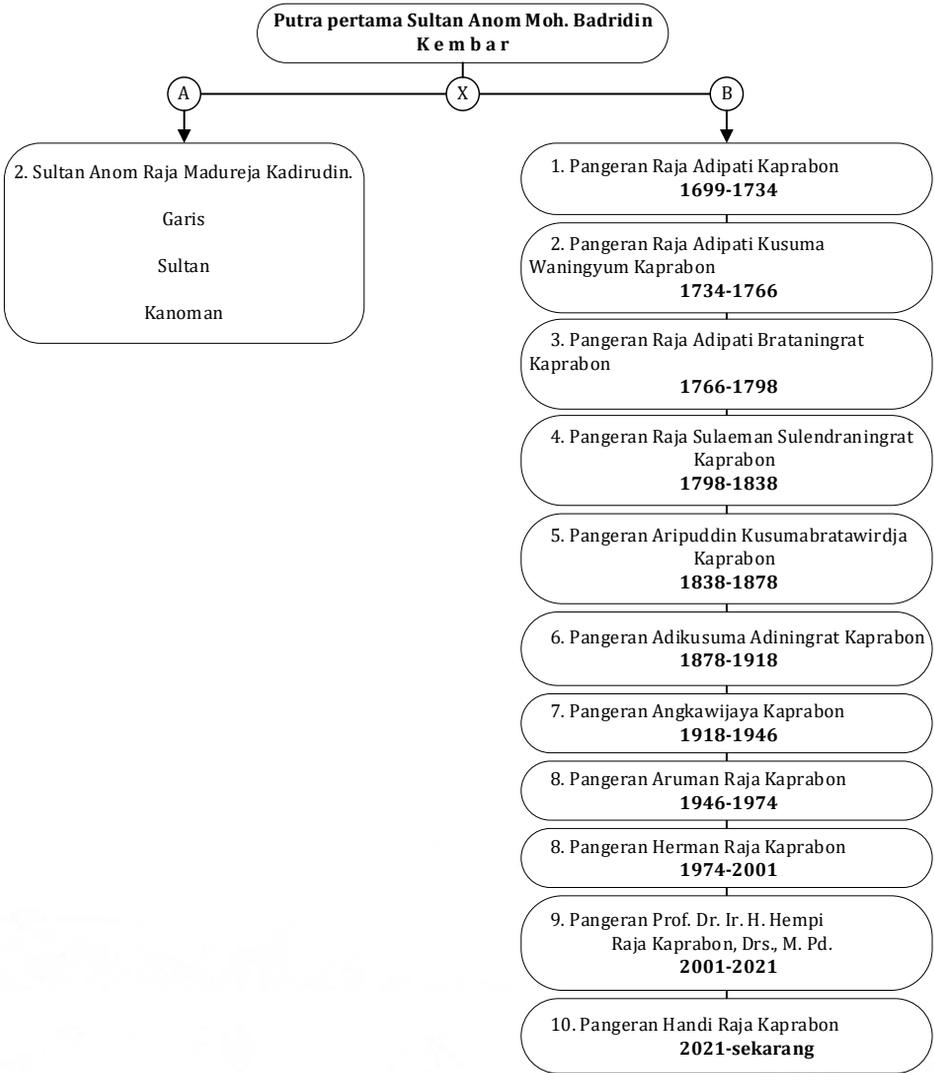
# Lampiran

## LAMPIRAN 1: SILSILAH PARA SULTAN DI CERBON

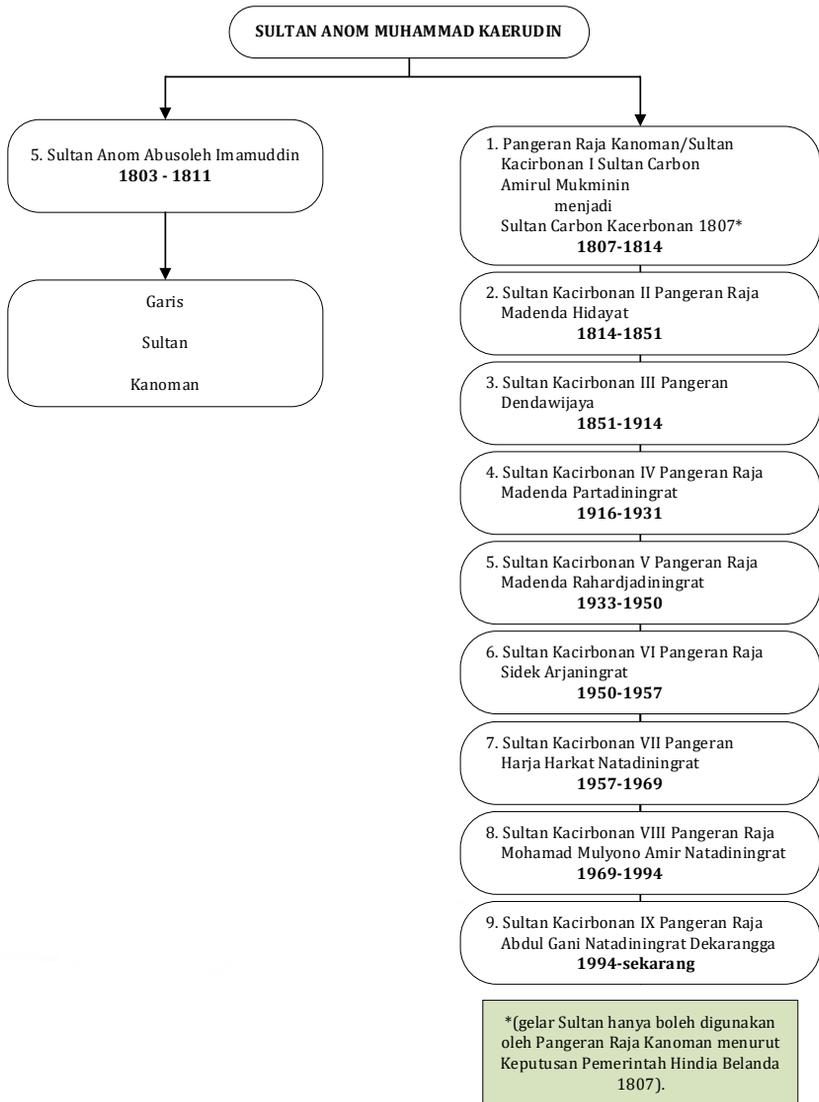




LAMPIRAN 2:  
SILSILAH KAPRABONAN



### LAMPIRAN 3: SILSILAH KACERBONAN





# GEGER CIAYUMAJAKUNING (CIREBON-INDRAMAYU-MAJALENGKA-KUNINGAN)

Mengungkap Jejak Perjuangan Ki Bagus Rangin  
di dalam Menentang Pemerintah Kolonial Belanda  
dan Inggris pada Abad ke-19 M.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan kedua peneliti dari Fakultas Adab dan Humaniora serta Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Keduanya merupakan Dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah dan Peradaban Islam. Buku ini sangat penting karena menyajikan informasi sejarah perjuangan yang dilakukan Ki Bagus Rangin di dalam menentang Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris pada Abad ke-19, yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Ki Bagus Rangin telah memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa ini. Ia telah berperan besar di dalam melawan praktik-praktik ketidakadilan terhadap dari Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris. Ia telah mengobarkan semangat perjuangan untuk bersama-sama menentang praktik-praktik imperialisme. Ia juga telah merelakan seluruh harta, jiwa, dan raganya untuk membela bumi pertiwi ini. Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Rangin dapat disejajarkan dengan perjuangan yang pernah dilakukan Tengku Cik Di Tiro, Tuanku Imam Bonjol, Panglima Polim, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Sisingamangaraja XII, Sultan Badarudin, Pangeran Antasari, dan Pangeran Diponegoro. Begitulah temuan yang dapat diinformasikan dari buku ini.

Dr. H. Ading Kusdiana, M. Ag., CIHCS  
Prof. Dr. Wawan Hernawan, M. Ag.

Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LP2M)

penerbit  
pusbangter



ISBN 978-623-6004-45-6

